

LAPORAN RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

RIFASKES 2019

DINAS KESEHATAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
2019

LAPORAN DINAS KESEHATAN RIFASKES 2019

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

JAKARTA

2019

TIM PENYUSUN

Kontributor Utama

Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
Yuyun Yuniar, S.Si, Apt, MA
Mujiati, SKM, M.Kes
Rani Marsini, SKM
Dr. Feri Ahmadi, S.Si, MPH
dr. Sri Mardikani Nugraha, MKM
Agus Dwi Harso, S.Si
dr. Anton Suryatma, MKM
Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM
Drs. Max Josep Herman, M.Kes
Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
Ina Kusriani, SKM, MKM
Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
Antonius Yudi Kristanto, S.Sos, MKM
Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
Tri Wurisastuti, S.Stat
Nur Rahmawati Wijaya, SKM
Made Agus Nurjana, SKM, M.Epid
Merry Budiarti S, M.Sc
Yuniarti Suryatinah, S.Farm, Apt
Nurul Puspasari, SKM, MKM

Kontributor Anggota

dr. Muhammad Karyana, M.Kes
Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes
Heny Lestary, SKM, MKM
Aris Yulianto, S.Si
Desi Fitriani, SKM, M.Si
Sundari Wirasmi, S.Si
Enung Nurchotimah, SKM, MKM
Meda Permana, S.Sos., M.Si
Dr. Miko Hananto, SKM, M.Kes
dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD
Dr. Gurendro Putro, SKM., M.Kes
Sundari Wirasmi, S.Si
Dr. Miko Hananto, SKM, MKes
Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes
Noor Edi Widya Sukoco, MPS., M.Sc.PH
Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
Asep Hermawan, S.Kep., Ners
Syachroni, S.Si, M.Kes
dr. Fitriana, Sp.MK
Dr. dr. Telly Purnamasari A, M.Epid
dr. Made Dewi Susilawati, M.Epid
dr. Srilaning Driyah, SpPK, M.Si. Med
dr. Eva Sulistiowati, M.Biomed
Dr. dr. Laurentia Konadi, MS., Sp.GK
Dra. Marice Sihombing, M.Si

drg. Lelly Andayasari, M.Kes
dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK
dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
drh. Risqa Novita, MKM
dr. Rossa Avrina, M.Epid
dr. Hadjar Siswanto, MSc
Nita Prihartini, SKM
Ida Diana Sari, S.Si., Apt., MPH
Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
Bryan Mario Isakh, SKM, MKM
drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS
dr. Tita Rosita, MKM
dr. Cicih Opitasari, MARS
dr. Retna Mustika Indah, MKM
Mimi Sumiarsih, SKM, MKM Dwi Hapsari
Andi Leny Susyanty, S.Si., Apt, MKM
dr. Idawaty Muas, MKM
Wening Wijayanti, SKM
Meiske Elisabeth Koraag, S.Si
M. Bakti Samsu Adi, S.Si, M.Si
Mara Ipa, SKM, M.Sc
Zainul Khaqiqi N, S.Si
Astridya Paramitha, SKM, M.Kes
Dwi Priyanto, S.Si, M.Si
Nur Sholihatin, S.Sos
Khadijah Azhar, SKM, MKM
Mutia Widawati, S.Si
Zumrotus Solichah, SKM
Amir Su'udi, SKM, MKM
Dr. Nurhayati, SKM, MKM
Rianto Purnama, S.Kom
Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
Djunaedi, SKM
Yusup, S.Kom
Narendro Arifia, S.Kom
Lusi Kristiana, S.Si, Apt, Mkes
Melda S Suebu, S.Si
Windarti Fauziah, S.Si
Lely Indrawati, S.Sos, MKM
Ritawati, S.Si
Rika Mayasari, S.Si
Akhmad Wahyudin, SKM
Milana Salim, M.Sc
Revi Rosavika Kinansi, S.Si
Puti Sari Hidayangsih, SKM, MSc.Ph
Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si

Cara Sitasi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019. Laporan Dinas Kesehatan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum wr.wb.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolongannya laporan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Rifaskes merupakan riset kesehatan nasional berbasis fasilitas yang bertujuan untuk memperoleh rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, baik dalam aspek kepesertaan, tata kelola, manfaat, dan pelayanan kesehatan.

Rifaskes 2019 mengumpulkan data di 514 Dinas Kesehatan kab/Kota, 532 rumah sakit, 9.821 puskesmas, 419 apotik, 411 praktek dokter, 402 praktek bidan, 403 laboratorium mandiri dan 417 klinik. Rifaskes 2019 merupakan pelaksanaan Rifaskes yang kedua sejak tahun 2011.

Laporan nasional Rifaskes 2019 terdiri dari 5 buku, yaitu: 1) laporan indikator utama, 2) laporan Dinas Kesehatan, 3) laporan rumah sakit, 4) laporan puskesmas dan 5) laporan fasilitas kesehatan lainnya. Informasi yang tercakup dalam laporan melingkupi informasi mengenai tata kelola (*governance*) Jaminan Kesehatan Nasional (*fraud, moral hazard, kewenangan, revenue collection, fund pooling, strategic purchaser*), aplikasi sistem informasi terkait pelaksanaan JKN (Verdika, P-care), kepesertaan (jumlah, jenis, integrasi Jamkesda, pendaftaran, aktiviasi kepesertaan, drop out, ATP, dan WTP, kepuasan peserta), obat dan alat kesehatan (e-katalog, Formularium Nasional, Program Rujuk Balik, Obat kemoterapi, talasemia, hemofilia, kecukupan obat) dan pembiayaan.

Pelaksanaan Rifaskes 2019 merupakan hasil kolaborasi banyak pihak, baik di tingkat pusat, provinsi dan Kab/kota. Riset ini melibatkan unit utama Kemenkes, para pakar dan pengarah, Puskes TNI dan Pusdokkes Polri, seluruh Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi dan seluruh enumerator yang berjumlah kurang lebih 4.500 orang. Proses pelaksanaan Rifaskes dimulai dari persiapan, rapat koordinasi, pelatihan, pengumpulan data, manajemen data hingga analisis dan penyusunan laporan sungguh membutuhkan kerja cerdas dan kerja keras dari setiap pihak. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada tim pakar, tim teknis, tim manajemen data, tim manajemen, tim manajemen Korwil, PJT Provinsi, PJO Provinsi, PJAL Provinsi, PJT

Kab/Kota, PJO Kab/Kota, PJAL Kab/Kota, SAL yang telah mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga untuk mensukseskan pelaksanaan Rifaskes 2019 , dan tak lupa kepada seluruh responden dari fasilitas kesehatan yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data. Simpati mendalam serta doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami musibah sewaktu menjalankan tugas Rifaskes 2019.

Akhir kata, kami berharap data Rifaskes 2019 dapat menjadi masukan bagi kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia, dan kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan dan pelaksanaan Rifaskes 2019.

Billahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 2019

Kepala Badan Litbangkes,



Dr. Siswanto, MHP., DTMH.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Ruang lingkup	3
BAB II METODOLOGI	2
2.1 Kerangka konsep	4
2.2 Desain penelitian	5
2.3 Populasi dan Besar Sampel	5
2.4 Instrumen Pengumpulan data	13
2.5 Manajemen data	13
BAB III HASIL	14
3.1 DATA UMUM	14
3.2 INDIKATOR KESEHATAN	58
3.3 SUMBER DAYA MANUSIA	119
3.4 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	168
3.5 SISTEM INFORMASI KESEHATAN	215
Lampiran	229

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1	Proporsi Dinas Kesehatan Berdasarkan Tipenya, Rifaskes 2019	14
Tabel 3.1.2	Jumlah Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	15
Tabel 3.1.3	Jumlah kelurahan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019 ..	16
Tabel 3.1.4	Jumlah Kecamatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	17
Tabel 3.1.5	Jumlah Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	18
Tabel 3.1.6	Distribusi Keberadaan SK Penetapan Puskesmas, Rifaskes 2019	19
Tabel 3.1.7	Proporsi Puskesmas Terakreditasi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	20
Tabel 3.1.8	Proporsi Kecamatan dengan Puskesmas Terakreditasi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	21
Tabel 3.1.9	Proporsi Puskesmas PONEB di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	22
Tabel 3.1.10	Proporsi Puskesmas BLUD di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	23
Tabel 3.1.11	Proporsi Puskesmas Pembantu di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	24
Tabel 3.1.12	Jumlah Posyandu dan Proporsi Posyandu yang Aktif, Rifaskes 2019 ..	25
Tabel 3.1.13	Jumlah Posyandu Balita Pratama dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019.....	26
Tabel 3.1.14	Jumlah Posyandu Balita Madya dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019	27
Tabel 3.1.15	Jumlah Posyandu Balita Purnama dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019.....	28
Tabel 3.1.16	Jumlah Posyandu Balita Mandiri dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019	29
Tabel 3.1.17	Jumlah Poskesdes di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	30
Tabel 3.1.18	Jumlah Poskestren di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	31
Tabel 3.1.19	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	32
Tabel 3.1.20	Jumlah Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	33
Tabel 3.1.21	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	34
Tabel 3.1.22	Jumlah Polindes di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	35
Tabel 3.1.29	Jumlah Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	36
Tabel 3.1.24	Jumlah Pos UKK di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019 ...	37
Tabel 3.1.25	Jumlah Pos Malaria Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	38
Tabel 3.1.26	Jumlah Posbindu PTM di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	39
Tabel 3.1.27	Jumlah Pos Obat Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	40
Tabel 3.1.28	Jumlah RS Umum Pemerintah dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	41
Tabel 3.1.29	Jumlah RS Khusus Pemerintah dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	42
Tabel 3.1.30	Jumlah RSU Swasta dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	43

Tabel 3.1.31	Jumlah RS Khusus Swasta dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	44
Tabel 3.1.32	Jumlah Klinik Pratama dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	45
Tabel 3.1.33	Jumlah Klinik Utama dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	46
Tabel 3.1.34	Jumlah Praktek Mandiri Dokter Spesialis dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	47
Tabel 3.1.35	Jumlah Praktek Mandiri Dokter Umum dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	48
Tabel 3.1.36	Jumlah Praktek Mandiri Dokter Gigi dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	49
Tabel 3.1.37	Jumlah Praktek Mandiri Bidan dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	50
Tabel 3.1.38	Jumlah Praktek Mandiri Perawat dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	51
Tabel 3.1.39	Jumlah Laboratorium Klinik Mandiri dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	52
Tabel 3.1.40	Jumlah Laboratorium Klinik Lain dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	53
Tabel 3.1.41	Jumlah Apotek dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	54
Tabel 3.1.42	Jumlah Bidan Desa di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019	55
Tabel 3.1.64	Proporsi Jumlah Desa dengan Bidan Desa Menetap di Desa Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	56
Tabel 3.1.44	Proporsi Jumlah Desa Tanpa Bidan Desa di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	57
Tabel 3.2.1	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	58
Tabel 3.2.2	Distribusi Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	59
Tabel 3.2.3	Distribusi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Lingkungan ke Rumah Sakit Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	60
Tabel 3.2.4	Distribusi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Air Minum di PDAM dan Menerima Hasil Pengawasan Kualitas Air Minum dari PDAM Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	61
Tabel 3.2.5	Distribusi Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum di Depot Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	62
Tabel 3.2.6	Distribusi Kabupaten/Kota yang Memiliki Peralatan Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	63
Tabel 3.2.7	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	64
Tabel 3.2.8	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	65
Tabel 3.2.9	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Rekreasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019	66
Tabel 3.2.10	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Fasilitas Umum menurut Provinsi, Rifaskes 2019	67
Tabel 3.2.11	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan menurut Provinsi, Rifaskes 2019	68

Tabel 3.2.12	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Sarana Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	69
Tabel 3.2.13	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Jasa Boga menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	70
Tabel 3.2.14	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Jasa Boga dan Rumah Makan/Restoran Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	71
Tabel 3.2.15	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang menurut Provinsi, Rifaskes 2019	72
Tabel 3.2.16	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Kantin Sekolah menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	73
Tabel 3.2.17	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Makanan Jajanan menurut Provinsi, Rifaskes 2019	74
Tabel 3.2.18	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT) menurut Provinsi, Rifaskes 2019	75
Tabel 3.2.19	Distribusi Kabupaten/Kota Melakukan Audit Maternal dan Perinatal Tahun 2018, Rifaskes 2019.....	76
Tabel 3.2.20	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Frekuensi Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	77
Tabel 3.2.21	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Pelaksanaan Kesehatan Kerja Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	78
Tabel 3.2.22	Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Banyaknya Puskesmas yang Melakukan Kesehatan Olah Raga menurut Provinsi, Rifaskes 2019...	79
Tabel 3.2.23	Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Keberadaan SK/SE Bupati/Walikota/Kadinkes Mendukung Program Kesehatan Olahraga menurut Provinsi, Rifaskes 2019	80
Tabel 3.2.24	Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Melaksanakan Kesehatan Olahraga* menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	81
Tabel 3.2.25	Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan 60 Persen atau lebih Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga dan Pembinaan Kebugaran Jasmani Pekerja Tingkat Kabupaten/Kota menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	82
Tabel 3.2.26	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	83
Tabel 3.2.27	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Kebijakan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendukung Kearif Gerak Perilaku Hidup Sehat yang Implementasinya Melibatkan Lintas Sektor/Mitra Potensial/Masyarakat Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	84
Tabel 3.2.28	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Penetapan Tatanan Sehat Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	85
Tabel 3.2.29	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Pelaksanaan Kampanye Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Melalui Media Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	86
Tabel 3.2.30	Distribusi Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	87
Tabel 3.2.31	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Desa Siaga Aktif Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	88
Tabel 3.2.32	Distribusi Kabupaten/Kota yang Menyediakan Anggaran Promosi Kesehatan dari APBD Kabupaten/Kota Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	89
Tabel 3.2.33	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Surveilans Gizi Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	90
Tabel 3.2.34	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Kegiatan Penanggulangan Anemia Remaja Putri Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	91

Tabel 3.2.35	Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Penetapan Kebijakan Lokal Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	92
Tabel 3.2.36	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Padat Populasi Jentik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	93
Tabel 3.2.37	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Padat Populasi Nyamuk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	94
Tabel 3.2.38	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Tempat Perindukan Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	95
Tabel 3.2.39	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pemantauan Resistensi Nyamuk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	96
Tabel 3.2.40	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pemantauan Resistensi Jentik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	97
Tabel 3.2.41	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Dinamika Penularan Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	98
Tabel 3.2.42	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Distribusi Kelambu Berinsektisida dan Penyemprotan Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	99
Tabel 3.2.43	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Larvasida Kimia Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	100
Tabel 3.2.44	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pengendalian Secara Biologi Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	101
Tabel 3.2.45	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pengasapan (<i>Fogging</i>) dan Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN) Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	102
Tabel 3.2.46	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Malaria Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	103
Tabel 3.2.47	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	104
Tabel 3.2.48	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Chikungunya Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	105
Tabel 3.2.49	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Leptospirosis Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	106
Tabel 3.2.50	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Japanese Encephalitis Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	107
Tabel 3.2.51	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Nilai <i>Annual Parasit Index</i> (API) <1/1000 Penduduk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	108
Tabel 3.2.52	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Nilai <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) < 1/1000 Penduduk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	109
Tabel 3.2.53	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Cakupan 80 Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	110
Tabel 3.2.54	Proporsi Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Melalui Pemeriksaan HbsAg, Rifaskes 2019.....	111
Tabel 3.2.55	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Dari Ibu ke Anak Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	112
Tabel 3.2.56	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Pasangan Penderita Hepatitis B dan Orang yang Sering Berganti Pasangan Seks Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	113

Tabel 3.2.57	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada MSM (Man Sex Man)/Homo Seksual dan Pengguna Jarum Suntik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	114
Tabel 3.2.58	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Orang yang Kontak Serumah dengan Penderita dan Pasien yang Mendapat Hemodialisa Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	115
Tabel 3.2.59	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Pekerja Kesehatan dan Petugas Laboratorium Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	116
Tabel 3.2.60	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Orang yang Berkunjung ke Wilayah dengan Endemisitas Tinggi Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	117
Tabel 3.2.61	Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Keberadaan Peraturan Tentang Keekarantinaan Kesehatan Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	118
Tabel 3.3.1	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	119
Tabel 3.3.2	Jumlah Tenaga Medis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	120
Tabel 3.3.3	Jumlah Dokter Umum di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	121
Tabel 3.3.4	Jumlah Dokter Spesialis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	122
Tabel 3.3.5	Jumlah Dokter Gigi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	123
Tabel 3.3.6	Jumlah Dokter Gigi Spesialis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	124
Tabel 3.3.7	Jumlah Bidan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	125
Tabel 3.3.8	Jumlah Perawat di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	126
Tabel 3.3.9	Jumlah Tenaga Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	127
Tabel 3.3.10	Jumlah Apoteker di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	128
Tabel 3.3.11	Jumlah Sarjana Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	129
Tabel 3.3.12	Jumlah Ahli Madya Farmasi/Analisis Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	130
Tabel 3.3.13	Jumlah Asisten Tenaga Kefarmasian di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	131
Tabel 3.3.14	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	132
Tabel 3.3.15	Jumlah Epidemiolog di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	133
Tabel 3.3.16	Jumlah Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	134

Tabel 3.3.17	Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	135
Tabel 3.3.18	Jumlah Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	136
Tabel 3.3.19	Jumlah Tenaga Biostatistik dan Kependudukan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	137
Tabel 3.3.20	Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	138
Tabel 3.3.21	Jumlah Tenaga Informatika Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	139
Tabel 3.3.22	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	140
Tabel 3.3.23	Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	141
Tabel 3.3.24	Jumlah Tenaga Entomolog Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	142
Tabel 3.3.25	Jumlah Tenaga Mikrobiolog Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	143
Tabel 3.3.26	Jumlah Tenaga Gizi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	144
Tabel 3.3.27	Jumlah Tenaga Nutrisi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	145
Tabel 3.3.28	Jumlah Tenaga Dietisien di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	146
Tabel 3.3.29	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	147
Tabel 3.3.30	Jumlah Tenaga Fisioterapis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	148
Tabel 3.3.31	Jumlah Tenaga Okupasi Terapis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	149
Tabel 3.3.32	Jumlah Tenaga Terapis Wicara dan Tenaga Akupunktur di Dinas Kesehatan dan Tenaga Akupunktur UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	150
Tabel 3.3.33	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	151
Tabel 3.3.34	Jumlah Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	152
Tabel 3.3.35	Jumlah Tenaga Teknik Kardiovaskuler di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	153
Tabel 3.3.36	Jumlah Tenaga Teknisi Pelayanan Darah di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	154
Tabel 3.3.37	Jumlah Tenaga Refraksionis Optisien/Optometrisme di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019..	155
Tabel 3.3.38	Jumlah Tenaga Teknisi Gigi di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	156
Tabel 3.3.39	Jumlah Tenaga Penata Anestesi di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019.....	157

Tabel 3.3.40	Jumlah Tenaga Terapis Gigi dan Mulut di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	158
Tabel 3.3.41	Jumlah Tenaga Audiologis di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	159
Tabel 3.3.42	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	160
Tabel 3.3.43	Jumlah Tenaga Radiografer di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	161
Tabel 3.3.44	Jumlah Tenaga Elektromedis di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	162
Tabel 3.3.45	Jumlah Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	163
Tabel 3.3.46	Jumlah Tenaga Fisikawan Medis di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	164
Tabel 3.3.47	Jumlah Tenaga Radioterapis di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS dan Tenaga Ortotik Prostetik di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	165
Tabel 3.3.48	Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	166
Tabel 3.3.49	Jumlah Tenaga Kestrad Ramuan di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS dan Tenaga Kestrad Ketrampilan di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019 ..	167
Tabel 3.4.1	Proporsi Struktur Pengampu Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019	168
Tabel 3.4.2	Distribusi Latar Belakang Pendidikan Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019	169
Tabel 3.4.3	Distribusi Ketersediaan SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019	170
Tabel 3.4.4	Proporsi Penyusunan dan Pengiriman RKO Tahun 2018, Rifaskes 2019	171
Tabel 3.4.5	Proporsi Evaluasi Kesesuaian RKO Tahun 2016- 2017, Rifaskes 2019	172
Tabel 3.4.6	Proporsi Evaluasi Kesesuaian RKO Tahun 2018, Rifaskes 2019	173
Tabel 3.4.7	Proporsi Alasan Ketidaksesuaian Realisasi Pengadaan Obat Dengan RKO, Rifaskes 2019	174
Tabel 3.4.8	Proporsi Keberadaan RKO dan Pemesanan Per Item Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (1), Rifaskes 2019	175
Tabel 3.4.9	Proporsi Keberadaan RKO dan Pemesanan Per Item Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (2), Rifaskes 2019	176
Tabel 3.4.10	Proporsi Perencanaan Kebutuhan Obat untuk 18 Bulan, Rifaskes 2019	177
Tabel 3.4.11	Proporsi Ketersediaan Rencana Kebutuhan BMHP dan Alkes Investasi, Rifaskes 2019	178
Tabel 3.4.12	Proporsi Ketersediaan Sumber Dana Pembelian Obat di Dinkes dan Besarannya (DAK, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Kapitasi, & Lainnya), Rifaskes 2019	179
Tabel 3.4.13	Proporsi Sistem Pembelian Obat dengan Dana Kapitasi di Puskesmas, Rifaskes 2019	180
Tabel 3.4.14	Proporsi Jenis Obat yang Dapat Dibeli dengan Dana Kapitasi di Puskesmas, Rifaskes 2019	181
Tabel 3.4.15	Proporsi Sumber Dana untuk Pembelian Alkes di Dinas Kesehatan Tahun 2018, Rifaskes 2019	182

Tabel 3.4.16	Proporsi Sumber Dana untuk Pembelian BMHP di Dinas Kesehatan Tahun 2018, Rifaskes 2019.....	183
Tabel 3.4.17	Proporsi Pembelian Alat Kesehatan dalam Negeri Tahun 2018, Rifaskes 2019.....	184
Tabel 3.4.18	Jenis Produk Alat Kesehatan dalam Negeri yang Disediakan, Rifaskes 2019.....	185
Tabel 3.4.19	Proporsi Mekanisme Pengadaan Obat dan Persentase Pendanaannya, Rifaskes 2019.....	186
Tabel 3.4.20	Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Epurchasing, Rifaskes 2019.....	187
Tabel 3.4.21	Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara Epurchasing, Rifaskes 2019.....	188
Tabel 3.4.22	Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Tender/Lelang, Rifaskes 2019.....	189
Tabel 3.4.23	Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara Tender/Lelang, Rifaskes 2019.....	190
Tabel 3.4.24	Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Pembelian Langsung, Rifaskes 2019.....	191
Tabel 3.4.25	Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara Pembelian Langsung, Rifaskes 2019.....	192
Tabel 3.4.26	Proporsi Penyediaan Obat Non Fornas dan Obat Fornas Non FKTP, Rifaskes 2019.....	193
Tabel 3.4.27	Proporsi Penyediaan Obat Non E-Katalog, Rifaskes 2019	194
Tabel 3.4.28	Proporsi Ketersediaan Obat Kedaluwarsa Tahun 2018, Rifaskes 2019	195
Tabel 3.4.29	Proporsi Obat yang Rusak Saat Diterima Dari Distributor, Rifaskes 2019	196
Tabel 3.4.30	Proporsi Pelaporan Obat Rusak, Rifaskes 2019	197
Tabel 3.4.31	Penerapan Kebijakan Mengenai Batas Penerimaan Obat Oleh Dinas Kesehatan Minimal 2 Tahun Sebelum Kedaluwarsa, Rifaskes 2019..	198
Tabel 3.4.32	Proposi Suplai Obat dari Kementerian Kesehatan, Rifaskes 2019.....	199
Tabel 3.4.33	Proporsi Ketersediaan Penanggung Jawab Obat, Rifaskes 2019	200
Tabel 3.4.34	Proporsi Ketersediaan Freezer, Rifaskes 2019	201
Tabel 3.4.35	Proporsi Ketersediaan Alat Pembawa Vaksin <i>Cold Box</i> dan <i>Vaccine Carrier</i> , Rifaskes 2019.....	202
Tabel 3.4.36	Ketersediaan Alat Pembawa Vaksin Termos dan <i>Cool Pack</i> , Rifaskes 2019.....	203
Tabel 3.4.37	Proporsi Ketersediaan Alat Suntik dan KIP Kit, Rifaskes 2019	204
Tabel 3.4.38	Proporsi Ketersediaan <i>Safety Box</i> dan Termometer, Rifaskes 2019..	205
Tabel 3.4.39	Proporsi Ketersediaan Refrigerator Buka Atas dan Buka Depan, Rifaskes 2019.....	206
Tabel 3.4.40	Rerata Ketersediaan Obat Indikator 2015-2019, Rifaskes 2019	207
Tabel 3.4.41	Rerata Ketersediaan Obat Indikator 2020-2024, Rifaskes 2019	208
Tabel 3.4.42	Rerata Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik, Rifaskes 2019.....	209
Tabel 3.4.43	Rerata Ketersediaan Obat Fornas FKTP untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019.....	210
Tabel 3.4.44	Rerata Ketersediaan Obat Fornas Non FKTP untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019.....	211
Tabel 3.4.45	Rerata Ketersediaan Obat Non Fornas Untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019.....	212
Tabel 3.4.46	Rerata Ketersediaan Obat Indikator SARA, Rifaskes 2019.....	213
Tabel 3.4.47	Ketersediaan Vaksin di Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019.....	214

Tabel 3.5.1	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	215
Tabel 3.5.2	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Komdat (Komunikasi Data) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	216
Tabel 3.5.3	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) Dinkes di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	217
Tabel 3.5.4	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SP2TP/SP3 di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	218
Tabel 3.5.5	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi ePuskesmas di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019	219
Tabel 3.5.6	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	220
Tabel 3.5.7	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019	221
Tabel 3.5.8	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (SIHEPI) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	222
Tabel 3.5.9	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019	223
Tabel 3.5.10	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (SIPD3I) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	224
Tabel 3.5.11	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	225
Tabel 3.5.12	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (s-STBM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	226
Tabel 3.5.13	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	227
Tabel 3.5.14	Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019.....	228

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini merupakan produk dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat pasal 60 ayat (1) Undang-Undang BPJS, terhitung tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tetap produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan mampu membuat rakyat lebih sejahtera. Perjalanan 5 tahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang dinilai memerlukan perbaikan. Beberapa isu yang menyeruak dalam perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional, antara lain defisit, mutu layanan klinis, besaran tarif INA-CBGs, klasifikasi dan kompetensi rumah sakit, standar mutu layanan rumah sakit, konflik manajemen dan dokter, keterbatasan SDM kesehatan profesional, disharmoni regulasi, ketidaksesuaian regionalisasi tarif dengan *unit cost* pelayanan, kelengkapan petunjuk teknis pelayanan JKN, sosialisasi dan edukasi JKN, keberadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), kemampuan teknis verifikator, fraud, besaran iuran premi, tarif *e-catalogue*, keterlambatan pencairan jasa pelayanan, model CoB, peran dinas kesehatan, peran Tim Kendali Mutu dan Kendala Biaya.

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional mengamanatkan seluruh penduduk masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 (pasal 6). Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan (pasal 20). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, antara lain diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama obat esensial, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, dan swasta.

Evaluasi merupakan bagian dari upaya untuk menjamin pencapaian tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai dasar atas koreksi yang harus dilakukan. Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 mengamanatkan Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan.

1.2 Permasalahan

Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama 5 tahun. Pemerintah perlu melihat secara komprehensif seluruh aspek yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut, baik ditinjau dari sisi regulasi, tata kelola, penyelenggara, penyedia pelayanan kesehatan, peserta, maupun hal-hal terkait lainnya. Penilaian yang komprehensif ini diperlukan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan serta perbaikan yang berkelanjutan dan penyempurnaan dari Jaminan Kesehatan Nasional, melalui penelaahan terhadap instrumen legal, teknis, dan pembiayaan.

1.3 Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Dihasilkannya rekomendasi kebijakan untuk penguatan pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*, UHC) dan perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus riset ini adalah:

1. Diperolehnya *baseline* indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 berbasis fasilitas kesehatan

2. Diperolehnya gambaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan (*supply side*) di era Jaminan Kesehatan Nasional (2019) dan perbandingannya dengan kondisi tahun 2011 dalam Rifaskes 2011
3. Dihasilkannya pemetaan kemampuan puskesmas dalam tatalaksana 144 diagnosa penyakit
4. Diperolehnya informasi dan rekomendasi perbaikan tata kelola (*governance*) Jaminan Kesehatan Nasional
5. Diperolehnya informasi dan rekomendasi sistem informasi JKN
6. Dihasilkannya informasi dan rekomendasi mengenai kepesertaan JKN
7. Dihasilkannya informasi dan rekomendasi mengenai kesiapan sumber daya manusia
8. Diperolehnya informasi dan rekomendasi mengenai obat dan alat kesehatan terkait JKN
9. Diperolehnya informasi dan rekomendasi mengenai pembiayaan JKN

1.4 Ruang lingkup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait kesesuaian antara pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yang dinilai dari efektivitas, efisiensi, adekuasi, ekuitas, dan responsivitas. Efektifitas menilai hubungan antara output dengan tujuan. Efisiensi (rasionalitas ekonomi) meninjau jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Adekuasi (kecukupan) menilai seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Ekuitas (perataan) merupakan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Responsivitas melihat seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Mengambil kerangka konsep yang diadaptasi dari *six building blocks of health system* dari WHO, maka dalam riset ini isu-isu yang diidentifikasi dan disarikan dalam 3 tahun perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional yang diklasifikasikan ke dalam 6 ranah sebagai berikut:

1. Tata Kelola (*Governance*) meliputi isu terkait *fraud*, *moral hazard*, kewenangan (Satuan Pengawas Internal, Pemerintah), *revenue collection*, *risk pooling*, *strategic purchasing*).

2. Obat dan Alat Kesehatan meliputi isu terkait e-katalog, Formularium Nasional, obat-obat Program Rujuk Balik (PRB), obat-obat kemoterapi, thalasemia, hemofilia, serta isu kecukupan obat.
3. Sistem Informasi meliputi implementasi dan kendala serta solusi sistem informasi, Sistem Verifikasi Digital Klaim (Vedika), Luar Paket Ina CBGs (LUPIS), *Primary Care* (P-Care).
4. Kepesertaan meliputi jumlah dan jenis kepesertaan, integrasi Jamkesda, pendaftaran dan aktivasi kepesertaan, *drop out*, *Ability to Pay* (ATP), *Willingness to Pay* (WTP), kepuasan peserta.
5. Pelayanan meliputi kemampuan puskesmas dalam penanganan 144 penyakit, kredensialing, mutu layanan, manfaat, aksesibilitas, ekuitas kelas, klinik regular dan klinik eksekutif, sistem rujukan dan *clinical pathway*.
6. Pembiayaan meliputi isu terkait defisit, denda, INA-CBGs, *Out of Pocket*, verifikasi dan keterlambatan klaim, surplus rumah sakit, kapitasi dan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), Koordinasi Manfaat (*Coordination of Benefit*), dan Kredit Bank.

BAB II METODOLOGI

Menimbang kompleksitas dan kedalaman riset, maka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaan riset kesehatan nasional ini dibagi ke dalam 2 pendekatan, yakni pendekatan generik dan tematik. Pendekatan generik dilakukan untuk memperoleh data kesiapan fasilitas kesehatan dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menjawab beberapa indikator yang akan menjadi indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024. Sedangkan pendekatan tematik dilakukan untuk memperoleh data mendalam terkait isu-isu spesifik yang terjadi di dalam 4 tahun perjalanan JKN, dilakukan setelah pengumpulan data pendekatan generik. Pendekatan generik dilakukan di seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 dinas kesehatan kabupaten/kota.

Riset dengan pendekatan tematik diserahkan pelaksanaannya ke beberapa Puslitbang yang ada di lingkungan Badan Litbangkes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Besar dan lokasi sampel riset dengan pendekatan tematik, ditetapkan tersendiri dan laporannya terpisah dengan laporan generik.

Pada Rifaskes 2019 ini juga dilakukan ujicoba penggunaan tablet (*paperless*) untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan riset-riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di masa yang akan datang. Adapun spesifikasi alat yang digunakan dalam ujicoba ini yaitu:

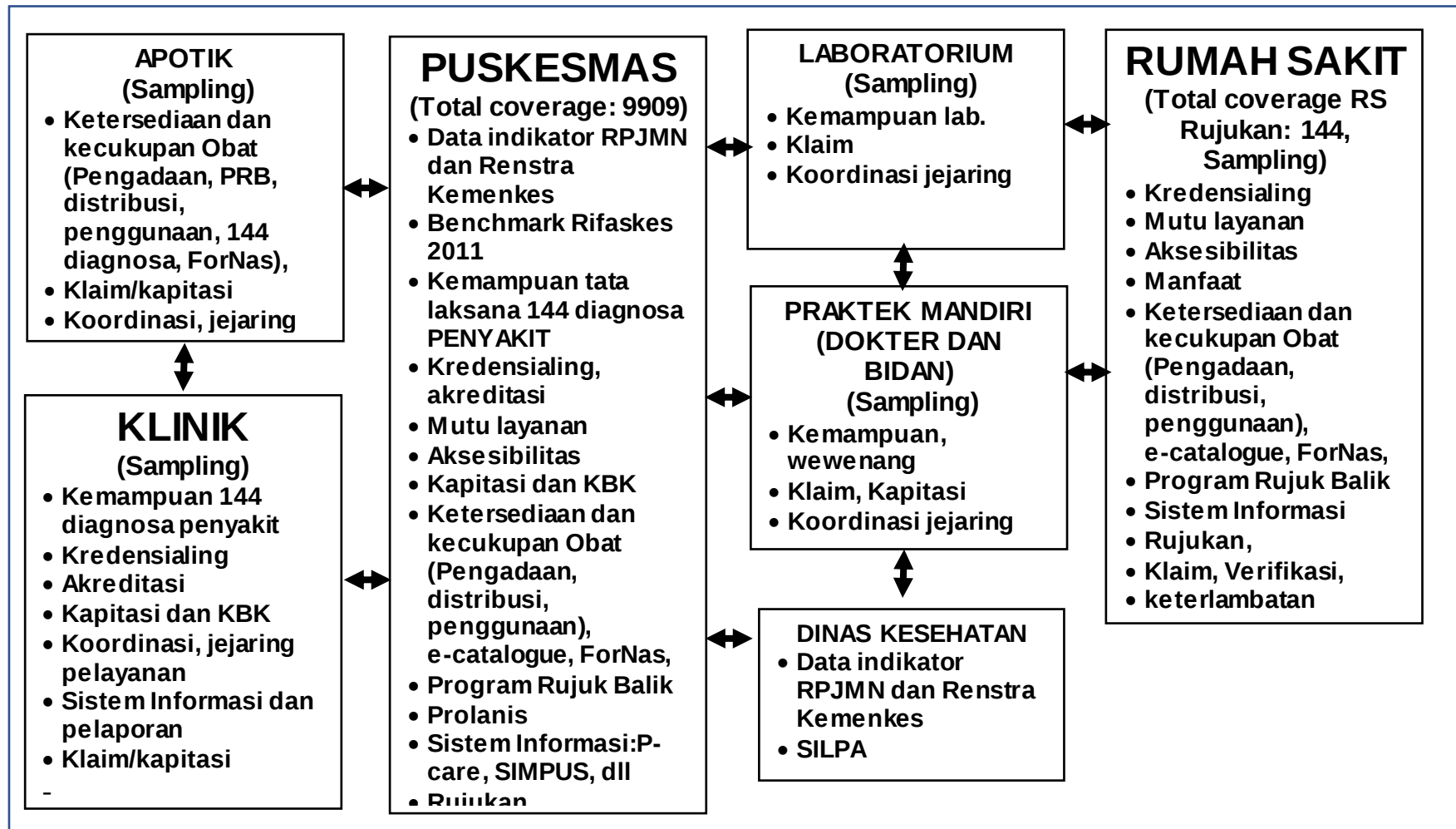
- HP Stream 8 Windows 10
- Prosesor: Intel Atom 2373SG Quad core 1.3 GHz (up to 1.8 GHz)
- Ukuran layar: 8-inch (1280x800) HD IPS
- Memori internal: 1 GB RAM, 32 GB Storage, Ext Memory Upto 32GB
- Kamera: Primary: 5MP FHD 1080p rear-facing, Secondary: 2MP FHD 1080p front-facing webcam
- Koneksi nirkabel: Wi-fii, Bluetooth 4.0 + LE
- Baterai: 4000 mAh, Lithium polymer
- Waktu siaga: Up to 8 hours and 20 minutes
- Sistem Operasi: Windows 8.1 with Bing 32
- Dimensi: 8.23 x 4.88 x 0.35 in
- 3G Network (data only)

- High speed 10-points capacitive display

Di setiap Korwil ditetapkan satu kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi uji coba *paperless*. Dasar dari pelaksanaan uji coba dikukuhkan dengan surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan nomor LB.02.02/I/5794/2018 tertanggal 15 Oktober 2018.

2.1 Kerangka konsep

Gambar 2. 3.1.1 Kerangka Konsep Penelitian Generik Rifaskes 2019



2.2 Desain penelitian

Studi ini merupakan riset evaluasi (*evaluation research*) dengan desain potong lintang (*cross sectional*)

2.3 Populasi dan Besar Sampel

2.3.1. Populasi studi

Populasi adalah seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota di Indonesia.

2.3.2. Sampel Studi

Jumlah dinas kesehatan kabupaten/kota dalam Rifaskes 2019 diambil secara *total coverage* yaitu 514 dinas kesehatan kabupaten/kota.

Tabel 2. 3.1.1 Daftar dinas kesehatan kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam Rifaskes 2019

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
1	Simeulue	258	Kota Blitar
2	Aceh Singkil	259	Kota Malang
3	Aceh Selatan	260	Kota Probolinggo
4	Aceh Tenggara	261	Kota Pasuruan
5	Aceh Timur	262	Kota Mojokerto
6	Aceh Tengah	263	Kota Madiun
7	Aceh Barat	264	Kota Surabaya
8	Aceh Besar	265	Kota Batu
9	Pidie	266	Pandeglang
10	Bireuen	267	Lebak
11	Aceh Utara	268	Tangerang
12	Aceh Barat Daya	269	Serang
13	Gayo Lues	270	Kota Tangerang
14	Aceh Tamiang	271	Kota Cilegon
15	Nagan Raya	272	Kota Serang
16	Aceh Jaya	273	Kota Tangerang Selatan
17	Bener Meriah	274	Jembrana
18	Pidie Jaya	275	Tabanan
19	Kota Banda Aceh	276	Badung
20	Kota Sabang	277	Gianyar
21	Kota Langsa	278	Klungkung
22	Kota Lhokseumawe	279	Bangli

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
23	Kota Subulussalam	280	Karangasem
24	Nias	281	Buleleng
25	Mandailing Natal	282	Kota Denpasar
26	Tapanuli Selatan	283	Lombok Barat
27	Tapanuli Tengah	284	Lombok Tengah
28	Tapanuli Utara	285	Lombok Timur
29	Toba Samosir	286	Sumbawa
30	Labuhan Batu	287	Dompu
31	Asahan	288	Bima
32	Simalungun	289	Sumbawa Barat
33	Dairi	290	Lombok Utara
34	Karo	291	Kota Mataram
35	Deli Serdang	292	Kota Bima
36	Langkat	293	Sumba Barat
37	Nias Selatan	294	Sumba Timur
38	Humbang Hasundutan	295	Kupang
39	Pakpak Bharat	296	Timor Tengah Selatan
40	Samosir	297	Timor Tengah Utara
41	Serdang Bedagai	298	Belu
42	Batu Bara	299	Alor
43	Padang Lawas Utara	300	Lembata
44	Padang Lawas	301	Flores Timur
45	Labuhan Batu Selatan	302	Sikka
46	Labuhan Batu Utara	303	Ende
47	Nias Utara	304	Ngada
48	Nias Barat	305	Manggarai
49	Kota Sibolga	306	Rote Ndao
50	Kota Tanjung Balai	307	Manggarai Barat
51	Kota Pematang Siantar	308	Sumba Tengah
52	Kota Tebing Tinggi	309	Sumba Barat Daya
53	Kota Medan	310	Nagekeo
54	Kota Binjai	311	Manggarai Timur
55	Kota Padangsidempuan	312	Sabu Raijua
56	Kota Gunungsitoli	313	Malaka
57	Kepulauan Mentawai	314	Kota Kupang

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
58	Pesisir Selatan	315	Sambas
59	Solok	316	Bengkayang
60	Sawahlunto sijnjung	317	Landak
61	Tanah Datar	318	Mempawah
62	Padang Pariaman	319	Sanggau
63	Agam	320	Ketapang
64	Lima Puluh Kota	321	Sintang
65	Pasaman	322	Kapuas Hulu
66	Solok Selatan	323	Sekadau
67	Dharmas Raya	324	Melawi
68	Pasaman Barat	324	Kayong Utara
69	Kota Padang	325	Kubu Raya
70	Kota Solok	326	Kota Pontianak
71	Kota Sawah Lunto	327	Kota Singkawang
72	Kota Padang Panjang	328	Kotawaringin Barat
73	Kota Bukittinggi	329	Kotawaringin Timur
74	Kota Payakumbuh	330	Kapuas
75	Kota Pariaman	331	Barito Selatan
76	Kuantan Singingi	332	Barito Utara
77	Indragiri Hulu	333	Sukamara
78	Indragiri Hilir	334	Lamandau
79	Pelalawan	335	Seruyan
80	Siak	336	Katingan
81	Kampar	337	Pulang Pisau
82	Rokan Hulu	338	Gunung Mas
83	Bengkalis	339	Barito Timur
84	Rokan Hilir	340	Murung Raya
85	Kepulauan Meranti	341	Kota Palangka Raya
86	Kota Pekanbaru	342	Tanah Laut
87	Kota Dumai	343	Kota Baru
88	Kerinci	344	Banjar
89	Merangin	345	Barito Kuala
90	Sarolangun	346	Tapin
91	Batanghari	347	Hulu Sungai Selatan
92	Muaro Jambi	348	Hulu Sungai Tengah

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
93	Tanjung Jabung Timur	349	Hulu Sungai Utara
94	Tanjung Jabung Barat	350	Tabalong
95	Tebo	351	Tanah Bumbu
96	Bungo	352	Balangan
97	Kota Jambi	353	Kota Banjarmasin
98	Kota Sungai Penuh	354	Kota Banjar Baru
99	Ogan Komering Ulu	355	Paser
100	Ogan Komering Ilir	356	Kutai Barat
101	Muara Enim	357	Kutai Kartanegara
102	Lahat	358	Kutai Timur
103	Musi Rawas	359	Berau
104	Musi Banyu Asin	360	Penajam Paser Utara
105	Banyu Asin	361	Mahakam Hulu
106	Ogan Komering Ulu Selatan	362	Kota Balikpapan
107	Ogan Komering Ulu Timur	363	Kota Samarinda
108	Ogan Ilir	364	Kota Bontang
109	Empat Lawang	365	Malinau
110	penukal Abab Lematang Ilir	366	Bulungan
111	Musi Rawas Utara	367	Tana Tidung
112	Kota Palembang	368	Nunukan
113	Kota Prabumulih	369	Kota Tarakan
114	Kota Pagar Alam	370	Bolang Mongondow
115	Kota Lubuk Linggau	371	Minahasa
116	Bengkulu Selatan	372	Sangihe
117	Rejang Lebong	373	Kepulauan Talaud
118	Bengkulu Utara	374	Minahasa Selatan
119	Kaur	375	Minahasa Utara
120	Seluma	376	Bolang Mongondow Utara
121	Mukomuko	377	Kep. Siau Tagolandang Biaro
122	Lebong	378	Minahasa Tenggara
123	Kepahiang	379	Bolaang Mongondow Selatan
124	Bengkulu Tengah	380	Bolaang Mongondow Timur
125	Kota Bengkulu	381	Kota Manado
126	Lampung Barat	382	Kota Bitung
127	Tanggamus	383	Kota Tomohon

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
128	Lampung Selatan	384	Kota Kotamobagu
129	Lampung Timur	385	Banggai Kepulauan
130	Lampung Tengah	386	Banggai
131	Lampung Utara	387	Morowali
132	Way Kanan	388	Poso
133	Tulang Bawang	389	Donggala
134	Pesawaran	390	Toli-toli
135	Pringsewu	391	Buol
136	Mesuji	392	Parigi Moutong
137	Tulangbawang Barat	393	Tojo Una-Una
138	Pesisir Barat	394	Sigi
139	Kota Bandar Lampung	395	Banggai laut
140	Kota Metro	396	Morowali Utara
141	Bangka	397	Kota Palu
142	Belitung	398	Selayar
143	Bangka Barat	399	Bulukumba
144	Bangka Tengah	400	Bantaeng
145	Bangka Selatan	401	Jeneponto
146	Belitung Timur	402	Takalar
147	Kota Pangkal Pinang	403	Gowa
148	Karimun	404	Sinjai
149	Bintan	405	Maros
150	Natuna	406	Pangkajene Kepulauan
151	Lingga	407	Barru
152	Kepulauan Anambas	408	Bone
153	Kota Batam	409	Soppeng
154	Kota Tanjung Pinang	410	Wajo
155	Kepulauan Seribu	411	Sidenreng Rappang
156	Kota Jakarta Selatan	412	Pinrang
157	Kota Jakarta Timur	413	Enrekang
158	Kota Jakarta Pusat	414	Luwu
159	Kota Jakarta Barat	415	Tana Toraja
160	Kota Jakarta Utara	416	Luwu Utara
161	Bogor	417	Luwu Timur
162	Sukabumi	418	Toraja Utara

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
163	Cianjur	419	Kota Makassar
164	Bandung	420	Kota Pare-pare
165	Garut	421	Kota Palopo
166	Tasikmalaya	422	Buton
167	Ciamis	423	Muna
168	Kuningan	424	Konawe
169	Cirebon	425	Kolaka
170	Majalengka	426	Konawe Selatan
171	Sumedang	427	Bombana
172	Indramayu	428	Wakatobi
173	Subang	429	Kolaka Utara
174	Purwakarta	430	Buton Utara
175	Karawang	431	Konawe Utara
176	Bekasi	432	Kolaka Timur
177	Bandung Barat	433	Konawe Kepulauan
178	Pangandaran	434	Muna Barat
179	Kota Bogor	435	Buton Tengah
180	Kota Sukabumi	436	Buton Selatan
181	Kota Bandung	437	Kota Kendari
182	Kota Cirebon	438	Kota Bau-bau
183	Kota Bekasi	439	Boalemo
184	Kota Depok	440	Gorontalo
185	Kota Cimahi	441	Pohuwato
186	Kota Tasikmalaya	442	Bone Bolango
187	Kota Banjar	443	Gorontalo Utara
188	Cilacap	444	Kota Gorontalo
189	Banyumas	445	Majene
190	Purbalingga	446	Polewali Mandar
191	Banjarnegara	447	Mamasa
192	Kebumen	448	Mamuju
193	Purworejo	449	Mamuju Utara/pasang kayu
194	Wonosobo	450	Mamuju Tengah
195	Magelang	451	Maluku Tenggara Barat
196	Boyolali	452	Maluku Tenggara
197	Klaten	453	Maluku Tengah

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
198	Sukoharjo	454	Buru
199	Wonogiri	455	Kepulauan Aru
200	Karanganyar	456	Seram Bagian Barat
201	Sragen	457	Seram Bagian Timur
202	Grobogan	458	Maluku Barat Daya
203	Blora	459	Buru Selatan
204	Rembang	460	Kota Ambon
205	Pati	461	Kota Tual
206	Kudus	462	Halmahera Barat
207	Jepara	463	Halmahera Tengah
208	Demak	464	Kepulauan Sula
209	Semarang	465	Halmahera Selatan
210	Temanggung	466	Halmahera Utara
211	Kendal	467	Halmahera Timur
212	Batang	468	Pulau Morotai
213	Pekalongan	469	Pulau Taliabu
214	Pemalang	470	Ternate
215	Tegal	471	Tidore Kepulauan
216	Brebes	472	Fak-fak
217	Kota Magelang	473	Kaimana
218	Kota Surakarta	474	Teluk Wondama
219	Kota Salatiga	475	Teluk Bintuni
220	Kota Semarang	476	Manokwari
221	Kota Pekalongan	477	Sorong Selatan
222	Kota Tegal	478	Sorong
223	Kulon Progo	479	Raja Ampat
224	Bantul	480	Tambrau
225	Gunung Kidul	481	Maybrat
226	Sleman	482	Manokwari Selatan
227	Kota Yogyakarta	483	Pegunungan Arfak
228	Pacitan	484	Kota Sorong
229	Ponorogo	485	Merauke
230	Trenggalek	486	Jayawijaya
231	Tulungagung	487	Jayapura
232	Blitar	488	Nabire

No	Dinas kesehatan kabupaten/kota	No	Dinas kesehatan kabupaten/kota
233	Kediri	489	Yapen Waropen
234	Malang	490	Biak Numfor
235	Lumajang	491	Paniai
236	Jember	492	Puncak Jaya
237	Banyuwangi	493	Mimika
238	Bondowoso	494	Boven Digoel
239	Situbondo	495	Mappi
240	Probolinggo	496	Asmat
241	Pasuruan	497	Yahukimo
242	Sidoarjo	498	Pegunungan Bintang
243	Mojokerto	499	Tolikara
244	Jombang	501	Sarmi
245	Nganjuk	502	Keerom
246	Madiun	503	Waropen
247	Magetan	504	Supiori
248	Ngawi	505	Mamberamo Raya
249	Bojonegoro	506	Nduga
250	Tuban	507	Lanny Jaya
251	Lamongan	508	Mamberano Tengah
252	Gresik	509	Yalimo
253	Bangkalan	510	Puncak
254	Sampang	511	Dogiyai
255	Pamekasan	512	Intan Jaya
256	Sumenep	513	Deiyai
257	Kota Kediri	514	Jayapura

Adapun kabupaten/kota yang menjadi uji coba pelaksanaan paperless yaitu Kota Yogyakarta, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Kota Bontang dan Kota Pangkal Pinang.

2.4 Instrumen Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur yang dikumpulkan melalui wawancara. Variabel yang dikumpulkan di dinas kesehatan kabupaten/kota meliputi:

- Blok I : Pengenalan Tempat
- Blok II : Pengumpul Data
- Blok III : Data Umum
- Blok IV : Indikator Kesehatan
- Blok V : Sumber Daya Manusia
- Blok VI : Kefarmasian dan Alkes
- Blok VII : Kapitasi dan Pembiayaan
- Blok VIII : Sistem Informasi

2.5 Manajemen data

Proses manajemen data Rifaskes 2019 terdiri dari dua tahap, tahap pertama dilakukan di kabupaten/kota yang terdiri dari kegiatan: pengumpulan data, *receiving-batching* (penerimaan-pembukuan), *editing* (kontrol kualitas data), *data entry*, dan pengiriman data elektronik. Tahap kedua dilakukan di satuan kerja Badan Litbangkes pusat yang terdiri dari kegiatan: penerimaan dan penggabungan data seluruh kabupaten/kota, *cleaning data*, penggabungan data provinsi, penggabungan data nasional, *cleaning data* nasional, imputasi, pembobotan, dan penyimpanan data elektronik. Analisis data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi.

BAB III HASIL

3.1 DATA UMUM

Tabel 3.1.1 Proporsi Dinas Kesehatan Berdasarkan Tipenya, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes	Tipe A	Tipe B	Tipe C
	N	%	%	%
Aceh	23	39,1	56,5	4,3
Sumatera Utara	33	60,6	36,4	3,0
Sumatera Barat	19	47,4	26,3	26,3
Riau	12	91,7	8,3	0,0
Jambi	11	45,5	54,5	0,0
Sumatera Selatan	17	58,8	41,2	0,0
Bengkulu	10	20,0	60,0	20,0
Lampung	15	80,0	20,0	0,0
Bangka Belitung	7	85,7	14,3	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	14,3	0,0
DKI Jakarta	6	0,0	16,7	83,3
Jawa Barat	27	81,5	18,5	0,0
Jawa Tengah	35	37,1	62,9	0,0
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	78,9	21,1	0,0
Banten	8	87,5	12,5	0,0
Bali	9	44,4	44,4	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	50,0	50,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	59,1	36,4	4,5
Kalimantan Barat	14	78,6	14,3	7,1
Kalimantan Tengah	14	21,4	78,6	0,0
Kalimantan Selatan	13	46,2	53,8	0,0
Kalimantan Timur	10	50,0	40,0	10,0
Kalimantan Utara	5	20,0	80,0	0,0
Sulawesi Utara	15	46,7	40,0	13,3
Sulawesi Tengah	13	84,6	15,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	70,8	25,0	4,2
Sulawesi Tenggara	17	35,3	52,9	11,8
Gorontalo	6	33,3	66,7	0,0
Sulawesi Barat	6	16,7	66,7	16,7
Maluku	11	63,6	36,4	0,0
Maluku Utara	10	10,0	70,0	20,0
Papua Barat	13	69,2	23,1	7,7
Papua	29	55,2	24,1	20,7
INDONESIA	514	56,8	36,8	6,4

Tabel 3.1.2 Jumlah Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jumlah desa
	N	n
Aceh	23	5.756
Sumatera Utara	31	5.445
Sumatera Barat	19	2.344
Riau	12	1.657
Jambi	11	1.408
Sumatera Selatan	17	3.066
Bengkulu	10	1.351
Lampung	15	2.455
Bangka Belitung	7	309
Kepulauan Riau	7	290
DKI Jakarta	6	0
Jawa Barat	27	5.353
Jawa Tengah	35	7.726
DI Yogyakarta	5	392
Jawa Timur	37	7.834
Banten	7	1.254
Bali	9	636
Nusa Tenggara Barat	10	1.013
Nusa Tenggara Timur	21	3.064
Kalimantan Barat	14	2.035
Kalimantan Tengah	14	1.463
Kalimantan Selatan	13	1.882
Kalimantan Timur	8	842
Kalimantan Utara	5	446
Sulawesi Utara	13	1.695
Sulawesi Tengah	13	1.850
Sulawesi Selatan	23	2.325
Sulawesi Tenggara	17	1.948
Gorontalo	6	685
Sulawesi Barat	6	589
Maluku	11	1.087
Maluku Utara	10	1.064
Papua Barat	13	1.710
Papua	28	4.931
INDONESIA	503	75.905

Tabel 3.1.3 Jumlah kelurahan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jumlah kelurahan
	N	n
Aceh	18	164
Sumatera Utara	32	766
Sumatera Barat	19	1.266
Riau	12	373
Jambi	11	158
Sumatera Selatan	17	388
Bengkulu	10	170
Lampung	15	353
Bangka Belitung	7	82
Kepulauan Riau	7	139
DKI Jakarta	6	267
Jawa Barat	26	637
Jawa Tengah	35	749
DI Yogyakarta	5	46
Jawa Timur	38	754
Banten	8	311
Bali	9	80
Nusa Tenggara Barat	10	140
Nusa Tenggara Timur	22	321
Kalimantan Barat	10	186
Kalimantan Tengah	14	138
Kalimantan Selatan	13	140
Kalimantan Timur	10	197
Kalimantan Utara	4	38
Sulawesi Utara	14	336
Sulawesi Tengah	13	175
Sulawesi Selatan	24	766
Sulawesi Tenggara	17	386
Gorontalo	6	184
Sulawesi Barat	6	85
Maluku	11	32
Maluku Utara	8	314
Papua Barat	13	95
Papua	26	557
INDONESIA	496	10.793

Tabel 3.1.4 Jumlah Kecamatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jumlah kecamatan
	N	n
Aceh	23	289
Sumatera Utara	33	448
Sumatera Barat	19	179
Riau	12	169
Jambi	11	144
Sumatera Selatan	17	241
Bengkulu	10	129
Lampung	15	228
Bangka Belitung	7	47
Kepulauan Riau	7	73
DKI Jakarta	6	44
Jawa Barat	27	627
Jawa Tengah	35	576
DI Yogyakarta	5	79
Jawa Timur	38	666
Banten	8	155
Bali	9	57
Nusa Tenggara Barat	10	116
Nusa Tenggara Timur	22	309
Kalimantan Barat	14	174
Kalimantan Tengah	14	137
Kalimantan Selatan	13	153
Kalimantan Timur	10	103
Kalimantan Utara	5	50
Sulawesi Utara	15	172
Sulawesi Tengah	13	175
Sulawesi Selatan	24	313
Sulawesi Tenggara	17	222
Gorontalo	6	77
Sulawesi Barat	6	69
Maluku	11	118
Maluku Utara	10	117
Papua Barat	13	220
Papua	29	529
INDONESIA	514	7.205

Tabel 3.1.5 Jumlah Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jumlah Puskesmas
	N	n
Aceh	23	354
Sumatera Utara	33	598
Sumatera Barat	19	274
Riau	12	231
Jambi	11	199
Sumatera Selatan	17	339
Bengkulu	10	179
Lampung	15	307
Bangka Belitung	7	64
Kepulauan Riau	7	87
DKI Jakarta	6	326
Jawa Barat	27	1.087
Jawa Tengah	35	878
DI Yogyakarta	5	121
Jawa Timur	38	968
Banten	8	241
Bali	9	120
Nusa Tenggara Barat	10	169
Nusa Tenggara Timur	22	415
Kalimantan Barat	14	244
Kalimantan Tengah	14	202
Kalimantan Selatan	13	235
Kalimantan Timur	10	183
Kalimantan Utara	5	57
Sulawesi Utara	15	194
Sulawesi Tengah	13	207
Sulawesi Selatan	24	461
Sulawesi Tenggara	17	287
Gorontalo	6	93
Sulawesi Barat	6	95
Maluku	11	207
Maluku Utara	10	140
Papua Barat	13	169
Papua	29	472
INDONESIA	514	10.203

Tabel 3.1.6 Distribusi Keberadaan SK Penetapan Puskesmas, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Puskesmas perkotaan	Puskesmas perdesaan	Puskesmas T/ST
	N	n	n	n
Aceh	23	62	181	111
Sumatera Utara	33	169	289	128
Sumatera Barat	19	71	142	61
Riau	12	71	116	44
Jambi	11	39	104	67
Sumatera Selatan	17	102	213	32
Bengkulu	10	36	82	44
Lampung	15	56	213	38
Bangka Belitung	7	20	40	4
Kepulauan Riau	7	38	16	32
DKI Jakarta	6	326	0	0
Jawa Barat	27	530	499	41
Jawa Tengah	35	294	584	7
DI Yogyakarta	5	48	73	0
Jawa Timur	38	268	641	11
Banten	8	140	102	0
Bali	9	26	94	0
Nusa Tenggara Barat	10	25	110	37
Nusa Tenggara Timur	22	38	69	308
Kalimantan Barat	14	46	72	121
Kalimantan Tengah	14	125	170	62
Kalimantan Selatan	13	64	120	51
Kalimantan Timur	10	78	69	36
Kalimantan Utara	5	17	15	25
Sulawesi Utara	15	46	101	41
Sulawesi Tengah	13	29	74	104
Sulawesi Selatan	24	108	243	120
Sulawesi Tenggara	17	31	109	148
Gorontalo	6	23	47	23
Sulawesi Barat	6	12	53	36
Maluku	11	21	48	141
Maluku Utara	10	20	40	80
Papua Barat	13	23	22	110
Papua	29	63	58	351
INDONESIA	514	3.065	4.809	2.414

Tabel 3.1.7 Proporsi Puskesmas Terakreditasi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Puskesmas	Puskesmas terakreditasi	
	N	N	n	%
Aceh	23	354	256	72,3
Sumatera Utara	33	598	398	66,6
Sumatera Barat	19	274	233	85,0
Riau	12	231	174	75,3
Jambi	11	199	165	82,9
Sumatera Selatan	17	339	265	78,2
Bengkulu	10	179	138	77,1
Lampung	15	307	279	90,9
Bangka Belitung	7	64	61	95,3
Kepulauan Riau	7	87	71	81,6
DKI Jakarta	6	326	133	40,8
Jawa Barat	27	1.087	764	70,3
Jawa Tengah	35	878	861	98,1
DI Yogyakarta	5	121	121	100,0
Jawa Timur	38	968	937	96,8
Banten	8	241	203	84,2
Bali	9	120	120	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	169	136	80,5
Nusa Tenggara Timur	22	415	273	65,8
Kalimantan Barat	14	244	188	77,0
Kalimantan Tengah	14	202	140	69,3
Kalimantan Selatan	13	235	199	84,7
Kalimantan Timur	10	183	139	76,0
Kalimantan Utara	5	57	43	75,4
Sulawesi Utara	15	194	108	55,7
Sulawesi Tengah	13	207	150	72,5
Sulawesi Selatan	24	461	407	88,3
Sulawesi Tenggara	17	287	158	55,1
Gorontalo	6	93	71	76,3
Sulawesi Barat	6	95	53	55,8
Maluku	11	207	88	42,5
Maluku Utara	10	140	71	50,7
Papua Barat	13	169	52	30,8
Papua	29	472	80	16,9
INDONESIA	514	10.203	7.535	72,6

Tabel 3.1.8 Proporsi Kecamatan dengan Puskesmas Terakreditasi di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Kecamatan	Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi	
	N	N	n	%
Aceh	23	289	229	79,2
Sumatera Utara	33	448	366	81,7
Sumatera Barat	19	179	164	91,6
Riau	12	169	151	89,3
Jambi	11	144	129	89,6
Sumatera Selatan	17	241	185	76,8
Bengkulu	10	129	104	80,6
Lampung	15	228	213	93,4
Bangka Belitung	7	47	47	100,0
Kepulauan Riau	7	73	54	74,0
DKI Jakarta	6	44	44	100,0
Jawa Barat	27	627	533	85,0
Jawa Tengah	35	576	571	99,1
DI Yogyakarta	5	79	79	100,0
Jawa Timur	38	666	667	100,2
Banten	8	155	142	91,6
Bali	9	57	57	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	116	96	82,8
Nusa Tenggara Timur	22	309	224	72,5
Kalimantan Barat	14	174	142	81,6
Kalimantan Tengah	14	137	96	70,1
Kalimantan Selatan	13	153	128	83,7
Kalimantan Timur	10	103	82	79,6
Kalimantan Utara	5	50	41	82,0
Sulawesi Utara	15	172	93	54,1
Sulawesi Tengah	13	175	135	77,1
Sulawesi Selatan	24	313	286	91,4
Sulawesi Tenggara	17	222	135	60,8
Gorontalo	6	77	68	88,3
Sulawesi Barat	6	69	44	63,8
Maluku	11	118	57	48,3
Maluku Utara	10	117	69	59,0
Papua Barat	13	220	59	26,8
Papua	29	529	64	12,1
INDONESIA	514	7.205	5.554	78,4

**Tabel 3.1.9 Proporsi Puskesmas PONEB di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan,
Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah dinkes	Puskesmas	Puskesmas PONEB	
	N	N	n	%
Aceh	23	354	72	20,3
Sumatera Utara	33	598	102	17,1
Sumatera Barat	19	274	90	32,8
Riau	12	231	62	26,8
Jambi	11	199	73	36,7
Sumatera Selatan	17	339	80	23,6
Bengkulu	10	179	46	25,7
Lampung	15	307	97	31,6
Bangka Belitung	7	64	18	28,1
Kepulauan Riau	7	87	20	23,0
DKI Jakarta	6	326	51	15,6
Jawa Barat	27	1.087	458	42,1
Jawa Tengah	35	878	289	32,9
DI Yogyakarta	5	121	35	28,9
Jawa Timur	38	968	280	28,9
Banten	8	241	143	59,3
Bali	9	120	51	42,5
Nusa Tenggara Barat	10	169	48	28,4
Nusa Tenggara Timur	22	415	83	20,0
Kalimantan Barat	14	244	42	17,2
Kalimantan Tengah	14	202	118	58,4
Kalimantan Selatan	13	235	42	17,9
Kalimantan Timur	10	183	28	15,3
Kalimantan Utara	5	57	11	19,3
Sulawesi Utara	15	194	39	20,1
Sulawesi Tengah	13	207	43	20,8
Sulawesi Selatan	24	461	107	23,2
Sulawesi Tenggara	17	287	61	21,3
Gorontalo	6	93	27	29,0
Sulawesi Barat	6	95	14	14,7
Maluku	11	207	37	17,9
Maluku Utara	10	140	32	22,9
Papua Barat	13	169	9	5,3
Papua	29	472	27	5,7
INDONESIA	514	10.203	2.735	25,7

Tabel 3.1.10 Proporsi Puskesmas BLUD di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Puskesmas	Puskesmas BLUD	
	N	N	n	%
Aceh	23	354	15	4,2
Sumatera Utara	33	598	36	6,0
Sumatera Barat	19	274	148	54,0
Riau	12	231	123	53,2
Jambi	11	199	36	18,1
Sumatera Selatan	17	339	52	15,3
Bengkulu	10	179	23	12,8
Lampung	15	307	144	46,9
Bangka Belitung	7	64	12	18,8
Kepulauan Riau	7	87	11	12,6
DKI Jakarta	6	326	89	27,3
Jawa Barat	27	1.087	595	54,7
Jawa Tengah	35	878	710	80,9
DI Yogyakarta	5	121	121	100,0
Jawa Timur	38	968	270	27,9
Banten	8	241	76	31,5
Bali	9	120	23	19,2
Nusa Tenggara Barat	10	169	57	33,7
Nusa Tenggara Timur	22	415	10	2,4
Kalimantan Barat	14	244	93	38,1
Kalimantan Tengah	14	202	89	44,1
Kalimantan Selatan	13	235	21	8,9
Kalimantan Timur	10	183	51	27,9
Kalimantan Utara	5	57	0	0,0
Sulawesi Utara	15	194	0	0,0
Sulawesi Tengah	13	207	0	0,0
Sulawesi Selatan	24	461	68	14,8
Sulawesi Tenggara	17	287	0	0,0
Gorontalo	6	93	7	7,5
Sulawesi Barat	6	95	2	2,1
Maluku	11	207	0	0,0
Maluku Utara	10	140	90	64,3
Papua Barat	13	169	0	0,0
Papua	29	472	4	0,8
INDONESIA	514	10.203	2.976	24,4

Tabel 3.1.11 Proporsi Puskesmas Pembantu di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jumlah Puskesmas	Pustu berfungsi	Pustu berfungsi
	N	N	n	%
Aceh	23	354	894	99,8
Sumatera Utara	33	598	1.966	97,2
Sumatera Barat	19	274	889	95,1
Riau	12	231	1.007	97,9
Jambi	11	199	515	99,8
Sumatera Selatan	17	339	756	90,0
Bengkulu	10	179	392	83,4
Lampung	15	307	788	98,6
Bangka Belitung	7	64	154	92,8
Kepulauan Riau	7	87	213	96,8
DKI Jakarta	6	326	0	0,0
Jawa Barat	27	1.087	1.464	92,1
Jawa Tengah	35	878	1.740	95,5
DI Yogyakarta	5	121	318	100,0
Jawa Timur	38	968	2.250	99,5
Banten	8	241	191	88,0
Bali	9	120	521	99,6
Nusa Tenggara Barat	10	169	561	97,2
Nusa Tenggara Timur	22	415	828	82,7
Kalimantan Barat	14	244	777	93,5
Kalimantan Tengah	14	202	1.073	99,0
Kalimantan Selatan	13	235	458	85,9
Kalimantan Timur	10	183	625	99,7
Kalimantan Utara	5	57	196	83,8
Sulawesi Utara	15	194	387	86,8
Sulawesi Tengah	13	207	641	95,8
Sulawesi Selatan	24	461	1.226	91,7
Sulawesi Tenggara	17	287	375	92,1
Gorontalo	6	93	144	76,2
Sulawesi Barat	6	95	300	100,0
Maluku	11	207	417	100,0
Maluku Utara	10	140	269	98,9
Papua Barat	13	169	332	81,6
Papua	29	472	794	86,5
INDONESIA	514	10.203	23.461	90,5

Tabel 3.1.12 Jumlah Posyandu dan Proporsi Posyandu yang Aktif, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Posyandu	Posyandu aktif	
	N	N	n	%
Aceh	23	7.495	7.371	98,3
Sumatera Utara	33	13.584	12.243	90,1
Sumatera Barat	19	6.848	6.844	99,9
Riau	12	5.437	5.059	93,0
Jambi	11	3.575	3.104	86,8
Sumatera Selatan	17	6.526	6.041	92,6
Bengkulu	10	2.034	1.562	76,8
Lampung	15	8.261	6.466	78,3
Bangka Belitung	7	1.095	914	83,5
Kepulauan Riau	7	1.399	1.399	100,0
DKI Jakarta	6	4.299	4.299	100,0
Jawa Barat	27	41.372	40.221	97,2
Jawa Tengah	35	48.542	44.328	91,3
DI Yogyakarta	5	5.720	5.614	98,1
Jawa Timur	38	45.685	41.749	91,4
Banten	8	10.483	10.041	95,8
Bali	9	4.812	4.170	86,7
Nusa Tenggara Barat	10	6.238	5.385	86,3
Nusa Tenggara Timur	22	10.030	9.402	93,7
Kalimantan Barat	14	5.102	4.458	87,4
Kalimantan Tengah	14	2.530	2.525	99,8
Kalimantan Selatan	13	3.957	3.956	100,0
Kalimantan Timur	10	4.522	3.190	70,5
Kalimantan Utara	5	727	647	89,0
Sulawesi Utara	15	2.291	2.264	98,8
Sulawesi Tengah	13	3.372	2.682	79,5
Sulawesi Selatan	24	9.960	8.961	90,0
Sulawesi Tenggara	17	3.211	3.065	95,5
Gorontalo	6	1.295	1.259	97,2
Sulawesi Barat	6	1.974	1.971	99,8
Maluku	11	2.283	2.030	88,9
Maluku Utara	10	1.567	1.567	100,0
Papua Barat	13	1.584	1.524	96,2
Papua	29	2.532	2.282	90,1
INDONESIA	514	280.342	258.593	91,8

Tabel 3.1.13 Jumlah Posyandu Balita Pratama dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Posyandu	Posyandu pratama		Posyandu pratama aktif	
	N	N	n	%	n	%
Aceh	23	7.495	1.107	14,8	1.106	99,9
Sumatera Utara	33	13.584	1.135	8,4	897	79,0
Sumatera Barat	19	6.848	223	3,3	223	100,0
Riau	12	5.437	468	8,6	409	87,4
Jambi	11	3.575	635	17,8	456	71,8
Sumatera Selatan	17	6.526	257	3,9	214	83,3
Bengkulu	10	2.034	78	3,8	35	44,9
Lampung	15	8.261	145	1,8	121	83,4
Bangka Belitung	7	1.095	48	4,4	33	68,8
Kepulauan Riau	7	1.399	128	9,1	128	100,0
DKI Jakarta	6	4.299	12	0,3	12	100,0
Jawa Barat	27	41.372	1.625	3,9	1.552	95,5
Jawa Tengah	35	48.542	2.120	4,4	1.408	66,4
DI Yogyakarta	5	5.720	250	4,4	230	92,0
Jawa Timur	38	45.685	994	2,2	892	89,7
Banten	8	10.483	1.200	11,4	1.064	88,7
Bali	9	4.812	10	0,2	5	50,0
Nusa Tenggara Barat	10	6.238	382	6,1	329	86,1
Nusa Tenggara Timur	22	10.030	1.470	14,7	1.285	87,4
Kalimantan Barat	14	5.102	911	17,9	807	88,6
Kalimantan Tengah	14	2.530	904	35,7	904	100,0
Kalimantan Selatan	13	3.957	472	11,9	472	100,0
Kalimantan Timur	10	4.522	659	14,6	385	58,4
Kalimantan Utara	5	727	144	19,8	120	83,3
Sulawesi Utara	15	2.291	773	33,7	773	100,0
Sulawesi Tengah	13	3.372	356	10,6	155	43,5
Sulawesi Selatan	24	9.960	805	8,1	612	76,0
Sulawesi Tenggara	17	3.211	454	14,1	453	99,8
Gorontalo	6	1.295	74	5,7	74	100,0
Sulawesi Barat	6	1.974	160	8,1	160	100,0
Maluku	11	2.283	789	34,6	606	76,8
Maluku Utara	10	1.567	268	17,1	268	100,0
Papua Barat	13	1.584	1.118	70,6	1.062	95,0
Papua	29	2.532	1.683	66,5	1.527	90,7
INDONESIA	514	280.342	21.857	14,5	18.777	84,9

Tabel 3.1.14 Jumlah Posyandu Balita Madya dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Posyandu (18 e)	Posyandu madya		Posyandu madya aktif	
	N	N	n	%	n	%
Aceh	23	7.495	4.585	61,2	4.462	97,3
Sumatera Utara	33	13.584	6.284	46,3	5.318	84,6
Sumatera Barat	19	6.848	1.193	17,4	1.193	100,0
Riau	12	5.437	1.949	35,8	1.630	83,6
Jambi	11	3.575	1.280	35,8	988	77,2
Sumatera Selatan	17	6.526	2.051	31,4	1.811	88,3
Bengkulu	10	2.034	933	45,9	506	54,2
Lampung	15	8.261	1.808	21,9	1.215	67,2
Bangka Belitung	7	1.095	369	33,7	223	60,4
Kepulauan Riau	7	1.399	567	40,5	567	100,0
DKI Jakarta	6	4.299	183	4,3	183	100,0
Jawa Barat	27	41.372	13.613	32,9	9.094	66,8
Jawa Tengah	35	48.542	12.461	25,7	10.360	83,1
DI Yogyakarta	5	5.720	862	15,1	776	90,0
Jawa Timur	38	45.685	9.758	21,4	7.534	77,2
Banten	8	10.483	4.710	44,9	4.404	93,5
Bali	9	4.812	1.347	28,0	710	52,7
Nusa Tenggara Barat	10	6.238	2.250	36,1	1.682	74,8
Nusa Tenggara Timur	22	10.030	3.457	34,5	3.092	89,4
Kalimantan Barat	14	5.102	2.560	50,2	2.218	86,6
Kalimantan Tengah	14	2.530	1.217	48,1	1.212	99,6
Kalimantan Selatan	13	3.957	2.265	57,2	2.265	100,0
Kalimantan Timur	10	4.522	1.875	41,5	819	43,7
Kalimantan Utara	5	727	298	41,0	242	81,2
Sulawesi Utara	15	2.291	961	41,9	934	97,2
Sulawesi Tengah	13	3.372	1.492	44,2	1.003	67,2
Sulawesi Selatan	24	9.960	2.842	28,5	2.254	79,3
Sulawesi Tenggara	17	3.211	1.112	34,6	1.068	96,0
Gorontalo	6	1.295	543	41,9	507	93,4
Sulawesi Barat	6	1.974	745	37,7	745	100,0
Maluku	11	2.283	829	36,3	759	91,6
Maluku Utara	10	1.567	562	35,9	562	100,0
Papua Barat	13	1.584	434	27,4	430	99,1
Papua	29	2.532	562	22,2	470	83,6
INDONESIA	514	280.342	87.957	35,3	71.236	84,1

Tabel 3.1.15 Jumlah Posyandu Balita Purnama dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Posyandu (18 e)	Posyandu purnama		Posyandu purnama aktif	
	N	N	n	%	n	%
Aceh	23	7.495	1.679	22,4	1.679	100,0
Sumatera Utara	33	13.584	6.958	51,2	5.601	80,5
Sumatera Barat	19	6.848	3.564	52,0	3.560	99,9
Riau	12	5.437	2.160	39,7	2.160	100,0
Jambi	11	3.575	1.205	33,7	1.205	100,0
Sumatera Selatan	17	6.526	3.720	57,0	3.575	96,1
Bengkulu	10	2.034	723	35,5	723	100,0
Lampung	15	8.261	4.673	56,6	3.676	78,7
Bangka Belitung	7	1.095	496	45,3	492	99,2
Kepulauan Riau	7	1.399	523	37,4	523	100,0
DKI Jakarta	6	4.299	1.402	32,6	1.402	100,0
Jawa Barat	27	41.372	17.261	41,7	16.327	94,6
Jawa Tengah	35	48.542	18.306	37,7	17.546	95,8
DI Yogyakarta	5	5.720	1.739	30,4	1.739	100,0
Jawa Timur	38	45.685	32.272	70,6	31.111	96,4
Banten	8	10.483	3.956	37,7	3.956	100,0
Bali	9	4.812	3.201	66,5	3.201	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	6.238	3.159	50,6	2.927	92,7
Nusa Tenggara Timur	22	10.030	4.573	45,6	4.500	98,4
Kalimantan Barat	14	5.102	1.340	26,3	1.199	89,5
Kalimantan Tengah	14	2.530	354	14,0	354	100,0
Kalimantan Selatan	13	3.957	1.135	28,7	1.134	99,9
Kalimantan Timur	10	4.522	1.464	32,4	1.462	99,9
Kalimantan Utara	5	727	199	27,4	199	100,0
Sulawesi Utara	15	2.291	498	21,7	498	100,0
Sulawesi Tengah	13	3.372	1.403	41,6	1.403	100,0
Sulawesi Selatan	24	9.960	5.074	50,9	4.864	95,9
Sulawesi Tenggara	17	3.211	1.363	42,4	1.263	92,7
Gorontalo	6	1.295	673	52,0	673	100,0
Sulawesi Barat	6	1.974	950	48,1	947	99,7
Maluku	11	2.283	646	28,3	646	100,0
Maluku Utara	10	1.567	568	36,2	568	100,0
Papua Barat	13	1.584	23	1,5	23	100,0
Papua	29	2.532	247	9,8	245	99,2
INDONESIA	514	280.342	127.507	38,4	121.381	97,3

Tabel 3.1.16 Jumlah Posyandu Balita Mandiri dan Proporsi yang Aktif, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Posyandu	Posyandu mandiri		Posyandu mandiri aktif	
	N	N	n	%	n	%
Aceh	23	7.495	124	1,7	124	100,0
Sumatera Utara	33	13.584	427	3,1	427	100,0
Sumatera Barat	19	6.848	1.868	27,3	1.868	100,0
Riau	12	5.437	860	15,8	860	100,0
Jambi	11	3.575	455	12,7	455	100,0
Sumatera Selatan	17	6.526	498	7,6	441	88,6
Bengkulu	10	2.034	300	14,7	300	100,0
Lampung	15	8.261	1.635	19,8	1.454	88,9
Bangka Belitung	7	1.095	182	16,6	166	91,2
Kepulauan Riau	7	1.399	181	12,9	181	100,0
DKI Jakarta	6	4.299	2.803	65,2	2.702	96,4
Jawa Barat	27	41.372	10.437	25,2	10.052	96,3
Jawa Tengah	35	48.542	14.655	30,2	14.014	95,6
DI Yogyakarta	5	5.720	2.743	48,0	2.743	100,0
Jawa Timur	38	45.685	3.509	7,7	3.509	100,0
Banten	8	10.483	644	6,1	644	100,0
Bali	9	4.812	254	5,3	254	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	6.238	447	7,2	447	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	10.030	530	5,3	525	99,1
Kalimantan Barat	14	5.102	291	5,7	234	80,4
Kalimantan Tengah	14	2.530	55	2,2	55	100,0
Kalimantan Selatan	13	3.957	85	2,1	85	100,0
Kalimantan Timur	10	4.522	524	11,6	524	100,0
Kalimantan Utara	5	727	86	11,8	86	100,0
Sulawesi Utara	15	2.291	59	2,6	59	100,0
Sulawesi Tengah	13	3.372	121	3,6	121	100,0
Sulawesi Selatan	24	9.960	1.239	12,4	1.231	99,4
Sulawesi Tenggara	17	3.211	282	8,8	281	99,6
Gorontalo	6	1.295	5	0,4	5	100,0
Sulawesi Barat	6	1.974	119	6,0	119	100,0
Maluku	11	2.283	19	0,8	19	100,0
Maluku Utara	10	1.567	169	10,8	169	100,0
Papua Barat	13	1.584	9	0,6	9	100,0
Papua	29	2.532	40	1,6	40	100,0
INDONESIA	514	280.342	45.655	12,2	44.203	98,1

Tabel 3.1.17 Jumlah Poskesdes di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Jumlah poskesdes
	N	n	n
Aceh	23	22	2.363
Sumatera Utara	33	33	3.330
Sumatera Barat	19	19	1.947
Riau	12	12	918
Jambi	11	11	688
Sumatera Selatan	17	17	2.698
Bengkulu	10	10	621
Lampung	15	15	1.911
Bangka Belitung	7	7	349
Kepulauan Riau	7	7	137
DKI Jakarta	6	6	4
Jawa Barat	27	27	2.829
Jawa Tengah	35	35	6.415
DI Yogyakarta	5	5	191
Jawa Timur	38	38	8.203
Banten	8	8	320
Bali	9	9	310
Nusa Tenggara Barat	10	9	550
Nusa Tenggara Timur	22	22	802
Kalimantan Barat	14	14	1.379
Kalimantan Tengah	14	13	484
Kalimantan Selatan	13	13	1.410
Kalimantan Timur	10	10	201
Kalimantan Utara	5	5	81
Sulawesi Utara	15	15	453
Sulawesi Tengah	13	13	1.418
Sulawesi Selatan	24	23	1.447
Sulawesi Tenggara	17	17	698
Gorontalo	6	6	324
Sulawesi Barat	6	6	309
Maluku	11	11	311
Maluku Utara	10	10	173
Papua Barat	13	13	37
Papua	29	28	216
INDONESIA	514	509	43.527

Tabel 3.1.18 Jumlah Poskestren di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Poskestren
	N	n	n
Aceh	23	23	322
Sumatera Utara	33	32	71
Sumatera Barat	19	16	89
Riau	12	11	295
Jambi	11	11	134
Sumatera Selatan	17	16	53
Bengkulu	10	9	16
Lampung	15	15	232
Bangka Belitung	7	7	32
Kepulauan Riau	7	7	8
DKI Jakarta	6	6	26
Jawa Barat	27	27	635
Jawa Tengah	35	34	1.818
DI Yogyakarta	5	4	87
Jawa Timur	38	38	1.402
Banten	8	7	106
Bali	9	9	0
Nusa Tenggara Barat	10	10	118
Nusa Tenggara Timur	22	22	0
Kalimantan Barat	14	14	23
Kalimantan Tengah	14	12	3
Kalimantan Selatan	13	13	110
Kalimantan Timur	10	10	24
Kalimantan Utara	5	5	4
Sulawesi Utara	15	14	2
Sulawesi Tengah	13	13	36
Sulawesi Selatan	24	24	128
Sulawesi Tenggara	17	16	19
Gorontalo	6	6	5
Sulawesi Barat	6	6	9
Maluku	11	11	9
Maluku Utara	10	8	0
Papua Barat	13	13	0
Papua	29	28	26
INDONESIA	514	497	5.842

Tabel 3.1.19 Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Dinkes valid n	BKB n
Aceh	23	16	392
Sumatera Utara	33	26	340
Sumatera Barat	19	13	804
Riau	12	9	349
Jambi	11	7	115
Sumatera Selatan	17	12	175
Bengkulu	10	8	20
Lampung	15	12	1.565
Bangka Belitung	7	5	187
Kepulauan Riau	7	6	146
DKI Jakarta	6	5	382
Jawa Barat	27	15	1.443
Jawa Tengah	35	16	2.548
DI Yogyakarta	5	2	465
Jawa Timur	38	28	8.498
Banten	8	6	441
Bali	9	7	1.391
Nusa Tenggara Barat	10	6	51
Nusa Tenggara Timur	22	19	781
Kalimantan Barat	14	10	190
Kalimantan Tengah	14	7	86
Kalimantan Selatan	13	5	738
Kalimantan Timur	10	7	47
Kalimantan Utara	5	5	7
Sulawesi Utara	15	13	383
Sulawesi Tengah	13	10	217
Sulawesi Selatan	24	16	1.204
Sulawesi Tenggara	17	12	487
Gorontalo	6	5	64
Sulawesi Barat	6	6	144
Maluku	11	11	289
Maluku Utara	10	8	85
Papua Barat	13	13	75
Papua	29	28	9
INDONESIA	514	374	24.118

Tabel 3.1.20 Jumlah Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	KP-KIA
	N	n	n
Aceh	23	17	540
Sumatera Utara	33	31	1.553
Sumatera Barat	19	15	568
Riau	12	8	223
Jambi	11	7	267
Sumatera Selatan	17	13	833
Bengkulu	10	9	461
Lampung	15	13	632
Bangka Belitung	7	6	89
Kepulauan Riau	7	6	219
DKI Jakarta	6	6	530
Jawa Barat	27	14	1.366
Jawa Tengah	35	20	2.730
DI Yogyakarta	5	2	698
Jawa Timur	38	31	2.452
Banten	8	5	832
Bali	9	8	103
Nusa Tenggara Barat	10	6	0
Nusa Tenggara Timur	22	20	357
Kalimantan Barat	14	10	0
Kalimantan Tengah	14	6	0
Kalimantan Selatan	13	10	354
Kalimantan Timur	10	6	100
Kalimantan Utara	5	5	66
Sulawesi Utara	15	13	210
Sulawesi Tengah	13	9	1.022
Sulawesi Selatan	24	18	568
Sulawesi Tenggara	17	13	766
Gorontalo	6	6	17
Sulawesi Barat	6	6	196
Maluku	11	10	42
Maluku Utara	10	8	45
Papua Barat	13	13	0
Papua	29	28	15
INDONESIA	514	398	17.854

Tabel 3.1.21 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	PAUD
	N	n
Aceh	23	1.471
Sumatera Utara	33	2.824
Sumatera Barat	19	3.520
Riau	12	1.413
Jambi	11	601
Sumatera Selatan	17	1.071
Bengkulu	10	1.099
Lampung	15	2.061
Bangka Belitung	7	255
Kepulauan Riau	7	177
DKI Jakarta	6	1.005
Jawa Barat	27	7.206
Jawa Tengah	35	8.837
DI Yogyakarta	5	2.444
Jawa Timur	38	10.431
Banten	8	2.000
Bali	9	1.431
Nusa Tenggara Barat	10	340
Nusa Tenggara Timur	22	2.534
Kalimantan Barat	14	305
Kalimantan Tengah	14	467
Kalimantan Selatan	13	496
Kalimantan Timur	10	238
Kalimantan Utara	5	187
Sulawesi Utara	15	1.566
Sulawesi Tengah	13	61
Sulawesi Selatan	24	1.412
Sulawesi Tenggara	17	683
Gorontalo*	6	342*
Sulawesi Barat	6	320
Maluku	11	265
Maluku Utara	10	281
Papua Barat	13	487
Papua	29	244
INDONESIA	514	58.074

Keterangan :

* perubahan data semula 6758 (koreksi data Boalemo)

Tabel 3.1.22 Jumlah Polindes di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Polindes
	N	n	n
Aceh	23	21	1.170
Sumatera Utara	33	32	1.227
Sumatera Barat	19	19	1.330
Riau	12	10	528
Jambi	11	9	370
Sumatera Selatan	17	17	1.284
Bengkulu	10	10	142
Lampung	15	14	1.128
Bangka Belitung	7	7	106
Kepulauan Riau	7	7	185
DKI Jakarta	6	6	0
Jawa Barat	27	26	982
Jawa Tengah	35	34	1.765
DI Yogyakarta	5	5	15
Jawa Timur	38	38	4.582
Banten	8	6	39
Bali	9	9	29
Nusa Tenggara Barat	10	10	616
Nusa Tenggara Timur	22	22	1.021
Kalimantan Barat	14	14	816
Kalimantan Tengah	14	13	290
Kalimantan Selatan	13	12	358
Kalimantan Timur	10	10	319
Kalimantan Utara	5	5	6
Sulawesi Utara	15	14	115
Sulawesi Tengah	13	12	356
Sulawesi Selatan	24	23	216
Sulawesi Tenggara	17	16	365
Gorontalo	6	5	74
Sulawesi Barat	6	6	133
Maluku	11	11	42
Maluku Utara	10	10	383
Papua Barat	13	12	196
Papua	29	28	219
INDONESIA	514	493	20.407

Tabel 3.1.23 Jumlah Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Posyandu Lansia
	N	n	n
Aceh	23	23	3.383
Sumatera Utara	33	31	3.979
Sumatera Barat	19	19	2.762
Riau	12	11	1.392
Jambi	11	11	1.257
Sumatera Selatan	17	17	3.068
Bengkulu	10	10	1.456
Lampung	15	15	2.709
Bangka Belitung	7	7	475
Kepulauan Riau	7	7	744
DKI Jakarta	6	6	1.855
Jawa Barat	27	26	9.026
Jawa Tengah	35	35	15.706
DI Yogyakarta	5	3	2.329
Jawa Timur	38	37	17.535
Banten	8	8	1.923
Bali	9	9	1.401
Nusa Tenggara Barat	10	9	1.614
Nusa Tenggara Timur	22	21	2.687
Kalimantan Barat	14	14	1.320
Kalimantan Tengah	14	14	1.474
Kalimantan Selatan	13	13	1.654
Kalimantan Timur	10	10	1.386
Kalimantan Utara	5	5	303
Sulawesi Utara	15	15	1.098
Sulawesi Tengah	13	13	1.824
Sulawesi Selatan	24	23	4.465
Sulawesi Tenggara	17	17	1.352
Gorontalo	6	6	369
Sulawesi Barat	6	6	577
Maluku	11	11	1.259
Maluku Utara	10	10	809
Papua Barat	13	13	331
Papua	29	28	447
INDONESIA	514	503	93.969

Tabel 3.1.24 Jumlah Pos UKK di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Pos UKK
	N	n	n
Aceh	23	23	64
Sumatera Utara	33	33	189
Sumatera Barat	19	19	279
Riau	12	12	7.927
Jambi	11	11	108
Sumatera Selatan	17	17	318
Bengkulu	10	10	146
Lampung	15	15	151
Bangka Belitung	7	7	77
Kepulauan Riau	7	7	162
DKI Jakarta	6	6	73
Jawa Barat	27	27	782
Jawa Tengah	35	35	978
DI Yogyakarta	5	5	130
Jawa Timur	38	38	1.218
Banten	8	8	139
Bali	9	9	104
Nusa Tenggara Barat	10	10	355
Nusa Tenggara Timur	22	22	301
Kalimantan Barat	14	14	196
Kalimantan Tengah	14	14	124
Kalimantan Selatan	13	13	164
Kalimantan Timur	10	10	47
Kalimantan Utara	5	5	37
Sulawesi Utara	15	15	41
Sulawesi Tengah	13	13	91
Sulawesi Selatan	24	24	829
Sulawesi Tenggara	17	17	299
Gorontalo	6	6	20
Sulawesi Barat	6	6	126
Maluku	11	11	48
Maluku Utara	10	10	155
Papua Barat	13	13	11
Papua	29	29	167
INDONESIA	514	514	15.856

Tabel 3.1.25 Jumlah Pos Malaria Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Pos Malaria Desa
	N	n	n
Aceh	23	23	15
Sumatera Utara	33	33	0
Sumatera Barat	19	19	51
Riau	12	8	0
Jambi	11	11	27
Sumatera Selatan	17	17	1
Bengkulu	10	8	56
Lampung	15	14	2
Bangka Belitung	7	6	0
Kepulauan Riau	7	7	82
DKI Jakarta	6	6	0
Jawa Barat	27	23	37
Jawa Tengah	35	32	54
DI Yogyakarta	5	5	28
Jawa Timur	38	36	23
Banten	8	7	0
Bali	9	9	6
Nusa Tenggara Barat	10	10	93
Nusa Tenggara Timur	22	21	43
Kalimantan Barat	14	14	5
Kalimantan Tengah	14	14	117
Kalimantan Selatan	13	13	19
Kalimantan Timur	10	9	12
Kalimantan Utara	5	5	0
Sulawesi Utara	15	14	15
Sulawesi Tengah	13	12	57
Sulawesi Selatan	24	23	11
Sulawesi Tenggara	17	16	13
Gorontalo	6	6	0
Sulawesi Barat	6	6	20
Maluku	11	11	0
Maluku Utara	10	9	28
Papua Barat	13	12	36
Papua	29	28	98
INDONESIA	514	487	949

Tabel 3.1.26 Jumlah Posbindu PTM di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Posbindu PTM
	N	n	n
Aceh	23	23	3.278
Sumatera Utara	33	33	2.906
Sumatera Barat	19	19	1.641
Riau	12	12	1.190
Jambi	11	10	961
Sumatera Selatan	17	17	2.002
Bengkulu	10	10	1.361
Lampung	15	15	2.339
Bangka Belitung	7	7	596
Kepulauan Riau	7	7	486
DKI Jakarta	6	6	1.473
Jawa Barat	27	26	6.909
Jawa Tengah	35	35	5.564
DI Yogyakarta	5	5	804
Jawa Timur	38	38	7.002
Banten	8	8	1.120
Bali	9	9	616
Nusa Tenggara Barat	10	9	948
Nusa Tenggara Timur	22	20	1.521
Kalimantan Barat	14	14	793
Kalimantan Tengah	14	14	740
Kalimantan Selatan	13	13	1.375
Kalimantan Timur	10	10	1.860
Kalimantan Utara	5	5	166
Sulawesi Utara	15	15	893
Sulawesi Tengah	13	13	1.863
Sulawesi Selatan	24	24	2.638
Sulawesi Tenggara	17	17	1.742
Gorontalo	6	6	509
Sulawesi Barat	6	6	479
Maluku	11	11	376
Maluku Utara	10	10	697
Papua Barat	13	13	140
Papua	29	28	397
INDONESIA	514	508	57.385

**Tabel 3.1.27 Jumlah Pos Obat Desa di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan,
Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah dinkes	Dinkes valid	Pos Obat Desa
	N	n	n
Aceh	23	20	0
Sumatera Utara	33	33	137
Sumatera Barat	19	18	70
Riau	12	8	916
Jambi	11	9	7
Sumatera Selatan	17	16	0
Bengkulu	10	9	27
Lampung	15	12	125
Bangka Belitung	7	6	0
Kepulauan Riau	7	7	65
DKI Jakarta	6	6	0
Jawa Barat	27	24	472
Jawa Tengah	35	30	280
DI Yogyakarta	5	5	0
Jawa Timur	38	35	1.166
Banten	8	6	15
Bali	9	9	3
Nusa Tenggara Barat	10	10	0
Nusa Tenggara Timur	22	22	1
Kalimantan Barat	14	14	5
Kalimantan Tengah	14	12	8
Kalimantan Selatan	13	12	16
Kalimantan Timur	10	9	8
Kalimantan Utara	5	5	0
Sulawesi Utara	15	15	30
Sulawesi Tengah	13	11	0
Sulawesi Selatan	24	23	38
Sulawesi Tenggara	17	14	0
Gorontalo	6	6	0
Sulawesi Barat	6	6	2
Maluku	11	11	1
Maluku Utara	10	9	16
Papua Barat	13	13	0
Papua	29	27	36
INDONESIA	514	472	3.444

Tabel 3.1.28 Jumlah RS Umum Pemerintah dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	RS Pemerintah	Bekerjasama dengan BPJS	
	N	N	n	%
Aceh	23	23	21	94,4
Sumatera Utara	33	33	31	90,9
Sumatera Barat	19	19	18	100,0
Riau	12	12	12	94,4
Jambi	11	11	10	96,7
Sumatera Selatan	17	17	16	89,1
Bengkulu	10	10	10	100,0
Lampung	15	15	14	92,9
Bangka Belitung	7	7	7	89,3
Kepulauan Riau	7	7	7	100,0
DKI Jakarta	6	6	6	100,0
Jawa Barat	27	27	26	94,2
Jawa Tengah	35	35	34	100,0
DI Yogyakarta	5	5	5	100,0
Jawa Timur	38	38	36	97,7
Banten	8	8	8	96,9
Bali	9	9	9	91,7
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	21	20	100,0
Kalimantan Barat	14	14	14	94,0
Kalimantan Tengah	14	14	14	89,3
Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	10	95,0
Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
Sulawesi Utara	15	15	13	71,8
Sulawesi Tengah	13	13	13	92,3
Sulawesi Selatan	24	24	24	97,9
Sulawesi Tenggara	17	17	17	88,2
Gorontalo	6	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
Maluku	11	11	10	85,0
Maluku Utara	10	10	10	90,0
Papua Barat	13	13	9	97,2
Papua	29	29	21	90,5
INDONESIA	514	513	485	94,5

Tabel 3.1.29 Jumlah RS Khusus Pemerintah dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	RS khusus Pemerintah	RS khusus pemerintah bekerjasama dengan BPJSK	
	N	n	n	%
Aceh	23	23	1	100,00
Sumatera Utara	33	32	1	100,00
Sumatera Barat	19	19	3	100,00
Riau	12	12	2	100,00
Jambi	11	11	1	100,00
Sumatera Selatan	17	17	0	NA
Bengkulu	10	9	1	100,00
Lampung	15	15	1	100,00
Bangka Belitung	7	7	1	100,00
Kepulauan Riau	7	7	0	NA
DKI Jakarta	6	6	4	87,50
Jawa Barat	27	25	5	100,00
Jawa Tengah	35	33	7	100,00
DI Yogyakarta	5	5	2	75,00
Jawa Timur	38	35	6	96,67
Banten	8	7	0	NA
Bali	9	9	2	100,00
Nusa Tenggara Barat	10	10	1	50,00
Nusa Tenggara Timur	22	20	0	NA
Kalimantan Barat	14	13	2	100,00
Kalimantan Tengah	14	13	1	100,00
Kalimantan Selatan	13	13	1	100,00
Kalimantan Timur	10	9	2	100,00
Kalimantan Utara	5	5	0	NA
Sulawesi Utara	15	15	1	100,00
Sulawesi Tengah	13	9	0	NA
Sulawesi Selatan	24	23	1	100,00
Sulawesi Tenggara	17	17	1	100,00
Gorontalo	6	6	0	NA
Sulawesi Barat	6	5	0	NA
Maluku	11	9	1	100,00
Maluku Utara	10	8	0	NA
Papua Barat	13	13	0	NA
Papua	29	28	0	NA
INDONESIA	514	488	48	96,46

Tabel 3.1.30 Jumlah RSUD Swasta dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	RSU Swasta	RSU Swasta bekerjasama dengan BPJSK	
	N	n	n	%
Aceh	23	23	11	100,00
Sumatera Utara	33	33	21	77,90
Sumatera Barat	19	18	10	90,00
Riau	12	12	6	76,67
Jambi	11	11	6	46,15
Sumatera Selatan	17	17	8	75,00
Bengkulu	10	9	3	88,89
Lampung	15	15	11	87,36
Bangka Belitung	7	7	5	66,67
Kepulauan Riau	7	7	2	96,67
DKI Jakarta	6	6	5	77,92
Jawa Barat	27	27	22	90,46
Jawa Tengah	35	35	31	88,05
DI Yogyakarta	5	5	5	80,83
Jawa Timur	38	38	33	82,51
Banten	8	8	7	80,53
Bali	9	9	9	93,70
Nusa Tenggara Barat	10	10	5	88,57
Nusa Tenggara Timur	22	20	10	95,00
Kalimantan Barat	14	14	8	90,00
Kalimantan Tengah	14	12	1	60,00
Kalimantan Selatan	13	13	9	72,22
Kalimantan Timur	10	9	5	87,67
Kalimantan Utara	5	5	2	100,00
Sulawesi Utara	15	15	7	85,71
Sulawesi Tengah	13	9	4	75,00
Sulawesi Selatan	24	24	13	95,60
Sulawesi Tenggara	17	17	4	59,72
Gorontalo	6	6	1	100,00
Sulawesi Barat	6	6	3	100,00
Maluku	11	9	3	66,67
Maluku Utara	10	9	2	87,50
Papua Barat	13	13	1	75,00
Papua	29	28	3	83,33
INDONESIA	514	499	276	84,47

Tabel 3.1.31 Jumlah RS Khusus Swasta dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	RS Khusus Swasta	RS Khusus Swasta bekerjasama dengan BPJS	
	N	n	n	%
Aceh	23	23	2	100,0
Sumatera Utara	33	32	5	60,0
Sumatera Barat	19	19	8	81,3
Riau	12	12	4	75,0
Jambi	11	11	1	0,0
Sumatera Selatan	17	17	1	100,0
Bengkulu	10	9	1	0,0
Lampung	15	15	4	87,5
Bangka Belitung	7	7	1	50,0
Kepulauan Riau	7	7	1	0,0
DKI Jakarta	6	6	4	27,2
Jawa Barat	27	25	13	68,5
Jawa Tengah	35	34	15	73,3
DI Yogyakarta	5	5	3	43,3
Jawa Timur	38	37	19	49,0
Banten	8	8	7	48,0
Bali	9	9	3	20,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	2	25,0
Nusa Tenggara Timur	22	21	3	100,0
Kalimantan Barat	14	13	4	91,7
Kalimantan Tengah	14	12	0	.NA
Kalimantan Selatan	13	13	5	60,0
Kalimantan Timur	10	9	3	61,1
Kalimantan Utara	5	5	0	.NA
Sulawesi Utara	15	15	2	25,0
Sulawesi Tengah	13	9	0	.NA
Sulawesi Selatan	24	23	3	49,1
Sulawesi Tenggara	17	17	0	.NA
Gorontalo	6	6	0	NA
Sulawesi Barat	6	5	0	NA
Maluku	11	9	0	NA
Maluku Utara	10	8	0	NA
Papua Barat	13	13	0	NA
Papua	29	28	1	100,0
INDONESIA	514	492	115	60,9

Tabel 3.1.32 Jumlah Klinik Pratama dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	dinkes valid	Klinik Pratama	Klinik Pratama bekerjasama dengan BPJSK
	N	n	n
Aceh	23	229	103
Sumatera Utara	31	729	288
Sumatera Barat	19	225	49
Riau	12	567	104
Jambi	11	142	44
Sumatera Selatan	16	333	63
Bengkulu	10	72	17
Lampung	15	329	134
Bangka Belitung	7	52	24
Kepulauan Riau	7	242	118
DKI Jakarta	6	1.597	248
Jawa Barat	27	2.903	965
Jawa Tengah	35	1.247	474
DI Yogyakarta	5	218	120
Jawa Timur	38	1.414	611
Banten	8	1.144	325
Bali	9	136	83
Nusa Tenggara Barat	10	101	27
Nusa Tenggara Timur	22	108	55
Kalimantan Barat	13	126	61
Kalimantan Tengah	14	142	26
Kalimantan Selatan	13	173	42
Kalimantan Timur	10	305	119
Kalimantan Utara	5	28	18
Sulawesi Utara	15	43	27
Sulawesi Tengah	12	83	11
Sulawesi Selatan	24	273	183
Sulawesi Tenggara	17	69	49
Gorontalo	6	30	24
Sulawesi Barat	5	18	13
Maluku	9	15	1
Maluku Utara	9	23	8
Papua Barat	13	33	15
Papua	28	83	23
INDONESIA	504	13.232	4.472

Tabel 3.1.33 Jumlah Klinik Utama dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Klinik Utama	Bekerjasama dengan BPJSK
	N	n	n
Aceh	22	12	4
Sumatera Utara	30	16	5
Sumatera Barat	18	29	10
Riau	11	75	23
Jambi	10	8	3
Sumatera Selatan	17	23	10
Bengkulu	9	3	1
Lampung	15	19	2
Bangka Belitung	7	9	4
Kepulauan Riau	7	21	9
DKI Jakarta	6	355	11
Jawa Barat	25	326	30
Jawa Tengah	34	194	19
DI Yogyakarta	5	44	10
Jawa Timur	37	203	22
Banten	8	77	6
Bali	9	48	17
Nusa Tenggara Barat	10	23	1
Nusa Tenggara Timur	19	3	0
Kalimantan Barat	11	6	3
Kalimantan Tengah	11	12	0
Kalimantan Selatan	13	27	6
Kalimantan Timur	9	22	3
Kalimantan Utara	4	1	1
Sulawesi Utara	15	6	3
Sulawesi Tengah	10	21	1
Sulawesi Selatan	23	421	32
Sulawesi Tenggara	17	10	6
Gorontalo	6	2	1
Sulawesi Barat	5	3	2
Maluku	9	6	4
Maluku Utara	9	3	1
Papua Barat	13	4	2
Papua	27	19	7
INDONESIA	481	2.051	259

Tabel 3.1.34 Jumlah Praktek Mandiri Dokter Spesialis dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Praktek Mandiri Dokter Spesialis	Praktek Mandiri Dokter Spesialis bekerjasama dengan BPJSK
		N	n
Aceh	21	146	3
Sumatera Utara	31	377	0
Sumatera Barat	17	247	3
Riau	10	77	0
Jambi	11	54	1
Sumatera Selatan	16	95	6
Bengkulu	9	32	8
Lampung	15	435	79
Bangka Belitung	7	24	3
Kepulauan Riau	7	271	1
DKI Jakarta	6	439	0
Jawa Barat	25	1.283	71
Jawa Tengah	35	2.353	25
DI Yogyakarta	5	113	0
Jawa Timur	37	2.500	297
Banten	7	1.191	0
Bali	9	411	89
Nusa Tenggara Barat	9	88	4
Nusa Tenggara Timur	21	112	1
Kalimantan Barat	13	66	19
Kalimantan Tengah	12	80	17
Kalimantan Selatan	11	338	28
Kalimantan Timur	9	68	0
Kalimantan Utara	5	46	0
Sulawesi Utara	15	51	11
Sulawesi Tengah	12	120	2
Sulawesi Selatan	23	193	2
Sulawesi Tenggara	17	34	1
Gorontalo	6	99	0
Sulawesi Barat	5	10	1
Maluku	11	76	0
Maluku Utara	10	38	20
Papua Barat	13	13	1
Papua	27	52	0
INDONESIA	487	11.532	693

Tabel 3.1.35 Jumlah Praktek Mandiri Dokter Umum dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Praktek Mandiri Dokter Umum	Praktek Mandiri Dokter Umum bekerjasama dengan BPJSK
		N	n
Aceh	23	442	25
Sumatera Utara	31	1.489	63
Sumatera Barat	18	849	80
Riau	12	852	22
Jambi	11	394	40
Sumatera Selatan	17	562	114
Bengkulu	10	334	111
Lampung	15	1.106	225
Bangka Belitung	7	191	22
Kepulauan Riau	7	636	12
DKI Jakarta	6	2.324	15
Jawa Barat	27	6.206	443
Jawa Tengah	34	6.909	1.038
DI Yogyakarta	5	311	117
Jawa Timur	38	7.493	901
Banten	8	2.646	19
Bali	9	1.187	403
Nusa Tenggara Barat	9	569	34
Nusa Tenggara Timur	22	264	90
Kalimantan Barat	14	648	68
Kalimantan Tengah	13	347	88
Kalimantan Selatan	13	1.022	125
Kalimantan Timur	10	376	109
Kalimantan Utara	5	104	30
Sulawesi Utara	15	463	103
Sulawesi Tengah	13	237	28
Sulawesi Selatan	24	1.043	203
Sulawesi Tenggara	17	123	40
Gorontalo	6	164	41
Sulawesi Barat	5	71	52
Maluku	11	92	11
Maluku Utara	10	86	52
Papua Barat	13	57	25
Papua	28	182	51
INDONESIA	506	39.779	4.800

Tabel 3.1.36 Jumlah Praktek Mandiri Dokter Gigi dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Praktek Mandiri Dokter Gigi	Praktek Mandiri Dokter Gigi bekerjasama dengan BPJSK
	N	n	n
Aceh	23	119	3
Sumatera Utara	31	341	6
Sumatera Barat	19	420	20
Riau	11	319	19
Jambi	11	132	7
Sumatera Selatan	16	148	15
Bengkulu	9	42	16
Lampung	15	310	32
Bangka Belitung	7	45	3
Kepulauan Riau	7	139	1
DKI Jakarta	6	1.488	0
Jawa Barat	25	950	68
Jawa Tengah	35	1.450	143
DI Yogyakarta	5	205	37
Jawa Timur	37	2.474	296
Banten	7	777	2
Bali	9	392	30
Nusa Tenggara Barat	9	136	7
Nusa Tenggara Timur	22	87	23
Kalimantan Barat	13	71	12
Kalimantan Tengah	13	69	0
Kalimantan Selatan	13	304	36
Kalimantan Timur	10	149	49
Kalimantan Utara	5	24	8
Sulawesi Utara	15	52	18
Sulawesi Tengah	12	63	4
Sulawesi Selatan	23	271	79
Sulawesi Tenggara	17	51	7
Gorontalo	6	22	4
Sulawesi Barat	5	36	24
Maluku	10	41	1
Maluku Utara	9	13	9
Papua Barat	13	21	2
Papua	28	57	17
INDONESIA	496	11.218	998

Tabel 3.1.37 Jumlah Praktek Mandiri Bidan dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Praktek Mandiri Bidan	Praktek Mandiri Bidan bekerjasama dengan BPJS
	N	n	n
Aceh	23	696	191
Sumatera Utara	31	5.527	299
Sumatera Barat	19	1.296	11
Riau	12	1.269	20
Jambi	11	653	172
Sumatera Selatan	17	997	34
Bengkulu	10	396	66
Lampung	15	1.595	62
Bangka Belitung	7	201	99
Kepulauan Riau	7	984	6
DKI Jakarta	6	726	0
Jawa Barat	25	6.599	175
Jawa Tengah	32	6.485	393
DI Yogyakarta	5	358	0
Jawa Timur	36	8.953	451
Banten	8	1.508	61
Bali	9	912	21
Nusa Tenggara Barat	9	366	4
Nusa Tenggara Timur	21	48	22
Kalimantan Barat	14	512	41
Kalimantan Tengah	12	339	145
Kalimantan Selatan	13	390	67
Kalimantan Timur	10	516	19
Kalimantan Utara	5	61	14
Sulawesi Utara	14	58	2
Sulawesi Tengah	12	81	0
Sulawesi Selatan	24	416	54
Sulawesi Tenggara	17	99	41
Gorontalo	6	30	10
Sulawesi Barat	4	39	22
Maluku	10	28	0
Maluku Utara	9	19	0
Papua Barat	13	7	0
Papua	28	124	4
INDONESIA	494	42.288	2.506

Tabel 3.1.38 Jumlah Praktek Mandiri Perawat dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Praktek Mandiri Perawat	Praktek Mandiri Perawat bekerjasama dengan BPJSK
	N	n	n
Aceh	17	159	0
Sumatera Utara	30	382	0
Sumatera Barat	18	132	0
Riau	11	160	0
Jambi	11	225	6
Sumatera Selatan	13	68	1
Bengkulu	7	31	0
Lampung	14	89	0
Bangka Belitung	7	1	0
Kepulauan Riau	6	3	0
DKI Jakarta	6	8	0
Jawa Barat	22	900	18
Jawa Tengah	28	732	0
DI Yogyakarta	4	93	0
Jawa Timur	31	3.950	607
Banten	5	106	0
Bali	9	146	0
Nusa Tenggara Barat	9	92	0
Nusa Tenggara Timur	19	3	0
Kalimantan Barat	13	263	0
Kalimantan Tengah	9	66	0
Kalimantan Selatan	12	17	0
Kalimantan Timur	8	22	0
Kalimantan Utara	5	4	0
Sulawesi Utara	14	41	0
Sulawesi Tengah	9	25	0
Sulawesi Selatan	24	169	14
Sulawesi Tenggara	17	4	0
Gorontalo	6	5	0
Sulawesi Barat	4	3	1
Maluku	9	5	0
Maluku Utara	9	1	0
Papua Barat	13	0	0
Papua	28	9	3
INDONESIA	447	7.914	650

Tabel 3.1.39 Jumlah Laboratorium Klinik Mandiri dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Laboratorium Klinik Mandiri	Laboratorium Klinik Mandiri bekerjasama dengan BPJSK
		N	n
Aceh	22	8	1
Sumatera Utara	32	31	7
Sumatera Barat	19	17	3
Riau	11	18	2
Jambi	11	60	0
Sumatera Selatan	17	17	2
Bengkulu	9	25	8
Lampung	15	22	1
Bangka Belitung	7	3	2
Kepulauan Riau	6	3	1
DKI Jakarta	6	110	7
Jawa Barat	26	239	18
Jawa Tengah	35	199	58
DI Yogyakarta	5	24	8
Jawa Timur	38	295	64
Banten	7	72	4
Bali	9	19	4
Nusa Tenggara Barat	10	16	5
Nusa Tenggara Timur	21	60	13
Kalimantan Barat	14	22	4
Kalimantan Tengah	12	23	5
Kalimantan Selatan	13	28	5
Kalimantan Timur	9	17	4
Kalimantan Utara	5	4	0
Sulawesi Utara	15	13	2
Sulawesi Tengah	10	5	0
Sulawesi Selatan	24	18	3
Sulawesi Tenggara	17	11	11
Gorontalo	6	6	0
Sulawesi Barat	5	2	0
Maluku	9	3	1
Maluku Utara	9	9	5
Papua Barat	13	19	12
Papua	28	36	2
INDONESIA	495	1.454	262

Tabel 3.1.40 Jumlah Laboratorium Klinik Lain dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Laboratorium Klinik Lain	Laboratorium Klinik Lain bekerjasama dengan BPJSK
	n	n	n
Aceh	20	1	0
Sumatera Utara	32	30	25
Sumatera Barat	18	5	3
Riau	11	51	0
Jambi	10	2	0
Sumatera Selatan	16	66	1
Bengkulu	10	35	14
Lampung	15	6	4
Bangka Belitung	7	0	0
Kepulauan Riau	6	29	26
DKI Jakarta	4	0	0
Jawa Barat	20	41	1
Jawa Tengah	29	171	91
DI Yogyakarta	5	42	0
Jawa Timur	33	136	121
Banten	5	2	0
Bali	9	71	66
Nusa Tenggara Barat	10	2	1
Nusa Tenggara Timur	20	48	48
Kalimantan Barat	13	61	58
Kalimantan Tengah	12	14	14
Kalimantan Selatan	12	2	0
Kalimantan Timur	7	2	1
Kalimantan Utara	5	2	1
Sulawesi Utara	15	1	0
Sulawesi Tengah	9	38	37
Sulawesi Selatan	23	53	51
Sulawesi Tenggara	17	31	31
Gorontalo	6	2	2
Sulawesi Barat	5	0	0
Maluku	9	2	1
Maluku Utara	9	18	15
Papua Barat	13	6	3
Papua	27	35	9
INDONESIA	462	1.005	624

Tabel 3.1.41 Jumlah Apotek dan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinas valid	Apotek	Dinas valid	Apotek bekerjasama dengan BPJSK	Dinas Valid	Apotek PRB
	N	n	N	n	N	n
Aceh	23	388	14	11	19	18
Sumatera Utara	32	1.843	21	118	29	20
Sumatera Barat	18	598	12	21	17	35
Riau	12	695	7	56	6	44
Jambi	11	405	7	3	10	8
Sumatera Selatan	16	548	10	47	13	29
Bengkulu	10	279	6	16	7	4
Lampung	14	423	10	2	12	3
Bangka Belitung	7	187	5	6	7	5
Kepulauan Riau	7	317	6	19	6	15
DKI Jakarta	6	2.224	4	23	6	40
Jawa Barat	27	6.183	14	322	16	69
Jawa Tengah	35	3.848	21	169	24	247
DI Yogyakarta	5	507	5	119	3	7
Jawa Timur	37	3.992	23	217	28	129
Banten	7	1.045	5	46	6	33
Bali	9	704	4	184	5	23
Nusa Tenggara Barat	10	480	5	3	6	2
Nusa Tenggara Timur	21	341	15	21	19	21
Kalimantan Barat	14	308	9	22	11	7
Kalimantan Tengah	14	226	5	6	8	2
Kalimantan Selatan	13	473	10	21	12	21
Kalimantan Timur	10	727	6	16	9	21
Kalimantan Utara	5	89	4	5	4	4
Sulawesi Utara	15	254	9	110	12	101
Sulawesi Tengah	13	482	8	6	9	6
Sulawesi Selatan	24	1.525	16	17	20	38
Sulawesi Tenggara	17	415	13	13	16	8
Gorontalo	6	158	4	11	4	0
Sulawesi Barat	6	109	3	2	4	2
Maluku	10	149	7	1	10	9
Maluku Utara	10	153	8	28	8	12
Papua Barat	13	243	12	11	13	9
Papua	27	209	22	16	24	11
INDONESIA	504	30.527	330	1.688	403	1.003

Tabel 3.1.42 Jumlah Bidan Desa di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Bidan Desa	Bidan Desa per kabupaten/kota			
	N	N	rerata	SD	min	maks
Aceh	21	4.764	227	167	17	623
Sumatera Utara	33	8.174	248	228	0	896
Sumatera Barat	18	1.920	107	79	0	267
Riau	11	1.744	159	109	0	342
Jambi	11	1.681	153	93	0	303
Sumatera Selatan	17	4.180	246	149	61	508
Bengkulu	10	1.002	100	66	0	220
Lampung	15	2.632	175	144	0	534
Bangka Belitung	6	359	60	17	39	79
Kepulauan Riau	7	385	55	20	18	79
DKI Jakarta	5	0	0	0	0	0
Jawa Barat	26	6.560	252	253	0	1.058
Jawa Tengah	35	8.604	246	137	0	479
DI Yogyakarta	5	376	75	47	0	128
Jawa Timur	38	7.949	209	136	0	502
Banten	7	1.455	208	209	0	524
Bali	9	785	87	73	0	221
Nusa Tenggara Barat	9	1.741	193	174	0	571
Nusa Tenggara Timur	22	3.448	157	98	42	409
Kalimantan Barat	14	2.005	143	98	0	288
Kalimantan Tengah	14	1.480	106	69	0	270
Kalimantan Selatan	13	1.648	127	87	5	293
Kalimantan Timur	9	738	82	66	0	193
Kalimantan Utara	5	204	41	52	0	108
Sulawesi Utara	14	843	60	46	0	130
Sulawesi Tengah	12	2.028	169	89	67	337
Sulawesi Selatan	23	3.460	150	144	0	761
Sulawesi Tenggara	16	1.598	100	62	0	204
Gorontalo	6	835	139	62	82	236
Sulawesi Barat	6	1.146	191	159	69	484
Maluku	11	897	82	67	0	233
Maluku Utara	10	1.166	117	53	54	212
Papua Barat	13	797	61	86	0	275
Papua	25	1.343	54	71	0	247
INDONESIA	496	77.947	157	147	0	1.058

Tabel 3.1.43 Proporsi Jumlah Desa dengan Bidan Desa Menetap di Desa Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Jumlah Desa	Desa dengan bidan desa	
	N	n	n	%
Aceh	21	5.756	3.524	61,2
Sumatera Utara	33	5.445	5.161	94,8
Sumatera Barat	18	2.344	1.534	65,4
Riau	11	1.657	1.591	96,0
Jambi	11	1.408	1.368	97,2
Sumatera Selatan	16	3.066	2.474	80,7
Bengkulu	10	1.351	806	59,7
Lampung	14	2.455	1.701	69,3
Bangka Belitung	6	309	329	106,5
Kepulauan Riau	7	290	247	85,2
DKI Jakarta	4	0	0	0,0
Jawa Barat	25	5.353	4.535	84,7
Jawa Tengah	34	7.726	6.981	90,4
DI Yogyakarta	3	392	146	37,2
Jawa Timur	38	7.834	6.454	82,4
Banten	7	1.254	1.235	98,5
Bali	8	636	312	49,1
Nusa Tenggara Barat	9	1.013	949	93,7
Nusa Tenggara Timur	17	3.064	1.488	48,6
Kalimantan Barat	14	2.035	1.395	68,6
Kalimantan Tengah	11	1.463	755	51,6
Kalimantan Selatan	12	1.882	1.460	77,6
Kalimantan Timur	7	842	524	62,2
Kalimantan Utara	5	446	197	44,2
Sulawesi Utara	13	1.695	413	24,4
Sulawesi Tengah	13	1.850	1.720	93,0
Sulawesi Selatan	23	2.325	2.269	97,6
Sulawesi Tenggara	16	1.948	1.265	64,9
Gorontalo	6	685	564	82,3
Sulawesi Barat	6	589	579	98,3
Maluku	11	1.087	624	57,4
Maluku Utara	10	1.064	833	78,3
Papua Barat	12	1.710	327	19,1
Papua	25	4.931	552	11,2
INDONESIA	476	75.905	54.312	68,6

Tabel 3.1.44 Proporsi Jumlah Desa Tanpa Bidan Desa di Wilayah Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Dinkes valid	Jumlah Desa	Desa tanpa bidan desa	
	N	n	n	%
Aceh	21	5.756	1.142	19,8
Sumatera Utara	32	5.445	622	11,4
Sumatera Barat	18	2.344	571	24,4
Riau	11	1.657	47	2,8
Jambi	11	1.408	143	10,2
Sumatera Selatan	16	3.066	413	13,5
Bengkulu	10	1.351	467	34,6
Lampung	15	2.455	309	12,6
Bangka Belitung	6	309	19	6,1
Kepulauan Riau	7	290	111	38,3
DKI Jakarta	4	0	0	NA
Jawa Barat	26	5.353	208	3,9
Jawa Tengah	35	7.726	214	2,8
DI Yogyakarta	5	392	17	4,3
Jawa Timur	38	7.834	731	9,3
Banten	7	1.254	18	1,4
Bali	8	636	73	11,5
Nusa Tenggara Barat	9	1.013	53	5,2
Nusa Tenggara Timur	19	3.064	808	26,4
Kalimantan Barat	14	2.035	131	6,4
Kalimantan Tengah	12	1.463	237	16,2
Kalimantan Selatan	12	1.882	184	9,8
Kalimantan Timur	7	842	185	22,0
Kalimantan Utara	5	446	256	57,4
Sulawesi Utara	13	1.695	845	49,9
Sulawesi Tengah	13	1.850	103	5,6
Sulawesi Selatan	23	2.325	213	9,2
Sulawesi Tenggara	16	1.948	264	13,6
Gorontalo	6	685	152	22,2
Sulawesi Barat	6	589	31	5,3
Maluku	10	1.087	87	8,0
Maluku Utara	9	1.064	190	17,9
Papua Barat	12	1.710	978	57,2
Papua	26	4.931	2.191	44,4
INDONESIA	482	75.905	12.013	17,7

3.2 INDIKATOR KESEHATAN

Tabel 3.2.1 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Laboratorium kesehatan lingkungan		laboratorium pemeriksaan kualitas air minum	
		n	%	n	%
Aceh	23	13	56,5	12	52,2
Sumatera Utara	33	8	24,2	8	24,2
Sumatera Barat	19	8	42,1	10	52,6
Riau	12	4	33,3	6	50,0
Jambi	11	1	9,1	5	45,5
Sumatera Selatan	17	8	47,1	10	58,8
Bengkulu	10	2	20,0	5	50,0
Lampung	15	0	0,0	0	0,0
Kep. Bangka Belitung	7	4	57,1	5	71,4
Kep. Riau	7	2	28,6	2	28,6
DKI Jakarta	6	1	16,7	2	33,3
Jawa Barat	27	15	55,6	20	74,1
Jawa Tengah	35	25	71,4	30	85,7
DI Yogyakarta	5	3	60,0	5	100,0
Jawa Timur	38	27	71,1	29	76,3
Banten	8	6	75,0	6	75,0
Bali	9	7	77,8	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	5	50,0	6	60,0
Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5	13	59,1
Kalimantan Barat	14	4	28,6	3	21,4
Kalimantan Tengah	14	6	42,9	7	50,0
Kalimantan Selatan	13	4	30,8	6	46,2
Kalimantan Timur	10	3	30,0	6	60,0
Kalimantan Utara	5	0	0,0	3	60,0
Sulawesi Utara	15	1	6,7	1	6,7
Sulawesi Tengah	13	4	30,8	5	38,5
Sulawesi Selatan	24	16	66,7	21	87,5
Sulawesi Tenggara	17	2	11,8	4	23,5
Gorontalo	6	2	33,3	5	83,3
Sulawesi Barat	6	1	16,7	1	16,7
Maluku	11	2	18,2	3	27,3
Maluku Utara	10	3	30,0	3	30,0
Papua Barat	13	2	15,4	3	23,1
Papua	29	2	6,9	3	10,3
INDONESIA	514	203	39,5	256	49,8

Tabel 3.2.2 Distribusi Kabupaten/Kota yang Menerbitkan Sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Menerbitkan sertifikasi tempa pengelolaan makanan (TPM)		Tidak menerbitkan sertifikasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	
		n	%	n	%
Aceh	23	13	56,5	10	43,5
Sumatera Utara	33	13	39,4	20	60,6
Sumatera Barat	19	16	84,2	3	15,8
Riau	12	10	83,3	2	16,7
Jambi	11	7	63,6	4	36,4
Sumatera Selatan	17	13	76,5	4	23,5
Bengkulu	10	6	60,0	4	40,0
Lampung	15	12	80,0	3	20,0
Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	0	0,0
Kep. Riau	7	7	100,0	0	0,0
DKI Jakarta	6	3	50,0	3	50,0
Jawa Barat	27	24	88,9	3	11,1
Jawa Tengah	35	35	100,0	0	0,0
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	35	92,1	3	7,9
Banten	8	7	87,5	1	12,5
Bali	9	9	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	9	90,0	1	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	8	36,4	14	63,6
Kalimantan Barat	14	12	85,7	2	14,3
Kalimantan Tengah	14	9	64,3	5	35,7
Kalimantan Selatan	13	9	69,2	4	30,8
Kalimantan Timur	10	7	70,0	3	30,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0	1	20,0
Sulawesi Utara	15	13	86,7	2	13,3
Sulawesi Tengah	13	9	69,2	4	30,8
Sulawesi Selatan	24	19	79,2	5	20,8
Sulawesi Tenggara	17	8	47,1	9	52,9
Gorontalo	6	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Barat	6	4	66,7	2	33,3
Maluku	11	3	27,3	8	72,7
Maluku Utara	10	7	70,0	3	30,0
Papua Barat	13	7	53,8	6	46,2
Papua	29	12	41,4	17	58,6
INDONESIA	514	367	71,4	147	28,6

Tabel 3.2.3 Distribusi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Lingkungan ke Rumah Sakit Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan ke Rumah Sakit		Tidak melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan ke Rumah Sakit	
		n	%	n	%
Aceh	23	18	78,3	5	21,7
Sumatera Utara	33	20	60,6	13	39,4
Sumatera Barat	19	17	89,5	2	10,5
Riau	12	12	100,0	0	0,0
Jambi	11	9	81,8	2	18,2
Sumatera Selatan	17	7	41,2	10	58,8
Bengkulu	10	7	70,0	3	30,0
Lampung	15	12	80,0	3	20,0
Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0	0	0,0
Kep. Riau	7	7	100,0	0	0,0
DKI Jakarta	6	6	100,0	0	0,0
Jawa Barat	27	24	88,9	3	11,1
Jawa Tengah	35	32	91,4	3	8,6
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	31	81,6	7	18,4
Banten	8	7	87,5	1	12,5
Bali	9	7	77,8	2	22,2
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	10	45,5	12	54,5
Kalimantan Barat	14	9	64,3	5	35,7
Kalimantan Tengah	14	10	71,4	4	28,6
Kalimantan Selatan	13	6	46,2	7	53,8
Kalimantan Timur	10	9	90,0	1	10,0
Kalimantan Utara	5	5	100,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	10	66,7	5	33,3
Sulawesi Tengah	13	2	15,4	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	13	54,2	11	45,8
Sulawesi Tenggara	17	8	47,1	9	52,9
Gorontalo	6	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	5	45,5	6	54,5
Maluku Utara	10	4	40,0	6	60,0
Papua Barat	13	4	30,8	9	69,2
Papua	29	7	24,1	22	75,9
INDONESIA	514	345	67,1	169	32,9

Tabel 3.2.4 Distribusi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Air Minum di PDAM dan Menerima Hasil Pengawasan Kualitas Air Minum dari PDAM Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang terdapat PDAM	Melaksanakan pengawasan air minum di PDAM		Menerima hasil pengawasan kualitas air minum dari PDAM	
			n	%	n	%
Aceh	23	21	11	47,8	6	26,1
Sumatera Utara	33	30	17	51,5	8	24,2
Sumatera Barat	19	19	14	73,7	11	57,9
Riau	12	10	9	75,0	5	41,7
Jambi	11	11	9	81,8	6	54,5
Sumatera Selatan	17	16	11	64,7	8	47,1
Bengkulu	10	9	4	40,0	5	50,0
Lampung	15	9	4	26,7	1	6,7
Kep. Bangka Belitung	7	7	7	100,0	5	71,4
Kep. Riau	7	6	6	85,7	1	14,3
DKI Jakarta	6	6	2	33,3	2	33,3
Jawa Barat	27	27	22	81,5	18	66,7
Jawa Tengah	35	35	30	85,7	27	77,1
DI Yogyakarta	5	5	5	100,0	4	80,0
Jawa Timur	38	38	37	97,4	32	84,2
Banten	8	8	5	62,5	5	62,5
Bali	9	9	8	88,9	6	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,0	4	40,0
Nusa Tenggara Timur	22	18	10	45,5	9	40,9
Kalimantan Barat	14	13	12	85,7	6	42,9
Kalimantan Tengah	14	14	11	78,6	10	71,4
Kalimantan Selatan	13	13	8	61,5	9	69,2
Kalimantan Timur	10	8	8	80,0	4	40,0
Kalimantan Utara	5	5	4	80,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	14	10	66,7	6	40,0
Sulawesi Tengah	13	12	7	53,8	5	38,5
Sulawesi Selatan	24	24	18	75,0	12	50,0
Sulawesi Tenggara	17	13	11	64,7	3	17,6
Gorontalo	6	6	5	83,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	6	3	50,0	1	16,7
Maluku	11	10	4	36,4	1	9,1
Maluku Utara	10	9	8	80,0	5	50,0
Papua Barat	13	10	3	23,1	1	7,7
Papua	29	18	9	31,0	6	20,7
INDONESIA	514	469	341	66,3	240	46,7

Tabel 3.2.5 Distribusi Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum di Depot Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang memiliki depot	Melakukan pengawasan kualitas air minum di depot air minum		Tidak melakukan pengawasan kualitas air minum di depot air minum	
			n	%	n	%
Aceh	23	23	22	95,7	1	4,3
Sumatera Utara	33	33	32	97,0	1	3,0
Sumatera Barat	19	19	19	100,0	0	0,0
Riau	12	12	11	91,7	1	8,3
Jambi	11	11	10	90,9	1	9,1
Sumatera Selatan	17	17	16	94,1	1	5,9
Bengkulu	10	10	8	80,0	2	20,0
Lampung	15	15	14	93,3	1	6,7
Kep. Bangka Belitung	7	7	7	100,0	0	0,0
Kep. Riau	7	7	7	100,0	0	0,0
DKI Jakarta	6	6	5	83,3	1	16,7
Jawa Barat	27	27	27	100,0	0	0,0
Jawa Tengah	35	35	34	97,1	1	2,9
DI Yogyakarta	5	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	38	38	100,0	0	0,0
Banten	8	8	8	100,0	0	0,0
Bali	9	9	9	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	22	22	100,0	0	0,0
Kalimantan Barat	14	14	12	85,7	2	14,3
Kalimantan Tengah	14	14	14	100,0	0	0,0
Kalimantan Selatan	13	13	12	92,3	1	7,7
Kalimantan Timur	10	10	9	90,0	1	10,0
Kalimantan Utara	5	5	5	100,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	15	15	100,0	0	0,0
Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0	0	0,0
Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0	0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	17	17	100,0	0	0,0
Gorontalo	6	6	6	100,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	6	5	83,3	1	16,7
Maluku	11	11	8	72,7	3	27,3
Maluku Utara	10	10	10	100,0	0	0,0
Papua Barat	13	12	10	76,9	2	15,4
Papua	29	25	17	58,6	8	27,6
INDONESIA	514	509	481	93,6	28	5,4

Tabel 3.2.6 Distribusi Kabupaten/Kota yang Memiliki Peralatan Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Memiliki water test kit		Memiliki food contamination kit		Memiliki alat ukur kualitas udara	
		n	%	n	%	n	%
Aceh	23	21	91,3	21	91,3	19	82,6
Sumatera Utara	33	24	72,7	19	57,6	14	42,4
Sumatera Barat	19	15	78,9	13	68,4	11	57,9
Riau	12	9	75,0	9	75,0	6	50,0
Jambi	11	10	90,9	10	90,9	10	90,9
Sumatera Selatan	17	10	58,8	11	64,7	7	41,2
Bengkulu	10	6	60,0	6	60,0	6	60,0
Lampung	15	12	80,0	10	66,7	10	66,7
Kep. Bangka Belitung	7	4	57,1	2	28,6	1	14,3
Kep. Riau	7	5	71,4	5	71,4	6	85,7
DKI Jakarta	6	1	16,7	5	83,3	2	33,3
Jawa Barat	27	23	85,2	24	88,9	22	81,5
Jawa Tengah	35	33	94,3	31	88,6	32	91,4
DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	100,0	4	80,0
Jawa Timur	38	32	84,2	34	89,5	25	65,8
Banten	8	8	100,0	8	100,0	6	75,0
Bali	9	7	77,8	6	66,7	1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	4	40,0	6	60,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	19	86,4	17	77,3	16	72,7
Kalimantan Barat	14	9	64,3	5	35,7	1	7,1
Kalimantan Tengah	14	13	92,9	12	85,7	12	85,7
Kalimantan Selatan	13	11	84,6	10	76,9	9	69,2
Kalimantan Timur	10	10	100,0	9	90,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0	2	40,0	2	40,0
Sulawesi Utara	15	9	60,0	4	26,7	3	20,0
Sulawesi Tengah	13	11	84,6	9	69,2	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	18	75,0	18	75,0	13	54,2
Sulawesi Tenggara	17	8	47,1	8	47,1	3	17,6
Gorontalo	6	5	83,3	6	100,0	5	83,3
Sulawesi Barat	6	4	66,7	4	66,7	4	66,7
Maluku	11	6	54,5	5	45,5	1	9,1
Maluku Utara	10	7	70,0	6	60,0	6	60,0
Papua Barat	13	6	46,2	4	30,8	5	38,5
Papua	29	11	37,9	8	27,6	3	10,3
INDONESIA	514	380	73,9	352	68,5	287	55,8

Tabel 3.2.7 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Desa/kelurahan yang melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				
		n	mean	min	max	SD
Aceh	23	1.605	69,78	0	475	108,07
Sumatera Utara	33	1.499	45,42	0	369	72,51
Sumatera Barat	19	839	44,16	0	132	34,71
Riau	12	1.138	103,45	3	246	80,02
Jambi	11	476	43,27	0	113	47,15
Sumatera Selatan	17	1.306	81,63	0	270	98,68
Bengkulu	10	692	69,20	0	220	62,77
Lampung	15	910	60,67	0	225	76,66
Kep. Bangka Belitung	7	333	47,57	1	81	25,56
Kep. Riau	7	175	25,00	0	77	30,01
DKI Jakarta	6	246	41,00	6	65	23,43
Jawa Barat	27	3.454	138,16	0	915	198,21
Jawa Tengah	35	4.093	120,38	0	401	134,88
DI Yogyakarta	5	337	67,40	23	144	49,22
Jawa Timur	38	2.996	80,97	0	474	129,29
Banten	8	657	109,50	0	311	143,59
Bali	9	359	39,89	0	112	40,88
Nusa Tenggara Barat	10	298	29,80	0	122	36,95
Nusa Tenggara Timur	22	1.747	83,19	0	273	77,84
Kalimantan Barat	14	497	35,50	0	156	48,85
Kalimantan Tengah	14	468	39,00	0	147	56,66
Kalimantan Selatan	13	1.089	83,77	0	188	67,44
Kalimantan Timur	10	288	28,80	0	110	45,13
Kalimantan Utara	5	146	29,20	0	74	38,25
Sulawesi Utara	15	681	45,40	0	137	42,77
Sulawesi Tengah	13	368	28,31	0	153	44,63
Sulawesi Selatan	24	1.594	66,42	0	364	83,79
Sulawesi Tenggara	17	477	28,06	0	127	41,44
Gorontalo	6	234	39,00	0	114	47,48
Sulawesi Barat	6	215	35,83	0	97	43,79
Maluku	11	365	33,18	0	161	47,45
Maluku Utara	10	399	39,90	0	95	34,55
Papua Barat	13	111	8,54	0	81	22,85
Papua	29	798	29,56	0	250	60,41
INDONESIA	514	30.890	61,66	0	915	92,61

Tabel 3.2.8 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Desa *Open Defecation Free* (ODF) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF)				SD
		n	mean	min	max	
Aceh	23	397	18,05	0	90	22,70
Sumatera Utara	33	271	8,47	0	36	11,02
Sumatera Barat	19	255	13,42	0	47	16,88
Riau	12	286	26,00	0	73	26,62
Jambi	11	295	26,82	0	57	17,54
Sumatera Selatan	17	493	35,21	0	119	34,26
Bengkulu	10	185	18,50	2	34	12,27
Lampung	15	897	59,80	0	227	71,71
Kep. Bangka Belitung	7	161	23,00	11	39	11,87
Kep. Riau	7	78	11,14	1	20	7,24
DKI Jakarta	6	20	3,33	0	7	2,94
Jawa Barat	27	1.208	44,74	0	173	52,29
Jawa Tengah	35	3.447	104,45	0	327	87,35
DI Yogyakarta	5	437	87,40	45	144	35,91
Jawa Timur	38	3.469	93,76	0	319	83,67
Banten	8	215	26,88	6	97	30,44
Bali	9	189	21,00	6	40	14,17
Nusa Tenggara Barat	10	572	57,20	11	102	34,15
Nusa Tenggara Timur	22	1.159	55,19	0	217	50,35
Kalimantan Barat	14	159	11,36	0	69	18,36
Kalimantan Tengah	14	307	21,93	0	55	18,07
Kalimantan Selatan	13	425	32,69	0	82	26,81
Kalimantan Timur	10	138	13,80	1	43	11,74
Kalimantan Utara	5	67	13,40	0	38	15,87
Sulawesi Utara	15	259	17,27	0	66	20,54
Sulawesi Tengah	13	332	25,54	0	63	23,31
Sulawesi Selatan	24	1.188	51,65	0	137	32,29
Sulawesi Tenggara	17	225	14,06	0	50	15,28
Gorontalo	6	60	10,00	2	22	6,60
Sulawesi Barat	6	185	30,83	6	62	25,49
Maluku	11	47	4,27	0	20	5,90
Maluku Utara	10	108	10,80	0	45	15,02
Papua Barat	13	77	5,92	0	54	15,17
Papua	29	254	9,41	0	97	23,44
INDONESIA	514	17.865	35,73	0	327	51,22

Tabel 3.2.9 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Rekreasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Tempat rekreasi		
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n
Aceh	23	96	61	51
Sumatera Utara	33	135	76	45
Sumatera Barat	19	115	82	50
Riau	12	164	74	47
Jambi	11	71	31	24
Sumatera Selatan	17	66	26	26
Bengkulu	10	39	31	25
Lampung	15	107	78	65
Kep. Bangka Belitung	7	20	11	7
Kep. Riau	7	47	35	7
DKI Jakarta	6	43	43	41
Jawa Barat	27	392	328	281
Jawa Tengah	35	252	225	158
DI Yogyakarta	5	148	148	141
Jawa Timur	38	356	276	243
Banten	8	243	100	91
Bali	9	342	267	264
Nusa Tenggara Barat	10	39	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	129	67	38
Kalimantan Barat	14	47	35	24
Kalimantan Tengah	14	6	1	0
Kalimantan Selatan	13	29	29	24
Kalimantan Timur	10	7	3	3
Kalimantan Utara	5	13	2	1
Sulawesi Utara	15	119	59	48
Sulawesi Tengah	13	158	3	2
Sulawesi Selatan	24	194	116	67
Sulawesi Tenggara	17	109	64	28
Gorontalo	6	23	10	5
Sulawesi Barat	6	90	0	0
Maluku	11	575	506	506
Maluku Utara	10	303	63	29
Papua Barat	13	34	8	6
Papua	29	35	14	10
INDONESIA	514	4.546	2.872	2.357

Tabel 3.2.10 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Fasilitas Umum menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Tempat dan fasilitas umum			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	7.195	6.163	6.104	4.491
Sumatera Utara	33	12.340	10.372	7.592	7.321
Sumatera Barat	19	11.304	9.419	9.135	8.880
Riau	12	5.316	5.316	4.535	3.598
Jambi	11	7.999	7.454	6.262	4.633
Sumatera Selatan	17	9.905	9.542	8.689	5.822
Bengkulu	10	2.511	2.467	1.869	1.543
Lampung	15	12.613	9.427	9.304	7.055
Kep. Bangka Belitung	7	1.694	1.694	1.592	1.391
Kep. Riau	7	5.382	5.144	2.790	1.451
DKI Jakarta	6	6.758	6.705	5.305	4.450
Jawa Barat	27	46.250	41.797	33.811	29.938
Jawa Tengah	35	33.886	31.754	28.452	25.929
DI Yogyakarta	5	2.299	10.897	2.206	2.069
Jawa Timur	38	33.606	28.807	28.628	25.250
Banten	8	15.893	12.693	7.757	6.630
Bali	9	11.272	11.179	11.209	9.450
Nusa Tenggara Barat	10	10.404	10.404	9.017	7.114
Nusa Tenggara Timur	22	12.549	11.702	8.709	4.834
Kalimantan Barat	14	4.352	4.278	3.772	2.884
Kalimantan Tengah	14	3.547	2.763	2.325	1.567
Kalimantan Selatan	13	9.476	8.050	8.685	7.419
Kalimantan Timur	10	5.425	4.681	4.410	3.586
Kalimantan Utara	5	2.268	2.268	1.460	1.195
Sulawesi Utara	15	3.828	3.828	3.718	2.980
Sulawesi Tengah	13	8.072	7.600	5.740	4.606
Sulawesi Selatan	24	16.221	16.074	13.648	11.509
Sulawesi Tenggara	17	7.146	6.660	5.959	3.656
Gorontalo	6	3.385	2.577	2.519	1.645
Sulawesi Barat	6	3.201	3.201	1.977	1.279
Maluku	11	3.509	2.800	2.360	2.489
Maluku Utara	10	4.637	4.387	3.794	2.674
Papua Barat	13	1.060	1.024	1.020	619
Papua	29	3.608	3.173	2.173	4.182
INDONESIA	514	328.911	306.300	256.526	214.139

Tabel 3.2.11 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Tempat pengelolaan makanan			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	24.822	16.944	18.039	13.154
Sumatera Utara	33	19.190	12.101	8.450	5.865
Sumatera Barat	19	23.615	16.562	15.799	12.867
Riau	12	21.923	19.879	9.763	5.747
Jambi	11	16.145	9.349	7.188	15.084
Sumatera Selatan	17	14.476	12.415	11.017	7.471
Bengkulu	10	4.167	3.446	3.573	2.032
Lampung	15	19.129	10.405	9.743	4.754
Kep. Bangka Belitung	7	3.364	3.296	2.851	1.851
Kep. Riau	7	6.882	6.549	4.242	2.231
DKI Jakarta	6	20.193	19.338	15.580	13.109
Jawa Barat	27	107.912	100.076	76.514	43.301
Jawa Tengah	35	62.051	56.793	42.320	33.157
DI Yogyakarta	5	6.352	7.973	4.538	4.210
Jawa Timur	38	50.334	52.354	41.261	30.123
Banten	8	14.504	8.225	5.983	2.947
Bali	9	12.652	10.350	8.405	7.026
Nusa Tenggara Barat	10	9.020	8.974	7.744	5.177
Nusa Tenggara Timur	22	3.441	2.839	1.952	1.526
Kalimantan Barat	14	10.507	10.230	8.558	5.001
Kalimantan Tengah	14	16.397	16.081	15.594	13.180
Kalimantan Selatan	13	15.364	12.774	15.956	8.756
Kalimantan Timur	10	8.694	7.380	6.655	3.656
Kalimantan Utara	5	3.362	3.230	2.372	1.832
Sulawesi Utara	15	6.697	4.919	5.925	3.417
Sulawesi Tengah	13	10.813	6.472	4.399	3.077
Sulawesi Selatan	24	30.654	30.208	28.539	22.574
Sulawesi Tenggara	17	6.023	5.617	3.861	2.867
Gorontalo	6	4.372	4.372	3.480	2.276
Sulawesi Barat	6	3.142	2.337	1.492	596
Maluku	11	3.679	3.304	2.371	2.100
Maluku Utara	10	3.894	3.768	3.324	1.860
Papua Barat	13	1.543	1.385	1.385	1.093
Papua	29	14.886	12.046	11.622	1.785
INDONESIA	514	580.199	501.991	410.495	285.702

Tabel 3.2.12 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Sarana Air Minum Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Sarana air minum			Memenuhi Syarat
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	
		n	n	n	n
Aceh	23	78.794	27.493	27.657	27.308
Sumatera Utara	33	213.629	173.159	6.942	20.079
Sumatera Barat	19	138.441	152.280	104.293	72.195
Riau	12	3.641	3.614	2.323	1.136
Jambi	11	342.263	319.554	224.578	179.029
Sumatera Selatan	17	328.284	312.963	215.843	126.057
Bengkulu	10	246.011	192.240	133.142	125.434
Lampung	15	245.028	244.860	50.467	520
Kep. Bangka Belitung	7	31.459	1.376	1.285	370
Kep. Riau	7	1.726	1.355	973	410
DKI Jakarta	6	169.188	31.112	12.878	8.223
Jawa Barat	27	3.490.149	1.248.161	1.683.916	1.576.521
Jawa Tengah	35	1.675.135	1.498.899	1.139.768	1.080.813
DI Yogyakarta	5	125.627	36.925	4.972	4.598
Jawa Timur	38	3.913.660	3.074.030	3.164.830	3.046.997
Banten	8	628.053	538.146	434.947	431.191
Bali	9	233.851	228.002	146.693	135.371
Nusa Tenggara Barat	10	423.083	299.067	105.711	266.476
Nusa Tenggara Timur	22	217.864	195.202	79.839	65.768
Kalimantan Barat	14	46.790	46.790	45.376	45.128
Kalimantan Tengah	14	87.831	84.441	26.222	22.183
Kalimantan Selatan	13	513.339	512.694	512.424	344.235
Kalimantan Timur	10	190.311	190.099	170.550	162.842
Kalimantan Utara	5	849	750	696	612
Sulawesi Utara	15	45.352	32.263	32.426	5.825
Sulawesi Tengah	13	220.565	181.654	95.932	65.128
Sulawesi Selatan	24	408.894	406.628	162.092	144.051
Sulawesi Tenggara	17	87.769	87.769	64.342	16.641
Gorontalo	6	47.203	47.203	47.142	27.932
Sulawesi Barat	6	78.589	40.577	11.446	6.168
Maluku	11	10.745	9.923	1.021	8.101
Maluku Utara	10	401	401	387	239
Papua Barat	13	3.461	3.164	3.070	2.001
Papua	29	8.491	7.958	6.348	972
INDONESIA	514	14.256.476	10.230.752	8.720.531	8.020.554

Tabel 3.2.13 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Jasa Boga menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jasa Boga			Memenuhi Syarat
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	
		n	n	n	n
Aceh	23	1.369	1.137	1.162	757
Sumatera Utara	33	1.419	1.005	861	1.286
Sumatera Barat	19	510	358	358	272
Riau	12	1.215	1.187	944	870
Jambi	11	390	390	323	987
Sumatera Selatan	17	840	558	558	350
Bengkulu	10	176	167	175	123
Lampung	15	1.308	1.270	933	707
Kep. Bangka Belitung	7	84	82	82	70
Kep. Riau	7	352	352	301	247
DKI Jakarta	6	3.542	1.772	1.451	1.798
Jawa Barat	27	10.202	4.409	4.158	3.471
Jawa Tengah	35	5.025	4.500	3.756	3.095
DI Yogyakarta	5	531	419	476	372
Jawa Timur	38	3.841	3.715	3.445	2.452
Banten	8	921	871	485	421
Bali	9	520	520	510	464
Nusa Tenggara Barat	10	425	425	421	332
Nusa Tenggara Timur	22	226	225	178	153
Kalimantan Barat	14	377	377	341	201
Kalimantan Tengah	14	362	358	342	203
Kalimantan Selatan	13	484	435	383	293
Kalimantan Timur	10	484	401	400	241
Kalimantan Utara	5	143	142	95	55
Sulawesi Utara	15	424	371	369	289
Sulawesi Tengah	13	454	451	232	226
Sulawesi Selatan	24	323	323	292	187
Sulawesi Tenggara	17	171	171	124	63
Gorontalo	6	169	169	145	100
Sulawesi Barat	6	163	124	64	43
Maluku	11	221	205	162	116
Maluku Utara	10	118	102	78	75
Papua Barat	13	149	146	145	79
Papua	29	641	433	413	575
INDONESIA	514	37.579	27.570	24.162	20.973

Tabel 3.2.14 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Jasa Boga dan Rumah Makan/Restoran Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Rumah Makan/Restoran			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	3.363	2.861	3.027	1.849
Sumatera Utara	33	5.108	3.870	2.803	2.078
Sumatera Barat	19	3.842	3.409	3.251	2.100
Riau	12	14.016	2.737	3.005	1.180
Jambi	11	9.055	1.898	1.943	870
Sumatera Selatan	17	3.226	2.441	2.401	1.341
Bengkulu	10	721	664	685	393
Lampung	15	3.159	2.905	2.615	1.748
Kep. Bangka Belitung	7	801	790	790	471
Kep. Riau	7	3.215	2.124	1.437	786
DKI Jakarta	6	18.917	3.996	2.372	1.908
Jawa Barat	27	21.449	9.893	8.359	6.430
Jawa Tengah	35	10.528	9.085	7.148	5.796
DI Yogyakarta	5	765	404	666	591
Jawa Timur	38	9.386	6.488	5.679	4.183
Banten	8	2.151	1.826	1.353	571
Bali	9	2.736	2.693	2.649	2.227
Nusa Tenggara Barat	10	1.686	1.599	1.454	1.032
Nusa Tenggara Timur	22	2.199	1.981	1.508	965
Kalimantan Barat	14	2.233	2.233	2.040	1.120
Kalimantan Tengah	14	1.756	1.500	1.463	896
Kalimantan Selatan	13	1.345	1.244	1.060	761
Kalimantan Timur	10	3.266	2.461	2.441	1.601
Kalimantan Utara	5	604	588	386	294
Sulawesi Utara	15	2.330	1.919	2.215	1.447
Sulawesi Tengah	13	1.353	1.312	1.136	924
Sulawesi Selatan	24	3.268	3.231	2.969	1.833
Sulawesi Tenggara	17	1.239	1.170	966	630
Gorontalo	6	713	651	620	444
Sulawesi Barat	6	888	813	670	207
Maluku	11	1.769	1.615	1.564	461
Maluku Utara	10	783	730	543	434
Papua Barat	13	447	367	367	277
Papua	29	7.464	3.237	2.105	1.696
INDONESIA	514	145.781	84.735	73.690	49.544

Tabel 3.2.15 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Depot Air Minum			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	2.684	2.261	2.308	1.479
Sumatera Utara	33	3.251	2.127	1.453	957
Sumatera Barat	19	3.788	3.432	3.467	2.677
Riau	12	2.756	2.605	2.726	1.942
Jambi	11	3.340	2.660	2.321	1.549
Sumatera Selatan	17	3.032	2.954	2.925	2.037
Bengkulu	10	1.560	937	956	723
Lampung	15	2.703	1.535	1.349	883
Kep. Bangka Belitung	7	1.040	1.020	1.020	705
Kep. Riau	7	1.276	1.273	716	558
DKI Jakarta	6	16.285	2.210	1.993	883
Jawa Barat	27	19.794	12.475	11.301	7.620
Jawa Tengah	35	17.994	8.915	8.277	7.747
DI Yogyakarta	5	524	410	482	418
Jawa Timur	38	9.026	8.470	8.101	6.131
Banten	8	3.344	3.145	2.019	1.164
Bali	9	669	657	635	581
Nusa Tenggara Barat	10	776	768	699	582
Nusa Tenggara Timur	22	1.111	1.081	887	729
Kalimantan Barat	14	1.577	1.577	1.454	997
Kalimantan Tengah	14	1.538	1.466	1.432	1.076
Kalimantan Selatan	13	2.470	2.434	2.197	1.604
Kalimantan Timur	10	2.752	2.541	2.075	1.071
Kalimantan Utara	5	773	757	620	541
Sulawesi Utara	15	903	777	833	455
Sulawesi Tengah	13	1.449	1.432	1.188	925
Sulawesi Selatan	24	11.624	2.824	2.689	2.310
Sulawesi Tenggara	17	845	845	773	450
Gorontalo	6	805	801	740	638
Sulawesi Barat	6	310	310	302	182
Maluku	11	887	878	842	547
Maluku Utara	10	551	533	488	323
Papua Barat	13	316	314	270	217
Papua	29	3.357	2.310	1.296	1.211
INDONESIA	514	125.110	78.734	70.834	51.912

Tabel 3.2.16 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Kantin Sekolah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Kantin Sekolah			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	2.146	985	1.316	447
Sumatera Utara	33	6.602	3.989	3.438	1.856
Sumatera Barat	19	3.970	1.719	1.625	1.106
Riau	12	4.102	2.639	2.428	1.368
Jambi	11	4.691	3.845	3.103	1.750
Sumatera Selatan	17	3.906	3.394	3.254	1.847
Bengkulu	10	1.360	1.284	1.284	435
Lampung	15	3.807	3.331	2.459	2.046
Kep. Bangka Belitung	7	1.010	798	854	415
Kep. Riau	7	747	747	670	297
DKI Jakarta	6	12.863	2.691	1.724	1.295
Jawa Barat	27	8.014	4.949	4.177	1.862
Jawa Tengah	35	5.238	3.076	3.064	1.722
DI Yogyakarta	5	1.515	584	9.454	9.341
Jawa Timur	38	9.932	9.922	8.634	6.083
Banten	8	964	544	370	241
Bali	9	1.246	1.226	1.243	1.109
Nusa Tenggara Barat	10	1.505	1.505	1.484	926
Nusa Tenggara Timur	22	552	546	480	77
Kalimantan Barat	14	629	624	609	433
Kalimantan Tengah	14	579	485	472	194
Kalimantan Selatan	13	510	510	1.805	1.378
Kalimantan Timur	10	2.820	1.306	1.306	1.149
Kalimantan Utara	5	472	432	319	242
Sulawesi Utara	15	1.224	852	1.031	620
Sulawesi Tengah	13	2.663	2.598	1.940	1.408
Sulawesi Selatan	24	4.708	4.708	4.283	2.493
Sulawesi Tenggara	17	1.140	997	742	374
Gorontalo	6	4.939	1.056	1.056	314
Sulawesi Barat	6	914	713	497	115
Maluku	11	197	197	94	60
Maluku Utara	10	319	319	276	115
Papua Barat	13	174	148	148	43
Papua	29	542	537	186	253
INDONESIA	514	96.000	63.256	65.825	43.414

Tabel 3.2.17 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Makanan Jajanan menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Makanan jajanan		
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n
Aceh	23	10.562	8.549	5.235
Sumatera Utara	33	11.328	4.436	3.714
Sumatera Barat	19	15.330	8.914	7.678
Riau	12	5.315	2.281	950
Jambi	11	5.039	3.186	1.886
Sumatera Selatan	17	4.957	4.706	3.101
Bengkulu	10	2.692	2.635	1.029
Lampung	15	8.010	5.089	1.762
Kep. Bangka Belitung	7	875	875	406
Kep. Riau	7	1.697	1.036	722
DKI Jakarta	6	9.572	1.967	874
Jawa Barat	27	64.985	24.770	19.811
Jawa Tengah	35	33.494	20.382	16.959
DI Yogyakarta	5	2.436	2.129	1.949
Jawa Timur	38	26.009	22.249	15.574
Banten	8	5.227	1.842	1.287
Bali	9	8.674	4.161	2.864
Nusa Tenggara Barat	10	3.496	2.889	2.088
Nusa Tenggara Timur	22	448	382	195
Kalimantan Barat	14	3.193	2.296	1.690
Kalimantan Tengah	14	3.986	3.617	1.893
Kalimantan Selatan	13	13.977	7.977	4.454
Kalimantan Timur	10	6.083	1.989	1.520
Kalimantan Utara	5	851	479	373
Sulawesi Utara	15	2.603	2.528	1.593
Sulawesi Tengah	13	1.280	1.023	755
Sulawesi Selatan	24	7.929	6.111	3.670
Sulawesi Tenggara	17	3.298	2.001	1.252
Gorontalo	6	1.396	1.370	418
Sulawesi Barat	6	1.314	390	136
Maluku	11	1.593	1.055	404
Maluku Utara	10	3.007	2.625	1.520
Papua Barat	13	260	226	103
Papua	29	3.523	971	320
INDONESIA	514	274.439	157.136	108.185

Tabel 3.2.18 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT) menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Indusri pangan rumah tangga (IPRT)			
		Jumlah di wilayah kerja	Jumlah terdaftar	Jumlah yang Diawasi	Memenuhi Syarat
		n	n	n	n
Aceh	23	897	897	831	721
Sumatera Utara	33	2.119	1.710	1.620	1.276
Sumatera Barat	19	4.585	4.344	4.496	3.812
Riau	12	18.868	1.827	2.341	834
Jambi	11	4.210	2.202	1.638	884
Sumatera Selatan	17	5.575	2.194	1.935	1.584
Bengkulu	10	1.180	9.737	9.671	9.122
Lampung	15	2.814	2.640	2.010	1.240
Kep. Bangka Belitung	7	1.370	1.370	1.195	912
Kep. Riau	7	1.487	1.373	1.371	1.371
DKI Jakarta	6	7.479	1.478	1.263	92
Jawa Barat	27	23.399	9.542	9.333	6.607
Jawa Tengah	35	19.924	15.351	13.053	12.786
DI Yogyakarta	5	1.186	3.005	9.650	9.576
Jawa Timur	38	22.329	22.552	19.687	18.394
Banten	8	961	1.466	1.078	1.026
Bali	9	593	480	523	460
NTB	10	4.019	2.347	2.090	1.507
NTT	22	643	643	361	318
Kalimantan Barat	14	721	706	651	389
Kalimantan Tengah	14	930	541	225	188
Kalimantan Selatan	13	6.063	4.031	2.113	1.994
Kalimantan Timur	10	1.307	1.031	1.023	874
Kalimantan Utara	5	320	301	198	165
Sulawesi Utara	15	838	740	711	702
Sulawesi Tengah	13	948	948	466	327
Sulawesi Selatan	24	1.629	1.629	1.444	1.071
Sulawesi Tenggara	17	611	611	398	429
Gorontalo	6	488	300	185	121
Sulawesi Barat	6	58	58	58	11
Maluku	11	1.322	1.322	406	333
Maluku Utara	10	154	154	75	40
Papua Barat	13	567	567	484	408
Papua	29	1.038	1.016	674	565
INDONESIA	514	140.632	99.113	93.257	80.139

Tabel 3.2.19 Distribusi Kabupaten/Kota Melakukan Audit Maternal dan Perinatal Tahun 2018, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/kota melakukan AMP		Kabupaten/kota tidak melakukan AMP	
		n	%	n	%
Aceh	23	19	82,6	4	17,4
Sumatera Utara	33	24	72,7	9	27,3
Sumatera Barat	19	14	73,7	5	26,3
Riau	12	10	83,3	2	16,7
Jambi	11	10	90,9	1	9,1
Sumatera Selatan	17	16	94,1	1	5,9
Bengkulu	10	8	80,0	2	20,0
Lampung	15	14	93,3	1	6,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	6	85,7	1	14,3
DKI Jakarta	6	5	83,3	1	16,7
Jawa Barat	27	23	85,2	4	14,8
Jawa Tengah	35	35	100,0	0	0,0
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	35	92,1	3	7,9
Banten	8	6	75,0	2	25,0
Bali	9	9	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9	2	9,1
Kalimantan Barat	14	12	85,7	2	14,3
Kalimantan Tengah	14	8	57,1	6	42,9
Kalimantan Selatan	13	11	84,6	2	15,4
Kalimantan Timur	10	10	100,0	0	0,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0	1	20,0
Sulawesi Utara	15	13	86,7	2	13,3
Sulawesi Tengah	13	11	84,6	2	15,4
Sulawesi Selatan	24	21	87,5	3	12,5
Sulawesi Tenggara	17	13	76,5	4	23,5
Gorontalo	6	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Barat	6	5	83,3	1	16,7
Maluku	11	4	36,4	7	63,6
Maluku Utara	10	5	50,0	5	50,0
Papua Barat	13	6	46,2	7	53,8
Papua	29	8	27,6	21	72,4
INDONESIA	514	409	79,6	105	20,4

Tabel 3.2.20 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Frekuensi Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal (AMP)				
		n	mean	min	max	SD
Aceh	23	163	8,58	1	48	13,17
Sumatera Utara	33	78	3,25	1	12	2,64
Sumatera Barat	19	50	3,57	0	27	6,91
Riau	12	133	13,30	1	61	18,93
Jambi	11	23	2,30	1	4	0,95
Sumatera Selatan	17	48	3,00	0	17	3,89
Bengkulu	10	49	6,13	1	29	9,39
Lampung	15	40	2,86	1	12	2,77
Kep. Bangka Belitung	7	10	1,67	1	2	0,52
Kep. Riau	7	21	3,50	1	10	3,27
DKI Jakarta	6	52	10,40	3	21	9,68
Jawa Barat	27	115	5,23	1	34	7,14
Jawa Tengah	35	192	5,65	1	41	7,53
DI Yogyakarta	5	23	4,60	2	8	2,41
Jawa Timur	38	259	7,40	1	94	16,54
Banten	8	37	6,17	2	12	4,40
Bali	9	28	3,11	1	8	2,15
NTB	10	21	2,63	2	6	1,41
NTT	22	64	3,20	1	17	4,51
Kalimantan Barat	14	77	7,00	1	48	13,71
Kalimantan Tengah	14	41	5,13	1	30	10,08
Kalimantan Selatan	13	22	2,00	1	4	1,00
Kalimantan Timur	10	122	12,20	1	80	24,25
Kalimantan Utara	5	5	1,25	1	2	0,50
Sulawesi Utara	15	25	2,08	0	4	1,38
Sulawesi Tengah	13	27	2,45	1	10	2,77
Sulawesi Selatan	24	60	2,86	1	6	1,59
Sulawesi Tenggara	17	137	10,54	1	61	17,76
Gorontalo	6	94	18,80	2	84	36,45
Sulawesi Barat	6	44	8,80	1	25	9,65
Maluku	11	28	7,00	1	12	5,35
Maluku Utara	10	10	2,00	1	4	1,41
Papua Barat	13	20	3,33	1	11	4,08
Papua	29	25	3,13	1	12	3,76
INDONESIA	514	2.143	5,29	0	94	10,37

Tabel 3.2.21 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Pelaksanaan Kesehatan Kerja Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/kota melakukan kesehatan kerja		Kabupaten/kota tidak melakukan kesehatan kerja	
		n	%	n	%
Aceh	23	3	13,0	20	87,0
Sumatera Utara	33	3	9,1	30	90,9
Sumatera Barat	19	4	21,1	15	78,9
Riau	12	3	25,0	9	75,0
Jambi	11	1	9,1	10	90,9
Sumatera Selatan	17	1	5,9	16	94,1
Bengkulu	10	2	20,0	8	80,0
Lampung	15	3	20,0	12	80,0
Kep.Bangka Belitung	7	3	42,9	4	57,1
Kepulauan Riau	7	0	0,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	2	33,3	4	66,7
Jawa Barat	27	3	11,1	24	88,9
Jawa Tengah	35	9	25,7	26	74,3
DI Yogyakarta	5	1	20,0	4	80,0
Jawa Timur	38	12	31,6	26	68,4
Banten	8	3	37,5	5	62,5
Bali	9	2	22,2	7	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	1	10,0	9	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0	22	100,0
Kalimantan Barat	14	1	7,1	13	92,9
Kalimantan Tengah	14	3	21,4	11	78,6
Kalimantan Selatan	13	2	15,4	11	84,6
Kalimantan Timur	10	1	10,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	0	0,0	5	100,0
Sulawesi Utara	15	1	6,7	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	0	0,0	13	100,0
Sulawesi Selatan	24	7	29,2	17	70,8
Sulawesi Tenggara	17	0	0,0	17	100,0
Gorontalo	6	0	0,0	6	100,0
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	0	0,0	11	100,0
Maluku Utara	10	1	10,0	9	90,0
Papua Barat	13	0	0,0	13	100,0
Papua	29	1	3,4	28	96,6
INDONESIA	514	75	14,6	439	85,4

Tabel 3.2.22 Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Banyaknya Puskesmas yang Melakukan Kesehatan Olah Raga menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah kabupaten/kota	Kabupaten/kota dengan < 60% puskesmas kesehatan olah raga		Kabupaten/kota dengan ≥ 60% puskesmas kesehatan olah raga	
		n	%	n	%
Aceh	23	6	26,1	17	73,9
Sumatera Utara	33	13	39,4	20	60,6
Sumatera Barat	19	1	5,3	18	94,7
Riau	12	0	0,0	12	100,0
Jambi	11	1	9,1	10	90,9
Sumatera Selatan	17	0	0,0	17	100,0
Bengkulu	10	0	0,0	10	100,0
Lampung	15	0	0,0	15	100,0
Kep.Bangka Belitung	7	0	0,0	7	100,0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	0	0,0	6	100,0
Jawa Barat	27	0	0,0	27	100,0
Jawa Tengah	35	0	0,0	35	100,0
DI Yogyakarta	5	0	0,0	5	100,0
Jawa Timur	38	0	0,0	38	100,0
Banten	8	0	0,0	8	100,0
Bali	9	0	0,0	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	2	20,0	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5	10	45,5
Kalimantan Barat	14	6	42,9	8	57,1
Kalimantan Tengah	14	5	35,7	9	64,3
Kalimantan Selatan	13	3	23,1	10	76,9
Kalimantan Timur	10	1	10,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	6	40,0	9	60,0
Sulawesi Tengah	13	5	38,5	8	61,5
Sulawesi Selatan	24	1	4,2	23	95,8
Sulawesi Tenggara	17	3	17,6	14	82,4
Gorontalo	6	0	0,0	6	100,0
Sulawesi Barat	6	0	0,0	6	100,0
Maluku	11	6	54,5	5	45,5
Maluku Utara	10	4	40,0	6	60,0
Papua Barat	13	12	92,3	1	7,7
Papua	29	28	96,6	1	3,4
INDONESIA	514	116	22,6	398	77,4

Tabel 3.2.23 Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Keberadaan SK/SE Bupati/Walikota/Kadinkes Mendukung Program Kesehatan Olahraga menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas	Terdapat SK/SE Bupati/walikota/Kadinkes mendukung program kesehatan olahraga		Tidak terdapat SK/SE Bupati/walikota/Kadinkes mendukung program kesehatan olahraga	
		n	%	n	%
Aceh	23	8	34,8	15	65,2
Sumatera Utara	33	4	12,1	29	87,9
Sumatera Barat	19	12	63,2	7	36,8
Riau	12	7	58,3	5	41,7
Jambi	11	4	36,4	7	63,6
Sumatera Selatan	17	2	11,8	15	88,2
Bengkulu	10	1	10,0	9	90,0
Lampung	15	3	20,0	12	80,0
Kep.Bangka Belitung	7	3	42,9	4	57,1
Kepulauan Riau	7	2	28,6	5	71,4
DKI Jakarta	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	8	29,6	19	70,4
Jawa Tengah	35	9	25,7	26	74,3
DI Yogyakarta	5	2	40,0	3	60,0
Jawa Timur	38	17	44,7	21	55,3
Banten	8	5	62,5	3	37,5
Bali	9	3	33,3	6	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	6	60,0	4	40,0
Nusa Tenggara Timur	22	5	22,7	17	77,3
Kalimantan Barat	14	4	28,6	10	71,4
Kalimantan Tengah	14	6	42,9	8	57,1
Kalimantan Selatan	13	6	46,2	7	53,8
Kalimantan Timur	10	5	50,0	5	50,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	3	20,0	12	80,0
Sulawesi Tengah	13	2	15,4	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	14	58,3	10	41,7
Sulawesi Tenggara	17	6	35,3	11	64,7
Gorontalo	6	2	33,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	3	27,3	8	72,7
Maluku Utara	10	3	30,0	7	70,0
Papua Barat	13	0	0,0	13	100,0
Papua	29	5	17,2	24	82,8
INDONESIA	514	167	32,5	347	67,5

Tabel 3.2.24 Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan Melaksanakan Kesehatan Olahraga* menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah kabupaten/kota	Kabupaten/kota yang melaksanakan Kesehatan olahraga ¹		Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Kesehatan olahraga ²	
		n	%	n	%
Aceh	23	7	30,4	16	69,6
Sumatera Utara	33	4	12,1	29	87,9
Sumatera Barat	19	11	57,9	8	42,1
Riau	12	7	58,3	5	41,7
Jambi	11	4	36,4	7	63,6
Sumatera Selatan	17	2	11,8	15	88,2
Bengkulu	10	1	10,0	9	90,0
Lampung	15	3	20,0	12	80,0
Kep.Bangka Belitung	7	3	42,9	4	57,1
Kepulauan Riau	7	2	28,6	5	71,4
DKI Jakarta	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	8	29,6	19	70,4
Jawa Tengah	35	9	25,7	26	74,3
DI Yogyakarta	5	2	40,0	3	60,0
Jawa Timur	38	17	44,7	21	55,3
Banten	8	5	62,5	3	37,5
Bali	9	3	33,3	6	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	4	40,0	6	60,0
Nusa Tenggara Timur	22	3	13,6	19	86,4
Kalimantan Barat	14	2	14,3	12	85,7
Kalimantan Tengah	14	5	35,7	9	64,3
Kalimantan Selatan	13	4	30,8	9	69,2
Kalimantan Timur	10	4	40,0	6	60,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	1	6,7	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	1	7,7	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	13	54,2	11	45,8
Sulawesi Tenggara	17	5	29,4	12	70,6
Gorontalo	6	2	33,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	3	27,3	8	72,7
Maluku Utara	10	2	20,0	8	80,0
Papua Barat	13	0	0,0	13	100,0
Papua	29	0	0,0	29	100,0
INDONESIA	514	144	28,0	370	72,0

Tabel 3.2.25 Proporsi Kabupaten/Kota berdasarkan 60 Persen atau lebih Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga dan Pembinaan Kebugaran Jasmani Pekerja Tingkat Kabupaten/Kota menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah kabupaten/kota	Kabupaten/kota dengan $\geq 60\%$ Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		Terdapat kegiatan pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota	
		n	%	n	%
Aceh	23	17	73,9	20	87,0
Sumatera Utara	33	20	60,6	25	75,8
Sumatera Barat	19	18	94,7	15	78,9
Riau	12	12	100,0	11	91,7
Jambi	11	10	90,9	11	100,0
Sumatera Selatan	17	17	100,0	12	70,6
Bengkulu	10	10	100,0	8	80,0
Lampung	15	15	100,0	14	93,3
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0	6	85,7
Kepulauan Riau	7	7	100,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	6	100,0	6	100,0
Jawa Barat	27	27	100,0	26	96,3
Jawa Tengah	35	35	100,0	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	100,0
Jawa Timur	38	38	100,0	35	92,1
Banten	8	8	100,0	8	100,0
Bali	9	9	100,0	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	10	45,5	9	40,9
Kalimantan Barat	14	8	57,1	14	100,0
Kalimantan Tengah	14	9	64,3	10	71,4
Kalimantan Selatan	13	10	76,9	12	92,3
Kalimantan Timur	10	9	90,0	7	70,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0	5	100,0
Sulawesi Utara	15	9	60,0	11	73,3
Sulawesi Tengah	13	8	61,5	9	69,2
Sulawesi Selatan	24	23	95,8	23	95,8
Sulawesi Tenggara	17	14	82,4	13	76,5
Gorontalo	6	6	100,0	6	100,0
Sulawesi Barat	6	6	100,0	6	100,0
Maluku	11	5	45,5	9	81,8
Maluku Utara	10	6	60,0	9	90,0
Papua Barat	13	1	7,7	5	38,5
Papua	29	1	3,4	7	24,1
INDONESIA	514	398	77,4	416	80,9

Tabel 3.2.26 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/kota melakukan kesehatan olahraga		Kabupaten/kota tidak melakukan kesehatan olahraga	
		n	%	n	%
Aceh	23	20	87,0	3	13,0
Sumatera Utara	33	25	75,8	8	24,2
Sumatera Barat	19	15	78,9	4	21,1
Riau	12	11	91,7	1	8,3
Jambi	11	11	100,0	0	0,0
Sumatera Selatan	17	12	70,6	5	29,4
Bengkulu	10	8	80,0	2	20,0
Lampung	15	14	93,3	1	6,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	7	100,0	0	0,0
DKI Jakarta	6	6	100,0	0	0,0
Jawa Barat	27	26	96,3	1	3,7
Jawa Tengah	35	34	97,1	1	2,9
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	35	92,1	3	7,9
Banten	8	8	100,0	0	0,0
Bali	9	8	88,9	1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9	13	59,1
Kalimantan Barat	14	14	100,0	0	0,0
Kalimantan Tengah	14	10	71,4	4	28,6
Kalimantan Selatan	13	12	92,3	1	7,7
Kalimantan Timur	10	7	70,0	3	30,0
Kalimantan Utara	5	5	100,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	11	73,3	4	26,7
Sulawesi Tengah	13	9	69,2	4	30,8
Sulawesi Selatan	24	23	95,8	1	4,2
Sulawesi Tenggara	17	13	76,5	4	23,5
Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	6	100,0	0	0,0
Maluku	11	9	81,8	2	18,2
Maluku Utara	10	9	90,0	1	10,0
Papua Barat	13	5	38,5	8	61,5
Papua	29	7	24,1	22	75,9
INDONESIA	514	416	80,9	98	19,1

Tabel 3.2.27 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Kebijakan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendukung Kearifan Gerakan Perilaku Hidup Sehat yang Implementasinya Melibatkan Lintas Sektor/Mitra Potensial/Masyarakat Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Terdapat kebijakan yang mendukung Gerakan perilaku hidup sehat melibatkan lintas sektor		Tidak terdapat kebijakan yang mendukung Gerakan perilaku hidup sehat melibatkan lintas sektor	
		n	%	n	%
Aceh	23	17	73,9	6	26,1
Sumatera Utara	33	25	75,8	8	24,2
Sumatera Barat	19	19	100,0	0	0,0
Riau	12	10	83,3	2	16,7
Jambi	11	10	90,9	1	9,1
Sumatera Selatan	17	16	94,1	1	5,9
Bengkulu	10	8	80,0	2	20,0
Lampung	15	11	73,3	4	26,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	5	71,4	2	28,6
DKI Jakarta	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	24	88,9	3	11,1
Jawa Tengah	35	31	88,6	4	11,4
DI Yogyakarta	5	4	80,0	1	20,0
Jawa Timur	38	30	78,9	8	21,1
Banten	8	7	87,5	1	12,5
Bali	9	9	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	15	68,2	7	31,8
Kalimantan Barat	14	9	64,3	5	35,7
Kalimantan Tengah	14	13	92,9	1	7,1
Kalimantan Selatan	13	10	76,9	3	23,1
Kalimantan Timur	10	9	90,0	1	10,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0	1	20,0
Sulawesi Utara	15	12	80,0	3	20,0
Sulawesi Tengah	13	10	76,9	3	23,1
Sulawesi Selatan	24	19	79,2	5	20,8
Sulawesi Tenggara	17	10	58,8	7	41,2
Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3	1	16,7
Maluku	11	10	90,9	1	9,1
Maluku Utara	10	10	100,0	0	0,0
Papua Barat	13	4	30,8	9	69,2
Papua	29	14	48,3	15	51,7
INDONESIA	514	404	78,6	110	21,4

Tabel 3.2.28 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Penetapan Tataan Sehat Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/kota dengan penetapan tataan sehat		Kabupaten/kota tanpa penetapan tataan sehat	
		n	%	n	%
Aceh	23	16	69,6	7	30,4
Sumatera Utara	33	22	66,7	11	33,3
Sumatera Barat	19	14	73,7	5	26,3
Riau	12	8	66,7	4	33,3
Jambi	11	11	100,0	0	0,0
Sumatera Selatan	17	13	76,5	4	23,5
Bengkulu	10	8	80,0	2	20,0
Lampung	15	12	80,0	3	20,0
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	5	71,4	2	28,6
DKI Jakarta	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	25	92,6	2	7,4
Jawa Tengah	35	31	88,6	4	11,4
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	33	86,8	5	13,2
Banten	8	5	62,5	3	37,5
Bali	9	8	88,9	1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0	3	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	14	63,6	8	36,4
Kalimantan Barat	14	11	78,6	3	21,4
Kalimantan Tengah	14	12	85,7	2	14,3
Kalimantan Selatan	13	8	61,5	5	38,5
Kalimantan Timur	10	7	70,0	3	30,0
Kalimantan Utara	5	3	60,0	2	40,0
Sulawesi Utara	15	10	66,7	5	33,3
Sulawesi Tengah	13	10	76,9	3	23,1
Sulawesi Selatan	24	21	87,5	3	12,5
Sulawesi Tenggara	17	12	70,6	5	29,4
Gorontalo	6	5	83,3	1	16,7
Sulawesi Barat	6	6	100,0	0	0,0
Maluku	11	5	45,5	6	54,5
Maluku Utara	10	10	100,0	0	0,0
Papua Barat	13	8	61,5	5	38,5
Papua	29	17	58,6	12	41,4
INDONESIA	514	392	76,3	122	23,7

Tabel 3.2.29 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Pelaksanaan Kampanye Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Melalui Media Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan kampanye peningkatan perilaku hidup sehat tahun 2018		Tidak melakukan kampanye peningkatan perilaku hidup sehat tahun 2018	
		n	%	n	%
Aceh	23	21	91,3	2	8,7
Sumatera Utara	33	27	81,8	6	18,2
Sumatera Barat	19	18	94,7	1	5,3
Riau	12	11	91,7	1	8,3
Jambi	11	11	100,0	0	0,0
Sumatera Selatan	17	16	94,1	1	5,9
Bengkulu	10	10	100,0	0	0,0
Lampung	15	15	100,0	0	0,0
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0	0	0,0
Kepulauan Riau	7	5	71,4	2	28,6
DKI Jakarta	6	6	100,0	0	0,0
Jawa Barat	27	25	92,6	2	7,4
Jawa Tengah	35	34	97,1	1	2,9
DI Yogyakarta	5	5	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	35	92,1	3	7,9
Banten	8	8	100,0	0	0,0
Bali	9	9	100,0	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	9	90,0	1	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	17	77,3	5	22,7
Kalimantan Barat	14	14	100,0	0	0,0
Kalimantan Tengah	14	14	100,0	0	0,0
Kalimantan Selatan	13	13	100,0	0	0,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0	0	0,0
Kalimantan Utara	5	5	100,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	14	93,3	1	6,7
Sulawesi Tengah	13	11	84,6	2	15,4
Sulawesi Selatan	24	21	87,5	3	12,5
Sulawesi Tenggara	17	16	94,1	1	5,9
Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3	1	16,7
Maluku	11	7	63,6	4	36,4
Maluku Utara	10	8	80,0	2	20,0
Papua Barat	13	7	53,8	6	46,2
Papua	29	21	72,4	8	27,6
INDONESIA	514	461	89,7	53	10,3

Tabel 3.2.30 Distribusi Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Memiliki kebijakan KTR	
	N	n	%
Aceh	23	20	87,0
Sumatera Utara	33	20	60,6
Sumatera Barat	19	17	89,5
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	11	100,0
Sumatera Selatan	17	15	88,2
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	15	100,0
Kep. Bangka Belitung	7	7	100,0
Kep. Riau	7	6	85,7
Dki Jakarta	6	5	83,3
Jawa Barat	27	24	88,9
Jawa Tengah	35	26	74,3
Di Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	30	78,9
Banten	8	7	87,5
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	14	63,6
Kalimantan Barat	14	8	57,1
Kalimantan Tengah	14	13	92,9
Kalimantan Selatan	13	10	76,9
Kalimantan Timur	10	9	90,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	13	86,7
Sulawesi Tengah	13	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	24	100,0
Sulawesi Tenggara	17	15	88,2
Gorontalo	6	4	66,7
Sulawesi Barat	6	6	100,0
Maluku	11	9	81,8
Maluku Utara	10	6	60,0
Papua Barat	13	8	61,5
Papua	29	9	31,0
INDONESIA	514	411	80,0

Tabel 3.2.31 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Keberadaan Desa Siaga Aktif Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Jumlah Kab/kota yang menjawab	Kabupaten/kota yang memiliki desa siaga aktif		Jumlah Desa Siaga Aktif
			n	%	
Aceh	23	22	18	81,8	3.270
Sumatera Utara	33	32	25	78,1	2.894
Sumatera Barat	19	19	19	100,0	1.373
Riau	12	11	11	100,0	1.344
Jambi	11	10	10	100,0	1.027
Sumatera Selatan	17	16	14	87,5	1.992
Bengkulu	10	10	10	100,0	1.027
Lampung	15	15	15	100,0	2.287
Kep.Bangka Belitung	7	7	5	71,4	292
Kepulauan Riau	7	7	7	100,0	416
DKI Jakarta	6	6	6	100,0	313
Jawa Barat	27	27	27	100,0	5.634
Jawa Tengah	35	35	35	100,0	7.684
DI Yogyakarta	5	5	5	100,0	406
Jawa Timur	38	38	38	100,0	8.020
Banten	8	8	8	100,0	1.181
Bali	9	9	9	100,0	716
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0	984
Nusa Tenggara Timur	22	21	19	90,5	1.227
Kalimantan Barat	14	14	13	92,9	1.045
Kalimantan Tengah	14	13	10	76,9	376
Kalimantan Selatan	13	13	11	84,6	1.316
Kalimantan Timur	10	8	8	100,0	523
Kalimantan Utara	5	5	4	80,0	115
Sulawesi Utara	15	14	12	85,7	835
Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0	1.266
Sulawesi Selatan	24	23	23	100,0	2.488
Sulawesi Tenggara	17	15	15	100,0	1.127
Gorontalo	6	6	6	100,0	561
Sulawesi Barat	6	6	6	100,0	327
Maluku	11	11	10	90,9	765
Maluku Utara	10	10	9	90,0	604
Papua Barat	13	13	5	38,5	95
Papua	29	25	12	48,0	603
INDONESIA	514	497	448	90,1	54.133

Tabel 3.2.32 Distribusi Kabupaten/Kota yang Menyediakan Anggaran Promosi Kesehatan dari APBD Kabupaten/Kota Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Menyediakan anggaran promosi kesehatan dari APBD kabupaten/kota	
		n	%
Aceh	23	20	87,0
Sumatera Utara	33	28	84,8
Sumatera Barat	19	18	94,7
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	16	94,1
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	14	93,3
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	6	85,7
DKI Jakarta	6	4	66,7
Jawa Barat	27	24	88,9
Jawa Tengah	35	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	36	94,7
Banten	8	7	87,5
Bali	9	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	16	72,7
Kalimantan Barat	14	12	85,7
Kalimantan Tengah	14	14	100,0
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	3	60,0
Sulawesi Utara	15	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	13	100,0
Sulawesi Selatan	24	23	95,8
Sulawesi Tenggara	17	16	94,1
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	9	81,8
Maluku Utara	10	7	70,0
Papua Barat	13	10	76,9
Papua	29	21	72,4
INDONESIA	514	459	89,3

Tabel 3.2.33 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Surveilans Gizi Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Menyelenggarakan surveilans gizi	
		n	%
Aceh	23	22	95,7
Sumatera Utara	33	32	97,0
Sumatera Barat	19	19	100,0
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	17	100,0
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	14	93,3
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	7	100,0
DKI Jakarta	6	6	100,0
Jawa Barat	27	27	100,0
Jawa Tengah	35	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	38	100,0
Banten	8	7	87,5
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9
Kalimantan Barat	14	13	92,9
Kalimantan Tengah	14	13	92,9
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	15	100,0
Sulawesi Tengah	13	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	23	95,8
Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	9	81,8
Maluku Utara	10	10	100,0
Papua Barat	13	12	92,3
Papua	29	25	86,2
INDONESIA	514	491	95,5

Tabel 3.2.34 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Kegiatan Penanggulangan Anemia Remaja Putri Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Melakukan kegiatan penanggulangan anemia remaja putri	
		n	%
Aceh	23	22	95,7
Sumatera Utara	33	30	90,9
Sumatera Barat	19	19	100,0
Riau	12	9	75,0
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	17	100,0
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	14	93,3
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	6	85,7
DKI Jakarta	6	5	83,3
Jawa Barat	27	25	92,6
Jawa Tengah	35	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	38	100,0
Banten	8	6	75,0
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9
Kalimantan Barat	14	13	92,9
Kalimantan Tengah	14	13	92,9
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	15	100,0
Sulawesi Tengah	13	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	22	91,7
Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	4	66,7
Maluku	11	8	72,7
Maluku Utara	10	10	100,0
Papua Barat	13	11	84,6
Papua	29	18	62,1
INDONESIA	514	471	91,6

Tabel 3.2.35 Distribusi Kabupaten/Kota Berdasarkan Penetapan Kebijakan Lokal Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Menetapkan kebijakan lokal untuk pengendalian penyakit tular vektor	
		n	%
Aceh	23	17	73,9
Sumatera Utara	33	14	42,4
Sumatera Barat	19	16	84,2
Riau	12	8	66,7
Jambi	11	8	72,7
Sumatera Selatan	17	13	76,5
Bengkulu	10	6	60,0
Lampung	15	9	60,0
Kep.Bangka Belitung	7	4	57,1
Kepulauan Riau	7	5	71,4
DKI Jakarta	6	6	100,0
Jawa Barat	27	17	63,0
Jawa Tengah	35	24	68,6
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	31	81,6
Banten	8	7	87,5
Bali	9	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	59,1
Kalimantan Barat	14	11	78,6
Kalimantan Tengah	14	12	85,7
Kalimantan Selatan	13	10	76,9
Kalimantan Timur	10	8	80,0
Kalimantan Utara	5	5	100,0
Sulawesi Utara	15	11	73,3
Sulawesi Tengah	13	8	61,5
Sulawesi Selatan	24	17	70,8
Sulawesi Tenggara	17	11	64,7
Gorontalo	6	3	50,0
Sulawesi Barat	6	6	100,0
Maluku	11	5	45,5
Maluku Utara	10	7	70,0
Papua Barat	13	6	46,2
Papua	29	11	37,9
INDONESIA	514	350	68,1

Tabel 3.2.36 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Padat Populasi Jentik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Melakukan Kegiatan survei padat populasi jentik (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	56,5	30,4	65,2	26,1
Sumatera Utara	33	39,4	18,2	66,7	24,2
Sumatera Barat	19	42,1	31,6	68,4	31,6
Riau	12	58,3	41,7	83,3	25,0
Jambi	11	54,5	27,3	81,8	9,1
Sumatera Selatan	17	58,8	17,6	70,6	5,9
Bengkulu	10	70,0	30,0	70,0	30,0
Lampung	15	46,7	20,0	66,7	40,0
Kep.Bangka Belitung	7	57,1	42,9	100,0	28,6
Kepulauan Riau	7	71,4	42,9	57,1	28,6
DKI Jakarta	6	33,3	16,7	66,7	16,7
Jawa Barat	27	25,9	33,3	70,4	37,0
Jawa Tengah	35	42,9	25,7	62,9	34,3
DI Yogyakarta	5	40,0	0,0	100,0	40,0
Jawa Timur	38	23,7	13,2	76,3	42,1
Banten	8	37,5	50,0	75,0	37,5
Bali	9	55,6	11,1	88,9	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	70,0	10,0	100,0	50,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	18,2	63,6	9,1
Kalimantan Barat	14	42,9	28,6	57,1	28,6
Kalimantan Tengah	14	57,1	21,4	85,7	28,6
Kalimantan Selatan	13	53,8	15,4	84,6	30,8
Kalimantan Timur	10	50,0	10,0	60,0	30,0
Kalimantan Utara	5	100,0	80,0	40,0	40,0
Sulawesi Utara	15	60,0	20,0	73,3	20,0
Sulawesi Tengah	13	61,5	30,8	76,9	46,2
Sulawesi Selatan	24	70,8	33,3	79,2	25,0
Sulawesi Tenggara	17	47,1	5,9	58,8	5,9
Gorontalo	6	16,7	16,7	83,3	33,3
Sulawesi Barat	6	83,3	50,0	83,3	33,3
Maluku	11	45,5	9,1	27,3	9,1
Maluku Utara	10	60,0	30,0	70,0	10,0
Papua Barat	13	46,2	38,5	53,8	0,0
Papua	29	41,4	34,5	37,9	6,9
INDONESIA	514	48,4	25,1	68,7	26,1

Tabel 3.2.37 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Padat Populasi Nyamuk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Melakukan Kegiatan survei padat populasi nyamuk (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	39,1	30,4	39,1	13,0
Sumatera Utara	33	30,3	15,2	57,6	24,2
Sumatera Barat	19	36,8	21,1	42,1	15,8
Riau	12	50,0	8,3	58,3	16,7
Jambi	11	36,4	9,1	63,6	0,0
Sumatera Selatan	17	52,9	17,6	35,3	5,9
Bengkulu	10	50,0	20,0	40,0	20,0
Lampung	15	26,7	6,7	33,3	13,3
Kep.Bangka Belitung	7	42,9	28,6	71,4	28,6
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	42,9	14,3
DKI Jakarta	6	50,0	33,3	66,7	33,3
Jawa Barat	27	14,8	0,0	33,3	3,7
Jawa Tengah	35	42,9	22,9	34,3	22,9
DI Yogyakarta	5	60,0	0,0	60,0	20,0
Jawa Timur	38	26,3	5,3	52,6	28,9
Banten	8	25,0	12,5	37,5	25,0
Bali	9	44,4	11,1	55,6	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	20,0	0,0	10,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	22,7	9,1	22,7	0,0
Kalimantan Barat	14	35,7	21,4	28,6	21,4
Kalimantan Tengah	14	35,7	21,4	64,3	28,6
Kalimantan Selatan	13	53,8	15,4	38,5	15,4
Kalimantan Timur	10	30,0	0,0	40,0	20,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	40,0	40,0
Sulawesi Utara	15	40,0	13,3	60,0	20,0
Sulawesi Tengah	13	53,8	30,8	30,8	23,1
Sulawesi Selatan	24	33,3	20,8	37,5	12,5
Sulawesi Tenggara	17	23,5	5,9	29,4	0,0
Gorontalo	6	16,7	16,7	66,7	33,3
Sulawesi Barat	6	66,7	33,3	50,0	16,7
Maluku	11	27,3	18,2	18,2	9,1
Maluku Utara	10	50,0	30,0	50,0	10,0
Papua Barat	13	38,5	30,8	23,1	0,0
Papua	29	20,7	24,1	20,7	6,9
INDONESIA	514	35,2	16,5	40,7	16,1

Tabel 3.2.38 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Tempat Perindukan Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Melakukan Kegiatan Survei Tempat Perindukan (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	60,9	34,8	65,2	17,4
Sumatera Utara	33	39,4	21,2	63,6	27,3
Sumatera Barat	19	47,4	31,6	68,4	36,8
Riau	12	50,0	8,3	66,7	16,7
Jambi	11	63,6	9,1	63,6	9,1
Sumatera Selatan	17	58,8	17,6	52,9	11,8
Bengkulu	10	70,0	30,0	70,0	30,0
Lampung	15	40,0	6,7	53,3	26,7
Kep.Bangka Belitung	7	57,1	28,6	85,7	28,6
Kepulauan Riau	7	85,7	71,4	85,7	42,9
DKI Jakarta	6	33,3	16,7	66,7	16,7
Jawa Barat	27	22,2	7,4	59,3	22,2
Jawa Tengah	35	42,9	20,0	60,0	34,3
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	80,0	60,0
Jawa Timur	38	34,2	7,9	63,2	31,6
Banten	8	50,0	37,5	75,0	37,5
Bali	9	55,6	22,2	77,8	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	0,0	70,0	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	59,1	18,2	68,2	9,1
Kalimantan Barat	14	50,0	28,6	57,1	28,6
Kalimantan Tengah	14	42,9	21,4	64,3	28,6
Kalimantan Selatan	13	46,2	15,4	69,2	30,8
Kalimantan Timur	10	60,0	0,0	70,0	20,0
Kalimantan Utara	5	80,0	40,0	60,0	60,0
Sulawesi Utara	15	66,7	13,3	60,0	26,7
Sulawesi Tengah	13	76,9	38,5	76,9	46,2
Sulawesi Selatan	24	91,7	33,3	83,3	29,2
Sulawesi Tenggara	17	41,2	5,9	58,8	5,9
Gorontalo	6	33,3	16,7	66,7	33,3
Sulawesi Barat	6	83,3	50,0	66,7	16,7
Maluku	11	45,5	9,1	18,2	9,1
Maluku Utara	10	70,0	30,0	70,0	20,0
Papua Barat	13	53,8	30,8	46,2	7,7
Papua	29	37,9	24,1	31,0	10,3
INDONESIA	514	52,1	20,4	62,5	24,9

Tabel 3.2.39 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pemantauan Resistensi Nyamuk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan Kegiatan pemantauan resistensi nyamuk (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	13,0	4,3	8,7	0,0
Sumatera Utara	33	18,2	6,1	24,2	12,1
Sumatera Barat	19	26,3	15,8	31,6	15,8
Riau	12	33,3	8,3	41,7	16,7
Jambi	11	36,4	9,1	36,4	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	11,8	17,6	0,0
Bengkulu	10	30,0	20,0	40,0	10,0
Lampung	15	20,0	6,7	33,3	6,7
Kep.Bangka Belitung	7	28,6	14,3	14,3	14,3
Kepulauan Riau	7	28,6	28,6	28,6	14,3
DKI Jakarta	6	33,3	16,7	66,7	16,7
Jawa Barat	27	7,4	0,0	3,7	3,7
Jawa Tengah	35	11,4	5,7	22,9	8,6
DI Yogyakarta	5	20,0	0,0	60,0	0,0
Jawa Timur	38	13,2	2,6	31,6	15,8
Banten	8	12,5	0,0	37,5	0,0
Bali	9	22,2	11,1	44,4	33,3
Nusa Tenggara Barat	10	20,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	9,1	4,5	13,6	0,0
Kalimantan Barat	14	14,3	14,3	28,6	7,1
Kalimantan Tengah	14	7,1	7,1	28,6	14,3
Kalimantan Selatan	13	7,7	0,0	30,8	7,7
Kalimantan Timur	10	20,0	10,0	10,0	10,0
Kalimantan Utara	5	0,0	0,0	20,0	20,0
Sulawesi Utara	15	40,0	13,3	40,0	13,3
Sulawesi Tengah	13	15,4	15,4	7,7	7,7
Sulawesi Selatan	24	20,8	8,3	33,3	20,8
Sulawesi Tenggara	17	11,8	0,0	17,6	0,0
Gorontalo	6	16,7	16,7	50,0	16,7
Sulawesi Barat	6	0,0	0,0	16,7	0,0
Maluku	11	18,2	9,1	9,1	9,1
Maluku Utara	10	20,0	10,0	20,0	10,0
Papua Barat	13	30,8	0,0	7,7	0,0
Papua	29	17,2	17,2	20,7	3,4
INDONESIA	514	18,1	7,8	24,1	8,8

Tabel 3.2.40 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pemantauan Resistensi Jentik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan Kegiatan pemantauan resistensi jentik (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	4,3	4,3	8,7	0,0
Sumatera Utara	33	15,2	6,1	24,2	12,1
Sumatera Barat	19	26,3	15,8	31,6	15,8
Riau	12	33,3	16,7	41,7	25,0
Jambi	11	27,3	9,1	45,5	0,0
Sumatera Selatan	17	17,6	11,8	17,6	0,0
Bengkulu	10	20,0	20,0	30,0	20,0
Lampung	15	13,3	6,7	20,0	6,7
Kep.Bangka Belitung	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	28,6	28,6	14,3
DKI Jakarta	6	33,3	16,7	50,0	16,7
Jawa Barat	27	3,7	0,0	11,1	7,4
Jawa Tengah	35	11,4	5,7	14,3	5,7
DI Yogyakarta	5	20,0	0,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	7,9	2,6	21,1	13,2
Banten	8	12,5	12,5	25,0	12,5
Bali	9	33,3	11,1	44,4	33,3
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	9,1	4,5	9,1	0,0
Kalimantan Barat	14	7,1	7,1	28,6	14,3
Kalimantan Tengah	14	14,3	14,3	35,7	21,4
Kalimantan Selatan	13	7,7	0,0	23,1	7,7
Kalimantan Timur	10	10,0	0,0	10,0	10,0
Kalimantan Utara	5	0,0	0,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	40,0	13,3	40,0	13,3
Sulawesi Tengah	13	15,4	15,4	23,1	7,7
Sulawesi Selatan	24	16,7	8,3	25,0	8,3
Sulawesi Tenggara	17	11,8	0,0	23,5	0,0
Gorontalo	6	0,0	16,7	50,0	16,7
Sulawesi Barat	6	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	11	18,2	9,1	9,1	9,1
Maluku Utara	10	20,0	10,0	20,0	10,0
Papua Barat	13	15,4	0,0	7,7	0,0
Papua	29	24,1	24,1	20,7	6,9
INDONESIA	514	14,8	8,2	21,8	8,8

Tabel 3.2.41 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Survei Dinamika Penularan Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan kegiatan survei dinamika penularan penyakit tular vektor (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	21,7	17,4	43,5	8,7
Sumatera Utara	33	21,2	12,1	27,3	12,1
Sumatera Barat	19	21,1	10,5	26,3	10,5
Riau	12	41,7	33,3	50,0	25,0
Jambi	11	36,4	18,2	45,5	9,1
Sumatera Selatan	17	23,5	11,8	23,5	5,9
Bengkulu	10	50,0	30,0	40,0	30,0
Lampung	15	13,3	6,7	26,7	6,7
Kep.Bangka Belitung	7	57,1	28,6	42,9	14,3
Kepulauan Riau	7	57,1	42,9	57,1	14,3
DKI Jakarta	6	33,3	16,7	33,3	16,7
Jawa Barat	27	11,1	7,4	22,2	7,4
Jawa Tengah	35	25,7	14,3	31,4	11,4
DI Yogyakarta	5	20,0	20,0	60,0	20,0
Jawa Timur	38	5,3	2,6	21,1	7,9
Banten	8	37,5	25,0	25,0	25,0
Bali	9	33,3	11,1	22,2	22,2
Nusa Tenggara Barat	10	20,0	10,0	10,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	18,2	9,1	18,2	4,5
Kalimantan Barat	14	28,6	28,6	50,0	21,4
Kalimantan Tengah	14	35,7	21,4	35,7	21,4
Kalimantan Selatan	13	38,5	15,4	38,5	15,4
Kalimantan Timur	10	50,0	0,0	40,0	20,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	80,0	40,0
Sulawesi Utara	15	40,0	20,0	40,0	13,3
Sulawesi Tengah	13	38,5	30,8	15,4	7,7
Sulawesi Selatan	24	41,7	16,7	37,5	12,5
Sulawesi Tenggara	17	41,2	11,8	41,2	0,0
Gorontalo	6	16,7	16,7	66,7	16,7
Sulawesi Barat	6	66,7	16,7	66,7	16,7
Maluku	11	36,4	18,2	27,3	9,1
Maluku Utara	10	30,0	10,0	30,0	10,0
Papua Barat	13	46,2	15,4	30,8	0,0
Papua	29	24,1	20,7	13,8	6,9
INDONESIA	514	28,8	15,6	31,9	11,7

Tabel 3.2.42 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Distribusi Kelambu Berinsektisida dan Penyemprotan Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan Distribusi kelambu berinsektisida (%)		Melakukan Penyemprotan (%)	
		Malaria	Filariasis	Malaria	Filariasis
Aceh	23	26,1	8,7	39,1	8,7
Sumatera Utara	33	21,2	3,0	30,3	12,1
Sumatera Barat	19	26,3	15,8	15,8	5,3
Riau	12	58,3	16,7	50,0	8,3
Jambi	11	72,7	9,1	18,2	0,0
Sumatera Selatan	17	41,2	11,8	35,3	17,6
Bengkulu	10	30,0	0,0	30,0	0,0
Lampung	15	33,3	6,7	26,7	0,0
Kep.Bangka Belitung	7	14,3	0,0	71,4	14,3
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	57,1	28,6
DKI Jakarta	6	0,0	16,7	16,7	16,7
Jawa Barat	27	7,4	3,7	14,8	7,4
Jawa Tengah	35	20,0	2,9	14,3	5,7
DI Yogyakarta	5	0,0	20,0	20,0	0,0
Jawa Timur	38	10,5	0,0	13,2	5,3
Banten	8	12,5	12,5	12,5	12,5
Bali	9	11,1	11,1	22,2	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	70,0	10,0	10,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	31,8	13,6	13,6
Kalimantan Barat	14	57,1	28,6	42,9	14,3
Kalimantan Tengah	14	78,6	14,3	50,0	7,1
Kalimantan Selatan	13	53,8	7,7	7,7	0,0
Kalimantan Timur	10	80,0	10,0	10,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	0,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	53,3	6,7	46,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	76,9	15,4	15,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	25,0	12,5	25,0	8,3
Sulawesi Tenggara	17	52,9	11,8	17,6	0,0
Gorontalo	6	16,7	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	83,3	16,7	16,7	0,0
Maluku	11	36,4	18,2	63,6	18,2
Maluku Utara	10	80,0	30,0	40,0	10,0
Papua Barat	13	76,9	69,2	30,8	23,1
Papua	29	96,6	55,2	44,8	17,2
INDONESIA	514	41,4	14,6	26,8	8,2

Tabel 3.2.43 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Larvasida Kimia Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan kegiatan larvasida kimia (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	39,1	13,0	73,9	17,4
Sumatera Utara	33	15,2	9,1	72,7	33,3
Sumatera Barat	19	5,3	10,5	78,9	31,6
Riau	12	25,0	16,7	75,0	25,0
Jambi	11	36,4	9,1	81,8	9,1
Sumatera Selatan	17	35,3	17,6	82,4	17,6
Bengkulu	10	40,0	10,0	60,0	0,0
Lampung	15	40,0	6,7	73,3	40,0
Kep.Bangka Belitung	7	71,4	28,6	85,7	42,9
Kepulauan Riau	7	71,4	28,6	71,4	14,3
DKI Jakarta	6	50,0	33,3	100,0	50,0
Jawa Barat	27	18,5	22,2	92,6	51,9
Jawa Tengah	35	25,7	20,0	94,3	57,1
DI Yogyakarta	5	80,0	0,0	100,0	40,0
Jawa Timur	38	10,5	5,3	89,5	52,6
Banten	8	12,5	12,5	87,5	50,0
Bali	9	55,6	22,2	88,9	55,6
Nusa Tenggara Barat	10	60,0	10,0	100,0	50,0
Nusa Tenggara Timur	22	40,9	27,3	77,3	22,7
Kalimantan Barat	14	42,9	28,6	78,6	28,6
Kalimantan Tengah	14	42,9	7,1	78,6	21,4
Kalimantan Selatan	13	15,4	7,7	100,0	38,5
Kalimantan Timur	10	30,0	20,0	100,0	40,0
Kalimantan Utara	5	60,0	20,0	100,0	80,0
Sulawesi Utara	15	40,0	0,0	73,3	33,3
Sulawesi Tengah	13	38,5	7,7	69,2	46,2
Sulawesi Selatan	24	29,2	16,7	91,7	37,5
Sulawesi Tenggara	17	29,4	11,8	76,5	17,6
Gorontalo	6	33,3	16,7	100,0	33,3
Sulawesi Barat	6	33,3	16,7	50,0	50,0
Maluku	11	54,5	18,2	45,5	18,2
Maluku Utara	10	40,0	10,0	40,0	10,0
Papua Barat	13	38,5	30,8	30,8	7,7
Papua	29	20,7	10,3	34,5	6,9
INDONESIA	514	31,5	14,6	77,4	33,1

Tabel 3.2.44 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pengendalian Secara Biologi Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan kegiatan pengendalian secara biologi (%)			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
Aceh	23	8,7	4,3	21,7	8,7
Sumatera Utara	33	12,1	6,1	27,3	12,1
Sumatera Barat	19	21,1	21,1	57,9	26,3
Riau	12	33,3	16,7	75,0	25,0
Jambi	11	18,2	0,0	45,5	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	17,6	29,4	11,8
Bengkulu	10	20,0	0,0	20,0	0,0
Lampung	15	33,3	6,7	53,3	33,3
Kep.Bangka Belitung	7	57,1	28,6	57,1	28,6
Kepulauan Riau	7	42,9	14,3	42,9	14,3
DKI Jakarta	6	16,7	16,7	50,0	16,7
Jawa Barat	27	25,9	25,9	55,6	33,3
Jawa Tengah	35	28,6	17,1	51,4	22,9
DI Yogyakarta	5	20,0	0,0	60,0	40,0
Jawa Timur	38	10,5	2,6	63,2	39,5
Banten	8	25,0	12,5	75,0	62,5
Bali	9	44,4	22,2	66,7	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	50,0	20,0	40,0	50,0
Nusa Tenggara Timur	22	18,2	13,6	9,1	9,1
Kalimantan Barat	14	21,4	14,3	42,9	21,4
Kalimantan Tengah	14	14,3	14,3	50,0	21,4
Kalimantan Selatan	13	30,8	15,4	69,2	38,5
Kalimantan Timur	10	30,0	0,0	50,0	30,0
Kalimantan Utara	5	20,0	20,0	40,0	20,0
Sulawesi Utara	15	26,7	6,7	46,7	20,0
Sulawesi Tengah	13	7,7	0,0	7,7	7,7
Sulawesi Selatan	24	45,8	8,3	66,7	29,2
Sulawesi Tenggara	17	11,8	11,8	29,4	5,9
Gorontalo	6	16,7	0,0	50,0	16,7
Sulawesi Barat	6	33,3	16,7	16,7	33,3
Maluku	11	27,3	18,2	18,2	18,2
Maluku Utara	10	40,0	10,0	30,0	10,0
Papua Barat	13	15,4	15,4	7,7	7,7
Papua	29	20,7	17,2	10,3	6,9
INDONESIA	514	23,7	12,1	41,4	21,6

Tabel 3.2.45 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Kegiatan Pengasapan (*Fogging*) dan Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN) Untuk Pengendalian Penyakit Tular Vektor Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Melakukan kegiatan pengasapan (<i>fogging</i>) (%)		Melakukan kegiatan pembasmian sarang nyamuk (PSN) (%)	
		DBD	Chikungunya	DBD	Chikungunya
Aceh	23	91,3	34,8	87,0	34,8
Sumatera Utara	33	93,9	36,4	90,9	45,5
Sumatera Barat	19	89,5	36,8	100,0	47,4
Riau	12	91,7	58,3	100,0	50,0
Jambi	11	100,0	18,2	100,0	27,3
Sumatera Selatan	17	100,0	41,2	94,1	29,4
Bengkulu	10	100,0	30,0	90,0	40,0
Lampung	15	100,0	53,3	100,0	53,3
Kep.Bangka Belitung	7	100,0	28,6	100,0	42,9
Kepulauan Riau	7	100,0	57,1	100,0	57,1
DKI Jakarta	6	100,0	50,0	100,0	33,3
Jawa Barat	27	100,0	44,4	96,3	55,6
Jawa Tengah	35	94,3	54,3	97,1	65,7
DI Yogyakarta	5	100,0	40,0	100,0	60,0
Jawa Timur	38	97,4	63,2	100,0	63,2
Banten	8	100,0	62,5	100,0	62,5
Bali	9	100,0	66,7	100,0	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	70,0	100,0	70,0
Nusa Tenggara Timur	22	72,7	31,8	95,5	50,0
Kalimantan Barat	14	100,0	35,7	100,0	35,7
Kalimantan Tengah	14	92,9	42,9	92,9	50,0
Kalimantan Selatan	13	100,0	53,8	100,0	69,2
Kalimantan Timur	10	100,0	40,0	100,0	40,0
Kalimantan Utara	5	80,0	60,0	100,0	60,0
Sulawesi Utara	15	93,3	33,3	93,3	53,3
Sulawesi Tengah	13	100,0	69,2	84,6	69,2
Sulawesi Selatan	24	100,0	45,8	100,0	45,8
Sulawesi Tenggara	17	100,0	23,5	82,4	23,5
Gorontalo	6	100,0	50,0	100,0	50,0
Sulawesi Barat	6	66,7	50,0	83,3	50,0
Maluku	11	81,8	27,3	45,5	27,3
Maluku Utara	10	70,0	10,0	80,0	10,0
Papua Barat	13	30,8	7,7	30,8	15,4
Papua	29	55,2	17,2	48,3	10,3
INDONESIA	514	90,7	41,8	90,1	46,1

Tabel 3.2.46 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Malaria Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	kab/kota dengan kejadian penyakit malaria		Jumlah kejadian penyakit malaria				
		n	%	n	mean	min	max	SD
Aceh	23	12	52,2	168	14,00	0	46	16,03
Sumatera Utara	33	17	51,5	1.298	76,35	1	275	85,98
Sumatera Barat	19	9	47,4	512	56,89	1	327	104,79
Riau	12	8	66,7	65	8,13	1	26	9,46
Jambi	11	8	72,7	174	24,86	2	82	34,31
Sumatera Selatan	17	15	88,2	1.051	70,07	2	441	120,16
Bengkulu	10	10	100,0	319	31,90	2	80	29,57
Lampung	15	10	66,7	3.165	316,50	3	2.043	648,78
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7	222	37,00	5	149	55,58
Kepulauan Riau	7	4	57,1	359	89,75	22	182	80,75
DKI Jakarta	6	3	50,0	47	15,67	9	22	6,51
Jawa Barat	27	21	77,8	298	14,19	1	60	14,23
Jawa Tengah	35	28	80,0	1.175	41,96	0	457	90,97
DI Yogyakarta	5	1	20,0	28	28,00	28	28	
Jawa Timur	38	28	73,7	472	16,86	1	97	22,29
Banten	8	7	87,5	52	7,43	2	19	6,55
Bali	9	6	66,7	26	4,33	1	13	4,63
Nusa Tenggara Barat	10	9	90,0	1.766	196,22	4	1.015	325,59
Nusa Tenggara Timur	22	22	100,0	18.425	837,50	3	8.050	1.718,94
Kalimantan Barat	14	13	92,9	1.674	139,50	1	1.569	450,31
Kalimantan Tengah	14	7	50,0	727	103,86	12	423	144,95
Kalimantan Selatan	13	13	100,0	799	61,46	5	203	56,54
Kalimantan Timur	10	9	90,0	2.368	263,11	6	1.195	383,46
Kalimantan Utara	5	4	80,0	47	11,75	2	23	9,53
Sulawesi Utara	15	12	80,0	550	45,83	3	181	53,32
Sulawesi Tengah	13	11	84,6	387	35,18	2	86	29,19
Sulawesi Selatan	24	23	95,8	1.167	50,74	1	190	47,84
Sulawesi Tenggara	17	16	94,1	927	57,94	4	321	78,82
Gorontalo	6	5	83,3	61	12,20	1	42	16,84
Sulawesi Barat	6	6	100,0	235	39,17	8	114	43,12
Maluku	11	10	90,9	3.644	364,40	19	2.320	693,71
Maluku Utara	10	10	100,0	686	68,60	10	189	65,74
Papua Barat	13	11	84,6	12.384	1.376,00	88	5.467	2.021,98
Papua	29	28	96,6	145.832	5.608,92	8	53.430	11.509,94
INDONESIA	514	402	78,2	201.110	507,85	0	53.430	3.250,19

Tabel 3.2.47 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	kab/kota dengan kejadian penyakit DBD		Jumlah kejadian penyakit DBD				
		n	%	n	mean	min	max	SD
Aceh	23	23	100,0	1.520	66,09	1	187	47,93
Sumatera Utara	33	32	97,0	5.962	186,31	0	1.490	331,95
Sumatera Barat	19	19	100,0	2.261	119,00	10	699	156,38
Riau	12	12	100,0	1.252	104,33	24	358	91,28
Jambi	11	11	100,0	1.208	109,82	6	237	86,26
Sumatera Selatan	17	17	100,0	2.430	142,94	20	642	166,41
Bengkulu	10	10	100,0	1.255	125,50	30	280	77,03
Lampung	15	14	93,3	3.008	214,86	5	1.114	301,29
Kep.Bangka Belitung	7	7	100,0	886	126,57	17	301	99,03
Kepulauan Riau	7	7	100,0	1.378	196,86	2	639	236,57
DKI Jakarta	6	6	100,0	2.984	497,33	11	913	409,18
Jawa Barat	27	27	100,0	12.235	453,15	12	2.826	615,79
Jawa Tengah	35	35	100,0	3.982	113,77	6	618	130,22
DI Yogyakarta	5	5	100,0	753	150,60	86	228	56,14
Jawa Timur	38	37	97,4	9.360	252,97	11	827	202,07
Banten	8	8	100,0	1.260	157,50	3	484	150,59
Bali	9	9	100,0	968	107,56	19	366	107,54
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	571	57,10	7	188	50,99
Nusa Tenggara Timur	22	18	81,8	1.538	85,44	3	539	131,11
Kalimantan Barat	14	14	100,0	3.178	244,46	64	808	208,33
Kalimantan Tengah	14	14	100,0	2.580	184,29	28	536	136,17
Kalimantan Selatan	13	13	100,0	2.051	157,77	28	396	107,66
Kalimantan Timur	10	10	100,0	4.249	424,90	87	1.213	398,04
Kalimantan Utara	5	5	100,0	379	75,80	18	124	44,18
Sulawesi Utara	15	14	93,3	2.034	145,29	6	330	110,32
Sulawesi Tengah	13	13	100,0	919	76,58	5	401	108,92
Sulawesi Selatan	24	24	100,0	2.349	97,88	4	256	66,08
Sulawesi Tenggara	17	17	100,0	853	50,18	7	213	58,41
Gorontalo	6	6	100,0	934	155,67	52	303	96,19
Sulawesi Barat	6	6	100,0	408	68,00	0	165	73,72
Maluku	11	6	54,5	308	51,33	18	71	18,86
Maluku Utara	10	7	70,0	262	37,43	1	94	36,74
Papua Barat	13	7	53,8	179	25,57	0	83	35,58
Papua	29	13	44,8	9.228	769,00	1	9.008	2.594,69
INDONESIA	514	476	92,6	84.722	179,12	0	9.008	474,50

Tabel 3.2.48 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Chikungunya Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kab/kota dengan kejadian penyakit chikungunya		Jumlah kejadian penyakit chikungunya
		n	%	n
Aceh	23	1	4,3	0
Sumatera Utara	33	0	0,0	0
Sumatera Barat	19	1	5,3	2
Riau	12	1	8,3	0
Jambi	11	0	0,0	0
Sumatera Selatan	17	0	0,0	0
Bengkulu	10	1	10,0	90
Lampung	15	2	13,3	52
Kep.Bangka Belitung	7	0	0,0	0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	0
DKI Jakarta	6	2	33,3	2
Jawa Barat	27	2	7,4	104
Jawa Tengah	35	5	14,3	90
DI Yogyakarta	5	0	0,0	0
Jawa Timur	38	4	10,5	58
Banten	8	0	0,0	0
Bali	9	0	0,0	0
Nusa Tenggara Barat	10	1	10,0	1
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0	0
Kalimantan Barat	14	0	0,0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0,0	0
Kalimantan Selatan	13	1	7,7	92
Kalimantan Timur	10	0	0,0	0
Kalimantan Utara	5	0	0,0	0
Sulawesi Utara	15	0	0,0	0
Sulawesi Tengah	13	4	30,8	78
Sulawesi Selatan	24	0	0,0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0,0	0
Gorontalo	6	1	16,7	36
Sulawesi Barat	6	0	0,0	0
Maluku	11	0	0,0	0
Maluku Utara	10	0	0,0	0
Papua Barat	13	1	7,7	0
Papua	29	0	0,0	0
INDONESIA	514	27	5,3	605

Tabel 3.2.49 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Leptospirosis Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	kab/kota dengan kejadian penyakit leptospirosis		Jumlah kejadian penyakit leptospirosis
		n	%	n
Aceh	23	1	4,3	0
Sumatera Utara	33	0	0,0	0
Sumatera Barat	19	0	0,0	0
Riau	12	1	8,3	0
Jambi	11	0	0,0	0
Sumatera Selatan	17	1	5,9	3
Bengkulu	10	0	0,0	0
Lampung	15	0	0,0	0
Kep.Bangka Belitung	7	0	0,0	0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	0
DKI Jakarta	6	5	83,3	25
Jawa Barat	27	3	11,1	5
Jawa Tengah	35	17	48,6	379
DI Yogyakarta	5	4	80,0	168
Jawa Timur	38	11	28,9	74
Banten	8	4	50,0	114
Bali	9	0	0,0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0	0
Nusa Tenggara Timur	22	2	9,1	13
Kalimantan Barat	14	1	7,1	1
Kalimantan Tengah	14	1	7,1	7
Kalimantan Selatan	13	0	0,0	0
Kalimantan Timur	10	1	10,0	14
Kalimantan Utara	5	0	0,0	0
Sulawesi Utara	15	0	0,0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0,0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0,0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0,0	0
Gorontalo	6	0	0,0	0
Sulawesi Barat	6	0	0,0	0
Maluku	11	2	18,2	3
Maluku Utara	10	0	0,0	0
Papua Barat	13	0	0,0	0
Papua	29	0	0,0	0
INDONESIA	514	54	10,5	806

Tabel 3.2.50 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Japanese Encephalitis Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	kab/kota dengan kejadian penyakit Japanese Encephalitis		Jumlah kejadian penyakit Japanese Encephalitis n
		n	%	
Aceh	23	1	4,3	0
Sumatera Utara	33	0	0,0	0
Sumatera Barat	19	0	0,0	0
Riau	12	1	8,3	0
Jambi	11	0	0,0	0
Sumatera Selatan	17	0	0,0	0
Bengkulu	10	0	0,0	0
Lampung	15	0	0,0	0
Kep.Bangka Belitung	7	0	0,0	0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	0
DKI Jakarta	6	0	0,0	0
Jawa Barat	27	0	0,0	0
Jawa Tengah	35	0	0,0	0
DI Yogyakarta	5	0	0,0	0
Jawa Timur	38	3	7,9	1
Banten	8	0	0,0	0
Bali	9	2	22,2	6
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0	0
Kalimantan Barat	14	0	0,0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0,0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0,0	0
Kalimantan Timur	10	0	0,0	0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	1
Sulawesi Utara	15	0	0,0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0,0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0,0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0,0	0
Gorontalo	6	0	0,0	0
Sulawesi Barat	6	0	0,0	0
Maluku	11	0	0,0	0
Maluku Utara	10	0	0,0	0
Papua Barat	13	0	0,0	0
Papua	29	0	0,0	0
INDONESIA	514	8	1,6	8

Tabel 3.2.51 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Nilai *Annual Parasit Index* (API) <1/1000 Penduduk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/Kota memiliki data API	Kab/Kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk	
			n	%
Aceh	23	17	16	94,1
Sumatera Utara	33	19	11	57,9
Sumatera Barat	19	13	10	76,9
Riau	12	8	7	87,5
Jambi	11	9	7	77,8
Sumatera Selatan	17	15	13	86,7
Bengkulu	10	9	9	100,0
Lampung	15	14	13	92,9
Kep.Bangka Belitung	7	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	5	4	80,0
DKI Jakarta	6	4	4	100,0
Jawa Barat	27	12	9	75,0
Jawa Tengah	35	18	17	94,4
DI Yogyakarta	5	1	1	100,0
Jawa Timur	38	22	19	86,4
Banten	8	5	4	80,0
Bali	9	8	7	87,5
Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	22	10	45,5
Kalimantan Barat	14	13	11	84,6
Kalimantan Tengah	14	12	10	83,3
Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	7	70,0
Kalimantan Utara	5	4	4	100,0
Sulawesi Utara	15	14	10	71,4
Sulawesi Tengah	13	11	11	100,0
Sulawesi Selatan	24	24	22	91,7
Sulawesi Tenggara	17	16	14	87,5
Gorontalo	6	5	4	80,0
Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
Maluku	11	11	4	36,4
Maluku Utara	10	10	3	30,0
Papua Barat	13	9	0	0,0
Papua	29	26	2	7,7
INDONESIA	514	402	298	74,1

Tabel 3.2.52 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Nilai *Annual Malaria Incidence* (AMI) < 1/1000 Penduduk Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/Kota memiliki data AMI	Kab/Kota yang mencapai AMI < 1/1000 penduduk	
			n	%
Aceh	17	11	0	0,0
Sumatera Utara	19	7	3	42,9
Sumatera Barat	13	6	1	16,7
Riau	8	3	0	0,0
Jambi	9	5	3	60,0
Sumatera Selatan	15	5	2	40,0
Bengkulu	9	2	0	0,0
Lampung	14	11	4	36,4
Kep.Bangka Belitung	7	1	1	100,0
Kepulauan Riau	5	3	1	33,3
DKI Jakarta	4	4	4	100,0
Jawa Barat	12	5	4	80,0
Jawa Tengah	18	3	5	100,0
DI Yogyakarta	1	0	NA	NA
Jawa Timur	22	11	12	85,7
Banten	5	0	NA	NA
Bali	8	2	2	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	6	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	3	2	66,7
Kalimantan Barat	13	6	4	66,7
Kalimantan Tengah	12	3	2	66,7
Kalimantan Selatan	13	4	1	25,0
Kalimantan Timur	10	3	1	33,3
Kalimantan Utara	4	1	0	0,0
Sulawesi Utara	14	7	2	28,6
Sulawesi Tengah	11	4	1	25,0
Sulawesi Selatan	24	14	3	21,4
Sulawesi Tenggara	16	6	0	0,0
Gorontalo	5	1	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	1	33,3
Maluku	11	6	1	16,7
Maluku Utara	10	6	1	16,7
Papua Barat	9	4	0	0,0
Papua	26	11	0	0,0
INDONESIA	402	167	61	35,5

NA: Not Available

Tabel 3.2.53 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Cakupan 80 Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap			
		< 80%		≥80%	
		n	%	n	%
Aceh	23	17	73,9	6	26,1
Sumatera Utara	33	9	27,3	24	72,7
Sumatera Barat	19	9	47,4	10	52,6
Riau	12	6	50,0	6	50,0
Jambi	11	0	0,0	11	100,0
Sumatera Selatan	17	1	5,9	16	94,1
Bengkulu	10	2	20,0	8	80,0
Lampung	15	1	6,7	14	93,3
Kep.Bangka Belitung	7	0	0,0	7	100,0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	0	0,0	6	100,0
Jawa Barat	27	2	7,4	25	92,6
Jawa Tengah	35	0	0,0	35	100,0
DI Yogyakarta	5	0	0,0	5	100,0
Jawa Timur	38	2	5,3	36	94,7
Banten	8	0	0,0	8	100,0
Bali	9	0	0,0	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5	10	45,5
Kalimantan Barat	14	5	35,7	9	64,3
Kalimantan Tengah	14	3	21,4	11	78,6
Kalimantan Selatan	13	2	15,4	11	84,6
Kalimantan Timur	10	1	10,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	6	40,0	9	60,0
Sulawesi Tengah	13	3	23,1	10	76,9
Sulawesi Selatan	24	0	0,0	24	100,0
Sulawesi Tenggara	17	1	5,9	16	94,1
Gorontalo	6	2	33,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	3	50,0	3	50,0
Maluku	11	3	27,3	8	72,7
Maluku Utara	10	2	20,0	8	80,0
Papua Barat	13	6	46,2	7	53,8
Papua	29	15	51,7	14	48,3
INDONESIA	514	114	22,2	400	77,8

Tabel 3.2.54 Proporsi Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Melalui Pemeriksaan HbsAg, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Kabupaten/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Pemeriksaan HbsAg	
		n	%
Aceh	23	20	87,0
Sumatera Utara	33	10	30,3
Sumatera Barat	19	17	89,5
Riau	12	7	58,3
Jambi	11	7	63,6
Sumatera Selatan	17	11	64,7
Bengkulu	10	6	60,0
Lampung	15	13	86,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	85,7
Kepulauan Riau	7	6	85,7
DKI Jakarta	6	6	100,0
Jawa Barat	27	19	70,4
Jawa Tengah	35	31	88,6
DI Yogyakarta	5	4	80,0
Jawa Timur	38	37	97,4
Banten	8	8	100,0
Bali	9	7	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	59,1
Kalimantan Barat	14	11	78,6
Kalimantan Tengah	14	12	85,7
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	22	91,7
Sulawesi Tenggara	17	10	58,8
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	3	50,0
Maluku	11	4	36,4
Maluku Utara	10	7	70,0
Papua Barat	13	4	30,8
Papua	29	11	37,9
INDONESIA	514	381	74,1

Tabel 3.2.55 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Dari Ibu ke Anak Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B dari ibu ke anak		Kab/kota tidak melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B dari ibu ke anak	
			n	%	n	%
Aceh	23	20	15	75,0	5	25,0
Sumatera Utara	33	10	7	70,0	3	30,0
Sumatera Barat	19	17	16	94,1	1	5,9
Riau	12	7	5	71,4	2	28,6
Jambi	11	7	6	85,7	1	14,3
Sumatera Selatan	17	11	10	90,9	1	9,1
Bengkulu	10	6	6	100,0	0	0,0
Lampung	15	13	13	100,0	0	0,0
Kep.Bangka Belitung	7	6	4	66,7	2	33,3
Kepulauan Riau	7	6	5	83,3	1	16,7
DKI Jakarta	6	6	5	83,3	1	16,7
Jawa Barat	27	19	18	94,7	1	5,3
Jawa Tengah	35	31	21	67,7	10	32,3
DI Yogyakarta	5	4	4	100,0	0	0,0
Jawa Timur	38	37	30	81,1	7	18,9
Banten	8	8	6	75,0	2	25,0
Bali	9	7	6	85,7	1	14,3
Nusa Tenggara Barat	10	10	8	80,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	8	61,5	5	38,5
Kalimantan Barat	14	11	8	72,7	3	27,3
Kalimantan Tengah	14	12	9	75,0	3	25,0
Kalimantan Selatan	13	13	10	76,9	3	23,1
Kalimantan Timur	10	10	10	100,0	0	0,0
Kalimantan Utara	5	4	3	75,0	1	25,0
Sulawesi Utara	15	14	11	78,6	3	21,4
Sulawesi Tengah	13	12	12	100,0	0	0,0
Sulawesi Selatan	24	22	17	77,3	5	22,7
Sulawesi Tenggara	17	10	6	60,0	4	40,0
Gorontalo	6	6	6	100,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	2	66,7	1	33,3
Maluku	11	4	2	50,0	2	50,0
Maluku Utara	10	7	7	100,0	0	0,0
Papua Barat	13	4	4	100,0	0	0,0
Papua	29	11	6	54,5	5	45,5
INDONESIA	514	381	306	80,3	75	19,7

Tabel 3.2.56 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Pasangan Penderita Hepatitis B dan Orang yang Sering Berganti Pasangan Seks Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada pasangan penderita hepatitis B		Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada orang yang sering berganti pasangan seks	
			n	%	n	%
Aceh	23	20	9	45,0	1	5,0
Sumatera Utara	33	10	5	50,0	1	10,0
Sumatera Barat	19	17	11	64,7	5	29,4
Riau	12	7	1	14,3	1	14,3
Jambi	11	7	5	71,4	2	28,6
Sumatera Selatan	17	11	7	63,6	2	18,2
Bengkulu	10	6	4	66,7	2	33,3
Lampung	15	13	5	38,5	1	7,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	3	50,0	3	50,0
Kepulauan Riau	7	6	2	33,3	2	33,3
DKI Jakarta	6	6	2	33,3	2	33,3
Jawa Barat	27	19	8	42,1	5	26,3
Jawa Tengah	35	31	11	35,5	4	12,9
DI Yogyakarta	5	4	2	50,0	2	50,0
Jawa Timur	38	37	18	48,6	10	27,0
Banten	8	8	3	37,5	3	37,5
Bali	9	7	3	42,9	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	3	30,0	3	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	6	46,2	5	38,5
Kalimantan Barat	14	11	6	54,5	1	9,1
Kalimantan Tengah	14	12	7	58,3	6	50,0
Kalimantan Selatan	13	13	9	69,2	2	15,4
Kalimantan Timur	10	10	9	90,0	3	30,0
Kalimantan Utara	5	4	4	100,0	2	50,0
Sulawesi Utara	15	14	6	42,9	5	35,7
Sulawesi Tengah	13	12	3	25,0	3	25,0
Sulawesi Selatan	24	22	17	77,3	5	22,7
Sulawesi Tenggara	17	10	4	40,0	1	10,0
Gorontalo	6	6	0	0,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	1	33,3	0	0,0
Maluku	11	4	2	50,0	1	25,0
Maluku Utara	10	7	5	71,4	1	14,3
Papua Barat	13	4	2	50,0	1	25,0
Papua	29	11	2	18,2	3	27,3
INDONESIA	514	381	185	48,6	88	23,1

Tabel 3.2.57 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada MSM (Man Sex Man)/Homo Seksual dan Pengguna Jarum Suntik Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada MSM (Man Sex Man)/Homo seksual		Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada pengguna jarum suntik	
			n	%	n	%
Aceh	23	20	2	10,0	1	5,0
Sumatera Utara	33	10	0	0,0	0	0,0
Sumatera Barat	19	17	7	41,2	6	35,3
Riau	12	7	0	0,0	0	0,0
Jambi	11	7	1	14,3	2	28,6
Sumatera Selatan	17	11	2	18,2	2	18,2
Bengkulu	10	6	2	33,3	1	16,7
Lampung	15	13	0	0,0	0	0,0
Kep.Bangka Belitung	7	6	3	50,0	3	50,0
Kepulauan Riau	7	6	2	33,3	2	33,3
DKI Jakarta	6	6	3	50,0	3	50,0
Jawa Barat	27	19	6	31,6	6	31,6
Jawa Tengah	35	31	3	9,7	3	9,7
DI Yogyakarta	5	4	2	50,0	2	50,0
Jawa Timur	38	37	9	24,3	8	21,6
Banten	8	8	3	37,5	3	37,5
Bali	9	7	0	0,0	1	14,3
Nusa Tenggara Barat	10	10	2	20,0	2	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	6	46,2	5	38,5
Kalimantan Barat	14	11	1	9,1	0	0,0
Kalimantan Tengah	14	12	3	25,0	4	33,3
Kalimantan Selatan	13	13	2	15,4	1	7,7
Kalimantan Timur	10	10	5	50,0	3	30,0
Kalimantan Utara	5	4	2	50,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	14	5	35,7	3	21,4
Sulawesi Tengah	13	12	3	25,0	1	8,3
Sulawesi Selatan	24	22	5	22,7	4	18,2
Sulawesi Tenggara	17	10	1	10,0	2	20,0
Gorontalo	6	6	0	0,0	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	0	0,0	0	0,0
Maluku	11	4	1	25,0	0	0,0
Maluku Utara	10	7	2	28,6	1	14,3
Papua Barat	13	4	0	0,0	1	25,0
Papua	29	11	3	27,3	2	18,2
INDONESIA	514	381	86	22,6	72	18,9

Tabel 3.2.58 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Orang yang Kontak Serumah dengan Penderita dan Pasien yang Mendapat Hemodialisa Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada orang yang kontak serumah dengan penderita		Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada pasien yang mendapat hemodialisa	
			n	%	n	%
Aceh	23	20	7	35,0	1	5,0
Sumatera Utara	33	10	3	30,0	0	0,0
Sumatera Barat	19	17	5	29,4	4	23,5
Riau	12	7	2	28,6	0	0,0
Jambi	11	7	1	14,3	1	14,3
Sumatera Selatan	17	11	4	36,4	1	9,1
Bengkulu	10	6	3	50,0	0	0,0
Lampung	15	13	2	15,4	1	7,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	3	50,0	2	33,3
Kepulauan Riau	7	6	2	33,3	2	33,3
DKI Jakarta	6	6	2	33,3	2	33,3
Jawa Barat	27	19	6	31,6	4	21,1
Jawa Tengah	35	31	6	19,4	6	19,4
DI Yogyakarta	5	4	2	50,0	2	50,0
Jawa Timur	38	37	12	32,4	10	27,0
Banten	8	8	4	50,0	1	12,5
Bali	9	7	1	14,3	0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	3	30,0	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	4	30,8	1	7,7
Kalimantan Barat	14	11	2	18,2	2	18,2
Kalimantan Tengah	14	12	8	66,7	4	33,3
Kalimantan Selatan	13	13	1	7,7	1	7,7
Kalimantan Timur	10	10	6	60,0	2	20,0
Kalimantan Utara	5	4	1	25,0	0	0,0
Sulawesi Utara	15	14	3	21,4	0	0,0
Sulawesi Tengah	13	12	2	16,7	2	16,7
Sulawesi Selatan	24	22	11	50,0	4	18,2
Sulawesi Tenggara	17	10	5	50,0	1	10,0
Gorontalo	6	6	0	0,0	1	16,7
Sulawesi Barat	6	3	0	0,0	0	0,0
Maluku	11	4	1	25,0	1	25,0
Maluku Utara	10	7	2	28,6	1	14,3
Papua Barat	13	4	0	0,0	0	0,0
Papua	29	11	2	18,2	0	0,0
INDONESIA	514	381	116	30,4	57	15,0

Tabel 3.2.59 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Pekerja Kesehatan dan Petugas Laboratorium Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada pekerja kesehatan		Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada petugas laboratorium	
			n	%	n	%
Aceh	23	20	5	25,0	3	15,0
Sumatera Utara	33	10	4	40,0	4	40,0
Sumatera Barat	19	17	6	35,3	4	23,5
Riau	12	7	2	28,6	1	14,3
Jambi	11	7	5	71,4	4	57,1
Sumatera Selatan	17	11	7	63,6	8	72,7
Bengkulu	10	6	1	16,7	1	16,7
Lampung	15	13	8	61,5	7	53,8
Kep.Bangka Belitung	7	6	4	66,7	4	66,7
Kepulauan Riau	7	6	2	33,3	2	33,3
DKI Jakarta	6	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	19	9	47,4	12	63,2
Jawa Tengah	35	31	14	45,2	15	48,4
DI Yogyakarta	5	4	2	50,0	3	75,0
Jawa Timur	38	37	17	45,9	16	43,2
Banten	8	8	4	50,0	4	50,0
Bali	9	7	3	42,9	2	28,6
Nusa Tenggara Barat	10	10	4	40,0	3	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	5	38,5	4	30,8
Kalimantan Barat	14	11	6	54,5	6	54,5
Kalimantan Tengah	14	12	5	41,7	5	41,7
Kalimantan Selatan	13	13	5	38,5	6	46,2
Kalimantan Timur	10	10	9	90,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	4	3	75,0	2	50,0
Sulawesi Utara	15	14	7	50,0	5	35,7
Sulawesi Tengah	13	12	2	16,7	2	16,7
Sulawesi Selatan	24	22	18	81,8	17	77,3
Sulawesi Tenggara	17	10	6	60,0	5	50,0
Gorontalo	6	6	1	16,7	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	1	33,3	1	33,3
Maluku	11	4	1	25,0	0	0,0
Maluku Utara	10	7	3	42,9	3	42,9
Papua Barat	13	4	0	0,0	0	0,0
Papua	29	11	7	63,6	7	63,6
INDONESIA	514	381	180	47,2	167	43,8

Tabel 3.2.60 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B Pada Orang yang Berkunjung ke Wilayah dengan Endemisitas Tinggi Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota	Jumlah kab/kota yang menjawab	Kab/kota melakukan pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B pada orang yang berkunjung ke wilayah dengan endemisitas tinggi	
			n	%
Aceh	23	20	4	20,0
Sumatera Utara	33	10	0	0,0
Sumatera Barat	19	17	2	11,8
Riau	12	7	0	0,0
Jambi	11	7	1	14,3
Sumatera Selatan	17	11	0	0,0
Bengkulu	10	6	0	0,0
Lampung	15	13	1	7,7
Kep.Bangka Belitung	7	6	2	33,3
Kepulauan Riau	7	6	2	33,3
DKI Jakarta	6	6	1	16,7
Jawa Barat	27	19	4	21,1
Jawa Tengah	35	31	1	3,2
DI Yogyakarta	5	4	0	0,0
Jawa Timur	38	37	4	10,8
Banten	8	8	1	12,5
Bali	9	7	1	14,3
Nusa Tenggara Barat	10	10	1	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	3	23,1
Kalimantan Barat	14	11	0	0,0
Kalimantan Tengah	14	12	4	33,3
Kalimantan Selatan	13	13	0	0,0
Kalimantan Timur	10	10	3	30,0
Kalimantan Utara	5	4	0	0,0
Sulawesi Utara	15	14	1	7,1
Sulawesi Tengah	13	12	0	0,0
Sulawesi Selatan	24	22	3	13,6
Sulawesi Tenggara	17	10	2	20,0
Gorontalo	6	6	0	0,0
Sulawesi Barat	6	3	0	0,0
Maluku	11	4	1	25,0
Maluku Utara	10	7	0	0,0
Papua Barat	13	4	1	25,0
Papua	29	11	0	0,0
INDONESIA	514	381	43	11,3

Tabel 3.2.61 Distribusi Kabupaten/Kota berdasarkan Keberadaan Peraturan Tentang Kekarantinaan Kesehatan Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah kabupaten/kota	Memiliki peraturan tentang kekarantinaan kesehatan	
		n	%
Aceh	23	1	4,3
Sumatera Utara	33	0	0,0
Sumatera Barat	19	2	10,5
Riau	12	2	16,7
Jambi	11	1	9,1
Sumatera Selatan	17	2	11,8
Bengkulu	10	2	20,0
Lampung	15	0	0,0
Kep.Bangka Belitung	7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	3	42,9
DKI Jakarta	6	2	33,3
Jawa Barat	27	4	14,8
Jawa Tengah	35	8	22,9
DI Yogyakarta	5	1	20,0
Jawa Timur	38	3	7,9
Banten	8	1	12,5
Bali	9	1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0
Kalimantan Barat	14	1	7,1
Kalimantan Tengah	14	1	7,1
Kalimantan Selatan	13	1	7,7
Kalimantan Timur	9	1	11,1
Kalimantan Utara	5	0	0,0
Sulawesi Utara	15	2	13,3
Sulawesi Tengah	13	3	23,1
Sulawesi Selatan	24	4	16,7
Sulawesi Tenggara	17	2	11,8
Gorontalo	6	0	0,0
Sulawesi Barat	6	0	0,0
Maluku	11	1	9,1
Maluku Utara	10	1	10,0
Papua Barat	13	1	7,7
Papua	29	3	10,3
INDONESIA	513	55	10,7

3.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3.3.1 Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	SDMK Dinkes		SDMK UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	2.825	134,52	239	11,38
Sumatera Utara	33	4.264	137,55	1.662	50,36
Sumatera Barat	19	1.102	61,22	311	17,28
Riau	12	660	55	317	26,42
Jambi	11	3.258	296,18	3.856	350,55
Sumatera Selatan	17	1.137	71,06	261	15,35
Bengkulu	10	447	44,7	342	42,75
Lampung	15	1.531	102,07	370	24,67
Bangka Belitung	7	211	35,17	1.312	218,67
Kepulauan Riau	7	381	54,43	417	59,57
DKI Jakarta	6	250	41,67	158	26,33
Jawa Barat	27	8.276	344,83	4.736	189,44
Jawa Tengah	35	1.947	55,63	1.845	54,26
DI Yogyakarta	5	230	46	23	5,75
Jawa Timur	38	5.176	143,78	978	27,94
Banten	8	3.211	458,71	197	32,83
Bali	9	410	45,56	202	28,86
Nusa Tenggara Barat	10	489	48,9	64	6,4
Nusa Tenggara Timur	22	1.666	75,73	381	17,32
Kalimantan Barat	14	958	68,43	249	17,79
Kalimantan Tengah	14	626	52,17	36	3,27
Kalimantan Selatan	13	1.366	105,08	1.582	121,69
Kalimantan Timur	10	638	70,89	260	32,50
Kalimantan Utara	5	177	35,4	54	10,80
Sulawesi Utara	15	462	33	647	43,13
Sulawesi Tengah	13	722	55,54	96	8,00
Sulawesi Selatan	24	1.591	66,29	94	4,09
Sulawesi Tenggara	17	894	52,59	261	16,31
Gorontalo	6	672	112	327	65,40
Sulawesi Barat	6	188	31,33	16	2,67
Maluku	11	1.679	152,64	447	49,67
Maluku Utara	10	407	45,22	135	15,00
Papua Barat	13	381	29,31	134	10,31
Papua	29	1.651	58,96	447	17,19
INDONESIA	514	49.883	100,77	22.456	46,59

Tabel 3.3.2 Jumlah Tenaga Medis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Medis Dinkes		Tenaga Medis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	145	6,59	29	1,32
Sumatera Utara	33	281	8,78	141	4,27
Sumatera Barat	19	82	4,32	65	3,42
Riau	12	64	5,33	93	7,75
Jambi	11	293	26,64	430	39,09
Sumatera Selatan	17	54	3,18	46	2,71
Bengkulu	10	3	0,30	34	3,40
Lampung	15	90	6,00	67	4,47
Bangka Belitung	7	8	1,14	199	28,43
Kepulauan Riau	7	31	4,43	47	6,71
DKI Jakarta	6	74	12,33	3	0,50
Jawa Barat	27	598	23,92	603	24,12
Jawa Tengah	35	152	4,34	292	8,34
DI Yogyakarta	5	42	8,40	5	1,00
Jawa Timur	38	588	15,47	298	8,05
Banten	8	402	57,43	27	3,86
Bali	9	31	3,44	19	2,11
Nusa Tenggara Barat	10	12	1,20	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	88	4,00	79	3,59
Kalimantan Barat	14	41	2,93	18	1,29
Kalimantan Tengah	14	98	7,54	28	2,33
Kalimantan Selatan	13	88	6,77	180	13,85
Kalimantan Timur	10	40	4,44	10	1,11
Kalimantan Utara	5	15	3,00	2	0,40
Sulawesi Utara	15	63	4,20	74	4,93
Sulawesi Tengah	13	44	3,38	2	0,17
Sulawesi Selatan	24	89	3,71	112	4,67
Sulawesi Tenggara	17	13	0,76	24	1,41
Gorontalo	6	28	4,67	0	0,00
Sulawesi Barat	6	5	0,83	1	0,17
Maluku	11	215	19,55	36	3,60
Maluku Utara	10	8	0,89	8	0,89
Papua Barat	13	13	1,00	16	1,23
Papua	29	101	3,48	14	0,50
INDONESIA	514	3.899	7,71	3.003	5,99

Tabel 3.3.3 Jumlah Dokter Umum di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Dokter Umum Dinkes		Dokter Umum UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	109	4,95	13	0,59
Sumatera Utara	33	216	6,75	67	2,03
Sumatera Barat	19	65	3,42	39	2,05
Riau	12	36	3,00	29	2,42
Jambi	11	125	11,36	232	21,09
Sumatera Selatan	17	46	2,71	34	2,00
Bengkulu	10	2	0,20	20	2,00
Lampung	15	59	3,93	39	2,60
Bangka Belitung	7	6	0,86	104	14,86
Kepulauan Riau	7	20	2,86	23	3,29
DKI Jakarta	6	62	10,33	3	0,50
Jawa Barat	27	594	22,00	263	10,12
Jawa Tengah	35	124	3,54	131	3,74
DI Yogyakarta	5	28	5,60	5	1,00
Jawa Timur	38	391	10,29	133	3,59
Banten	8	284	35,5	10	1,25
Bali	9	27	3,00	19	2,11
Nusa Tenggara Barat	10	8	0,80	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	67	3,05	43	1,95
Kalimantan Barat	14	31	2,21	10	0,71
Kalimantan Tengah	14	86	6,14	15	1,25
Kalimantan Selatan	13	62	4,77	90	6,92
Kalimantan Timur	10	30	3,33	8	0,80
Kalimantan Utara	5	10	2,00	1	0,20
Sulawesi Utara	15	50	3,33	40	2,67
Sulawesi Tengah	13	28	2,15	2	0,17
Sulawesi Selatan	24	60	2,50	21	0,88
Sulawesi Tenggara	17	10	0,59	13	0,76
Gorontalo	6	24	4,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	3	0,50	1	0,17
Maluku	11	157	14,27	21	2,10
Maluku Utara	10	9	0,90	7	0,78
Papua Barat	13	8	0,62	10	0,77
Papua	29	83	2,86	9	0,31
INDONESIA	514	2.920	5,71	1.456	2,88

Tabel 3.3.4 Jumlah Dokter Spesialis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Dokter Spesialis Dinkes		Dokter Spesialis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	6	0,27	15	0,68
Sumatera Utara	33	6	0,18	63	1,91
Sumatera Barat	19	2	0,11	10	0,53
Riau	12	2	0,17	50	4,17
Jambi	11	29	2,64	156	14,18
Sumatera Selatan	17	0	0,00	3	0,18
Bengkulu	10	0	0,00	10	1,00
Lampung	15	16	1,07	9	0,60
Bangka Belitung	7	1	0,14	78	11,14
Kepulauan Riau	7	2	0,29	19	2,71
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	85	3,15	217	8,35
Jawa Tengah	35	2	0,06	120	3,43
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	32	0,84	125	3,38
Banten	8	15	1,88	15	2,14
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	18	0,82
Kalimantan Barat	14	0	0,00	7	0,50
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	11	0,92
Kalimantan Selatan	13	4	0,31	36	2,77
Kalimantan Timur	10	0	0,00	1	0,11
Kalimantan Utara	5	0	0,00	1	0,20
Sulawesi Utara	15	4	0,27	28	1,87
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	1	0,04	84	3,50
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	5	0,29
Gorontalo	6	1	0,17	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	15	1,36	13	1,30
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	2	0,15	4	0,31
Papua	29	4	0,14	2	0,07
INDONESIA	514	229	0,45	1.100	2,19

Tabel 3.3.5 Jumlah Dokter Gigi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Dokter Gigi Dinkes		Dokter Gigi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	30	1,36	1	0,05
Sumatera Utara	33	114	3,45	10	0,30
Sumatera Barat	19	14	0,74	16	0,84
Riau	12	18	1,50	14	1,17
Jambi	11	42	3,82	28	2,55
Sumatera Selatan	17	8	0,47	9	0,53
Bengkulu	10	1	0,10	4	0,40
Lampung	15	15	1,00	19	1,27
Bangka Belitung	7	1	0,14	12	1,71
Kepulauan Riau	7	9	1,29	5	0,71
DKI Jakarta	6	12	2,00	0	0,00
Jawa Barat	27	208	7,70	121	4,84
Jawa Tengah	35	26	0,74	36	1,03
DI Yogyakarta	5	14	2,80	0	0,00
Jawa Timur	38	164	4,32	37	1,00
Banten	8	120	15,00	5	0,71
Bali	9	4	0,44	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	4	0,40	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	20	0,91	18	0,82
Kalimantan Barat	14	10	0,71	1	0,07
Kalimantan Tengah	14	16	1,14	2	0,17
Kalimantan Selatan	13	22	1,69	51	3,92
Kalimantan Timur	10	10	1,11	2	0,22
Kalimantan Utara	5	5	1,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	9	0,60	6	0,40
Sulawesi Tengah	13	16	1,23	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	28	1,17	6	0,25
Sulawesi Tenggara	17	3	0,18	6	0,35
Gorontalo	6	3	0,50	0	0,00
Sulawesi Barat	6	2	0,33	0	0,00
Maluku	11	38	3,45	1	0,10
Maluku Utara	10	0	0,00	1	0,11
Papua Barat	13	3	0,23	2	0,15
Papua	29	14	0,48	3	0,10
INDONESIA	514	1.003	1,96	416	0,83

Tabel 3.3.6 Jumlah Dokter Gigi Spesialis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Dokter Gigi Spesialis Dinkes		Dokter Gigi Spesialis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	0	0,00
Sumatera Utara	33	1	0,03	1	0,03
Sumatera Barat	19	1	0,05	0	0,00
Riau	12	8	0,67	0	0,00
Jambi	11	97	8,82	14	1,27
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	5	0,71
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	3	0,12	76	3,04
Jawa Tengah	35	0	0,00	5	0,14
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	1	0,03	3	0,08
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	1	0,05	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	3	0,23
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	1	0,04
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	5	0,45	1	0,09
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	117	0,23	109	0,22

Tabel 3.3.7 Jumlah Bidan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Bidan Dinkes		Bidan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	1.119	48,65	915	39,78
Sumatera Utara	33	2.252	68,24	533	16,15
Sumatera Barat	19	267	14,05	121	6,37
Riau	12	171	14,25	36	3,00
Jambi	11	1.673	152,09	518	47,09
Sumatera Selatan	17	155	9,69	14	0,82
Bengkulu	10	48	4,80	95	9,50
Lampung	15	549	36,60	88	5,87
Bangka Belitung	7	47	6,71	207	29,57
Kepulauan Riau	7	82	11,71	83	11,86
DKI Jakarta	6	20	3,33	8	1,33
Jawa Barat	27	4.436	164,30	2.402	88,96
Jawa Tengah	35	371	10,60	526	15,03
DI Yogyakarta	5	20	4,00	1	0,20
Jawa Timur	38	2.166	57,00	1.331	35,03
Banten	8	1.479	184,88	1.874	234,25
Bali	9	69	7,67	25	2,78
Nusa Tenggara Barat	10	56	5,60	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	297	13,50	146	6,64
Kalimantan Barat	14	250	17,86	36	2,57
Kalimantan Tengah	14	499	35,64	1.602	114,43
Kalimantan Selatan	13	368	28,31	398	30,62
Kalimantan Timur	10	124	12,40	956	95,60
Kalimantan Utara	5	19	3,80	2	0,40
Sulawesi Utara	15	32	2,29	48	3,20
Sulawesi Tengah	13	43	3,31	807	62,08
Sulawesi Selatan	24	187	7,79	4	0,17
Sulawesi Tenggara	17	117	6,88	39	2,44
Gorontalo	6	234	39,00	1.085	180,83
Sulawesi Barat	6	37	6,17	0	0,00
Maluku	11	401	36,45	1.853	168,45
Maluku Utara	10	90	9,00	919	91,90
Papua Barat	13	56	4,31	27	2,08
Papua	29	369	12,72	405	13,97
INDONESIA	514	18.103	35,36	17.105	33,41

Tabel 3.3.8 Jumlah Perawat di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Perawat Dinkes		Perawat UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	703	30,57	977	42,48
Sumatera Utara	33	2.230	67,58	713	21,61
Sumatera Barat	19	237	12,47	23	1,21
Riau	12	116	9,67	35	2,92
Jambi	11	609	55,36	2.041	185,55
Sumatera Selatan	17	335	19,71	15	0,88
Bengkulu	10	117	11,70	105	10,50
Lampung	15	472	31,47	74	4,93
Bangka Belitung	7	56	8,00	712	101,71
Kepulauan Riau	7	90	12,86	200	28,57
DKI Jakarta	6	71	11,83	130	21,67
Jawa Barat	27	4.792	177,48	3.525	130,56
Jawa Tengah	35	350	10,00	462	13,59
DI Yogyakarta	5	31	6,20	1	0,20
Jawa Timur	38	2.641	69,50	1.509	40,78
Banten	8	832	104,00	1.813	226,63
Bali	9	58	6,44	85	9,44
Nusa Tenggara Barat	10	115	11,50	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	602	27,36	24	1,09
Kalimantan Barat	14	308	22,00	129	9,21
Kalimantan Tengah	14	735	52,50	1.760	125,71
Kalimantan Selatan	13	400	30,77	633	48,69
Kalimantan Timur	10	174	17,40	957	95,70
Kalimantan Utara	5	41	8,20	5	1,00
Sulawesi Utara	15	291	19,40	390	26,00
Sulawesi Tengah	13	77	5,92	797	61,31
Sulawesi Selatan	24	297	12,38	315	13,13
Sulawesi Tenggara	17	135	7,94	165	9,71
Gorontalo	6	155	25,83	1.006	167,67
Sulawesi Barat	6	58	9,67	0	0,00
Maluku	11	300	27,27	1.988	180,73
Maluku Utara	10	92	9,20	908	90,80
Papua Barat	13	132	10,15	39	3,00
Papua	29	702	24,21	70	2,41
INDONESIA	514	18.354	35,71	21.607	42,20

Tabel 3.3.9 Jumlah Tenaga Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Farmasi Dinkes		Tenaga Farmasi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	159	7,23	44	2,00
Sumatera Utara	33	299	9,06	95	2,88
Sumatera Barat	19	92	4,84	74	3,89
Riau	12	47	3,92	97	8,08
Jambi	11	181	16,45	320	29,09
Sumatera Selatan	17	119	7,00	41	2,41
Bengkulu	10	28	2,80	36	3,60
Lampung	15	83	5,53	58	3,87
Bangka Belitung	7	35	5,83	82	13,67
Kepulauan Riau	7	38	5,43	36	5,14
DKI Jakarta	6	19	3,17	4	0,67
Jawa Barat	27	455	17,50	601	24,04
Jawa Tengah	35	175	5,00	157	4,49
DI Yogyakarta	5	30	6,00	9	1,80
Jawa Timur	38	318	8,59	85	2,36
Banten	8	164	20,50	34	4,86
Bali	9	20	2,22	40	4,44
Nusa Tenggara Barat	10	28	2,80	54	5,40
Nusa Tenggara Timur	22	172	7,82	93	4,23
Kalimantan Barat	14	90	6,43	24	1,71
Kalimantan Tengah	14	136	10,46	15	1,36
Kalimantan Selatan	13	88	6,77	129	9,92
Kalimantan Timur	10	94	10,44	31	3,44
Kalimantan Utara	5	15	3,00	22	4,40
Sulawesi Utara	15	84	5,60	46	3,07
Sulawesi Tengah	13	96	7,38	10	0,83
Sulawesi Selatan	24	169	7,04	94	3,92
Sulawesi Tenggara	17	87	5,12	79	4,65
Gorontalo	6	31	5,17	5	1,00
Sulawesi Barat	6	21	3,50	15	2,50
Maluku	11	105	9,55	14	1,56
Maluku Utara	10	43	4,30	24	2,67
Papua Barat	13	46	3,54	26	2,00
Papua	29	181	6,24	36	1,24
INDONESIA	514	3.748	7,38	2.530	5,08

Tabel 3.3.10 Jumlah Apoteker di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Apoteker Dinkes		Apoteker UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	45	1,96	16	0,73
Sumatera Utara	33	78	2,36	41	1,24
Sumatera Barat	19	34	1,79	27	1,42
Riau	12	19	1,58	33	2,75
Jambi	11	47	4,27	67	6,09
Sumatera Selatan	17	35	2,06	10	0,59
Bengkulu	10	15	1,50	14	1,40
Lampung	15	38	2,53	26	1,73
Bangka Belitung	7	15	2,14	38	5,43
Kepulauan Riau	7	20	2,86	14	2,00
DKI Jakarta	6	9	1,50	2	0,33
Jawa Barat	27	193	7,15	135	5,40
Jawa Tengah	35	77	2,20	50	1,43
DI Yogyakarta	5	10	2,00	3	0,60
Jawa Timur	38	122	3,21	70	1,89
Banten	8	99	12,38	12	1,71
Bali	9	9	1,00	9	1,00
Nusa Tenggara Barat	10	12	1,20	27	2,70
Nusa Tenggara Timur	22	75	3,41	19	0,86
Kalimantan Barat	14	32	2,29	10	0,71
Kalimantan Tengah	14	38	2,71	5	0,45
Kalimantan Selatan	13	36	2,77	39	3,00
Kalimantan Timur	10	36	3,60	11	1,10
Kalimantan Utara	5	9	1,80	7	1,40
Sulawesi Utara	15	29	1,93	11	0,73
Sulawesi Tengah	13	42	3,23	7	0,58
Sulawesi Selatan	24	90	3,75	53	2,21
Sulawesi Tenggara	17	45	2,65	40	2,35
Gorontalo	6	16	2,67	3	0,60
Sulawesi Barat	6	8	1,33	7	1,17
Maluku	11	53	4,82	13	1,44
Maluku Utara	10	21	2,10	11	1,22
Papua Barat	13	29	2,23	22	1,69
Papua	29	85	2,93	19	0,66
INDONESIA	514	1.521	2,96	871	1,74

Tabel 3.3.11 Jumlah Sarjana Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Sarjana Farmasi Dinkes		Sarjana Farmasi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	10	0,43	5	0,23
Sumatera Utara	33	33	1,00	12	0,36
Sumatera Barat	19	11	0,58	4	0,21
Riau	12	13	1,08	37	3,08
Jambi	11	18	1,64	15	1,36
Sumatera Selatan	17	16	0,94	5	0,29
Bengkulu	10	1	0,10	2	0,20
Lampung	15	4	0,27	1	0,07
Bangka Belitung	7	3	0,43	14	2,00
Kepulauan Riau	7	5	0,71	7	1,00
DKI Jakarta	6	4	0,67	0	0,00
Jawa Barat	27	161	5,96	8	0,31
Jawa Tengah	35	7	0,20	9	0,26
DI Yogyakarta	5	5	1,00	1	0,20
Jawa Timur	38	87	2,29	51	1,38
Banten	8	11	1,38	1	0,14
Bali	9	3	0,33	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	4	0,40	10	1,00
Nusa Tenggara Timur	22	19	0,86	2	0,09
Kalimantan Barat	14	10	0,71	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	24	1,85	2	0,18
Kalimantan Selatan	13	5	0,38	5	0,38
Kalimantan Timur	10	13	1,30	1	0,11
Kalimantan Utara	5	1	0,20	4	0,80
Sulawesi Utara	15	22	1,47	15	1,00
Sulawesi Tengah	13	31	2,38	1	0,08
Sulawesi Selatan	24	51	2,13	7	0,29
Sulawesi Tenggara	17	28	1,65	15	0,88
Gorontalo	6	7	1,17	1	0,20
Sulawesi Barat	6	10	1,67	6	1,00
Maluku	11	31	2,82	1	0,11
Maluku Utara	10	14	1,40	4	0,44
Papua Barat	13	9	0,69	1	0,08
Papua	29	31	1,07	6	0,21
INDONESIA	514	702	1,37	253	0,50

Tabel 3.3.12 Jumlah Ahli Madya Farmasi/Analisis Farmasi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ahli madya farmasi Dinkes		Ahli madya farmasi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	65	2,83	18	0,82
Sumatera Utara	33	166	5,03	30	0,91
Sumatera Barat	19	33	1,74	26	1,37
Riau	12	10	0,83	22	1,83
Jambi	11	73	6,64	203	18,45
Sumatera Selatan	17	37	2,18	18	1,06
Bengkulu	10	6	0,60	15	1,50
Lampung	15	22	1,47	12	0,80
Bangka Belitung	7	20	2,86	43	6,14
Kepulauan Riau	7	9	1,29	4	0,57
DKI Jakarta	6	5	0,83	1	0,17
Jawa Barat	27	51	1,96	445	17,80
Jawa Tengah	35	68	1,94	49	1,40
DI Yogyakarta	5	10	2,00	5	1,00
Jawa Timur	38	90	2,37	27	0,73
Banten	8	53	6,63	23	2,88
Bali	9	4	0,44	29	3,22
Nusa Tenggara Barat	10	9	0,90	9	0,90
Nusa Tenggara Timur	22	63	2,86	69	3,14
Kalimantan Barat	14	32	2,29	11	0,79
Kalimantan Tengah	14	59	4,21	6	0,55
Kalimantan Selatan	13	43	3,31	65	5,00
Kalimantan Timur	10	42	4,20	20	2,00
Kalimantan Utara	5	3	0,60	7	1,40
Sulawesi Utara	15	27	1,80	16	1,07
Sulawesi Tengah	13	19	1,46	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	19	0,79	29	1,21
Sulawesi Tenggara	17	13	0,76	18	1,06
Gorontalo	6	2	0,33	0	0,00
Sulawesi Barat	6	2	0,33	1	0,17
Maluku	11	12	1,09	0	0,00
Maluku Utara	10	4	0,40	8	0,89
Papua Barat	13	2	0,15	0	0,00
Papua	29	50	1,72	6	0,21
INDONESIA	514	1.123	2,19	1.235	2,46

Tabel 3.3.13 Jumlah Asisten Tenaga Kefarmasian di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Asisten Tenaga Kefarmasian Dinkes		Asisten Tenaga Kefarmasian UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	42	1,91	5	0,23
Sumatera Utara	33	22	0,67	12	0,36
Sumatera Barat	19	14	0,74	17	0,89
Riau	12	5	0,42	5	0,42
Jambi	11	43	3,91	35	3,18
Sumatera Selatan	17	31	1,82	8	0,47
Bengkulu	10	6	0,60	5	0,50
Lampung	15	19	1,27	19	1,27
Bangka Belitung	7	4	0,67	4	0,67
Kepulauan Riau	7	4	0,57	11	1,57
DKI Jakarta	6	1	0,17	1	0,17
Jawa Barat	27	53	2,04	15	0,60
Jawa Tengah	35	23	0,66	49	1,40
DI Yogyakarta	5	5	1,00	0	0,00
Jawa Timur	38	69	1,86	18	0,50
Banten	8	1	0,13	4	0,50
Bali	9	4	0,44	2	0,22
Nusa Tenggara Barat	10	3	0,30	8	0,80
Nusa Tenggara Timur	22	15	0,68	3	0,14
Kalimantan Barat	14	16	1,14	3	0,21
Kalimantan Tengah	14	24	1,71	2	0,18
Kalimantan Selatan	13	4	0,31	20	1,54
Kalimantan Timur	10	8	0,89	1	0,11
Kalimantan Utara	5	2	0,40	4	0,80
Sulawesi Utara	15	6	0,40	4	0,27
Sulawesi Tengah	13	4	0,31	2	0,17
Sulawesi Selatan	24	9	0,38	5	0,21
Sulawesi Tenggara	17	1	0,06	6	0,35
Gorontalo	6	6	1,00	1	0,20
Sulawesi Barat	6	1	0,17	1	0,17
Maluku	11	9	0,82	0	0,00
Maluku Utara	10	4	0,40	1	0,11
Papua Barat	13	6	0,46	3	0,23
Papua	29	15	0,52	5	0,17
INDONESIA	514	479	0,94	279	0,56

Tabel 3.3.14 Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Kesmas Dinkes		Tenaga Kesmas UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	387	18,43	13	0,62
Sumatera Utara	33	546	17,06	51	1,55
Sumatera Barat	19	229	12,72	4	0,22
Riau	12	115	9,58	3	0,25
Jambi	11	175	15,91	12	1,09
Sumatera Selatan	17	456	26,82	123	7,24
Bengkulu	10	198	19,80	9	0,90
Lampung	15	142	9,47	2	0,13
Bangka Belitung	7	40	6,67	14	2,33
Kepulauan Riau	7	89	12,71	7	1,00
DKI Jakarta	6	40	6,67	10	1,67
Jawa Barat	27	430	17,20	69	2,76
Jawa Tengah	35	429	12,26	48	1,37
DI Yogyakarta	5	63	12,60	4	0,80
Jawa Timur	38	439	11,55	62	1,68
Banten	8	82	11,71	1	0,17
Bali	9	138	15,33	6	0,67
Nusa Tenggara Barat	10	143	14,30	3	0,30
Nusa Tenggara Timur	22	225	10,23	14	0,64
Kalimantan Barat	14	111	7,93	15	1,07
Kalimantan Tengah	14	196	16,33	3	0,27
Kalimantan Selatan	13	166	12,77	11	0,85
Kalimantan Timur	10	89	9,89	7	0,88
Kalimantan Utara	5	54	10,80	5	1,00
Sulawesi Utara	15	79	5,27	48	3,20
Sulawesi Tengah	13	313	24,08	21	1,75
Sulawesi Selatan	24	533	22,21	20	0,83
Sulawesi Tenggara	17	396	23,29	13	0,76
Gorontalo	6	116	19,33	1	0,20
Sulawesi Barat	6	41	6,83	0	0,00
Maluku	11	182	16,55	46	5,11
Maluku Utara	10	137	15,22	7	0,78
Papua Barat	13	62	4,77	5	0,38
Papua	29	288	9,93	5	0,18
INDONESIA	514	7.129	14,2	662	1,34

Tabel 3.3.15 Jumlah Epidemiolog di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Epidemiolog Dinkes		Epidemiolog UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	54	2,45	1	0,05
Sumatera Utara	33	112	3,39	9	0,27
Sumatera Barat	19	35	1,94	2	0,11
Riau	12	19	1,58	0	0,00
Jambi	11	24	2,18	1	0,09
Sumatera Selatan	17	142	8,35	55	3,24
Bengkulu	10	22	2,20	2	0,20
Lampung	15	43	2,87	0	0,00
Bangka Belitung	7	9	1,50	7	1,17
Kepulauan Riau	7	41	5,86	3	0,43
DKI Jakarta	6	11	1,83	5	0,83
Jawa Barat	27	121	4,48	48	1,92
Jawa Tengah	35	176	5,03	7	0,20
DI Yogyakarta	5	13	2,60	0	0,00
Jawa Timur	38	73	1,92	22	0,59
Banten	8	6	0,75	0	0,00
Bali	9	17	1,89	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	59	5,90	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	113	5,14	6	0,27
Kalimantan Barat	14	21	1,50	15	1,07
Kalimantan Tengah	14	144	11,08	2	0,18
Kalimantan Selatan	13	42	3,23	1	0,08
Kalimantan Timur	10	31	3,10	4	0,40
Kalimantan Utara	5	13	2,60	1	0,20
Sulawesi Utara	15	22	1,47	9	0,60
Sulawesi Tengah	13	126	9,69	16	1,33
Sulawesi Selatan	24	226	9,42	5	0,21
Sulawesi Tenggara	17	119	7,00	3	0,18
Gorontalo	6	45	7,50	1	0,20
Sulawesi Barat	6	11	1,83	0	0,00
Maluku	11	74	6,73	35	3,89
Maluku Utara	10	50	5,00	2	0,22
Papua Barat	13	17	1,31	2	0,15
Papua	29	90	3,10	12	0,41
INDONESIA	514	2.121	4,16	276	0,56

Tabel 3.3.16 Jumlah Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga PKIP Dinkes		Tenaga PKIP UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	134	6,09	3	0,14
Sumatera Utara	33	242	7,33	36	1,09
Sumatera Barat	19	41	2,28	0	0,00
Riau	12	36	3,00	0	0,00
Jambi	11	67	6,09	7	0,64
Sumatera Selatan	17	60	3,53	22	1,29
Bengkulu	10	48	4,80	2	0,20
Lampung	15	38	2,53	1	0,07
Bangka Belitung	7	5	0,83	3	0,50
Kepulauan Riau	7	9	1,29	3	0,43
DKI Jakarta	6	14	2,33	1	0,17
Jawa Barat	27	182	7,00	1	0,04
Jawa Tengah	35	128	3,66	34	0,97
DI Yogyakarta	5	33	6,60	3	0,60
Jawa Timur	38	120	3,16	6	0,16
Banten	8	55	7,86	1	0,17
Bali	9	58	6,44	4	0,44
Nusa Tenggara Barat	10	26	2,60	2	0,20
Nusa Tenggara Timur	22	44	2,00	4	0,18
Kalimantan Barat	14	62	4,43	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	84	6,46	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	59	4,54	7	0,54
Kalimantan Timur	10	19	2,11	1	0,11
Kalimantan Utara	5	11	2,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	14	0,93	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	52	4,00	2	0,17
Sulawesi Selatan	24	70	2,92	4	0,17
Sulawesi Tenggara	17	26	1,53	1	0,06
Gorontalo	6	27	4,50	0	0,00
Sulawesi Barat	6	4	0,67	0	0,00
Maluku	11	39	3,55	2	0,20
Maluku Utara	10	28	2,80	2	0,22
Papua Barat	13	19	1,46	1	0,08
Papua	29	63	2,17	2	0,07
INDONESIA	514	1.917	3,78	155	0,31

Tabel 3.3.17 Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Pembimbing Kesehatan Kerja Dinkes		Pembimbing KK UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	11	0,50	0	0,00
Sumatera Utara	33	14	0,42	1	0,03
Sumatera Barat	19	17	0,94	0	0,00
Riau	12	4	0,33	0	0,00
Jambi	11	7	0,64	0	0,00
Sumatera Selatan	17	13	0,76	0	0,00
Bengkulu	10	8	0,80	1	0,10
Lampung	15	9	0,60	0	0,00
Bangka Belitung	7	4	0,67	2	0,33
Kepulauan Riau	7	15	2,14	0	0,00
DKI Jakarta	6	5	0,83	0	0,00
Jawa Barat	27	18	0,69	0	0,00
Jawa Tengah	35	9	0,26	0	0,00
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	13	0,34	30	0,81
Banten	8	2	0,29	0	0,00
Bali	9	26	2,89	1	0,11
Nusa Tenggara Barat	10	30	3,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	8	0,36	0	0,00
Kalimantan Barat	14	3	0,21	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	2	0,17	1	0,09
Kalimantan Selatan	13	4	0,31	0	0,00
Kalimantan Timur	10	19	2,11	2	0,22
Kalimantan Utara	5	7	1,40	1	0,20
Sulawesi Utara	15	5	0,33	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	5	0,38	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	7	0,29	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	7	0,41	0	0,00
Gorontalo	6	5	0,83	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	3	0,27	1	0,09
Maluku Utara	10	6	0,67	0	0,00
Papua Barat	13	2	0,15	0	0,00
Papua	29	2	0,07	0	0,00
INDONESIA	514	290	0,57	40	0,08

Tabel 3.3.18 Jumlah Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Dinkes		Administrasi dan Kebijakan Kesehatan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	157	7,14	8	0,38
Sumatera Utara	33	135	4,22	4	0,12
Sumatera Barat	19	109	6,06	2	0,11
Riau	12	37	3,08	3	0,25
Jambi	11	47	4,27	4	0,36
Sumatera Selatan	17	227	13,35	33	1,94
Bengkulu	10	114	11,40	3	0,30
Lampung	15	30	2,00	1	0,07
Bangka Belitung	7	18	3,00	2	0,33
Kepulauan Riau	7	17	2,43	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	0	0,00
Jawa Barat	27	97	3,73	20	0,80
Jawa Tengah	35	84	2,40	5	0,14
DI Yogyakarta	5	4	0,80	0	0,00
Jawa Timur	38	207	5,45	3	0,08
Banten	8	17	2,43	0	0,00
Bali	9	16	1,78	1	0,11
Nusa Tenggara Barat	10	21	2,10	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	48	2,18	1	0,05
Kalimantan Barat	14	13	0,93	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	6	0,50	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	49	3,77	1	0,08
Kalimantan Timur	10	9	1,00	1	0,13
Kalimantan Utara	5	18	3,60	3	0,60
Sulawesi Utara	15	37	2,47	33	2,20
Sulawesi Tengah	13	125	9,62	3	0,25
Sulawesi Selatan	24	205	8,54	11	0,46
Sulawesi Tenggara	17	210	12,35	9	0,53
Gorontalo	6	38	6,33	0	0,00
Sulawesi Barat	6	25	4,17	0	0,00
Maluku	11	40	3,64	3	0,30
Maluku Utara	10	66	6,60	3	0,33
Papua Barat	13	17	1,31	0	0,00
Papua	29	111	3,83	0	0,00
INDONESIA	514	2.355	4,66	157	0,32

Tabel 3.3.19 Jumlah Tenaga Biostatistik dan Kependudukan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Biostatistik dan Kependudukan Dinkes		Biostatistik dan Kependudukan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	4	0,19	0	0,00
Sumatera Utara	33	6	0,18	0	0,00
Sumatera Barat	19	8	0,44	0	0,00
Riau	12	3	0,25	0	0,00
Jambi	11	6	0,55	0	0,00
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	3	0,30	1	0,10
Lampung	15	5	0,33	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	0	0,00
Kepulauan Riau	7	1	0,14	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	0	0,00
Jawa Barat	27	7	0,27	0	0,00
Jawa Tengah	35	8	0,23	1	0,03
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	9	0,24	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	3	0,33	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	3	0,30	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	5	0,23	0	0,00
Kalimantan Barat	14	3	0,21	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	1	0,08	0	0,00
Kalimantan Timur	10	4	0,44	0	0,00
Kalimantan Utara	5	3	0,60	0	0,00
Sulawesi Utara	15	1	0,07	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	2	0,15	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	16	0,67	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	6	0,35	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	4	0,36	2	0,20
Maluku Utara	10	2	0,22	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	1	0,03	0	0,00
INDONESIA	514	117	0,23	4	0,01

Tabel 3.3.20 Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Kespro dan Keluarga Dinkes		Kespro dan Keluarga UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	23	1,10	1	0,05
Sumatera Utara	33	43	1,34	1	0,03
Sumatera Barat	19	17	0,94	0	0,00
Riau	12	16	1,33	0	0,00
Jambi	11	21	1,91	0	0,00
Sumatera Selatan	17	10	0,59	13	0,76
Bengkulu	10	1	0,10	0	0,00
Lampung	15	15	1,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	4	0,67	0	0,00
Kepulauan Riau	7	4	0,57	0	0,00
DKI Jakarta	6	8	1,33	0	0,00
Jawa Barat	27	7	0,27	0	0,00
Jawa Tengah	35	12	0,34	0	0,00
DI Yogyakarta	5	2	0,40	0	0,00
Jawa Timur	38	13	0,34	0	0,00
Banten	8	1	0,14	0	0,00
Bali	9	4	0,44	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	2	0,20	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	7	0,32	0	0,00
Kalimantan Barat	14	7	0,50	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	3	0,25	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	10	0,77	1	0,08
Kalimantan Timur	10	3	0,33	0	0,00
Kalimantan Utara	5	1	0,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	2	0,15	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	9	0,38	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	16	0,94	0	0,00
Gorontalo	6	1	0,17	0	0,00
Sulawesi Barat	6	1	0,17	0	0,00
Maluku	11	19	1,73	2	0,20
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	7	0,54	2	0,15
Papua	29	21	0,72	0	0,00
INDONESIA	514	310	0,62	21	0,04

Tabel 3.3.21 Jumlah Tenaga Informatika Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Informastika Kesehatan Dinkes		Informastika Kesehatan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	29	1,38	0	0,00
Sumatera Utara	33	3	0,09	0	0,00
Sumatera Barat	19	2	0,11	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	3	0,27	0	0,00
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	2	0,20	0	0,00
Lampung	15	2	0,13	0	0,00
Bangka Belitung	7	4	0,57	3	0,43
Kepulauan Riau	7	2	0,29	1	0,14
DKI Jakarta	6	0	0,00	4	0,67
Jawa Barat	27	6	0,23	0	0,00
Jawa Tengah	35	12	0,34	1	0,03
DI Yogyakarta	5	11	2,20	1	0,20
Jawa Timur	38	4	0,11	1	0,03
Banten	8	4	0,50	0	0,00
Bali	9	14	1,56	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	2	0,20	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	3	0,14
Kalimantan Barat	14	2	0,14	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	1	0,08	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	1	0,08	1	0,08
Kalimantan Timur	10	5	0,56	0	0,00
Kalimantan Utara	5	1	0,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	6	0,40
Sulawesi Tengah	13	1	0,08	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	12	0,71	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	3	0,27	1	0,10
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	128	0,25	22	0,04

Tabel 3.3.22 Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Kesling Dinkes		Tenaga Kesling UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	120	5,45	33	1,50
Sumatera Utara	33	148	4,48	24	0,73
Sumatera Barat	19	83	4,37	18	0,95
Riau	12	61	5,08	12	1,00
Jambi	11	115	10,45	126	11,45
Sumatera Selatan	17	106	6,24	33	1,94
Bengkulu	10	30	3,00	24	2,40
Lampung	15	100	6,67	6	0,40
Bangka Belitung	7	18	3,00	48	8,00
Kepulauan Riau	7	32	4,57	33	4,71
DKI Jakarta	6	11	1,83	0	0,00
Jawa Barat	27	324	12,46	126	4,85
Jawa Tengah	35	224	6,40	372	10,63
DI Yogyakarta	5	17	3,40	3	0,60
Jawa Timur	38	222	5,84	141	3,81
Banten	8	98	14,00	18	3,00
Bali	9	63	7,00	24	2,67
Nusa Tenggara Barat	10	60	6,00	3	0,30
Nusa Tenggara Timur	22	126	5,73	42	1,91
Kalimantan Barat	14	90	6,43	9	0,64
Kalimantan Tengah	14	36	3,00	6	0,55
Kalimantan Selatan	13	87	6,69	102	7,85
Kalimantan Timur	10	37	4,11	39	4,33
Kalimantan Utara	5	18	3,60	6	1,20
Sulawesi Utara	15	54	3,60	33	2,20
Sulawesi Tengah	13	78	6,00	24	2,00
Sulawesi Selatan	24	173	7,21	51	2,13
Sulawesi Tenggara	17	81	4,76	48	2,82
Gorontalo	6	59	9,83	6	1,20
Sulawesi Barat	6	18	3,00	0	0,00
Maluku	11	169	15,36	75	7,50
Maluku Utara	10	23	2,56	0	0,00
Papua Barat	13	38	2,92	3	0,23
Papua	29	109	3,76	39	1,34
INDONESIA	514	3.028	5,98	1.527	3,05

Tabel 3.3.23 Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Sanitasi Lingkungan Dinkes		Sanitasi Lingkungan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	121	5,26	11	0,50
Sumatera Utara	33	144	4,36	8	0,24
Sumatera Barat	19	83	4,37	6	0,32
Riau	12	56	4,67	4	0,33
Jambi	11	99	9,00	42	3,82
Sumatera Selatan	17	106	6,24	11	0,65
Bengkulu	10	29	2,90	8	0,80
Lampung	15	98	6,53	2	0,13
Bangka Belitung	7	17	2,83	16	2,67
Kepulauan Riau	7	31	4,43	11	1,57
DKI Jakarta	6	9	1,50	0	0,00
Jawa Barat	27	344	12,74	42	1,62
Jawa Tengah	35	216	6,17	124	3,54
DI Yogyakarta	5	16	3,20	1	0,20
Jawa Timur	38	221	5,82	47	1,27
Banten	8	104	13,00	6	1,00
Bali	9	61	6,78	8	0,89
Nusa Tenggara Barat	10	59	5,90	1	0,10
Nusa Tenggara Timur	22	118	5,36	14	0,64
Kalimantan Barat	14	68	4,86	3	0,21
Kalimantan Tengah	14	65	4,64	2	0,18
Kalimantan Selatan	13	85	6,54	34	2,62
Kalimantan Timur	10	35	3,89	13	1,44
Kalimantan Utara	5	18	3,60	2	0,40
Sulawesi Utara	15	54	3,60	11	0,73
Sulawesi Tengah	13	74	5,69	8	0,67
Sulawesi Selatan	24	171	7,13	17	0,71
Sulawesi Tenggara	17	67	3,94	16	0,94
Gorontalo	6	59	9,83	2	0,40
Sulawesi Barat	6	18	3,00	0	0,00
Maluku	11	169	15,36	25	2,50
Maluku Utara	10	25	2,50	0	0,00
Papua Barat	13	36	2,77	1	0,08
Papua	29	98	3,38	13	0,45
INDONESIA	514	2.974	5,81	509	1,02

Tabel 3.3.24 Jumlah Tenaga Entomolog Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Entomolog Kesehatan Dinkes		Entomolog Kesehatan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	1	0,05	0	0,00
Sumatera Utara	33	0	0,00	8	0,24
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	0	0,00	0	0,00
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	1	0,10	2	0,20
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	1	0,17	3	0,43
Kepulauan Riau	7	1	0,14	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	0	0,00
Jawa Barat	27	3	0,12	0	0,00
Jawa Tengah	35	8	0,23	0	0,00
DI Yogyakarta	5	1	0,20	9	1,80
Jawa Timur	38	1	0,03	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	5	0,56
Nusa Tenggara Barat	10	1	0,10	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	6	0,27	0	0,00
Kalimantan Barat	14	20	1,43	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Timur	10	0	0,00	1	0,11
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	4	0,31	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	2	0,08	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	10	0,59	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	2	0,15	0	0,00
Papua	29	1	0,03	0	0,00
INDONESIA	514	64	0,13	28	0,06

Tabel 3.3.25 Jumlah Tenaga Mikrobiolog Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Mikrobiolog Kesehatan Dinkes		Mikrobiolog Kesehatan UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	0	0,00
Sumatera Utara	33	4	0,12	0	0,00
Sumatera Barat	19	0	0,00	1	0,05
Riau	12	5	0,42	0	0,00
Jambi	11	16	1,45	0	0,00
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	2	0,13	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	7	1,00
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	1	0,17
Jawa Barat	27	0	0,00	0	0,00
Jawa Tengah	35	0	0,00	0	0,00
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	0	0,00	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	2	0,22	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	2	0,09	0	0,00
Kalimantan Barat	14	2	0,14	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	2	0,15	0	0,00
Kalimantan Timur	10	2	0,22	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	4	0,24	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	10	0,34	0	0,00
INDONESIA	514	52	0,10	9	0,02

Tabel 3.3.26 Jumlah Tenaga Gizi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Gizi Dinkes		Tenaga Gizi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	77	3,50	2	0,09
Sumatera Utara	33	138	4,18	19	0,58
Sumatera Barat	19	88	4,63	9	0,47
Riau	12	35	2,92	21	1,75
Jambi	11	46	4,18	56	5,09
Sumatera Selatan	17	66	3,88	1	0,06
Bengkulu	10	20	2,00	7	0,7
Lampung	15	58	3,87	20	1,33
Bangka Belitung	7	12	2,00	33	4,71
Kepulauan Riau	7	15	2,14	9	1,29
DKI Jakarta	6	13	2,17	0	0,00
Jawa Barat	27	264	9,78	78	3,00
Jawa Tengah	35	157	4,49	80	2,29
DI Yogyakarta	5	15	3,00	2	0,40
Jawa Timur	38	260	6,84	75	2,03
Banten	8	78	11,14	0	0,00
Bali	9	20	2,22	6	0,67
Nusa Tenggara Barat	10	56	5,60	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	89	4,05	8	0,36
Kalimantan Barat	14	45	3,21	6	0,43
Kalimantan Tengah	14	58	4,46	1	0,09
Kalimantan Selatan	13	88	6,77	58	4,46
Kalimantan Timur	10	41	4,56	2	0,22
Kalimantan Utara	5	11	2,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	78	5,20	16	1,07
Sulawesi Tengah	13	53	4,08	1	0,08
Sulawesi Selatan	24	106	4,42	12	0,50
Sulawesi Tenggara	17	54	3,18	14	0,82
Gorontalo	6	32	5,33	4	0,80
Sulawesi Barat	6	8	1,33	0	0,00
Maluku	11	159	14,45	47	4,70
Maluku Utara	10	33	3,67	28	3,11
Papua Barat	13	26	2,00	8	0,62
Papua	29	79	2,82	0	0,00
INDONESIA	514	2.378	4,69	623	1,25

Tabel 3.3.27 Jumlah Tenaga Nutrisi di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Nutrisi Dinkes		Tenaga Nutrisi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	57	2,48	2	0,09
Sumatera Utara	33	121	3,67	18	0,55
Sumatera Barat	19	82	4,32	9	0,47
Riau	12	32	2,67	21	1,75
Jambi	11	43	3,91	53	4,82
Sumatera Selatan	17	46	2,71	0	0,00
Bengkulu	10	20	2,00	7	0,70
Lampung	15	55	3,67	20	1,33
Bangka Belitung	7	11	1,83	17	2,43
Kepulauan Riau	7	8	1,14	7	1,00
DKI Jakarta	6	12	2,00	0	0,00
Jawa Barat	27	260	9,63	48	1,85
Jawa Tengah	35	141	4,03	80	2,29
DI Yogyakarta	5	15	3,00	2	0,40
Jawa Timur	38	255	6,71	65	1,76
Banten	8	76	9,50	0	0,00
Bali	9	9	1,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	40	4,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	78	3,55	8	0,36
Kalimantan Barat	14	37	2,64	6	0,43
Kalimantan Tengah	14	68	4,86	12	1,00
Kalimantan Selatan	13	83	6,38	58	4,46
Kalimantan Timur	10	39	4,33	2	0,22
Kalimantan Utara	5	11	2,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	75	5,00	16	1,07
Sulawesi Tengah	13	43	3,31	1	0,08
Sulawesi Selatan	24	80	3,33	12	0,50
Sulawesi Tenggara	17	48	2,82	11	0,65
Gorontalo	6	30	5,00	3	0,60
Sulawesi Barat	6	7	1,17	0	0,00
Maluku	11	150	13,64	44	4,40
Maluku Utara	10	33	3,30	22	2,44
Papua Barat	13	19	1,46	8	0,62
Papua	29	72	2,48	5	0,17
INDONESIA	514	2.156	4,21	557	1,11

Tabel 3.3.28 Jumlah Tenaga Dietisien di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Dietisien Dinkes		Tenaga Dietisien UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	23	1,05	0	0,00
Sumatera Utara	33	17	0,52	1	0,03
Sumatera Barat	19	6	0,32	0	0,00
Riau	12	3	0,25	0	0,00
Jambi	11	3	0,27	3	0,27
Sumatera Selatan	17	20	1,18	1	0,06
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	3	0,20	0	0,00
Bangka Belitung	7	1	0,17	16	2,29
Kepulauan Riau	7	7	1,00	2	0,29
DKI Jakarta	6	1	0,17	0	0,00
Jawa Barat	27	4	0,15	30	1,15
Jawa Tengah	35	16	0,46	0	0,00
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	5	0,13	10	0,27
Banten	8	5	0,71	0	0,00
Bali	9	11	1,22	6	0,67
Nusa Tenggara Barat	10	16	1,60	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	11	0,50	0	0,00
Kalimantan Barat	14	8	0,57	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	15	1,15	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	5	0,38	0	0,00
Kalimantan Timur	10	3	0,30	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	3	0,20	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	10	0,77	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	26	1,08	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	6	0,35	3	0,18
Gorontalo	6	2	0,33	1	0,20
Sulawesi Barat	6	1	0,17	0	0,00
Maluku	11	9	0,82	3	0,30
Maluku Utara	10	6	0,67	6	0,67
Papua Barat	13	7	0,54	0	0,00
Papua	29	17	0,61	0	0,00
INDONESIA	514	270	0,53	82	0,16

Tabel 3.3.29 Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Keterampilan Fisik Dinkes		Tenaga Keterampilan Fisik UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	12	0,55	3	0,14
Sumatera Utara	33	8	0,24	13	0,39
Sumatera Barat	19	5	0,26	3	0,16
Riau	12	2	0,17	13	1,08
Jambi	11	6	0,55	59	5,36
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	3	0,30
Lampung	15	1	0,07	0	0,00
Bangka Belitung	7	1	0,14	37	5,29
Kepulauan Riau	7	2	0,29	4	0,57
DKI Jakarta	6	0	0,00	1	0,17
Jawa Barat	27	26	0,96	146	5,84
Jawa Tengah	35	0	0,00	52	1,49
DI Yogyakarta	5	0	0,00	1	0,20
Jawa Timur	38	8	0,21	16	0,43
Banten	8	8	1,14	0	0,00
Bali	9	1	0,11	3	0,33
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	1	0,05	0	0,00
Kalimantan Barat	14	1	0,07	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	1	0,08	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	3	0,23	11	0,85
Kalimantan Timur	10	2	0,22	0	0,00
Kalimantan Utara	5	1	0,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	6	0,40	7	0,47
Sulawesi Tengah	13	10	0,77	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	7	0,29	7	0,29
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	4	0,24
Gorontalo	6	8	1,33	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	1	0,09	2	0,18
Maluku Utara	10	0	0,00	1	0,11
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	2	0,07	0	0,00
INDONESIA	514	125	0,25	386	0,77

Tabel 3.3.30 Jumlah Tenaga Fisioterapis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Fisioterapis Dinkes		Tenaga Fisioterapis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	12	0,55	3	0,14
Sumatera Utara	33	8	0,24	12	0,36
Sumatera Barat	19	5	0,26	3	0,16
Riau	12	2	0,17	13	1,08
Jambi	11	6	0,55	56	5,09
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	2	0,20
Lampung	15	1	0,07	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	24	3,43
Kepulauan Riau	7	2	0,29	4	0,57
DKI Jakarta	6	0	0,00	1	0,17
Jawa Barat	27	24	0,89	110	4,23
Jawa Tengah	35	0	0,00	48	1,37
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	8	0,21	13	0,35
Banten	8	8	1,14	0	0,00
Bali	9	1	0,11	3	0,33
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	1	0,05	0	0,00
Kalimantan Barat	14	1	0,07	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	1	0,08	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	3	0,23	10	0,77
Kalimantan Timur	10	2	0,22	0	0,00
Kalimantan Utara	5	1	0,20	0	0,00
Sulawesi Utara	15	6	0,40	7	0,47
Sulawesi Tengah	13	10	0,77	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	7	0,29	7	0,29
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	4	0,24
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	1	0,09	2	0,18
Maluku Utara	10	0	0,00	1	0,11
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	2	0,07	0	0,00
INDONESIA	514	114	0,22	323	0,64

Tabel 3.3.31 Jumlah Tenaga Okupasi Terapis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Okupasi Terapis Dinkes		Tenaga Okupasi Terapis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	0	0,00
Sumatera Utara	33	0	0,00	0	0,00
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	0	0,00	1	0,09
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	1	0,14	1	0,14
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	1	0,04	16	0,64
Jawa Tengah	35	0	0,00	1	0,03
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	0	0,00	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	1	0,08
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0	0,00
Gorontalo	6	8	1,33	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	10	0,02	20	0,04

Tabel 3.3.32 Jumlah Tenaga Terapis Wicara dan Tenaga Akupunktur di Dinas Kesehatan dan Tenaga Akupunktur UPT Dinas Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Terapis Wicara		Tenaga Akupunktur	
		Dinkes	UPT Dinas Non Puskesmas/RS	Dinkes	UPT Dinas Non Puskesmas/RS
Aceh	23	0	0	0	0
Sumatera Utara	33	0	1	0	0
Sumatera Barat	19	0	0	0	0
Riau	12	0	0	0	0
Jambi	11	0	2	0	0
Sumatera Selatan	17	0	0	0	0
Bengkulu	10	0	1	0	0
Lampung	15	0	0	0	0
Bangka Belitung	7	0	2	0	10
Kepulauan Riau	7	0	0	0	0
DKI Jakarta	6	0	0	0	0
Jawa Barat	27	1	26	0	0
Jawa Tengah	35	0	3	0	0
DI Yogyakarta	5	0	1	0	0
Jawa Timur	38	0	2	0	1
Banten	8	0	0	0	0
Bali	9	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0	0	0
Kalimantan Barat	14	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0	0	0
Kalimantan Timur	10	0	0	0	0
Kalimantan Utara	5	0	0	0	0
Sulawesi Utara	15	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0	0	0
Gorontalo	6	0	0	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0	0	0
Maluku	11	0	0	0	0
Maluku Utara	10	0	0	0	0
Papua Barat	13	0	0	0	0
Papua	29	0	0	0	0
INDONESIA	514	1	38	0	11

Tabel 3.3.33 Jumlah Tenaga Keteknisian Medis di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Keteknisian Medis Dinkes		Tenaga Keteknisian Medis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	75	3,41	8	0,36
Sumatera Utara	33	34	1,03	25	0,76
Sumatera Barat	19	35	1,84	12	0,63
Riau	12	19	1,58	5	0,42
Jambi	11	74	6,73	104	9,45
Sumatera Selatan	17	8	0,47	1	0,06
Bengkulu	10	2	0,2	28	2,8
Lampung	15	4	0,27	7	0,47
Bangka Belitung	7	10	1,43	60	8,57
Kepulauan Riau	7	1	0,14	7	1
DKI Jakarta	6	2	0,33	1	0,17
Jawa Barat	27	175	6,73	127	5,08
Jawa Tengah	35	53	1,51	19	0,54
DI Yogyakarta	5	4	0,8	6	1,2
Jawa Timur	38	67	1,76	68	1,84
Banten	8	41	5,86	2	0,33
Bali	9	4	0,44	1	0,11
Nusa Tenggara Barat	10	7	0,7	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	38	1,73	0	0
Kalimantan Barat	14	8	0,57	4	0,29
Kalimantan Tengah	14	23	1,92	0	0
Kalimantan Selatan	13	40	3,08	42	3,23
Kalimantan Timur	10	27	3	1	0,11
Kalimantan Utara	5	0	0	0	0
Sulawesi Utara	15	7	0,47	3	0,2
Sulawesi Tengah	13	6	0,46	4	0,33
Sulawesi Selatan	24	9	0,38	11	0,46
Sulawesi Tenggara	17	5	0,29	14	0,82
Gorontalo	6	6	1	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0	0	0
Maluku	11	16	1,45	5	0,45
Maluku Utara	10	0	0	7	0,78
Papua Barat	13	1	0,08	5	0,38
Papua	29	6	0,21	0	0
INDONESIA	514	807	1,59	577	1,15

Tabel 3.3.34 Jumlah Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT Dinas non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Perekam Medis Dinkes		Tenaga Perekam Medis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	11	0,50	1	0,05
Sumatera Utara	33	6	0,18	13	0,39
Sumatera Barat	19	14	0,74	9	0,47
Riau	12	4	0,33	5	0,42
Jambi	11	5	0,45	56	5,09
Sumatera Selatan	17	1	0,06	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	13	1,30
Lampung	15	1	0,07	0	0,00
Bangka Belitung	7	4	0,57	23	3,29
Kepulauan Riau	7	0	0,00	7	1,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	31	1,15	115	4,42
Jawa Tengah	35	29	0,83	12	0,34
DI Yogyakarta	5	1	0,20	0	0,00
Jawa Timur	38	18	0,47	36	0,97
Banten	8	22	3,14	2	0,33
Bali	9	1	0,11	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	2	0,20	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	29	1,32	0	0,00
Kalimantan Barat	14	2	0,14	2	0,14
Kalimantan Tengah	14	6	0,46	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	11	0,85	10	0,77
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	5	0,33	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	6	0,46	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	4	0,17	6	0,25
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	6	0,35
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	1	0,09	2	0,18
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	1	0,08	2	0,15
Papua	29	4	0,14	0	0,00
INDONESIA	514	219	0,43	320	0,64

Tabel 3.3.35 Jumlah Tenaga Teknik Kardiovaskuler di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Teknis Kardiovaskuler Dinkes	Tenaga Teknis Kardiovaskuler Non Puskesmas/RS
		n	n
Aceh	23	0	0
Sumatera Utara	33	0	0
Sumatera Barat	19	0	0
Riau	12	0	0
Jambi	11	0	0
Sumatera Selatan	17	0	0
Bengkulu	10	0	0
Lampung	15	0	0
Bangka Belitung	7	0	0
Kepulauan Riau	7	0	0
DKI Jakarta	6	0	0
Jawa Barat	27	0	0
Jawa Tengah	35	0	0
DI Yogyakarta	5	0	0
Jawa Timur	38	0	0
Banten	8	0	0
Bali	9	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0
Kalimantan Barat	14	0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0
Kalimantan Timur	10	0	0
Kalimantan Utara	5	0	0
Sulawesi Utara	15	0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0
Gorontalo	6	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0
Maluku	11	0	0
Maluku Utara	10	0	0
Papua Barat	13	0	0
Papua	29	0	0
INDONESIA	514	0	0

Tabel 3.3.36 Jumlah Tenaga Teknisi Pelayanan Darah di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Teknisi Pelayanan Darah Dinkes		Tenaga Teknisi Pelayanan Darah UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	0	0,00
Sumatera Utara	33	0	0,00	0	0,00
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	10	0,91	6	0,55
Sumatera Selatan	17	0	0,00	1	0,06
Bengkulu	10	0	0,00	9	0,90
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	2	0,29
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	1	0,04	8	0,32
Jawa Tengah	35	0	0,00	1	0,03
DI Yogyakarta	5	3	0,60	6	1,20
Jawa Timur	38	1	0,03	2	0,05
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	1	0,11
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	1	0,05	0	0,00
Kalimantan Barat	14	1	0,07	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	3	0,23
Kalimantan Timur	10	0	0,00	1	0,11
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	1	0,07
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	3	0,25
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	3	0,18	0	0,00
Gorontalo	6	6	1,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	7	0,78
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	26	0,05	51	0,10

Tabel 3.3.37 Jumlah Tenaga Refraksionis Optisien/Optometriss di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Refraksionis Optisien Dinkes		Tenaga Refraksionis Optisien UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	1	0,05	2	0,09
Sumatera Utara	33	5	0,15	2	0,06
Sumatera Barat	19	7	0,37	2	0,11
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	0	0,00	4	0,36
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	2	0,20	2	0,20
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	0	0,00	7	1,00
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	0	0,00	8	0,31
Jawa Tengah	35	0	0,00	1	0,03
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	4	0,11	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	2	0,14
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	2	0,15	3	0,23
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	23	0,05	33	0,07

Tabel 3.3.38 Jumlah Tenaga Teknisi Gigi di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Teknisi Gigi Dinkes		Tenaga Teknisi Gigi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	16	0,73	3	0,14
Sumatera Utara	33	5	0,15	1	0,03
Sumatera Barat	19	2	0,11	0	0,00
Riau	12	14	1,17	0	0,00
Jambi	11	0	0,00	3	0,27
Sumatera Selatan	17	3	0,18	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	1	0,07	0	0,00
Bangka Belitung	7	1	0,14	1	0,14
Kepulauan Riau	7	1	0,14	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	1	0,17
Jawa Barat	27	101	3,74	6	0,23
Jawa Tengah	35	0	0,00	5	0,14
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	1	0,03	5	0,14
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	5	0,23	0	0,00
Kalimantan Barat	14	3	0,21	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	1	0,08	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	7	0,54	1	0,08
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	1	0,08
Sulawesi Selatan	24	3	0,13	4	0,17
Sulawesi Tenggara	17	1	0,06	5	0,29
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	2	0,18	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	2	0,15
Papua	29	1	0,03	0	0,00
INDONESIA	514	169	0,33	38	0,08

Tabel 3.3.39 Jumlah Tenaga Penata Anestesi di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Penata Anestesi Dinkes		Tenaga Penata Anestesi UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	0	0,00
Sumatera Utara	33	2	0,06	2	0,06
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	0	0,00	1	0,09
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	4	0,40
Lampung	15	0	0,00	3	0,20
Bangka Belitung	7	3	0,43	8	1,14
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	0	0,00	0	0,00
Jawa Tengah	35	0	0,00	0	0,00
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	7	0,18	4	0,11
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	4	0,31
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	1	0,07
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	3	0,27
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	1	0,08
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	12	0,02	31	0,06

Tabel 3.3.40 Jumlah Tenaga Terapis Gigi dan Mulut di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Terapis Gigi dan Mulut Dinkes		Tenaga Terapis Gigi dan Mulut UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	47	2,14	2	0,09
Sumatera Utara	33	16	0,48	7	0,21
Sumatera Barat	19	12	0,63	1	0,05
Riau	12	1	0,08	0	0,00
Jambi	11	59	5,36	34	3,09
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	2	0,13	4	0,27
Bangka Belitung	7	2	0,29	8	1,14
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	1	0,17	0	0,00
Jawa Barat	27	92	3,41	30	1,15
Jawa Tengah	35	24	0,69	0	0,00
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	36	0,95	21	0,57
Banten	8	19	2,71	0	0,00
Bali	9	3	0,33	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	5	0,50	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	3	0,14	0	0,00
Kalimantan Barat	14	2	0,14	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	35	2,69	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	20	1,54	21	1,62
Kalimantan Timur	10	27	3,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	2	0,13	1	0,07
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	2	0,08	1	0,04
Sulawesi Tenggara	17	1	0,06	2	0,12
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	13	1,18	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	1	0,03	0	0,00
INDONESIA	514	427	0,84	132	0,26

Tabel 3.3.41 Jumlah Tenaga Audiologis di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Audiologis Dinkes	Tenaga Audiologis non Puskesmas/RS
		n	n
Aceh	23	0	0
Sumatera Utara	33	0	0
Sumatera Barat	19	0	0
Riau	12	0	0
Jambi	11	0	0
Sumatera Selatan	17	0	0
Bengkulu	10	0	0
Lampung	15	0	0
Bangka Belitung	7	0	7
Kepulauan Riau	7	0	0
DKI Jakarta	6	0	0
Jawa Barat	27	0	0
Jawa Tengah	35	0	0
DI Yogyakarta	5	0	0
Jawa Timur	38	0	0
Banten	8	0	0
Bali	9	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0
Kalimantan Barat	14	0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0
Kalimantan Timur	10	0	0
Kalimantan Utara	5	0	0
Sulawesi Utara	15	0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	1
Gorontalo	6	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0
Maluku	11	0	0
Maluku Utara	10	0	0
Papua Barat	13	0	0
Papua	29	0	0
INDONESIA	514	0	8

Tabel 3.3.42 Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Teknik Biomedika Dinkes		Tenaga Teknik Biomedika UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	60	2,73	17	0,77
Sumatera Utara	33	31	0,94	56	1,70
Sumatera Barat	19	24	1,26	7	0,37
Riau	12	30	2,50	10	0,83
Jambi	11	77	7,00	274	24,91
Sumatera Selatan	17	6	0,35	9	0,53
Bengkulu	10	1	0,10	33	3,30
Lampung	15	32	2,13	52	3,47
Bangka Belitung	7	23	3,29	64	9,14
Kepulauan Riau	7	1	0,14	13	1,86
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	177	6,81	461	18,44
Jawa Tengah	35	36	1,03	245	7,00
DI Yogyakarta	5	8	1,60	3	0,60
Jawa Timur	38	102	2,76	110	3,06
Banten	8	48	6,86	0	0,00
Bali	9	6	0,67	20	2,22
Nusa Tenggara Barat	10	12	1,20	3	0,30
Nusa Tenggara Timur	22	25	1,14	3	0,14
Kalimantan Barat	14	14	1,00	14	1,00
Kalimantan Tengah	14	17	1,42	11	1,00
Kalimantan Selatan	13	38	2,92	86	6,62
Kalimantan Timur	10	14	1,56	0	0,00
Kalimantan Utara	5	3	0,60	16	3,20
Sulawesi Utara	15	0	0,00	4	0,27
Sulawesi Tengah	13	2	0,15	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	21	0,88	43	1,79
Sulawesi Tenggara	17	5	0,29	30	1,76
Gorontalo	6	3	0,50	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	11	1,00	5	0,50
Maluku Utara	10	1	0,11	9	1,00
Papua Barat	13	7	0,54	7	0,54
Papua	29	6	0,21	5	0,17
INDONESIA	514	841	1,66	1,610	3,23

Tabel 3.3.43 Jumlah Tenaga Radiografer di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Radiografer Dinkes		Tenaga Radiografer UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	0	0,00	7	0,32
Sumatera Utara	33	4	0,12	23	0,70
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	3	0,27	51	4,64
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	8	0,80
Lampung	15	0	0,00	6	0,40
Bangka Belitung	7	1	0,14	30	4,29
Kepulauan Riau	7	0	0,00	5	0,71
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	4	0,15	153	5,88
Jawa Tengah	35	1	0,03	53	1,51
DI Yogyakarta	5	0	0,00	0	0,00
Jawa Timur	38	1	0,03	27	0,73
Banten	8	2	0,29	0	0,00
Bali	9	4	0,44	7	0,78
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	5	0,36
Kalimantan Tengah	14	2	0,15	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	8	0,62	18	1,38
Kalimantan Timur	10	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	12	0,50
Sulawesi Tenggara	17	1	0,06	5	0,29
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	3	0,27	3	0,30
Maluku Utara	10	0	0,00	3	0,33
Papua Barat	13	0	0,00	2	0,15
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	34	0,07	418	0,83

Tabel 3.3.44 Jumlah Tenaga Elektromedis di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Elektromedis Dinkes		Tenaga Elektromedis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	17	0,74	1	0,05
Sumatera Utara	33	7	0,21	7	0,21
Sumatera Barat	19	10	0,53	0	0,00
Riau	12	1	0,08	0	0,00
Jambi	11	2	0,18	10	0,91
Sumatera Selatan	17	2	0,12	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	4	0,40
Lampung	15	3	0,20	0	0,00
Bangka Belitung	7	4	0,57	7	1,00
Kepulauan Riau	7	0	0,00	3	0,43
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	2	0,07	19	0,76
Jawa Tengah	35	20	0,57	10	0,29
DI Yogyakarta	5	1	0,20	0	0,00
Jawa Timur	38	21	0,55	21	0,57
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	1	0,11	1	0,11
Nusa Tenggara Barat	10	9	0,90	3	0,30
Nusa Tenggara Timur	22	6	0,27	0	0,00
Kalimantan Barat	14	3	0,21	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	2	0,17	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	1	0,08	7	0,54
Kalimantan Timur	10	2	0,22	0	0,00
Kalimantan Utara	5	2	0,40	3	0,60
Sulawesi Utara	15	0	0,00	1	0,07
Sulawesi Tengah	13	1	0,08	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	4	0,17	5	0,21
Sulawesi Tenggara	17	2	0,12	0	0,00
Gorontalo	6	2	0,33	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	5	0,45	1	0,09
Maluku Utara	10	0	0,00	2	0,22
Papua Barat	13	1	0,08	0	0,00
Papua	29	1	0,03	1	0,03
INDONESIA	514	132	0,26	106	0,21

Tabel 3.3.45 Jumlah Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga ATLM Dinkes		Tenaga ATLM UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	43	1,95	9	0,41
Sumatera Utara	33	20	0,61	20	0,61
Sumatera Barat	19	14	0,74	7	0,37
Riau	12	28	2,33	10	0,83
Jambi	11	71	6,45	211	19,18
Sumatera Selatan	17	4	0,24	9	0,53
Bengkulu	10	1	0,10	21	2,10
Lampung	15	29	1,93	46	3,07
Bangka Belitung	7	2	0,29	25	3,57
Kepulauan Riau	7	1	0,14	5	0,71
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	195	7,22	312	12,00
Jawa Tengah	35	8	0,23	179	5,11
DI Yogyakarta	5	2	0,40	3	0,60
Jawa Timur	38	86	2,26	87	2,35
Banten	8	46	6,57	0	0,00
Bali	9	1	0,11	10	1,11
Nusa Tenggara Barat	10	3	0,30	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	18	0,82	3	0,14
Kalimantan Barat	14	11	0,79	9	0,64
Kalimantan Tengah	14	38	2,92	11	1,00
Kalimantan Selatan	13	29	2,23	61	4,69
Kalimantan Timur	10	2	0,22	0	0,00
Kalimantan Utara	5	1	0,20	13	2,60
Sulawesi Utara	15	0	0,00	2	0,13
Sulawesi Tengah	13	1	0,08	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	17	0,71	26	1,08
Sulawesi Tenggara	17	2	0,12	25	1,47
Gorontalo	6	1	0,17	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	3	0,27	0	0,00
Maluku Utara	10	1	0,11	2	0,22
Papua Barat	13	6	0,46	5	0,38
Papua	29	5	0,17	4	0,14
INDONESIA	514	689	1,35	1.115	2,23

Tabel 3.3.46 Jumlah Tenaga Fisikawan Medis di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Fisikawan Medis Dinkes		Tenaga Fisikawan Medis UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	1	0,05	0	0,00
Sumatera Utara	33	0	0,00	0	0,00
Sumatera Barat	19	0	0,00	0	0,00
Riau	12	0	0,00	0	0,00
Jambi	11	1	0,09	1	0,09
Sumatera Selatan	17	0	0,00	0	0,00
Bengkulu	10	0	0,00	0	0,00
Lampung	15	0	0,00	0	0,00
Bangka Belitung	7	15	2,14	1	0,14
Kepulauan Riau	7	0	0,00	0	0,00
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	0	0,00	0	0,00
Jawa Tengah	35	0	0,00	0	0,00
DI Yogyakarta	5	5	1,00	0	0,00
Jawa Timur	38	0	0,00	0	0,00
Banten	8	0	0,00	0	0,00
Bali	9	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00	0	0,00
Nusa Tenggara Timur	22	1	0,05	0	0,00
Kalimantan Barat	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Tengah	14	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Selatan	13	0	0,00	0	0,00
Kalimantan Timur	10	10	1,11	0	0,00
Kalimantan Utara	5	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Utara	15	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tengah	13	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Tenggara	17	0	0,00	0	0,00
Gorontalo	6	0	0,00	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	0	0,00	0	0,00
Maluku Utara	10	0	0,00	0	0,00
Papua Barat	13	0	0,00	0	0,00
Papua	29	0	0,00	0	0,00
INDONESIA	514	33	0,07	2	0,00

Tabel 3.3.47 Jumlah Tenaga Radioterapis di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS dan Tenaga Ortotik Prostetik di Dinas Kesehatan dan UPT Non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Radioterapis Dinkes	Tenaga Radioterapis Non Puskesmas/RS	Tenaga Ortotik Prostetik Dinkes	Tenaga Ortotik Prostetik Non Puskesmas/RS
		n	n	n	n
Aceh	23	0	0	0	0
Sumatera Utara	33	0	6	0	0
Sumatera Barat	19	0	0	0	0
Riau	12	1	0	0	0
Jambi	11	0	1	0	0
Sumatera Selatan	17	0	0	0	0
Bengkulu	10	0	0	0	0
Lampung	15	0	0	0	0
Bangka Belitung	7	0	1	1	0
Kepulauan Riau	7	0	0	0	0
DKI Jakarta	6	0	0	0	0
Jawa Barat	27	0	13	0	0
Jawa Tengah	35	7	3	0	0
DI Yogyakarta	5	0	0	0	0
Jawa Timur	38	0	0	0	0
Banten	8	0	0	0	0
Bali	9	0	2	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0	0	0
Kalimantan Barat	14	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0	0	0
Kalimantan Timur	10	0	0	0	0
Kalimantan Utara	5	0	0	0	0
Sulawesi Utara	15	0	0	0	1
Sulawesi Tengah	13	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	17	0	0	0	0
Gorontalo	6	0	0	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0	0	0
Maluku	11	0	1	0	0
Maluku Utara	10	0	2	0	0
Papua Barat	13	0	0	0	0
Papua	29	0	0	0	0
INDONESIA	514	8	29	1	1

Tabel 3.3.48 Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Kesehatan Tradisional Dinkes		Tenaga Kesehatan Tradisional UPT Dinas non Puskesmas/RS	
		n	Mean	n	Mean
Aceh	23	60	2,73	17	0,77
Sumatera Utara	33	31	0,94	56	1,70
Sumatera Barat	19	24	1,26	7	0,37
Riau	12	30	2,50	10	0,83
Jambi	11	77	7,00	274	24,91
Sumatera Selatan	17	6	0,35	9	0,53
Bengkulu	10	1	0,10	33	3,30
Lampung	15	32	2,13	52	3,47
Bangka Belitung	7	23	3,29	64	9,14
Kepulauan Riau	7	1	0,14	13	1,86
DKI Jakarta	6	0	0,00	0	0,00
Jawa Barat	27	177	6,81	461	18,44
Jawa Tengah	35	36	1,03	245	7,00
DI Yogyakarta	5	8	1,60	3	0,60
Jawa Timur	38	102	2,76	110	3,06
Banten	8	48	6,86	0	0,00
Bali	9	6	0,67	20	2,22
Nusa Tenggara Barat	10	12	1,20	3	0,30
Nusa Tenggara Timur	22	25	1,14	3	0,14
Kalimantan Barat	14	14	1,00	14	1,00
Kalimantan Tengah	14	17	1,42	11	1,00
Kalimantan Selatan	13	38	2,92	86	6,62
Kalimantan Timur	10	14	1,56	0	0,00
Kalimantan Utara	5	3	0,60	16	3,20
Sulawesi Utara	15	0	0,00	4	0,27
Sulawesi Tengah	13	2	0,15	0	0,00
Sulawesi Selatan	24	21	0,88	43	1,79
Sulawesi Tenggara	17	5	0,29	30	1,76
Gorontalo	6	3	0,50	0	0,00
Sulawesi Barat	6	0	0,00	0	0,00
Maluku	11	11	1,00	5	0,50
Maluku Utara	10	1	0,11	9	1,00
Papua Barat	13	7	0,54	7	0,54
Papua	29	6	0,21	5	0,17
INDONESIA	514	841	1,66	1.610	3,23

Tabel 3.3.49 Jumlah Tenaga Kestrad Ramuan di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS dan Tenaga Kestrad Ketrampilan di Dinas Kesehatan dan UPT non Puskesmas/RS Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Tenaga Kestrad Ramuan Dinkes n	Tenaga Kestrad Ramuan UPT Non Puskesmas/RS n	Tenaga Kestrad Ketrampilan Dinkes n	Tenaga Kestrad Ketrampilan UPT non Puskesmas/RS n
Aceh	23	0	0	1	0
Sumatera Utara	33	1	0	0	0
Sumatera Barat	19	0	0	0	0
Riau	12	0	0	0	0
Jambi	11	0	0	9	0
Sumatera Selatan	17	0	0	0	0
Bengkulu	10	0	0	0	0
Lampung	15	0	0	0	0
Bangka Belitung	7	0	0	0	0
Kepulauan Riau	7	0	0	0	0
DKI Jakarta	6	0	0	0	0
Jawa Barat	27	0	16	5	0
Jawa Tengah	35	0	1	0	0
DI Yogyakarta	5	0	0	0	0
Jawa Timur	38	0	0	3	0
Banten	8	0	0	2	0
Bali	9	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0	3	0
Kalimantan Barat	14	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	14	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	13	0	0	0	0
Kalimantan Timur	10	0	18	0	45
Kalimantan Utara	5	0	0	0	0
Sulawesi Utara	15	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	13	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	24	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	17	1	0	0	0
Gorontalo	6	0	0	0	0
Sulawesi Barat	6	0	0	0	0
Maluku	11	41	0	79	0
Maluku Utara	10	0	0	0	0
Papua Barat	13	0	0	0	0
Papua	29	0	0	0	0
INDONESIA	514	43	35	102	45

3.4 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Tabel 3.4.1 Proporsi Struktur Pengampu Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	UPTD %	Di bawah eselon III %	Di bawah eselon IV %	lainnya %
Aceh	23	26,1	13,0	60,9	0,0
Sumatera Utara	33	45,5	15,2	39,4	0,0
Sumatera Barat	19	73,7	0,0	26,3	0,0
Riau	12	66,7	0,0	33,3	0,0
Jambi	11	90,9	0,0	9,1	0,0
Sumatera Selatan	17	41,2	5,9	47,1	5,9
Bengkulu	10	50,0	10,0	40,0	0,0
Lampung	15	53,3	6,7	33,3	6,7
Bangka Belitung	7	14,3	14,3	71,4	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	100,0	0,0
Jawa Barat	27	59,3	7,4	33,3	0,0
Jawa Tengah	35	60,0	2,9	37,1	0,0
DI Yogyakarta	5	20,0	20,0	60,0	0,0
Jawa Timur	38	57,9	2,6	39,5	0,0
Banten	8	75,0	0,0	25,0	0,0
Bali	9	77,8	22,2	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	70,0	0,0	30,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	18,2	27,3	50,0	4,5
Kalimantan Barat	14	14,3	0,0	78,6	7,1
Kalimantan Tengah	14	50,0	7,1	42,9	0,0
Kalimantan Selatan	13	84,6	0,0	15,4	0,0
Kalimantan Timur	10	70,0	0,0	30,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	0,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	40,0	13,3	40,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	7,7	7,7	84,6	0,0
Sulawesi Selatan	24	12,5	4,2	79,2	4,2
Sulawesi Tenggara	17	41,2	29,4	29,4	0,0
Gorontalo	6	33,3	0,0	66,7	0,0
Sulawesi Barat	6	33,3	16,7	50,0	0,0
Maluku	11	36,4	27,3	36,4	0,0
Maluku Utara	10	30,0	20,0	50,0	0,0
Papua Barat	13	30,8	7,7	61,5	0,0
Papua	29	13,8	20,7	65,5	0,0
INDONESIA	514	45,1	9,3	44,4	1,2

Tabel 3.4.2 Distribusi Latar Belakang Pendidikan Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Apoteker n	TTK n	Asisten TK n	Kes/non kes lainnya n
Aceh	23	17	2	1	3
Sumatera Utara	33	24	4	2	3
Sumatera Barat	19	17	0	0	2
Riau	12	8	0	0	4
Jambi	11	10	0	1	0
Sumatera Selatan	17	12	3	1	1
Bengkulu	10	5	0	0	5
Lampung	15	12	1	0	2
Bangka Belitung	7	7	0	0	0
Kepulauan Riau	7	7	0	0	0
DKI Jakarta	6	5	0	1	0
Jawa Barat	27	17	1	1	8
Jawa Tengah	35	31	0	0	4
DI Yogyakarta	5	5	0	0	0
Jawa Timur	38	30	2	1	5
Banten	8	5	0	0	3
Bali	9	6	0	0	3
Nusa Tenggara Barat	10	8	1	0	1
Nusa Tenggara Timur	22	17	4	0	1
Kalimantan Barat	14	13	1	0	0
Kalimantan Tengah	14	12	0	0	2
Kalimantan Selatan	13	12	0	0	1
Kalimantan Timur	10	9	0	0	1
Kalimantan Utara	5	4	0	0	1
Sulawesi Utara	15	9	4	0	2
Sulawesi Tengah	13	11	1	0	1
Sulawesi Selatan	24	23	1	0	0
Sulawesi Tenggara	17	13	1	0	3
Gorontalo	6	5	1	0	0
Sulawesi Barat	6	4	2	0	0
Maluku	11	9	1	0	1
Maluku Utara	10	9	0	0	1
Papua Barat	13	12	0	1	0
Papua	29	24	3	0	2
INDONESIA	514	412	33	9	60

Tabel 3.4.3 Distribusi Ketersediaan SDM Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Apoteker n	S1 Farmasi n	D3 Farmasi n	SAA / SMF n	Nakes lain n	non nakes n
Aceh	23	42	15	60	17	36	57
Sumatera Utara	33	42	25	89	11	63	67
Sumatera Barat	19	35	6	33	21	19	56
Riau	12	24	9	20	9	20	32
Jambi	11	19	5	20	10	12	23
Sumatera Selatan	17	27	18	33	14	19	43
Bengkulu	10	22	2	8	15	30	13
Lampung	15	22	4	20	0	19	26
Bangka Belitung	7	10	3	18	2	9	13
Kepulauan Riau	7	9	2	3	8	10	28
DKI Jakarta	6	7	1	6	2	1	2
Jawa Barat	27	64	21	44	16	26	97
Jawa Tengah	35	67	6	55	34	14	156
DI Yogyakarta	5	11	1	9	5	1	17
Jawa Timur	38	56	5	49	27	11	196
Banten	8	19	8	14	3	9	44
Bali	9	15	1	3	11	8	39
Nusa Tenggara Barat	10	32	12	18	8	4	32
Nusa Tenggara Timur	22	41	11	71	1	7	57
Kalimantan Barat	14	25	6	35	4	16	35
Kalimantan Tengah	14	26	6	37	10	14	43
Kalimantan Selatan	13	21	0	27	13	4	47
Kalimantan Timur	10	22	2	16	7	6	60
Kalimantan Utara	5	9	3	10	1	9	14
Sulawesi Utara	15	26	26	32	3	9	18
Sulawesi Tengah	13	34	30	21	2	17	17
Sulawesi Selatan	24	78	41	16	5	32	41
Sulawesi Tenggara	17	51	35	18	3	28	15
Gorontalo	6	12	6	1	1	11	14
Sulawesi Barat	6	15	11	3	1	8	18
Maluku	11	24	14	2	2	24	20
Maluku Utara	10	19	11	5	2	10	11
Papua Barat	13	24	7	2	5	7	20
Papua	29	60	30	28	15	31	74
INDONESIA	514	1.010	383	826	288	544	1.445

Tabel 3.4.4 Proporsi Penyusunan dan Pengiriman RKO Tahun 2018, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Membuat RKO	Bulan pengiriman RKO tahun 2018 (%)				
			Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	≥ Bulan 7
Aceh	23	100,0	30,4	39,1	13,0	4,3	4,3
Sumatera Utara	33	100,0	54,5	18,2	9,1	0,0	3,0
Sumatera Barat	19	100,0	63,2	15,8	0,0	0,0	0,0
Riau	12	100,0	50,0	25,0	0,0	8,3	0,0
Jambi	11	100,0	36,4	36,4	9,1	9,1	0,0
Sumatera Selatan	17	100,0	52,9	17,6	5,9	0,0	11,8
Bengkulu	10	100,0	30,0	60,0	10,0	0,0	0,0
Lampung	15	100,0	46,7	26,7	6,7	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	100,0	57,1	14,3	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	28,6	14,3	0,0	14,3	14,3
DKI Jakarta	6	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	100,0	37,0	33,3	7,4	3,7	7,4
Jawa Tengah	35	97,1	42,9	22,9	2,9	2,9	2,9
DI Yogyakarta	5	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	100,0	42,1	26,3	2,6	2,6	5,3
Banten	8	100,0	37,5	37,5	12,5	0,0	0,0
Bali	9	100,0	44,4	44,4	11,1	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	68,2	22,7	0,0	0,0	9,1
Kalimantan Barat	14	100,0	42,9	14,3	7,1	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	100,0	57,1	28,6	7,1	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	100,0	69,2	23,1	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	100,0	40,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	100,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	100,0	40,0	13,3	13,3	0,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	100,0	23,1	30,8	7,7	0,0	23,1
Sulawesi Selatan	24	100,0	37,5	29,2	4,2	4,2	4,2
Sulawesi Tenggara	17	100,0	70,6	11,8	0,0	0,0	5,9
Gorontalo	6	100,0	0,0	50,0	16,7	16,7	0,0
Sulawesi Barat	6	100,0	50,0	33,3	0,0	16,7	0,0
Maluku	11	100,0	54,5	18,2	9,1	0,0	9,1
Maluku Utara	10	90,0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Papua Barat	13	100,0	30,8	30,8	7,7	0,0	15,4
Papua	29	100,0	27,6	20,7	3,4	6,9	13,8
INDONESIA	514	98,6	43,2	24,9	5,3	2,3	5,3

Tabel 3.4.5 Proporsi Evaluasi Kesesuaian RKO Tahun 2016- 2017, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Kesesuaian 2016 (%)				Jumlah Dinkes N	Kesesuaian 2017 (%)			
		≤ 25	25-50	51-75	>75		≤ 25	25-50	51-75	>75
Aceh	23	0,0	10,5	21,1	68,4	23	0,0	0,0	31,6	68,4
Sumatera Utara	33	0,0	0,0	21,9	75,0	33	0,0	0,0	21,9	78,1
Sumatera Barat	19	5,6	5,6	27,8	55,6	19	5,6	5,6	11,1	77,8
Riau	12	9,1	0,0	9,1	72,7	12	9,1	0,0	0,0	81,8
Jambi	11	0,0	0,0	9,1	90,9	11	0,0	0,0	9,1	90,9
Sumatera Selatan	17	0,0	7,1	28,6	57,1	17	0,0	7,1	21,4	71,4
Bengkulu	10	0,0	0,0	11,1	66,7	10	0,0	11,1	22,2	55,6
Lampung	15	0,0	0,0	28,6	57,1	15	0,0	0,0	28,6	71,4
Bangka Belitung	7	0,0	16,7	33,3	50,0	7	0,0	0,0	33,3	66,7
Kepulauan Riau	7	16,7	0,0	16,7	66,7	7	16,7	0,0	16,7	66,7
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0,0	0,0	100,0	0,0
Jawa Barat	27	8,0	0,0	32,0	56,0	27	8,0	4,0	28,0	60,0
Jawa Tengah	35	0,0	9,7	25,8	58,1	35	0,0	3,2	22,6	67,7
DI Yogyakarta	5	0,0	0,0	0,0	100,0	5	0,0	0,0	0,0	100,0
Jawa Timur	38	0,0	6,5	25,8	64,5	38	0,0	6,5	25,8	64,5
Banten	8	0,0	12,5	12,5	62,5	8	12,5	12,5	12,5	62,5
Bali	9	0,0	0,0	22,2	66,7	9	0,0	0,0	22,2	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	0,0	0,0	100,0	10	0,0	0,0	10,0	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	0,0	5,3	21,1	57,9	22	0,0	10,5	21,1	68,4
Kalimantan Barat	14	0,0	7,7	30,8	61,5	14	0,0	7,7	23,1	69,2
Kalimantan Tengah	14	8,3	0,0	33,3	50,0	14	0,0	8,3	16,7	75,0
Kalimantan Selatan	13	9,1	9,1	9,1	72,7	13	9,1	0,0	18,2	72,7
Kalimantan Timur	10	12,5	0,0	25,0	62,5	10	12,5	0,0	25,0	62,5
Kalimantan Utara	5	0,0	20,0	0,0	80,0	5	0,0	20,0	0,0	80,0
Sulawesi Utara	15	0,0	7,1	21,4	71,4	15	0,0	14,3	21,4	64,3
Sulawesi Tengah	13	0,0	0,0	33,3	66,7	13	0,0	0,0	33,3	66,7
Sulawesi Selatan	24	0,0	8,7	26,1	60,9	24	0,0	4,3	13,0	82,6
Sulawesi Tenggara	17	6,3	12,5	31,3	50,0	17	0,0	6,3	31,3	62,5
Gorontalo	6	20,0	0,0	40,0	40,0	6	0,0	20,0	20,0	60,0
Sulawesi Barat	6	0,0	16,7	50,0	33,3	6	0,0	0,0	50,0	50,0
Maluku	11	10,0	0,0	10,0	80,0	11	10,0	0,0	10,0	80,0
Maluku Utara	10	0,0	11,1	55,6	33,3	10	0,0	0,0	66,7	33,3
Papua Barat	13	0,0	8,3	33,3	58,3	13	0,0	16,7	8,3	75,0
Papua	29	3,8	15,4	23,1	46,2	29	3,8	3,8	30,8	57,7
INDONESIA	514	2,6	5,9	24,1	62,4	513	2,2	4,6	22,4	69,3

Tabel 3.4.6 Proporsi Evaluasi Kesesuaian RKO Tahun 2018, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Kesesuaian 2018 (%)			
		≤ 25	25-50	51-75	>75
Aceh	23	0,0	0,0	26,3	73,7
Sumatera Utara	33	0,0	0,0	25,0	75,0
Sumatera Barat	19	5,6	5,6	22,2	66,7
Riau	12	9,1	0,0	0,0	81,8
Jambi	11	0,0	0,0	9,1	90,9
Sumatera Selatan	17	0,0	7,1	21,4	71,4
Bengkulu	10	0,0	0,0	22,2	77,8
Lampung	15	0,0	0,0	21,4	78,6
Bangka Belitung	7	0,0	0,0	33,3	66,7
Kepulauan Riau	7	16,7	0,0	16,7	66,7
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	100,0
Jawa Barat	27	8,0	4,0	24,0	64,0
Jawa Tengah	35	3,2	0,0	19,4	77,4
DI Yogyakarta	5	0,0	0,0	0,0	100,0
Jawa Timur	38	3,2	6,5	16,1	74,2
Banten	8	0,0	12,5	25,0	62,5
Bali	9	0,0	0,0	33,3	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	10,0	0,0	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	0,0	10,5	21,1	68,4
Kalimantan Barat	14	0,0	7,7	30,8	61,5
Kalimantan Tengah	14	0,0	8,3	16,7	75,0
Kalimantan Selatan	13	9,1	0,0	9,1	81,8
Kalimantan Timur	10	12,5	0,0	25,0	62,5
Kalimantan Utara	5	0,0	20,0	0,0	80,0
Sulawesi Utara	15	0,0	0,0	21,4	78,6
Sulawesi Tengah	13	0,0	0,0	25,0	75,0
Sulawesi Selatan	24	0,0	4,3	13,0	82,6
Sulawesi Tenggara	17	0,0	6,3	25,0	68,8
Gorontalo	6	0,0	0,0	40,0	60,0
Sulawesi Barat	6	0,0	0,0	33,3	66,7
Maluku	11	0,0	0,0	10,0	90,0
Maluku Utara	10	0,0	0,0	55,6	44,4
Papua Barat	13	0,0	8,3	25,0	66,7
Papua	29	0,0	7,7	15,4	76,9
INDONESIA	514	2,0	3,7	20,4	73,7

Tabel 3.4.7 Proporsi Alasan Ketidaksesuaian Realisasi Pengadaan Obat Dengan RKO, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Alasan ketidaksesuaian (%)								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
Aceh	23	21,1	47,4	73,7	89,5	84,2	47,4	47,4	26,3	15,8
Sumatera Utara	33	37,5	15,6	40,6	84,4	81,3	68,8	9,4	12,5	9,4
Sumatera Barat	19	38,9	44,4	50,0	94,4	77,8	66,7	33,3	22,2	16,7
Riau	12	54,5	9,1	63,6	81,8	72,7	81,8	36,4	9,1	9,1
Jambi	11	36,4	54,5	45,5	90,9	81,8	54,5	36,4	36,4	9,1
Sumatera Selatan	17	28,6	21,4	21,4	71,4	71,4	57,1	0,0	21,4	14,3
Bengkulu	10	22,2	11,1	55,6	77,8	88,9	66,7	44,4	11,1	0,0
Lampung	15	35,7	35,7	35,7	78,6	92,9	92,9	7,1	7,1	7,1
Bangka Belitung	7	50,0	50,0	33,3	83,3	50,0	66,7	33,3	0,0	16,7
Kepulauan Riau	7	66,7	50,0	66,7	100,0	66,7	83,3	50,0	33,3	50,0
DKI Jakarta	5	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Jawa Barat	27	56,0	48,0	48,0	80,0	76,0	76,0	44,0	32,0	12,0
Jawa Tengah	35	54,8	61,3	71,0	93,5	83,9	80,6	45,2	38,7	9,7
DI Yogyakarta	5	50,0	25,0	75,0	100,0	100,0	25,0	25,0	0,0	25,0
Jawa Timur	38	54,8	45,2	54,8	100,0	87,1	87,1	41,9	38,7	12,9
Banten	8	75,0	62,5	37,5	62,5	62,5	62,5	62,5	12,5	12,5
Bali	9	33,3	44,4	66,7	100,0	100,0	100,0	44,4	11,1	33,3
Nusa Tenggara Barat	10	30,0	0,0	10,0	60,0	80,0	80,0	20,0	10,0	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	21,1	21,1	26,3	94,7	73,7	63,2	15,8	21,1	21,1
Kalimantan Barat	14	46,2	53,8	30,8	84,6	84,6	76,9	30,8	23,1	7,7
Kalimantan Tengah	14	33,3	50,0	66,7	75,0	83,3	83,3	25,0	25,0	8,3
Kalimantan Selatan	13	63,6	63,6	72,7	81,8	54,5	72,7	54,5	18,2	27,3
Kalimantan Timur	10	62,5	37,5	37,5	87,5	87,5	50,0	37,5	12,5	12,5
Kalimantan Utara	5	40,0	80,0	60,0	80,0	80,0	40,0	60,0	60,0	40,0
Sulawesi Utara	15	21,4	50,0	28,6	78,6	78,6	50,0	50,0	35,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	25,0	25,0	33,3	66,7	66,7	50,0	16,7	16,7	16,7
Sulawesi Selatan	24	39,1	34,8	69,6	87,0	82,6	69,6	39,1	26,1	13,0
Sulawesi Tenggara	17	18,8	31,3	43,8	87,5	93,8	62,5	18,8	0,0	6,3
Gorontalo	6	20,0	40,0	40,0	100,0	80,0	40,0	0,0	40,0	0,0
Sulawesi Barat	6	83,3	66,7	33,3	50,0	50,0	33,3	33,3	16,7	16,7
Maluku	11	40,0	40,0	50,0	60,0	80,0	60,0	20,0	20,0	10,0
Maluku Utara	10	33,3	22,2	44,4	77,8	66,7	33,3	33,3	11,1	22,2
Papua Barat	13	33,3	16,7	33,3	75,0	58,3	41,7	25,0	16,7	16,7
Papua	29	30,8	30,8	53,8	69,2	42,3	42,3	26,9	19,2	7,7
INDONESIA	513	40,2	38,0	48,9	83,0	76,7	65,7	31,7	22,4	13,3

Keterangan:

- Perubahan Anggaran
- Pola Penyakit Berubah
- Sisa stok obat tahun lalu yang masih banyak
- Ketersediaan obat di e katalog / permintaan obat tidak dilayani
- Obat di e katalog tidak tersedia tepat waktu
- Obat di e katalog sudah habis
- Pola persepsian berubah
- Perubahan regulasi
- lainnya

Tabel 3.4.8 Proporsi Keberadaan RKO dan Pemesanan Per Item Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (1), Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Amoksisilin		Deksametason		Diazepam		Metformin	
		RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %
Aceh	23	78,3	73,9	73,9	78,3	56,5	47,8	73,9	56,5
Sumatera Utara	33	78,8	84,8	87,9	87,9	51,5	51,5	60,6	45,5
Sumatera Barat	19	94,7	94,7	100,0	100,0	73,7	52,6	84,2	73,7
Riau	12	83,3	91,7	75,0	91,7	66,7	58,3	83,3	91,7
Jambi	11	81,8	90,9	72,7	90,9	72,7	72,7	54,5	54,5
Sumatera Selatan	17	82,4	82,4	76,5	82,4	52,9	58,8	82,4	82,4
Bengkulu	10	90,0	70,0	80,0	80,0	60,0	70,0	60,0	50,0
Lampung	15	86,7	93,3	80,0	86,7	60,0	60,0	73,3	53,3
Bangka Belitung	7	85,7	71,4	100,0	71,4	71,4	71,4	100,0	71,4
Kepulauan Riau	7	100,0	85,7	85,7	100,0	100,0	71,4	85,7	71,4
DKI Jakarta	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	85,2	81,5	88,9	81,5	74,1	70,4	81,5	70,4
Jawa Tengah	35	82,9	80,0	94,3	88,6	62,9	62,9	74,3	51,4
DI Yogyakarta	5	100,0	80,0	100,0	100,0	60,0	60,0	100,0	100,0
Jawa Timur	38	92,1	73,7	97,4	92,1	63,2	52,6	92,1	71,1
Banten	8	87,5	75,0	87,5	100,0	75,0	75,0	62,5	62,5
Bali	9	88,9	100,0	100,0	88,9	77,8	77,8	100,0	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	100,0	90,0	90,0	80,0	70,0	100,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9	86,4	81,8	68,2	81,8	77,3	81,8	77,3
Kalimantan Barat	14	85,7	78,6	92,9	92,9	71,4	71,4	85,7	71,4
Kalimantan Tengah	14	92,9	78,6	85,7	78,6	100,0	78,6	85,7	64,3
Kalimantan Selatan	13	92,3	61,5	100,0	100,0	69,2	61,5	76,9	53,8
Kalimantan Timur	10	90,0	60,0	90,0	80,0	50,0	70,0	90,0	70,0
Kalimantan Utara	5	100,0	80,0	80,0	40,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Sulawesi Utara	15	86,7	73,3	80,0	60,0	60,0	33,3	73,3	60,0
Sulawesi Tengah	13	92,3	76,9	92,3	84,6	76,9	69,2	46,2	46,2
Sulawesi Selatan	24	87,5	79,2	87,5	79,2	58,3	54,2	83,3	75,0
Sulawesi Tenggara	17	94,1	76,5	94,1	88,2	64,7	64,7	82,4	58,8
Gorontalo	6	50,0	50,0	83,3	83,3	50,0	50,0	50,0	66,7
Sulawesi Barat	6	66,7	66,7	83,3	83,3	50,0	50,0	83,3	50,0
Maluku	11	81,8	72,7	81,8	72,7	63,6	45,5	90,9	63,6
Maluku Utara	10	90,0	80,0	80,0	80,0	60,0	60,0	40,0	50,0
Papua Barat	13	53,8	46,2	53,8	53,8	46,2	46,2	61,5	38,5
Papua	29	62,1	55,2	58,6	62,1	41,4	48,3	41,4	34,5
INDONESIA	513	83,7	76,7	84,2	81,5	63,6	59,3	74,7	62,3

Catatan :

% RKO berarti persentase dinas kesehatan yang memiliki RKO (dari seluruh dinas kesehatan)

% pesan berarti persentase dinas kesehatan yang melakukan pemesanan (dari seluruh dinas kesehatan)

Tabel 3.4.9 Proporsi Keberadaan RKO dan Pemesanan Per Item Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (2), Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	MgSO4		As. mefenamat		Oralit		Infus RL	
		RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %	RKO %	Pesan %
Aceh	23	26,1	39,1	65,2	60,9	43,5	30,4	82,6	82,6
Sumatera Utara	33	45,5	45,5	78,8	81,8	51,5	48,5	75,8	72,7
Sumatera Barat	19	57,9	31,6	100,0	100,0	73,7	47,4	89,5	84,2
Riau	12	41,7	58,3	75,0	83,3	41,7	41,7	83,3	91,7
Jambi	11	54,5	54,5	90,9	100,0	63,6	63,6	81,8	100,0
Sumatera Selatan	17	52,9	41,2	82,4	82,4	52,9	58,8	82,4	76,5
Bengkulu	10	60,0	40,0	100,0	80,0	50,0	30,0	70,0	90,0
Lampung	15	53,3	33,3	80,0	66,7	60,0	46,7	80,0	80,0
Kep. Bangka Belitung	7	57,1	28,6	71,4	57,1	14,3	14,3	85,7	71,4
Kep. Riau	7	28,6	28,6	57,1	42,9	57,1	42,9	57,1	57,1
DKI Jakarta	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	63,0	48,1	88,9	92,6	81,5	59,3	92,6	85,2
Jawa Tengah	35	54,3	31,4	80,0	80,0	54,3	37,1	91,4	80,0
Di Yogyakarta	5	60,0	40,0	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	100,0
Jawa Timur	38	71,1	73,7	81,6	73,7	28,9	21,1	86,8	81,6
Banten	8	25,0	75,0	87,5	100,0	87,5	37,5	87,5	62,5
Bali	9	33,3	44,4	88,9	100,0	66,7	66,7	77,8	66,7
NTB	10	30,0	20,0	90,0	90,0	50,0	50,0	100,0	100,0
NTT	22	72,7	68,2	90,9	81,8	63,6	45,5	95,5	95,5
Kalimantan Barat	14	64,3	64,3	92,9	92,9	71,4	35,7	85,7	100,0
Kalimantan Tengah	14	64,3	57,1	92,9	71,4	64,3	42,9	71,4	71,4
Kalimantan Selatan	13	38,5	46,2	92,3	84,6	69,2	69,2	100,0	100,0
Kalimantan Timur	10	60,0	60,0	80,0	60,0	80,0	50,0	80,0	80,0
Kalimantan Utara	5	100,0	60,0	80,0	60,0	60,0	60,0	40,0	80,0
Sulawesi Utara	15	46,7	33,3	80,0	53,3	73,3	53,3	73,3	80,0
Sulawesi Tengah	13	69,2	69,2	76,9	69,2	53,8	61,5	61,5	69,2
Sulawesi Selatan	24	41,7	37,5	75,0	70,8	66,7	54,2	87,5	87,5
Sulawesi Tenggara	17	17,6	23,5	94,1	88,2	47,1	29,4	88,2	88,2
Gorontalo	6	16,7	16,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Sulawesi Barat	6	50,0	50,0	66,7	66,7	66,7	83,3	83,3	83,3
Maluku	11	36,4	27,3	90,9	72,7	72,7	45,5	81,8	72,7
Maluku Utara	10	30,0	30,0	70,0	80,0	50,0	30,0	50,0	40,0
Papua Barat	13	30,8	30,8	61,5	61,5	61,5	61,5	76,9	84,6
Papua	29	48,3	48,3	65,5	62,1	44,8	34,5	55,2	51,7
INDONESIA	513	49,4	44,9	80,7	76,5	57,2	44,9	80,2	79,2

Catatan :

% RKO berarti persentase dinas kesehatan yang memiliki RKO (dari seluruh dinas kesehatan)

% pesan berarti persentase dinas kesehatan yang melakukan pesanan (dari seluruh dinas kesehatan)

Tabel 3.4.10 Proporsi Perencanaan Kebutuhan Obat untuk 18 Bulan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Ya %
Aceh	23	69,6
Sumatera Utara	33	75,8
Sumatera Barat	19	63,2
Riau	12	75,0
Jambi	11	72,7
Sumatera Selatan	17	70,6
Bengkulu	10	70,0
Lampung	15	86,7
Bangka Belitung	7	85,7
Kepulauan Riau	7	100,0
DKI Jakarta	6	100,0
Jawa Barat	27	55,6
Jawa Tengah	35	58,8
DI Yogyakarta	5	60,0
Jawa Timur	38	78,9
Banten	8	62,5
Bali	9	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9
Kalimantan Barat	14	78,6
Kalimantan Tengah	14	85,7
Kalimantan Selatan	13	76,9
Kalimantan Timur	10	70,0
Kalimantan Utara	5	80,0
Sulawesi Utara	15	80,0
Sulawesi Tengah	13	76,9
Sulawesi Selatan	24	79,2
Sulawesi Tenggara	17	82,4
Gorontalo	6	100,0
Sulawesi Barat	6	83,3
Maluku	11	72,7
Maluku Utara	10	88,9
Papua Barat	13	84,6
Papua	29	58,6
INDONESIA	514	75,0

Catatan : semua obat direncanakan untuk kebutuhan 18 bulan

Tabel 3.4.11 Proporsi Ketersediaan Rencana Kebutuhan BMHP dan Alkes Investasi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	BMHP	Alkes investasi
	N	%	%
Aceh	23	95,7	56,5
Sumatera Utara	33	97,0	39,4
Sumatera Barat	19	94,7	36,8
Riau	12	100,0	66,7
Jambi	11	100,0	63,6
Sumatera Selatan	17	100,0	41,2
Bengkulu	10	90,0	50,0
Lampung	15	100,0	60,0
Bangka Belitung	7	85,7	42,9
Kepulauan Riau	7	100,0	57,1
DKI Jakarta	6	16,7	0,0
Jawa Barat	27	100,0	33,3
Jawa Tengah	35	100,0	54,3
DI Yogyakarta	5	100,0	20,0
Jawa Timur	38	92,1	55,3
Banten	8	100,0	62,5
Bali	9	100,0	22,2
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	95,5	31,8
Kalimantan Barat	14	100,0	50,0
Kalimantan Tengah	14	100,0	50,0
Kalimantan Selatan	13	100,0	69,2
Kalimantan Timur	10	100,0	70,0
Kalimantan Utara	5	100,0	80,0
Sulawesi Utara	15	100,0	46,7
Sulawesi Tengah	13	100,0	46,2
Sulawesi Selatan	24	95,8	62,5
Sulawesi Tenggara	17	94,1	29,4
Gorontalo	6	100,0	50,0
Sulawesi Barat	6	100,0	66,7
Maluku	11	90,9	54,5
Maluku Utara	10	90,0	40,0
Papua Barat	13	92,3	53,8
Papua	29	96,6	24,1
INDONESIA	514	96,1	46,9

Tabel 3.4.12 Proporsi Ketersediaan Sumber Dana Pembelian Obat di Dinkes dan Besarannya (DAK, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Kapitasi, & Lainnya), Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	DAK	APBD Prov	APBD kab/kota	Kapitasi	Lainnya
Aceh	23	100,0	8,7	8,7	43,5	8,7
Sumatera Utara	33	97,0	15,2	27,3	60,6	6,1
Sumatera Barat	19	100,0	10,5	47,4	31,6	0,0
Riau	12	91,7	0,0	75,0	25,0	0,0
Jambi	11	100,0	0,0	54,5	18,2	0,0
Sumatera Selatan	17	100,0	5,9	41,2	29,4	0,0
Bengkulu	10	100,0	0,0	11,1	10,0	0,0
Lampung	15	100,0	33,3	53,3	26,7	0,0
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	42,9	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	28,6	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	92,6	3,7	59,3	18,5	22,2
Jawa Tengah	35	100,0	14,3	60,0	11,4	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	100,0	0,0	40,0
Jawa Timur	38	97,4	13,2	52,6	26,3	18,4
Banten	8	87,5	0,0	62,5	0,0	0,0
Bali	9	88,9	0,0	77,8	0,0	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	20,0	30,0	70,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	95,5	9,1	13,6	40,9	0,0
Kalimantan Barat	14	92,9	28,6	21,4	35,7	14,3
Kalimantan Tengah	14	100,0	7,1	21,4	21,4	0,0
Kalimantan Selatan	13	92,3	69,2	92,3	30,8	0,0
Kalimantan Timur	10	80,0	0,0	80,0	10,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	0,0	100,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	100,0	0,0	26,7	20,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	100,0	0,0	30,8	15,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	100,0	4,2	29,2	29,2	4,2
Sulawesi Tenggara	17	100,0	11,8	17,6	29,4	5,9
Gorontalo	6	83,3	0,0	16,7	0,0	16,7
Sulawesi Barat	6	100,0	16,7	16,7	0,0	16,7
Maluku	11	100,0	0,0	9,1	27,3	9,1
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	92,3	0,0	38,5	7,7	7,7
Papua	29	86,2	13,8	44,8	17,2	10,3
INDONESIA	514	94,9	10,5	40,2	24,5	6,2

Tabel 3.4.13 Proporsi Sistem Pembelian Obat dengan Dana Kapitasi di Puskesmas, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Sistem Pembelian (%)					
		1	2	3	4	5	6
Aceh	23	0,0	69,6	4,3	0,0	17,4	8,7
Sumatera Utara	33	6,1	27,3	0,0	0,0	57,6	9,1
Sumatera Barat	19	26,3	31,6	15,8	0,0	10,5	15,8
Riau	12	25,0	50,0	0,0	0,0	8,3	16,7
Jambi	11	18,2	18,2	9,1	0,0	45,5	9,1
Sumatera Selatan	17	23,5	17,6	0,0	5,9	29,4	23,5
Bengkulu	10	0,0	10,0	0,0	0,0	40,0	50,0
Lampung	15	13,3	26,7	6,7	0,0	40,0	13,3
Bangka Belitung	7	28,6	0,0	0,0	14,3	28,6	28,6
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	0,0	0,0	0,0	14,3
DKI Jakarta	6	50,0	33,3	16,7	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	25,9	33,3	22,2	0,0	7,4	11,1
Jawa Tengah	35	8,6	28,6	25,7	2,9	17,1	17,1
DI Yogyakarta	5	40,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Jawa Timur	38	13,2	23,7	21,1	0,0	36,8	5,3
Banten	8	37,5	0,0	25,0	0,0	25,0	12,5
Bali	9	33,3	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	20,0	0,0	10,0	60,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	22,7	36,4	0,0	4,5	31,8	4,5
Kalimantan Barat	14	28,6	7,1	14,3	7,1	28,6	14,3
Kalimantan Tengah	14	14,3	21,4	0,0	14,3	35,7	14,3
Kalimantan Selatan	13	15,4	7,7	7,7	23,1	30,8	15,4
Kalimantan Timur	10	70,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Kalimantan Utara	5	80,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	13,3	40,0	0,0	0,0	33,3	13,3
Sulawesi Tengah	13	15,4	30,8	0,0	7,7	15,4	30,8
Sulawesi Selatan	24	12,5	45,8	4,2	0,0	25,0	12,5
Sulawesi Tenggara	17	52,9	29,4	0,0	0,0	11,8	5,9
Gorontalo	6	33,3	33,3	0,0	0,0	16,7	16,7
Sulawesi Barat	6	33,3	33,3	0,0	0,0	16,7	16,7
Maluku	11	18,2	54,5	9,1	0,0	9,1	9,1
Maluku Utara	10	20,0	50,0	0,0	0,0	10,0	20,0
Papua Barat	13	23,1	53,8	0,0	0,0	7,7	15,4
Papua	29	17,2	34,5	0,0	0,0	34,5	13,8
INDONESIA	514	20,6	30,5	7,4	2,5	25,1	13,8

Keterangan:

1. Puskesmas yang punya apoteker membeli sendiri
2. Puskesmas membeli sendiri meskipun tidak punya apoteker
3. Gabungan beberapa puskesmas dikoordinir oleh apoteker dari puskesmas yang ditunjuk
4. Pembelian dilakukan di tingkat dinas untuk puskesmas non BLUD
5. Pembelian dilakukan di tingkat dinas untuk seluruh puskesmas
6. Tidak boleh membeli sendiri (semua disuplai dari dinkes)

Tabel 3.4.14 Proporsi Jenis Obat yang Dapat Dibeli dengan Dana Kapitasi di Puskesmas, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Jenis obat yang dapat dibeli (%)				
	N	a	b	c	d	e
Aceh	23	76,2	90,5	61,9	38,1	14,3
Sumatera Utara	33	63,3	76,7	70,0	43,3	3,3
Sumatera Barat	19	75,0	87,5	56,3	31,3	12,5
Riau	12	80,0	80,0	80,0	40,0	0,0
Jambi	11	80,0	80,0	50,0	30,0	10,0
Sumatera Selatan	17	84,6	84,6	61,5	53,8	0,0
Bengkulu	10	20,0	40,0	40,0	20,0	0,0
Lampung	15	69,2	69,2	61,5	23,1	7,7
Bangka Belitung	7	100,0	80,0	60,0	80,0	0,0
Kepulauan Riau	7	66,7	83,3	33,3	50,0	0,0
DKI Jakarta	6	16,7	16,7	33,3	16,7	0,0
Jawa Barat	27	75,0	66,7	62,5	54,2	4,2
Jawa Tengah	35	72,4	86,2	72,4	44,8	13,8
DI Yogyakarta	5	75,0	100,0	25,0	50,0	0,0
Jawa Timur	38	72,2	86,1	80,6	52,8	0,0
Banten	8	71,4	85,7	57,1	28,6	0,0
Bali	9	100,0	83,3	66,7	33,3	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	44,4	88,9	66,7	44,4	11,1
Nusa Tenggara Timur	22	76,2	100,0	66,7	23,8	9,5
Kalimantan Barat	14	83,3	91,7	75,0	66,7	0,0
Kalimantan Tengah	14	75,0	100,0	91,7	83,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	90,9	100,0	100,0	54,5	9,1
Kalimantan Timur	10	77,8	77,8	88,9	11,1	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	60,0	40,0	60,0	20,0
Sulawesi Utara	15	69,2	69,2	61,5	38,5	0,0
Sulawesi Tengah	13	44,4	77,8	55,6	33,3	11,1
Sulawesi Selatan	24	76,2	90,5	71,4	52,4	9,5
Sulawesi Tenggara	17	75,0	81,3	68,8	37,5	6,3
Gorontalo	6	80,0	80,0	40,0	40,0	20,0
Sulawesi Barat	6	80,0	60,0	60,0	20,0	40,0
Maluku	11	60,0	60,0	20,0	10,0	0,0
Maluku Utara	10	62,5	100,0	75,0	50,0	0,0
Papua Barat	13	63,6	81,8	45,5	63,6	9,1
Papua	29	60,0	72,0	48,0	28,0	0,0
INDONESIA	514	70,9	81,3	64,3	42,2	5,9

- a. Obat fornas yang tidak disediakan dinkes
- b. Stok obat fornas yang telah disediakan dinkes tapi masih kurang
- c. Obat fornas yang tidak ada di e-katalog
- d. Obat non fornas baik yang disediakan dinkes maupun tidak
- e. Lainnya.....

**Tabel 3.4.15 Proporsi Sumber Dana untuk Pembelian Alkes di Dinas Kesehatan
Tahun 2018, Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah dinkes N	Ada sumber dana (%)				
		DAK	APBDP	APBDK	Kapitasi	Lainnya
Aceh	23	69,6	13,0	4,3	39,1	17,4
Sumatera Utara	33	72,7	0,0	12,1	42,4	3,0
Sumatera Barat	19	78,9	0,0	31,6	26,3	0,0
Riau	12	58,3	8,3	25,0	8,3	8,3
Jambi	11	100,0	0,0	36,4	18,2	9,1
Sumatera Selatan	17	70,6	0,0	35,3	17,6	0,0
Bengkulu	10	70,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Lampung	15	86,7	0,0	20,0	13,3	0,0
Bangka Belitung	7	71,4	0,0	42,9	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	14,3	14,3	14,3
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	51,9	3,7	40,7	11,1	14,8
Jawa Tengah	35	62,9	5,7	54,3	11,4	22,9
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	80,0	20,0	20,0
Jawa Timur	38	57,9	5,3	39,5	21,1	42,1
Banten	8	62,5	25,0	62,5	0,0	0,0
Bali	9	66,7	11,1	33,3	11,1	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	0,0	40,0	40,0	20,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	0,0	13,6	22,7	4,5
Kalimantan Barat	14	85,7	0,0	21,4	14,3	0,0
Kalimantan Tengah	14	85,7	0,0	21,4	7,1	21,4
Kalimantan Selatan	13	69,2	7,7	69,2	7,7	0,0
Kalimantan Timur	10	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	40,0	0,0	60,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	93,3	0,0	6,7	13,3	0,0
Sulawesi Tengah	13	76,9	0,0	23,1	7,7	0,0
Sulawesi Selatan	24	66,7	4,2	25,0	29,2	25,0
Sulawesi Tenggara	17	82,4	5,9	29,4	41,2	0,0
Gorontalo	6	83,3	0,0	16,7	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	83,3	0,0	0,0	16,7	0,0
Maluku	11	81,8	0,0	9,1	27,3	0,0
Maluku Utara	10	80,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Papua Barat	13	61,5	0,0	7,7	0,0	38,5
Papua	29	58,6	6,9	17,2	10,3	10,3
INDONESIA	514	71,8	3,5	28,0	18,1	11,5

**Tabel 3.4.16 Proporsi Sumber Dana untuk Pembelian BMHP di Dinas Kesehatan
Tahun 2018, Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah dinkes N	Ada sumber dana (%)				
		DAK	APBDP	APBDK	Kapitasi	Lainnya
Aceh	23	87,0	8,7	0,0	43,5	8,7
Sumatera Utara	33	90,9	6,1	9,1	51,5	0,0
Sumatera Barat	19	94,7	0,0	36,8	21,1	0,0
Riau	12	91,7	0,0	33,3	0,0	0,0
Jambi	11	72,7	9,1	27,3	9,1	0,0
Sumatera Selatan	17	94,1	0,0	23,5	5,9	0,0
Bengkulu	10	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	86,7	13,3	20,0	13,3	0,0
Bangka Belitung	7	71,4	0,0	14,3	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	0,0	28,6	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	66,7	0,0	44,4	14,8	3,7
Jawa Tengah	35	80,0	11,4	37,1	14,3	2,9
DI Yogyakarta	5	60,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	71,1	2,6	26,3	15,8	13,2
Banten	8	37,5	0,0	62,5	0,0	12,5
Bali	9	55,6	11,1	33,3	11,1	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0	10,0	20,0	40,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	81,8	4,5	18,2	36,4	0,0
Kalimantan Barat	14	85,7	0,0	7,1	21,4	7,1
Kalimantan Tengah	14	92,9	7,1	21,4	7,1	7,1
Kalimantan Selatan	13	69,2	46,2	92,3	15,4	0,0
Kalimantan Timur	10	60,0	0,0	80,0	20,0	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	20,0	80,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	80,0	6,7	0,0	20,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	100,0	0,0	15,4	7,7	0,0
Sulawesi Selatan	24	91,7	0,0	16,7	25,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	88,2	0,0	5,9	29,4	0,0
Gorontalo	6	83,3	0,0	16,7	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	100,0	16,7	16,7	0,0	0,0
Maluku	11	63,6	0,0	9,1	18,2	0,0
Maluku Utara	10	80,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	61,5	0,0	23,1	0,0	15,4
Papua	29	58,6	10,3	31,0	13,8	0,0
INDONESIA	514	78,4	5,6	24,9	17,9	3,1

Tabel 3.4.17 Proporsi Pembelian Alat Kesehatan dalam Negeri Tahun 2018, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Pembelian AKDN (Ya)
Aceh	23	52,2
Sumatera Utara	33	57,6
Sumatera Barat	19	68,4
Riau	12	83,3
Jambi	11	63,6
Sumatera Selatan	17	52,9
Bengkulu	10	20,0
Lampung	15	46,7
Bangka Belitung	7	57,1
Kepulauan Riau	7	57,1
DKI Jakarta	6	0,0
Jawa Barat	27	55,6
Jawa Tengah	35	62,9
DI Yogyakarta	5	100,0
Jawa Timur	38	73,7
Banten	8	62,5
Bali	9	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9
Kalimantan Barat	14	64,3
Kalimantan Tengah	14	50,0
Kalimantan Selatan	13	53,8
Kalimantan Timur	10	100,0
Kalimantan Utara	5	20,0
Sulawesi Utara	15	73,3
Sulawesi Tengah	13	46,2
Sulawesi Selatan	24	62,5
Sulawesi Tenggara	17	52,9
Gorontalo	6	83,3
Sulawesi Barat	6	50,0
Maluku	11	54,5
Maluku Utara	10	20,0
Papua Barat	13	61,5
Papua	29	31,0
INDONESIA	514	59,1

**Tabel 3.4.18 Jenis Produk Alat Kesehatan dalam Negeri yang Disediakan,
Rifaskes 2019**

No	Jenis Alkes
1	Bed Pasien
2	Dental Unit
3	Examination Lamp
4	Examination Table
5	Kursi Roda

Tabel 3.4.19 Proporsi Mekanisme Pengadaan Obat dan Persentase Pendanaannya, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	E-purchasing %	Tender / lelang %	Pembelian langsung %
Aceh	23	100,0	30,4	43,5
Sumatera Utara	33	90,9	9,1	60,6
Sumatera Barat	19	100,0	21,1	63,2
Riau	12	100,0	50,0	50,0
Jambi	11	100,0	36,4	72,7
Sumatera Selatan	17	100,0	41,2	58,8
Bengkulu	10	100,0	20,0	50,0
Lampung	15	100,0	6,7	33,3
Bangka Belitung	7	100,0	14,3	71,4
Kepulauan Riau	7	100,0	100,0	14,3
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	96,3	48,1	44,4
Jawa Tengah	35	100,0	57,1	57,1
DI Yogyakarta	5	100,0	80,0	100,0
Jawa Timur	38	100,0	52,6	55,3
Banten	8	100,0	62,5	37,5
Bali	9	100,0	66,7	55,6
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	10,0	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	63,6	36,4
Kalimantan Barat	14	100,0	14,3	64,3
Kalimantan Tengah	14	100,0	28,6	35,7
Kalimantan Selatan	13	100,0	38,5	84,6
Kalimantan Timur	10	100,0	20,0	70,0
Kalimantan Utara	5	100,0	0,0	60,0
Sulawesi Utara	15	100,0	26,7	33,3
Sulawesi Tengah	13	100,0	30,8	61,5
Sulawesi Selatan	24	95,8	41,7	62,5
Sulawesi Tenggara	17	100,0	41,2	35,3
Gorontalo	6	100,0	50,0	33,3
Sulawesi Barat	6	100,0	16,7	83,3
Maluku	11	90,9	54,5	45,5
Maluku Utara	10	70,0	40,0	40,0
Papua Barat	13	76,9	69,2	30,8
Papua	29	72,4	89,7	13,8
INDONESIA	514	94,9	41,2	50,2

Tabel 3.4.20 Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Epurchasing, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes	Frekuensi Pengadaan (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	91,3	4,3	0,0	0,0	4,3
Sumatera Utara	33	83,3	13,3	3,3	0,0	0,0
Sumatera Barat	19	73,7	15,8	5,3	0,0	5,3
Riau	12	91,7	8,3	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	81,8	9,1	9,1	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	94,1	5,9	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	88,5	3,8	0,0	0,0	7,7
Jawa Tengah	35	82,9	5,7	2,9	0,0	8,6
DI Yogyakarta	5	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	89,5	5,3	0,0	0,0	5,3
Banten	8	87,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Bali	9	66,7	22,2	0,0	0,0	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	85,7	0,0	7,1	0,0	7,1
Kalimantan Tengah	14	78,6	14,3	0,0	0,0	7,1
Kalimantan Selatan	13	84,6	7,7	0,0	0,0	7,7
Kalimantan Timur	10	80,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	93,3	0,0	0,0	0,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	82,6	13,0	0,0	0,0	4,3
Sulawesi Tenggara	17	94,1	0,0	5,9	0,0	0,0
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	0,0	0,0	0,0	33,3
Maluku	11	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Papua	29	85,7	4,8	0,0	0,0	9,5
INDONESIA	513	87,5	7,0	1,4	0,2	3,9

Frekuensi Pengadaan

1. 1 kali per tahun
2. setiap 3-6 bulan
3. setiap bulan
4. setiap minggu
5. lainnya

**Tabel 3.4.21 Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara
Epurchasing, Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah dinkes N	Waktu Tunggu (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	26,1	39,1	30,4	0,0	4,3
Sumatera Utara	33	13,3	30,0	50,0	3,3	3,3
Sumatera Barat	19	26,3	26,3	36,8	5,3	5,3
Riau	12	16,7	25,0	41,7	8,3	8,3
Jambi	11	9,1	54,5	36,4	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	41,2	41,2	11,8	5,9	0,0
Bengkulu	10	30,0	50,0	20,0	0,0	0,0
Lampung	15	20,0	40,0	33,3	6,7	0,0
Bangka Belitung	7	14,3	71,4	14,3	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	0,0	85,7	14,3	0,0	0,0
DKI Jakarta	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	15,4	42,3	38,5	0,0	3,8
Jawa Tengah	35	2,9	34,3	57,1	5,7	0,0
DI Yogyakarta	5	0,0	20,0	40,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	13,2	44,7	42,1	0,0	0,0
Banten	8	12,5	12,5	75,0	0,0	0,0
Bali	9	22,2	22,2	55,6	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	10,0	30,0	60,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	13,6	54,5	22,7	9,1	0,0
Kalimantan Barat	14	21,4	28,6	35,7	0,0	14,3
Kalimantan Tengah	14	21,4	28,6	42,9	7,1	0,0
Kalimantan Selatan	13	30,8	61,5	7,7	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	20,0	60,0	20,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	26,7	40,0	26,7	6,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	53,8	23,1	23,1	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	8,7	47,8	39,1	4,3	0,0
Sulawesi Tenggara	17	23,5	58,8	11,8	5,9	0,0
Gorontalo	6	16,7	33,3	33,3	0,0	16,7
Sulawesi Barat	6	16,7	50,0	33,3	0,0	0,0
Maluku	11	10,0	70,0	20,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	28,6	42,9	28,6	0,0	0,0
Papua Barat	13	10,0	70,0	20,0	0,0	0,0
Papua	29	23,8	47,6	19,0	4,8	4,8
INDONESIA	513	18,0	42,2	34,6	3,3	1,8

Rata rata waktu tunggu

1. > 180 hari
2. 91-180 hari
3. 30-90 hari
4. 14-30 hari
5. <14 hari

Tabel 3.4.22 Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Tender/Lelang, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Frekuensi Pengadaan (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Utara	33	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Barat	19	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riau	12	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	14,3	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	5					
Jawa Barat	27	92,3	7,7	0,0	0,0	0,0
Jawa Tengah	35	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DI Yogyakarta	5	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	95,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Banten	8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bali	9	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Kalimantan Timur	10	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5					
Sulawesi Utara	15	75,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Sulawesi Tengah	13	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	11	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	88,9	0,0	0,0	0,0	11,1
Papua	29	84,6	11,5	0,0	0,0	3,8
INDONESIA	513	91,0	4,7	1,9	0,0	2,4

Frekuensi Pengadaan

1. 1 kali per tahun
2. setiap 3-6 bulan
3. setiap bulan
4. setiap minggu
5. lainnya

Tabel 3.4.23 Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara Tender/Lelang, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Waktu Tunggu (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	0,0	0,0	71,4	28,6	0,0
Sumatera Utara	33	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Sumatera Barat	19	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Riau	12	0,0	16,7	66,7	16,7	0,0
Jambi	11	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	14,3	42,9	42,9	0,0	0,0
Bengkulu	10	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Lampung	15	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	0,0	42,9	42,9	14,3	0,0
DKI Jakarta	5					
Jawa Barat	27	23,1	7,7	69,2	0,0	0,0
Jawa Tengah	35	0,0	35,0	60,0	5,0	0,0
DI Yogyakarta	5	0,0	0,0	66,7	33,3	0,0
Jawa Timur	38	0,0	35,0	50,0	15,0	0,0
Banten	8	0,0	20,0	40,0	40,0	0,0
Bali	9	0,0	25,0	75,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	7,1	50,0	42,9	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	0,0	25,0	50,0	25,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5					
Sulawesi Utara	15	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	14,3	71,4	14,3	0,0	0,0
Gorontalo	6	0,0	33,3	66,7	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	11	0,0	50,0	33,3	0,0	16,7
Maluku Utara	10	0,0	0,0	75,0	25,0	0,0
Papua Barat	13	33,3	33,3	11,1	22,2	0,0
Papua	29	23,1	38,5	34,6	3,8	0,0
INDONESIA	513	9,1	33,2	49,5	7,7	0,5

Rata rata waktu tunggu

1. > 180 hari
2. 91-180 hari
3. 30-90 hari
4. 14-30 hari
5. <14 hari

Tabel 3.4.24 Proporsi Rerata Frekuensi Pengadaan Pengadaan Secara Pembelian Langsung, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Frekuensi Pengadaan (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	80,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Sumatera Utara	33	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Barat	19	75,0	16,7	8,3	0,0	0,0
Riau	12	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	90,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	5					
Jawa Barat	27	83,3	16,7	0,0	0,0	0,0
Jawa Tengah	35	75,0	20,0	0,0	0,0	5,0
DI Yogyakarta	5	40,0	20,0	20,0	0,0	20,0
Jawa Timur	38	95,2	0,0	4,8	0,0	0,0
Banten	8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bali	9	40,0	20,0	20,0	0,0	20,0
Nusa Tenggara Barat	10	77,8	11,1	11,1	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	87,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	88,9	0,0	11,1	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	90,9	0,0	0,0	0,0	9,1
Kalimantan Timur	10	71,4	14,3	0,0	14,3	0,0
Kalimantan Utara	5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Sulawesi Tengah	13	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	73,3	6,7	6,7	0,0	13,3
Sulawesi Tenggara	17	83,3	0,0	0,0	0,0	16,7
Gorontalo	6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	60,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Maluku	11	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	75,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	75,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Papua	29	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INDONESIA	513	82,2	10,5	2,7	0,4	4,3

Frekuensi Pengadaan

1. 1 kali per tahun
2. setiap 3-6 bulan
3. setiap bulan
4. setiap minggu
5. lainnya

Tabel 3.4.25 Proporsi Rerata Waktu Tunggu Pengadaan Secara Pembelian Langsung, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Waktu Tunggu (%)				
		1	2	3	4	5
Aceh	23	10,0	20,0	30,0	30,0	10,0
Sumatera Utara	33	5,0	15,0	45,0	20,0	15,0
Sumatera Barat	19	16,7	25,0	41,7	16,7	0,0
Riau	12	0,0	16,7	83,3	0,0	0,0
Jambi	11	0,0	37,5	62,5	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	30,0	30,0	30,0	10,0	0,0
Bengkulu	10	40,0	40,0	20,0	0,0	0,0
Lampung	15	20,0	20,0	40,0	20,0	0,0
Bangka Belitung	7	25,0	0,0	50,0	0,0	25,0
Kepulauan Riau	7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	5					
Jawa Barat	27	25,0	16,7	25,0	16,7	16,7
Jawa Tengah	35	5,0	15,0	45,0	25,0	10,0
DI Yogyakarta	5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Jawa Timur	38	4,8	14,3	47,6	23,8	9,5
Banten	8	0,0	66,7	0,0	0,0	33,3
Bali	9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	11,1	0,0	44,4	22,2	22,2
Nusa Tenggara Timur	22	0,0	37,5	25,0	25,0	12,5
Kalimantan Barat	14	0,0	22,2	33,3	33,3	11,1
Kalimantan Tengah	14	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0
Kalimantan Selatan	13	0,0	27,3	45,5	27,3	0,0
Kalimantan Timur	10	33,3	16,7	16,7	16,7	16,7
Kalimantan Utara	5	0,0	33,3	33,3	33,3	0,0
Sulawesi Utara	15	0,0	40,0	40,0	20,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	0,0	12,5	75,0	12,5	0,0
Sulawesi Selatan	24	0,0	20,0	33,3	40,0	6,7
Sulawesi Tenggara	17	33,3	16,7	33,3	16,7	0,0
Gorontalo	6	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Sulawesi Barat	6	0,0	20,0	40,0	0,0	40,0
Maluku	11	0,0	20,0	60,0	0,0	20,0
Maluku Utara	10	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	0,0	50,0	0,0	25,0	25,0
Papua	29	0,0	50,0	25,0	25,0	0,0
INDONESIA	513	9,1	20,5	41,3	19,3	9,8

Rata rata waktu tunggu

1. > 180 hari
2. 91-180 hari
3. 30-90 hari
4. 14-30 hari
5. <14 hari

Tabel 3.4.26 Proporsi Penyediaan Obat Non Fornas dan Obat Fornas Non FKTP, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Obat Non Fornas %	Obat Fornas non FKTP %
Aceh	23	56,5	43,5
Sumatera Utara	33	57,6	30,3
Sumatera Barat	19	63,2	52,6
Riau	12	91,7	50,0
Jambi	11	63,6	45,5
Sumatera Selatan	17	64,7	23,5
Bengkulu	10	70,0	50,0
Lampung	15	53,3	33,3
Bangka Belitung	7	57,1	57,1
Kepulauan Riau	7	71,4	57,1
DKI Jakarta	5	0,0	16,7
Jawa Barat	27	55,6	44,4
Jawa Tengah	35	88,6	60,0
DI Yogyakarta	5	80,0	60,0
Jawa Timur	38	78,9	68,4
Banten	8	75,0	37,5
Bali	9	66,7	33,3
Nusa Tenggara Barat	10	50,0	30,0
Nusa Tenggara Timur	22	54,5	31,8
Kalimantan Barat	14	71,4	64,3
Kalimantan Tengah	14	57,1	50,0
Kalimantan Selatan	13	84,6	53,8
Kalimantan Timur	10	60,0	40,0
Kalimantan Utara	5	80,0	20,0
Sulawesi Utara	15	86,7	33,3
Sulawesi Tengah	13	76,9	38,5
Sulawesi Selatan	24	70,8	45,8
Sulawesi Tenggara	17	82,4	52,9
Gorontalo	6	66,7	33,3
Sulawesi Barat	6	83,3	16,7
Maluku	11	45,5	36,4
Maluku Utara	10	40,0	20,0
Papua Barat	13	69,2	15,4
Papua	29	75,9	41,4
INDONESIA	513	67,7	43,4

Catatan : Jenis obat non fornas yang banyak disediakan dinkes antara lain Ambroksol, Gliseril guayakolat (GG), Multi vitamin, Obat Batuk Hitam (OBH), Piroksikam, Meloksikam, Antalgin, dan Asiklovir

Jenis obat fornas non FKTP yang banyak disediakan dinkes antara lain Sefotaksim, ranitidine, Betahistin mesilat, sefadroksil, Sefriakson, Ketorolac, dan Asam Traneksamat

Tabel 3.4.27 Proporsi Penyediaan Obat Non E-Katalog, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dikes N	Ada (%)	Tidak ada (%)	Tidak tahu (%)
Aceh	23	65,2	34,8	0,0
Sumatera Utara	33	48,5	51,5	0,0
Sumatera Barat	19	78,9	21,1	0,0
Riau	12	58,3	41,7	0,0
Jambi	11	72,7	27,3	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	70,6	0,0
Bengkulu	10	40,0	50,0	10,0
Lampung	15	60,0	40,0	0,0
Bangka Belitung	7	85,7	14,3	0,0
Kepulauan Riau	7	71,4	14,3	14,3
DKI Jakarta	6	0,0	66,7	33,3
Jawa Barat	27	59,3	40,7	0,0
Jawa Tengah	35	71,4	28,6	0,0
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	76,3	23,7	0,0
Banten	8	87,5	12,5	0,0
Bali	9	55,6	44,4	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	10,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	68,2	22,7	9,1
Kalimantan Barat	14	64,3	21,4	14,3
Kalimantan Tengah	14	57,1	35,7	7,1
Kalimantan Selatan	13	76,9	23,1	0,0
Kalimantan Timur	10	50,0	50,0	0,0
Kalimantan Utara	5	40,0	40,0	20,0
Sulawesi Utara	15	53,3	40,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	84,6	15,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	75,0	25,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	88,2	11,8	0,0
Gorontalo	6	33,3	66,7	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	0,0	33,3
Maluku	11	45,5	45,5	9,1
Maluku Utara	10	50,0	10,0	40,0
Papua Barat	13	46,2	23,1	30,8
Papua	29	62,1	20,7	17,2
INDONESIA	514	63,4	31,1	5,4

Tabel 3.4.28 Proporsi Ketersediaan Obat Kedaluwarsa Tahun 2018, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Ya %
Aceh	23	82,6
Sumatera Utara	33	51,5
Sumatera Barat	19	89,5
Riau	12	75,0
Jambi	11	45,5
Sumatera Selatan	17	41,2
Bengkulu	10	90,0
Lampung	15	53,3
Bangka Belitung	7	100,0
Kepulauan Riau	7	85,7
DKI Jakarta	6	50,0
Jawa Barat	27	66,7
Jawa Tengah	35	94,3
DI Yogyakarta	5	60,0
Jawa Timur	38	78,9
Banten	8	62,5
Bali	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9
Kalimantan Barat	14	92,9
Kalimantan Tengah	14	85,7
Kalimantan Selatan	13	76,9
Kalimantan Timur	10	90,0
Kalimantan Utara	5	100,0
Sulawesi Utara	15	66,7
Sulawesi Tengah	13	76,9
Sulawesi Selatan	24	75,0
Sulawesi Tenggara	17	88,2
Gorontalo	6	100,0
Sulawesi Barat	6	83,3
Maluku	11	27,3
Maluku Utara	10	90,0
Papua Barat	13	69,2
Papua	29	69,0
INDONESIA	514	75,5

Catatan : Jenis obat yang paling banyak kedaluwarsa antara lain Haloperidol, Zink, Amoksisilin, Albendazol, Kotrimoksazol, Prednison, Kalsium laktat, Pirantel tablet, Retinol dan Diazepam

Tabel 3.4.29 Proporsi Obat yang Rusak Saat Diterima Dari Distributor, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Ada Obat rusak (%)	Jenis Kerusakan (%)						
			1	2	3	4	5	6	7
Aceh	23	13,0	33,3	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3	33,3
Sumatera Utara	33	9,1	0,0	0,0	0,0	33,3	33,3	33,3	66,7
Sumatera Barat	19	21,1	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0	75,0
Riau	12	25,0	33,3	0,0	0,0	0,0	33,3	100,0	0,0
Jambi	11	9,1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Sumatera Selatan	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Lampung	15	13,3	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	42,9	66,7	0,0	0,0	66,7	66,7	66,7	33,3
DKI Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	25,9	57,1	0,0	0,0	0,0	42,9	71,4	42,9
Jawa Tengah	35	17,1	50,0	0,0	33,3	0,0	50,0	50,0	16,7
DI Yogyakarta	5	60,0	33,3	0,0	0,0	33,3	33,3	66,7	66,7
Jawa Timur	38	7,9	33,3	0,0	0,0	33,3	66,7	66,7	33,3
Banten	8	25,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Bali	9	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	60,0	20,0
Kalimantan Barat	14	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Kalimantan Tengah	14	14,3	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Kalimantan Selatan	13	15,4	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Kalimantan Timur	10	40,0	0,0	0,0	25,0	75,0	25,0	50,0	25,0
Kalimantan Utara	5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Sulawesi Utara	15	20,0	33,3	33,3	33,3	66,7	66,7	66,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Sulawesi Selatan	24	33,3	25,0	0,0	25,0	25,0	62,5	75,0	12,5
Sulawesi Tenggara	17	23,5	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Gorontalo	6	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	25,0	25,0
Sulawesi Barat	6	33,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Maluku	11	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Maluku Utara	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Papua Barat	13	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Papua	29	20,7	16,7	16,7	16,7	16,7	33,3	50,0	50,0
INDONESIA	514	18,3	22,3	3,2	8,5	22,3	43,6	54,3	29,8

Keterangan: Jenis Kerusakan:

1. Tablet mudah hancur
2. Tablet terlalu keras
3. Kapsul melunak
4. Suspensi mengental/mengeras
5. Obat berubah warna
6. Strip/blister/botol rusak
7. Lainnya

Tabel 3.4.30 Proporsi Pelaporan Obat Rusak, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Pelaporan (%)			
		1	2	3	4
Aceh	23	0,0	33,3	66,7	66,7
Sumatera Utara	33	0,0	33,3	33,3	66,7
Sumatera Barat	19	0,0	0,0	25,0	75,0
Riau	12	66,7	33,3	66,7	100,0
Jambi	11	0,0	0,0	0,0	100,0
Sumatera Selatan	17	0,0	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	0,0	0,0	0,0	100,0
Kep, Bangka Belitung	7	0,0	100,0	100,0	100,0
Kep, Riau	7	0,0	33,3	66,7	66,7
Dki Jakarta	6	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	42,9	71,4	57,1	57,1
Jawa Tengah	35	16,7	16,7	33,3	83,3
Di Yogyakarta	5	33,3	66,7	66,7	100,0
Jawa Timur	38	0,0	0,0	0,0	100,0
Banten	8	0,0	0,0	0,0	50,0
Bali	9	0,0	0,0	100,0	100,0
NTB	10	0,0	0,0	0,0	0,0
NTT	22	0,0	0,0	0,0	80,0
Kalimantan Barat	14	0,0	0,0	50,0	50,0
Kalimantan Tengah	14	50,0	50,0	0,0	50,0
Kalimantan Selatan	13	0,0	0,0	100,0	50,0
Kalimantan Timur	10	0,0	0,0	25,0	100,0
Kalimantan Utara	5	0,0	0,0	0,0	100,0
Sulawesi Utara	15	0,0	33,3	33,3	66,7
Sulawesi Tengah	13	0,0	50,0	50,0	50,0
Sulawesi Selatan	24	0,0	37,5	12,5	87,5
Sulawesi Tenggara	17	0,0	0,0	25,0	75,0
Gorontalo	6	0,0	25,0	25,0	50,0
Sulawesi Barat	6	50,0	50,0	50,0	100,0
Maluku	11	0,0	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	0,0	0,0	0,0	100,0
Papua Barat	13	0,0	0,0	50,0	50,0
Papua	29	16,7	16,7	0,0	83,3
INDONESIA	514	10,6	23,4	30,9	73,4

Keterangan:

Pelaporan Masalah dilakukan ke:

1. Kementerian Kesehatan
2. BPOM/ Balai POM
3. Dinas Kesehatan Provinsi
4. Industri/Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Tabel 3.4.31 Penerapan Kebijakan Mengenai Batas Penerimaan Obat Oleh Dinas Kesehatan Minimal 2 Tahun Sebelum Kedaluwarsa, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Diberlakukan pada (%)		
		Semua obat	Hanya obat tertentu	Tidak dilaksanakan
Aceh	23	78,3	17,4	4,3
Sumatera Utara	33	78,8	21,2	0,0
Sumatera Barat	19	63,2	36,8	0,0
Riau	12	66,7	16,7	16,7
Jambi	11	63,6	36,4	0,0
Sumatera Selatan	17	64,7	35,3	0,0
Bengkulu	10	70,0	20,0	10,0
Lampung	15	66,7	26,7	6,7
Bangka Belitung	7	42,9	28,6	28,6
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	14,3
DKI Jakarta	6	66,7	16,7	16,7
Jawa Barat	27	44,4	51,9	3,7
Jawa Tengah	35	62,9	28,6	8,6
DI Yogyakarta	5	60,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	57,9	34,2	7,9
Banten	8	75,0	25,0	0,0
Bali	9	66,7	33,3	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0	0,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	63,6	31,8	4,5
Kalimantan Barat	14	71,4	21,4	7,1
Kalimantan Tengah	14	85,7	14,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	23,1	69,2	7,7
Kalimantan Timur	10	60,0	40,0	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	0,0
Sulawesi Utara	15	86,7	13,3	0,0
Sulawesi Tengah	13	92,3	7,7	0,0
Sulawesi Selatan	24	75,0	25,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	88,2	5,9	5,9
Gorontalo	6	66,7	33,3	0,0
Sulawesi Barat	6	83,3	16,7	0,0
Maluku	11	45,5	45,5	9,1
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	61,5	15,4	23,1
Papua	29	58,6	27,6	13,8
INDONESIA	514	67,1	27,2	5,6

Tabel 3.4.32 Proposi Suplai Obat dari Kementerian Kesehatan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Ya (%)
Aceh	23	78,3
Sumatera Utara	33	75,8
Sumatera Barat	19	78,9
Riau	12	58,3
Jambi	11	81,8
Sumatera Selatan	17	76,5
Bengkulu	10	70,0
Lampung	15	73,3
Bangka Belitung	7	57,1
Kepulauan Riau	7	71,4
DKI Jakarta	6	83,3
Jawa Barat	27	85,2
Jawa Tengah	35	80,0
DI Yogyakarta	5	40,0
Jawa Timur	38	68,4
Banten	8	87,5
Bali	9	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	40,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9
Kalimantan Barat	14	92,9
Kalimantan Tengah	14	78,6
Kalimantan Selatan	13	69,2
Kalimantan Timur	10	90,0
Kalimantan Utara	5	80,0
Sulawesi Utara	15	33,3
Sulawesi Tengah	13	76,9
Sulawesi Selatan	24	79,2
Sulawesi Tenggara	17	64,7
Gorontalo	6	66,7
Sulawesi Barat	6	83,3
Maluku	11	72,7
Maluku Utara	10	70,0
Papua Barat	13	76,9
Papua	29	44,8
INDONESIA	514	72,6

Tabel 3.4.33 Proporsi Ketersediaan Penanggung Jawab Obat, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Ada (%)
Aceh	23	82,6
Sumatera Utara	33	69,7
Sumatera Barat	19	94,7
Riau	12	66,7
Jambi	11	100,0
Sumatera Selatan	17	88,2
Bengkulu	10	60,0
Lampung	15	86,7
Bangka Belitung	7	85,7
Kepulauan Riau	7	100,0
DKI Jakarta	6	83,3
Jawa Barat	27	88,9
Jawa Tengah	35	94,3
DI Yogyakarta	5	60,0
Jawa Timur	38	92,1
Banten	8	75,0
Bali	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	86,4
Kalimantan Barat	14	100,0
Kalimantan Tengah	14	85,7
Kalimantan Selatan	13	100,0
Kalimantan Timur	10	100,0
Kalimantan Utara	5	80,0
Sulawesi Utara	15	73,3
Sulawesi Tengah	13	92,3
Sulawesi Selatan	24	91,7
Sulawesi Tenggara	17	76,5
Gorontalo	6	83,3
Sulawesi Barat	6	83,3
Maluku	11	81,8
Maluku Utara	10	80,0
Papua Barat	13	92,3
Papua	29	89,7
INDONESIA	514	86,6

Tabel 3.4.34 Proporsi Ketersediaan Freezer, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Freezer (%)			
		1	2	3	4
Aceh	23	91,3	4,3	0,0	4,3
Sumatera Utara	33	75,8	18,2	0,0	6,1
Sumatera Barat	19	84,2	10,5	0,0	5,3
Riau	12	100,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	90,9	9,1	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	94,1	5,9	0,0	0,0
Bengkulu	10	80,0	0,0	0,0	20,0
Lampung	15	93,3	0,0	0,0	6,7
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	14,3	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	74,1	14,8	3,7	7,4
Jawa Tengah	35	97,1	2,9	0,0	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	0,0	0,0	20,0
Jawa Timur	38	89,5	5,3	0,0	5,3
Banten	8	87,5	12,5	0,0	0,0
Bali	9	77,8	0,0	11,1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	20,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	77,3	18,2	0,0	4,5
Kalimantan Barat	14	78,6	14,3	0,0	7,1
Kalimantan Tengah	14	92,9	7,1	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	30,8	0,0	7,7
Kalimantan Timur	10	90,0	10,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	53,3	13,3	0,0	33,3
Sulawesi Tengah	13	76,9	15,4	0,0	7,7
Sulawesi Selatan	24	79,2	12,5	0,0	8,3
Sulawesi Tenggara	17	70,6	11,8	0,0	17,6
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	16,7	0,0	16,7
Maluku	11	72,7	18,2	0,0	9,1
Maluku Utara	10	90,0	0,0	0,0	10,0
Papua Barat	13	92,3	7,7	0,0	0,0
Papua	29	75,9	10,3	0,0	13,8
INDONESIA	514	82,9	10,1	0,4	6,6

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.35 Proporsi Ketersediaan Alat Pembawa Vaksin *Cold Box* dan *Vaccine Carrier*, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Cold Box (%)				Vaccine Carrier (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Aceh	23	65,2	0,0	4,3	30,4	87,0	4,3	0,0	8,7
Sumatera Utara	33	78,8	3,0	0,0	18,2	93,9	3,0	0,0	3,0
Sumatera Barat	19	84,2	5,3	0,0	10,5	78,9	5,3	0,0	15,8
Riau	12	91,7	8,3	0,0	0,0	83,3	16,7	0,0	0,0
Jambi	11	81,8	9,1	0,0	9,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	70,6	5,9	0,0	23,5	76,5	11,8	0,0	11,8
Bengkulu	10	100,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	10,0
Lampung	15	93,3	0,0	0,0	6,7	86,7	0,0	0,0	13,3
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	0,0	0,0	14,3	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	81,5	7,4	0,0	11,1	74,1	7,4	0,0	18,5
Jawa Tengah	35	88,6	2,9	2,9	5,7	85,7	2,9	0,0	11,4
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	89,5	5,3	0,0	5,3	89,5	7,9	0,0	2,6
Banten	8	87,5	12,5	0,0	0,0	87,5	12,5	0,0	0,0
Bali	9	100,0	0,0	0,0	0,0	88,9	0,0	0,0	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	70,0	0,0	0,0	30,0	90,0	0,0	0,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	86,4	4,5	0,0	9,1	90,9	0,0	0,0	9,1
Kalimantan Barat	14	85,7	0,0	0,0	14,3	92,9	0,0	0,0	7,1
Kalimantan Tengah	14	85,7	0,0	0,0	14,3	85,7	0,0	0,0	14,3
Kalimantan Selatan	13	76,9	7,7	0,0	15,4	84,6	15,4	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	90,0	10,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	20,0	0,0	20,0	40,0	40,0	0,0	20,0
Sulawesi Utara	15	80,0	0,0	0,0	20,0	86,7	6,7	0,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	84,6	7,7	0,0	7,7	69,2	15,4	0,0	15,4
Sulawesi Selatan	24	83,3	0,0	0,0	16,7	87,5	4,2	0,0	8,3
Sulawesi Tenggara	17	76,5	5,9	0,0	17,6	82,4	5,9	0,0	11,8
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	83,3	16,7	0,0	0,0	50,0	33,3	0,0	16,7
Maluku	11	81,8	0,0	0,0	18,2	81,8	0,0	0,0	18,2
Maluku Utara	10	80,0	0,0	0,0	20,0	70,0	0,0	0,0	30,0
Papua Barat	13	84,6	0,0	0,0	15,4	76,9	0,0	0,0	23,1
Papua	29	86,2	10,3	0,0	3,4	89,7	6,9	0,0	3,4
INDONESIA	514	84,0	4,1	0,4	11,5	85,8	5,3	0,0	8,9

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.36 Ketersediaan Alat Pembawa Vaksin Termos dan Cool Pack, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Termos (%)				Cool Pack (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Aceh	23	21,7	0,0	4,3	73,9	91,3	4,3	0,0	4,3
Sumatera Utara	33	33,3	3,0	0,0	63,6	93,9	3,0	0,0	3,0
Sumatera Barat	19	36,8	5,3	0,0	57,9	100,0	0,0	0,0	0,0
Riau	12	41,7	8,3	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	63,6	0,0	0,0	36,4	100,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	11,8	0,0	58,8	100,0	0,0	0,0	0,0
Bengkulu	10	30,0	0,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	40,0	6,7	0,0	53,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Bangka Belitung	7	57,1	0,0	0,0	42,9	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	0,0	0,0	71,4	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	16,7	0,0	0,0	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	59,3	7,4	0,0	33,3	92,6	3,7	0,0	3,7
Jawa Tengah	35	42,9	14,3	0,0	42,9	97,1	0,0	0,0	2,9
DI Yogyakarta	5	40,0	20,0	0,0	40,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	63,2	5,3	0,0	31,6	97,4	2,6	0,0	0,0
Banten	8	87,5	0,0	0,0	12,5	87,5	12,5	0,0	0,0
Bali	9	33,3	0,0	0,0	66,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	30,0	10,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	40,9	4,5	0,0	54,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	35,7	0,0	0,0	64,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	57,1	7,1	0,0	35,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	30,8	0,0	0,0	69,2	92,3	7,7	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	30,0	10,0	0,0	60,0	90,0	10,0	0,0	0,0
Kalimantan Utara	5	40,0	0,0	0,0	60,0	80,0	0,0	0,0	20,0
Sulawesi Utara	15	46,7	6,7	0,0	46,7	93,3	0,0	0,0	6,7
Sulawesi Tengah	13	46,2	15,4	0,0	38,5	92,3	0,0	0,0	7,7
Sulawesi Selatan	24	45,8	4,2	0,0	50,0	95,8	0,0	0,0	4,2
Sulawesi Tenggara	17	52,9	11,8	0,0	35,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Gorontalo	6	83,3	0,0	0,0	16,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	33,3	0,0	0,0	66,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Maluku	11	45,5	0,0	0,0	54,5	90,9	0,0	0,0	9,1
Maluku Utara	10	30,0	0,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	61,5	0,0	0,0	38,5	92,3	0,0	0,0	7,7
Papua	29	69,0	6,9	0,0	24,1	100,0	0,0	0,0	0,0
INDONESIA	514	45,3	5,4	0,2	49,0	96,7	1,4	0,0	1,9

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.37 Proporsi Ketersediaan Alat Suntik dan KIPI Kit, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	ADS (%)				KIPI Kit (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Aceh	23	100,0	0,0	0,0	0,0	39,1	4,3	0,0	56,5
Sumatera Utara	33	97,0	3,0	0,0	0,0	54,5	6,1	6,1	33,3
Sumatera Barat	19	89,5	5,3	0,0	5,3	21,1	26,3	0,0	52,6
Riau	12	100,0	0,0	0,0	0,0	16,7	33,3	0,0	50,0
Jambi	11	100,0	0,0	0,0	0,0	18,2	9,1	0,0	72,7
Sumatera Selatan	17	94,1	5,9	0,0	0,0	29,4	11,8	5,9	52,9
Bengkulu	10	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	60,0
Lampung	15	93,3	6,7	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	46,7
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	71,4
Kepulauan Riau	7	100,0	0,0	0,0	0,0	28,6	28,6	0,0	42,9
DKI Jakarta	6	100,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	66,7
Jawa Barat	27	88,9	3,7	0,0	7,4	37,0	7,4	0,0	55,6
Jawa Tengah	35	88,6	0,0	0,0	11,4	34,3	5,7	0,0	60,0
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	40,0
Jawa Timur	38	89,5	2,6	0,0	7,9	36,8	7,9	0,0	55,3
Banten	8	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Bali	9	88,9	11,1	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	100,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	100,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	68,2
Kalimantan Barat	14	100,0	0,0	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	71,4
Kalimantan Tengah	14	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7,1	0,0	42,9
Kalimantan Selatan	13	92,3	0,0	0,0	7,7	30,8	7,7	0,0	61,5
Kalimantan Timur	10	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	10,0	0,0	40,0
Kalimantan Utara	5	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	60,0
Sulawesi Utara	15	93,3	0,0	0,0	6,7	26,7	20,0	0,0	53,3
Sulawesi Tengah	13	84,6	0,0	0,0	15,4	23,1	7,7	0,0	69,2
Sulawesi Selatan	24	95,8	4,2	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	70,8
Sulawesi Tenggara	17	100,0	0,0	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	82,4
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0	33,3	16,7	0,0	50,0
Sulawesi Barat	6	100,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	83,3
Maluku	11	90,9	9,1	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0	81,8
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	50,0
Papua Barat	13	92,3	0,0	0,0	7,7	30,8	0,0	0,0	69,2
Papua	29	96,6	3,4	0,0	0,0	37,9	6,9	0,0	55,2
INDONESIA	514	95,1	1,9	0,0	2,9	34,2	7,2	0,6	58,0

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.38 Proporsi Ketersediaan Safety Box dan Termometer, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dikes N	Safety Box (%)				Termometer (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Aceh	23	100,0	95,7	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Utara	33	90,9	81,8	6,1	0,0	12,1	3,0	0,0	6,1
Sumatera Barat	19	89,5	84,2	10,5	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3
Riau	12	100,0	66,7	25,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	100,0	90,9	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	94,1	94,1	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
Bengkulu	10	100,0	70,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Lampung	15	93,3	93,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
Bangka Belitung	7	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	85,7	100,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
Jawa Barat	27	85,2	88,9	7,4	0,0	3,7	3,7	0,0	11,1
Jawa Tengah	35	94,3	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
DI Yogyakarta	5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	92,1	94,7	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Banten	8	100,0	62,5	25,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Bali	9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0	70,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	10,0
Nusa Tenggara Timur	22	90,9	90,9	4,5	0,0	4,5	9,1	0,0	0,0
Kalimantan Barat	14	92,9	78,6	7,1	0,0	14,3	7,1	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	92,3	84,6	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
Kalimantan Timur	10	70,0	90,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0
Kalimantan Utara	5	100,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	100,0	86,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	92,3	92,3	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
Sulawesi Selatan	24	100,0	95,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	94,1	88,2	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Gorontalo	6	100,0	83,3	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	100,0	83,3	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
Maluku	11	100,0	63,6	9,1	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	100,0	90,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	100,0	84,6	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
Papua	29	86,2	86,2	6,9	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9
INDONESIA	514	93,8	88,3	6,6	0,0	5,1	1,9	0,0	4,3

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.39 Proporsi Ketersediaan Refrigerator Buka Atas dan Buka Depan, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah dinkes N	Kulkas bukaan atas (%)				Kulkas bukaan depan (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Aceh	23	87,0	4,3	0,0	8,7	21,7	8,7	4,3	65,2
Sumatera Utara	33	78,8	21,2	0,0	0,0	24,2	9,1	0,0	66,7
Sumatera Barat	19	73,7	15,8	0,0	10,5	47,4	10,5	0,0	42,1
Riau	12	83,3	16,7	0,0	0,0	41,7	8,3	0,0	50,0
Jambi	11	81,8	18,2	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	45,5
Sumatera Selatan	17	76,5	23,5	0,0	0,0	47,1	11,8	0,0	41,2
Bengkulu	10	90,0	10,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	60,0
Lampung	15	86,7	6,7	0,0	6,7	46,7	6,7	0,0	46,7
Bangka Belitung	7	100,0	0,0	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	42,9
Kepulauan Riau	7	85,7	14,3	0,0	0,0	28,6	14,3	0,0	57,1
DKI Jakarta	6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Jawa Barat	27	77,8	18,5	0,0	3,7	33,3	11,1	0,0	55,6
Jawa Tengah	35	91,4	8,6	0,0	0,0	40,0	2,9	2,9	54,3
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	60,0
Jawa Timur	38	84,2	13,2	0,0	2,6	21,1	7,9	0,0	71,1
Banten	8	75,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	50,0
Bali	9	100,0	0,0	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	90,0	10,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	50,0
Nusa Tenggara Timur	22	81,8	13,6	0,0	4,5	36,4	9,1	0,0	54,5
Kalimantan Barat	14	92,9	7,1	0,0	0,0	71,4	7,1	0,0	21,4
Kalimantan Tengah	14	100,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	57,1
Kalimantan Selatan	13	84,6	15,4	0,0	0,0	38,5	0,0	0,0	61,5
Kalimantan Timur	10	90,0	10,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	40,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	60,0
Sulawesi Utara	15	86,7	6,7	0,0	6,7	53,3	0,0	0,0	46,7
Sulawesi Tengah	13	76,9	15,4	0,0	7,7	46,2	0,0	0,0	53,8
Sulawesi Selatan	24	83,3	16,7	0,0	0,0	33,3	8,3	0,0	58,3
Sulawesi Tenggara	17	82,4	11,8	0,0	5,9	17,6	5,9	0,0	76,5
Gorontalo	6	100,0	0,0	0,0	0,0	66,7	16,7	0,0	16,7
Sulawesi Barat	6	83,3	16,7	0,0	0,0	16,7	16,7	16,7	50,0
Maluku	11	63,6	18,2	0,0	18,2	27,3	9,1	0,0	63,6
Maluku Utara	10	100,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	40,0
Papua Barat	13	84,6	7,7	0,0	7,7	30,8	7,7	0,0	61,5
Papua	29	79,3	13,8	3,4	3,4	44,8	13,8	6,9	34,5
INDONESIA	514	84,4	12,5	0,2	2,9	36,6	7,8	1,0	54,7

Keterangan:

1. Ya, semua berfungsi
2. Ya, sebagian berfungsi
3. Semua tidak berfungsi
4. Tidak ada

Tabel 3.4.40 Rerata Ketersediaan Obat Indikator 2015-2019, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata jenis obat tersedia
Aceh	23	16,83
Sumatera Utara	33	16,12
Sumatera Barat	19	17,58
Riau	12	18,08
Jambi	11	15,73
Sumatera Selatan	17	15,47
Bengkulu	10	17,70
Lampung	15	16,73
Bangka Belitung	7	18,29
Kepulauan Riau	7	16,29
DKI Jakarta*	6	3,50
Jawa Barat	27	16,56
Jawa Tengah	35	17,89
DI Yogyakarta	5	19,00
Jawa Timur	38	18,00
Banten	8	17,25
Bali	9	18,00
Nusa Tenggara Barat	10	18,30
Nusa Tenggara Timur	22	16,23
Kalimantan Barat	14	17,14
Kalimantan Tengah	14	16,79
Kalimantan Selatan	13	18,08
Kalimantan Timur	10	15,80
Kalimantan Utara	5	16,20
Sulawesi Utara	15	15,60
Sulawesi Tengah	13	14,38
Sulawesi Selatan	24	16,63
Sulawesi Tenggara	17	16,29
Gorontalo	6	18,00
Sulawesi Barat	6	17,67
Maluku	11	13,73
Maluku Utara	10	15,50
Papua Barat	13	16,38
Papua	29	17,45
INDONESIA	514	16,68

Keterangan : obat indikator 2015-2019 terdiri dari 20 item

*DKI Jakarta : penyediaan obat dilakukan di puskesmas kecamatan

Tabel 3.4.41 Rerata Ketersediaan Obat Indikator 2020-2024, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	rerata
Aceh	23	30,70
Sumatera Utara	33	29,94
Sumatera Barat	19	32,68
Riau	12	32,00
Jambi	11	31,18
Sumatera Selatan	17	28,76
Bengkulu	10	31,80
Lampung	15	32,60
Bangka Belitung	7	32,43
Kepulauan Riau	7	30,57
DKI Jakarta*	6	2,00
Jawa Barat	27	30,89
Jawa Tengah	35	32,74
DI Yogyakarta	5	33,40
Jawa Timur	38	33,29
Banten	8	32,88
Bali	9	32,11
Nusa Tenggara Barat	10	33,10
Nusa Tenggara Timur	22	29,32
Kalimantan Barat	14	32,00
Kalimantan Tengah	14	31,36
Kalimantan Selatan	13	33,62
Kalimantan Timur	10	29,80
Kalimantan Utara	5	30,80
Sulawesi Utara	15	30,00
Sulawesi Tengah	13	27,69
Sulawesi Selatan	24	31,63
Sulawesi Tenggara	17	29,88
Gorontalo	6	31,83
Sulawesi Barat	6	32,00
Maluku	11	26,18
Maluku Utara	10	28,90
Papua Barat	13	30,62
Papua	29	31,62
INDONESIA	514	30,85

Keterangan : obat indikator 2015-2019 terdiri dari 35 item

Tabel 3.4.42 Rerata Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata (%)
Aceh	23	27,52
Sumatera Utara	33	27,58
Sumatera Barat	19	32,74
Riau	12	33,58
Jambi	11	29,82
Sumatera Selatan	17	26,88
Bengkulu	10	27,50
Lampung	15	32,93
Bangka Belitung	7	33,86
Kepulauan Riau	7	38,14
DKI Jakarta*	6	1,00
Jawa Barat	27	27,89
Jawa Tengah	35	32,37
DI Yogyakarta	5	34,00
Jawa Timur	38	34,74
Banten	8	31,88
Bali	9	32,33
Nusa Tenggara Barat	10	28,30
Nusa Tenggara Timur	22	25,27
Kalimantan Barat	14	33,71
Kalimantan Tengah	14	31,00
Kalimantan Selatan	13	35,08
Kalimantan Timur	10	32,80
Kalimantan Utara	5	31,00
Sulawesi Utara	15	28,07
Sulawesi Tengah	13	26,31
Sulawesi Selatan	24	28,42
Sulawesi Tenggara	17	25,65
Gorontalo	6	28,67
Sulawesi Barat	6	32,00
Maluku	11	22,73
Maluku Utara	10	27,30
Papua Barat	13	24,08
Papua	29	26,59
INDONESIA	514	29,36

Tabel 3.4.43 Rerata Ketersediaan Obat Fornas FKTP untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata (%)
Aceh	23	64,09
Sumatera Utara	33	61,97
Sumatera Barat	19	75,95
Riau	12	73,50
Jambi	11	67,45
Sumatera Selatan	17	56,71
Bengkulu	10	63,90
Lampung	15	70,87
Bangka Belitung	7	69,43
Kepulauan Riau	7	79,29
DKI Jakarta*	6	5,33
Jawa Barat	27	64,44
Jawa Tengah	35	73,91
DI Yogyakarta	5	81,60
Jawa Timur	38	79,42
Banten	8	70,50
Bali	9	72,67
Nusa Tenggara Barat	10	66,70
Nusa Tenggara Timur	22	65,27
Kalimantan Barat	14	73,64
Kalimantan Tengah	14	69,29
Kalimantan Selatan	13	80,38
Kalimantan Timur	10	69,10
Kalimantan Utara	5	67,20
Sulawesi Utara	15	62,27
Sulawesi Tengah	13	60,69
Sulawesi Selatan	24	65,88
Sulawesi Tenggara	17	62,71
Gorontalo	6	66,17
Sulawesi Barat	6	73,83
Maluku	11	58,91
Maluku Utara	10	65,80
Papua Barat	13	64,92
Papua	29	70,38
INDONESIA	514	67,85

Tabel 3.4.44 Rerata Ketersediaan Obat Fornas Non FKTP untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata
Aceh	23	13,04
Sumatera Utara	33	15,67
Sumatera Barat	19	15,47
Riau	12	23,00
Jambi	11	16,73
Sumatera Selatan	17	14,41
Bengkulu	10	16,10
Lampung	15	18,67
Bangka Belitung	7	18,14
Kepulauan Riau	7	30,00
DKI Jakarta*	6	1,67
Jawa Barat	27	13,26
Jawa Tengah	35	18,49
DI Yogyakarta	5	16,20
Jawa Timur	38	19,32
Banten	8	15,63
Bali	9	19,00
Nusa Tenggara Barat	10	13,20
Nusa Tenggara Timur	22	15,64
Kalimantan Barat	14	21,50
Kalimantan Tengah	14	16,79
Kalimantan Selatan	13	21,46
Kalimantan Timur	10	20,10
Kalimantan Utara	5	16,80
Sulawesi Utara	15	16,13
Sulawesi Tengah	13	15,92
Sulawesi Selatan	24	14,21
Sulawesi Tenggara	17	15,18
Gorontalo	6	14,17
Sulawesi Barat	6	16,00
Maluku	11	15,91
Maluku Utara	10	16,80
Papua Barat	13	19,38
Papua	29	18,76
INDONESIA	514	16,86

Tabel 3.4.45 Rerata Ketersediaan Obat Non Fornas Untuk 155 Penyakit, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata
Aceh	23	10,35
Sumatera Utara	33	8,70
Sumatera Barat	19	12,84
Riau	12	16,00
Jambi	11	11,27
Sumatera Selatan	17	8,00
Bengkulu	10	10,80
Lampung	15	11,87
Bangka Belitung	7	12,57
Kepulauan Riau	7	27,57
DKI Jakarta*	6	1,67
Jawa Barat	27	11,74
Jawa Tengah	35	15,94
DI Yogyakarta	5	13,80
Jawa Timur	38	16,95
Banten	8	12,50
Bali	9	14,89
Nusa Tenggara Barat	10	12,60
Nusa Tenggara Timur	22	14,41
Kalimantan Barat	14	14,79
Kalimantan Tengah	14	12,36
Kalimantan Selatan	13	17,00
Kalimantan Timur	10	18,70
Kalimantan Utara	5	10,60
Sulawesi Utara	15	12,67
Sulawesi Tengah	13	12,15
Sulawesi Selatan	24	11,67
Sulawesi Tenggara	17	12,41
Gorontalo	6	11,33
Sulawesi Barat	6	13,83
Maluku	11	12,09
Maluku Utara	10	14,30
Papua Barat	13	16,31
Papua	29	17,72
INDONESIA	514	13,42

Tabel 3.4.46 Rerata Ketersediaan Obat Indikator SARA, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Dinkes N	Rerata
Aceh	23	12,09
Sumatera Utara	33	11,45
Sumatera Barat	19	12,74
Riau	12	12,92
Jambi	11	12,45
Sumatera Selatan	17	11,00
Bengkulu	10	11,80
Lampung	15	13,60
Bangka Belitung	7	13,14
Kepulauan Riau	7	14,14
DKI Jakarta*	6	0,17
Jawa Barat	27	11,96
Jawa Tengah	35	13,20
DI Yogyakarta	5	13,60
Jawa Timur	38	13,87
Banten	8	12,88
Bali	9	13,11
Nusa Tenggara Barat	10	13,00
Nusa Tenggara Timur	22	11,73
Kalimantan Barat	14	13,07
Kalimantan Tengah	14	12,93
Kalimantan Selatan	13	13,69
Kalimantan Timur	10	11,40
Kalimantan Utara	5	12,00
Sulawesi Utara	15	11,27
Sulawesi Tengah	13	10,77
Sulawesi Selatan	24	12,21
Sulawesi Tenggara	17	11,65
Gorontalo	6	11,33
Sulawesi Barat	6	13,00
Maluku	11	11,82
Maluku Utara	10	12,80
Papua Barat	13	12,23
Papua	29	13,48
INDONESIA	514	12,35

Tabel 3.4.47 Ketersediaan Vaksin di Dinas Kesehatan, Rifaskes 2019

No	Jenis vaksin dan serum	Jumlah dinkes	Ya (%)	Kedaluwarsa (%)		
				seluruhnya	sebagian	Tidak ada
1	Vaksin BCG	514	94,4	7,4	18,9	73,7
2	Vaksin TT	514	34,2	8,0	16,0	76,0
3	Vaksin DT	514	82,7	7,8	11,4	80,8
4	Vaksin Td	514	96,9	7,1	11,1	81,8
5	Vaksin Campak	514	63,6	10,6	22,7	66,7
6	Vaksin Campak-Rubella (MR)	514	96,7	7,4	9,2	83,3
7	Vaksin Polio oral (OPV)	514	92,6	7,5	11,1	81,4
8	Vaksin Polio injeksi (IPV)	514	92,4	7,9	9,7	82,3
9	Vaksin Hepatitis B uniject	514	87,9	7,3	10,3	82,4
10	Vaksin Hepatitis B	514	50,6	8,1	14,1	77,9
11	Vaksin DPT-HB	514	30,9	5,7	10,2	84,1
12	Vaksin DPT-HB-HiB	514	91,2	7,1	10,9	82,0
13	Vaksin Anti rabies	514	62,1	9,4	8,2	82,4
14	Anti difteri serum (ADS)	514	19,6	5,8	5,8	88,5
15	Serum anti bisa ular (SABU)	514	42,0	7,9	12,3	79,8
16	Anti Rabies Serum	514	23,3	6,3	9,4	84,4
17	Anti Tetanus serum (ATS)	514	46,9	7,9	7,9	84,1

3.5 SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Tabel 3.5.1 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan				Developer		
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan	Kemenkes	Dinkes	Swasta
Aceh	23	43,5	21,7	4,3	30,4	60,0	13,3	26,7	0,0	93,3	6,7	0,0
Sumatera Utara	33	21,2	15,2	9,1	54,5	41,7	0,0	41,7	16,7	58,3	33,3	8,3
Sumatera Barat	19	10,5	15,8	21,1	52,6	60,0	20,0	20,0	0,0	60,0	20,0	20,0
Riau	12	66,7	16,7	0,0	16,7	80,0	10,0	10,0	0,0	20,0	70,0	10,0
Jambi	11	9,1	27,3	18,2	45,5	25,0	50,0	25,0	0,0	25,0	50,0	25,0
Sumatera Selatan	17	17,6	17,6	17,6	47,1	16,7	16,7	50,0	16,7	83,3	16,7	0,0
Bengkulu	10	20,0	40,0	10,0	30,0	16,7	16,7	66,7	0,0	33,3	66,7	0,0
Lampung	15	33,3	46,7	13,3	6,7	50,0	16,7	16,7	16,7	91,7	0,0	8,3
Bangka Belitung	7	28,6	0,0	0,0	71,4	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	14,3	14,3	14,3	57,1	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0
DKI Jakarta	6	66,7	0,0	0,0	33,3	100,0	0,0	0,0	0,0	25,0	75,0	0,0
Jawa Barat	27	40,7	22,2	0,0	37,0	47,1	5,9	41,2	5,9	70,6	17,6	11,8
Jawa Tengah	35	40,0	17,1	2,9	40,0	55,0	5,0	35,0	5,0	25,0	55,0	20,0
DI Yogyakarta	5	40,0	40,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	75,0	25,0
Jawa Timur	38	39,5	26,3	0,0	34,2	64,0	4,0	24,0	8,0	32,0	56,0	12,0
Banten	8	25,0	12,5	0,0	62,5	33,3	0,0	66,7	0,0	66,7	33,3	0,0
Bali	9	44,4	22,2	22,2	11,1	66,7	0,0	33,3	0,0	66,7	16,7	16,7
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	30,0	20,0	10,0	42,9	14,3	42,9	0,0	42,9	0,0	57,1
Nusa Tenggara Timur	22	22,7	36,4	40,9	0,0	7,7	69,2	23,1	0,0	23,1	76,9	0,0
Kalimantan Barat	14	35,7	28,6	21,4	14,3	33,3	22,2	33,3	11,1	66,7	22,2	11,1
Kalimantan Tengah	14	14,3	14,3	14,3	57,1	50,0	25,0	25,0	0,0	75,0	25,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	7,7	7,7	15,4	69,2	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	40,0	0,0	10,0	50,0	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	75,0	25,0
Kalimantan Utara	5	20,0	0,0	20,0	60,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Sulawesi Utara	15	20,0	40,0	6,7	33,3	22,2	11,1	44,4	22,2	55,6	44,4	0,0
Sulawesi Tengah	13	23,1	38,5	7,7	30,8	50,0	0,0	37,5	12,5	87,5	12,5	0,0
Sulawesi Selatan	24	12,5	8,3	16,7	62,5	20,0	20,0	60,0	0,0	40,0	60,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	11,8	23,5	23,5	41,2	16,7	16,7	66,7	0,0	66,7	33,3	0,0
Gorontalo	6	33,3	0,0	0,0	66,7	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	0,0	66,7	16,7	16,7	50,0	25,0	25,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Maluku	11	18,2	36,4	0,0	45,5	33,3	16,7	33,3	16,7	83,3	16,7	0,0
Maluku Utara	10	30,0	40,0	10,0	20,0	42,9	28,6	28,6	0,0	28,6	57,1	14,3
Papua Barat	13	7,7	7,7	23,1	61,5	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
Papua	29	31,0	17,2	3,4	48,3	50,0	21,4	28,6	0,0	57,1	42,9	0,0
INDONESIA	514	27,8	22,0	10,9	39,3	46,9	14,5	32,0	6,6	52,3	38,3	9,4

Tabel 3.5.2 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Komdat (Komunikasi Data) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	73,9	26,1	0,0	0,0	78,3	13,0	8,7	0,0
Sumatera Utara	33	63,6	33,3	0,0	3,0	75,0	0,0	25,0	0,0
Sumatera Barat	19	42,1	52,6	5,3	0,0	72,2	11,1	16,7	0,0
Riau	12	83,3	16,7	0,0	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Jambi	11	63,6	27,3	0,0	9,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	76,5	23,5	0,0	0,0	76,5	0,0	23,5	0,0
Bengkulu	10	60,0	30,0	0,0	10,0	88,9	0,0	11,1	0,0
Lampung	15	60,0	33,3	0,0	6,7	71,4	7,1	21,4	0,0
Bangka Belitung	7	71,4	28,6	0,0	0,0	85,7	0,0	14,3	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	57,1	0,0	14,3	66,7	0,0	33,3	0,0
DKI Jakarta	6	16,7	66,7	0,0	16,7	60,0	0,0	40,0	0,0
Jawa Barat	27	74,1	25,9	0,0	0,0	77,8	3,7	18,5	0,0
Jawa Tengah	35	82,9	17,1	0,0	0,0	80,0	11,4	8,6	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	84,2	10,5	2,6	2,6	86,1	8,3	2,8	2,8
Banten	8	75,0	12,5	0,0	12,5	85,7	0,0	14,3	0,0
Bali	9	100,0	0,0	0,0	0,0	88,9	0,0	11,1	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	80,0	20,0	0,0	0,0	70,0	0,0	30,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	68,2	13,6	13,6	4,5	88,9	5,6	5,6	0,0
Kalimantan Barat	14	57,1	42,9	0,0	0,0	57,1	14,3	21,4	7,1
Kalimantan Tengah	14	71,4	21,4	0,0	7,1	76,9	0,0	23,1	0,0
Kalimantan Selatan	13	84,6	15,4	0,0	0,0	69,2	7,7	23,1	0,0
Kalimantan Timur	10	60,0	20,0	10,0	10,0	87,5	0,0	12,5	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	40,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	33,3	53,3	0,0	13,3	38,5	7,7	53,8	0,0
Sulawesi Tengah	13	61,5	38,5	0,0	0,0	69,2	0,0	30,8	0,0
Sulawesi Selatan	24	66,7	29,2	0,0	4,2	73,9	0,0	26,1	0,0
Sulawesi Tenggara	17	58,8	35,3	5,9	0,0	81,3	0,0	18,8	0,0
Gorontalo	6	83,3	16,7	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Barat	6	33,3	66,7	0,0	0,0	83,3	16,7	0,0	0,0
Maluku	11	45,5	54,5	0,0	0,0	63,6	9,1	27,3	0,0
Maluku Utara	10	30,0	40,0	20,0	10,0	71,4	28,6	0,0	0,0
Papua Barat	13	38,5	15,4	23,1	23,1	85,7	0,0	14,3	0,0
Papua	29	48,3	27,6	3,4	20,7	59,1	9,1	31,8	0,0
INDONESIA	514	64,8	28,0	2,5	4,7	76,3	5,2	18,0	0,4

Tabel 3.5.3 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) Dinkes di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	13,0	8,7	13,0	65,2	40,0	0,0	60,0	0,0
Sumatera Utara	33	9,1	6,1	9,1	75,8	60,0	20,0	20,0	0,0
Sumatera Barat	19	10,5	5,3	10,5	73,7	66,7	0,0	33,3	0,0
Riau	12	8,3	8,3	0,0	83,3	50,0	0,0	50,0	0,0
Jambi	11	0,0	0,0	18,2	81,8	n/a	n/a	n/a	n/a
Sumatera Selatan	17	11,8	5,9	5,9	76,5	66,7	33,3	0,0	0,0
Bengkulu	10	0,0	10,0	0,0	90,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Lampung	15	6,7	13,3	20,0	60,0	33,3	33,3	33,3	0,0
Bangka Belitung	7	0,0	0,0	0,0	100,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Kepulauan Riau	7	14,3	0,0	14,3	71,4	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	66,7	0,0	0,0	33,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	14,8	29,6	11,1	44,4	41,7	16,7	41,7	0,0
Jawa Tengah	35	34,3	11,4	5,7	48,6	81,3	6,3	12,5	0,0
DI Yogyakarta	5	40,0	0,0	0,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	26,3	13,2	7,9	52,6	66,7	13,3	20,0	0,0
Banten	8	12,5	0,0	0,0	87,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Bali	9	33,3	0,0	11,1	55,6	66,7	0,0	33,3	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	30,0	0,0	0,0	70,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	9,1	13,6	4,5	72,7	20,0	20,0	60,0	0,0
Kalimantan Barat	14	0,0	7,1	0,0	92,9	0,0	0,0	100,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	7,1	7,1	14,3	71,4	50,0	0,0	50,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	0,0	7,7	7,7	84,6	0,0	0,0	100,0	0,0
Kalimantan Timur	10	10,0	10,0	10,0	70,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Kalimantan Utara	5	0,0	0,0	0,0	100,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Sulawesi Utara	15	0,0	6,7	26,7	66,7	0,0	100,0	0,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	0,0	0,0	7,7	92,3	n/a	n/a	n/a	n/a
Sulawesi Selatan	24	12,5	12,5	0,0	75,0	50,0	16,7	33,3	0,0
Sulawesi Tenggara	17	5,9	5,9	23,5	64,7	50,0	0,0	50,0	0,0
Gorontalo	6	0,0	0,0	33,3	66,7	n/a	n/a	n/a	n/a
Sulawesi Barat	6	0,0	0,0	0,0	100,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Maluku	11	18,2	18,2	18,2	45,5	50,0	25,0	25,0	0,0
Maluku Utara	10	0,0	20,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Papua Barat	13	0,0	15,4	15,4	69,2	0,0	50,0	0,0	50,0
Papua	29	6,9	17,2	10,3	65,5	14,3	42,9	42,9	0,0
INDONESIA	514	12,5	9,7	9,7	68,1	53,5	15,8	29,8	0,9

Tabel 3.5.4 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi SP2TP/SP3 di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	8,7	26,1	39,1	26,1	12,5	50,0	37,5	0,0
Sumatera Utara	33	3,0	15,2	54,5	27,3	0,0	50,0	33,3	16,7
Sumatera Barat	19	0,0	15,8	47,4	36,8	0,0	66,7	33,3	0,0
Riau	12	25,0	8,3	25,0	41,7	50,0	25,0	25,0	0,0
Jambi	11	9,1	18,2	54,5	18,2	0,0	100,0	0,0	0,0
Sumatera Selatan	17	11,8	23,5	47,1	17,6	33,3	16,7	50,0	0,0
Bengkulu	10	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Lampung	15	13,3	40,0	40,0	6,7	37,5	25,0	37,5	0,0
Bangka Belitung	7	0,0	0,0	57,1	42,9	n/a	n/a	n/a	n/a
Kepulauan Riau	7	28,6	0,0	71,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	33,3	0,0	50,0	16,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	18,5	22,2	22,2	37,0	45,5	27,3	27,3	0,0
Jawa Tengah	35	25,7	17,1	20,0	37,1	66,7	6,7	26,7	0,0
DI Yogyakarta	5	20,0	40,0	0,0	40,0	33,3	33,3	33,3	0,0
Jawa Timur	38	7,9	15,8	34,2	42,1	44,4	11,1	33,3	11,1
Banten	8	12,5	12,5	12,5	62,5	50,0	0,0	50,0	0,0
Bali	9	11,1	22,2	55,6	11,1	33,3	33,3	33,3	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	0,0	30,0	30,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	0,0	13,6	31,8	54,5	0,0	33,3	66,7	0,0
Kalimantan Barat	14	14,3	21,4	42,9	21,4	20,0	40,0	20,0	20,0
Kalimantan Tengah	14	21,4	7,1	35,7	35,7	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	7,7	7,7	76,9	7,7	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	0,0	20,0	20,0	60,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Kalimantan Utara	5	20,0	0,0	60,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	0,0	13,3	53,3	33,3	0,0	50,0	0,0	50,0
Sulawesi Tengah	13	7,7	38,5	38,5	15,4	0,0	66,7	33,3	0,0
Sulawesi Selatan	24	8,3	25,0	45,8	20,8	12,5	50,0	37,5	0,0
Sulawesi Tenggara	17	11,8	11,8	41,2	35,3	50,0	50,0	0,0	0,0
Gorontalo	6	50,0	16,7	33,3	0,0	25,0	50,0	25,0	0,0
Sulawesi Barat	6	0,0	16,7	33,3	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Maluku	11	18,2	0,0	54,5	27,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	0,0	30,0	50,0	20,0	0,0	33,3	66,7	0,0
Papua Barat	13	7,7	23,1	30,8	38,5	25,0	50,0	25,0	0,0
Papua	29	6,9	17,2	44,8	31,0	28,6	28,6	42,9	0,0
INDONESIA	514	11,9	17,1	40,9	30,2	32,9	34,9	29,5	2,7

Tabel 3.5.5 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi ePuskesmas di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	4,3	0,0	0,0	95,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Sumatera Utara	33	3,0	12,1	6,1	78,8	20,0	0,0	80,0	0,0
Sumatera Barat	19	31,6	10,5	0,0	57,9	50,0	25,0	25,0	0,0
Riau	12	16,7	0,0	0,0	83,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	18,2	9,1	0,0	72,7	66,7	0,0	33,3	0,0
Sumatera Selatan	17	11,8	11,8	5,9	70,6	50,0	25,0	25,0	0,0
Bengkulu	10	0,0	20,0	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Lampung	15	6,7	13,3	0,0	80,0	33,3	33,3	33,3	0,0
Bangka Belitung	7	42,9	0,0	0,0	57,1	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	0,0	0,0	71,4	100,0	0,0	0,0	0,0
DKI Jakarta	6	66,7	0,0	0,0	33,3	75,0	25,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	25,9	25,9	0,0	48,1	64,3	14,3	21,4	0,0
Jawa Tengah	35	8,6	5,7	2,9	82,9	60,0	20,0	20,0	0,0
DI Yogyakarta	5	20,0	0,0	0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	10,5	7,9	0,0	81,6	71,4	0,0	28,6	0,0
Banten	8	25,0	25,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Bali	9	22,2	0,0	0,0	77,8	50,0	0,0	50,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	0,0	0,0	60,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	0,0	9,1	0,0	90,9	0,0	0,0	100,0	0,0
Kalimantan Barat	14	7,1	7,1	0,0	85,7	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	7,1	7,1	7,1	78,6	50,0	0,0	0,0	50,0
Kalimantan Selatan	13	15,4	0,0	0,0	84,6	50,0	50,0	0,0	0,0
Kalimantan Timur	10	20,0	0,0	0,0	80,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Kalimantan Utara	5	20,0	0,0	20,0	60,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	6,7	13,3	6,7	73,3	0,0	33,3	0,0	66,7
Sulawesi Tengah	13	15,4	7,7	7,7	69,2	66,7	33,3	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	4,2	4,2	4,2	87,5	50,0	50,0	0,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	0,0	0,0	23,5	76,5	n/a	n/a	n/a	n/a
Gorontalo	6	33,3	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	100,0	0,0
Sulawesi Barat	6	0,0	0,0	0,0	100,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Maluku	11	9,1	27,3	0,0	63,6	75,0	25,0	0,0	0,0
Maluku Utara	10	10,0	0,0	20,0	70,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Papua Barat	13	0,0	0,0	15,4	84,6	n/a	n/a	n/a	n/a
Papua	29	3,4	6,9	13,8	75,9	66,7	33,3	0,0	0,0
INDONESIA	514	12,3	7,8	4,1	75,9	55,3	16,5	25,2	2,9

Tabel 3.5.6 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	78,3	17,4	0,0	4,3	59,1	9,1	31,8	0,0
Sumatera Utara	33	63,6	33,3	3,0	0,0	37,5	3,1	59,4	0,0
Sumatera Barat	19	47,4	42,1	5,3	5,3	29,4	11,8	58,8	0,0
Riau	12	75,0	16,7	0,0	8,3	81,8	0,0	18,2	0,0
Jambi	11	81,8	0,0	9,1	9,1	66,7	0,0	33,3	0,0
Sumatera Selatan	17	64,7	29,4	5,9	0,0	31,3	0,0	68,8	0,0
Bengkulu	9	55,6	44,4	0,0	0,0	0,0	22,2	77,8	0,0
Lampung	15	66,7	33,3	0,0	0,0	73,3	0,0	26,7	0,0
Bangka Belitung	7	85,7	14,3	0,0	0,0	42,9	0,0	57,1	0,0
Kepulauan Riau	7	42,9	42,9	0,0	14,3	33,3	50,0	16,7	0,0
DKI Jakarta	6	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Jawa Barat	27	59,3	33,3	0,0	7,4	48,0	8,0	40,0	4,0
Jawa Tengah	35	71,4	28,6	0,0	0,0	25,7	11,4	62,9	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	0,0	0,0	60,0	20,0	20,0	0,0
Jawa Timur	38	65,8	31,6	0,0	2,6	51,4	8,1	40,5	0,0
Banten	8	62,5	25,0	12,5	0,0	71,4	14,3	14,3	0,0
Bali	9	66,7	33,3	0,0	0,0	33,3	0,0	66,7	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0	10,0	70,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	27,3	9,1	13,6	41,2	11,8	47,1	0,0
Kalimantan Barat	14	50,0	42,9	0,0	7,1	53,8	0,0	46,2	0,0
Kalimantan Tengah	14	42,9	28,6	7,1	21,4	40,0	0,0	60,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	46,2	46,2	7,7	0,0	33,3	0,0	66,7	0,0
Kalimantan Timur	10	70,0	30,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	20,0	0,0	0,0	60,0	20,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	46,7	33,3	13,3	6,7	16,7	33,3	50,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	61,5	23,1	7,7	7,7	63,6	0,0	36,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	50,0	41,7	4,2	4,2	27,3	9,1	63,6	0,0
Sulawesi Tenggara	17	76,5	17,6	0,0	5,9	31,3	0,0	68,8	0,0
Gorontalo	6	50,0	50,0	0,0	0,0	33,3	16,7	50,0	0,0
Sulawesi Barat	6	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Maluku	11	36,4	54,5	0,0	9,1	10,0	10,0	80,0	0,0
Maluku Utara	10	30,0	40,0	10,0	20,0	42,9	0,0	57,1	0,0
Papua Barat	13	46,2	23,1	7,7	23,1	44,4	0,0	55,6	0,0
Papua	29	31,0	41,4	6,9	20,7	38,1	9,5	47,6	4,8
INDONESIA	513	58,7	32,0	3,3	6,0	41,5	7,5	50,5	0,4

Tabel 3.5.7 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	56,5	30,4	8,7	4,3	50,0	15,0	30,0	5,0
Sumatera Utara	33	63,6	33,3	3,0	0,0	40,6	3,1	56,3	0,0
Sumatera Barat	19	52,6	36,8	5,3	5,3	41,2	5,9	47,1	5,9
Riau	12	83,3	16,7	0,0	0,0	58,3	8,3	33,3	0,0
Jambi	11	45,5	27,3	18,2	9,1	62,5	12,5	25,0	0,0
Sumatera Selatan	17	52,9	29,4	11,8	5,9	35,7	0,0	64,3	0,0
Bengkulu	9	55,6	44,4	0,0	0,0	11,1	11,1	77,8	0,0
Lampung	15	73,3	13,3	6,7	6,7	76,9	0,0	23,1	0,0
Bangka Belitung	7	57,1	28,6	14,3	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Kepulauan Riau	7	57,1	42,9	0,0	0,0	14,3	14,3	71,4	0,0
DKI Jakarta	6	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Jawa Barat	27	63,0	25,9	0,0	11,1	54,2	4,2	41,7	0,0
Jawa Tengah	35	71,4	22,9	5,7	0,0	36,4	12,1	51,5	0,0
DI Yogyakarta	5	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	73,7	23,7	0,0	2,6	67,6	0,0	32,4	0,0
Banten	8	62,5	25,0	12,5	0,0	71,4	14,3	14,3	0,0
Bali	9	66,7	33,3	0,0	0,0	44,4	0,0	55,6	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	50,0	50,0	0,0	0,0	30,0	10,0	60,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	18,2	18,2	13,6	40,0	20,0	33,3	6,7
Kalimantan Barat	14	42,9	21,4	14,3	21,4	44,4	11,1	44,4	0,0
Kalimantan Tengah	14	42,9	28,6	7,1	21,4	50,0	0,0	50,0	0,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	23,1	15,4	0,0	45,5	9,1	45,5	0,0
Kalimantan Timur	10	60,0	30,0	0,0	10,0	55,6	11,1	33,3	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	40,0	20,0	26,7	13,3	22,2	11,1	66,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	46,2	38,5	0,0	15,4	36,4	9,1	54,5	0,0
Sulawesi Selatan	24	33,3	58,3	0,0	8,3	27,3	4,5	68,2	0,0
Sulawesi Tenggara	17	41,2	35,3	11,8	11,8	38,5	0,0	61,5	0,0
Gorontalo	6	50,0	50,0	0,0	0,0	16,7	33,3	50,0	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	16,7	0,0	16,7	20,0	0,0	80,0	0,0
Maluku	11	27,3	36,4	9,1	27,3	28,6	0,0	71,4	0,0
Maluku Utara	10	30,0	30,0	10,0	30,0	16,7	0,0	83,3	0,0
Papua Barat	13	30,8	23,1	23,1	23,1	42,9	0,0	57,1	0,0
Papua	29	27,6	37,9	6,9	27,6	42,1	5,3	52,6	0,0
INDONESIA	513	54,4	29,8	6,8	9,0	44,4	6,5	48,4	0,7

Tabel 3.5.8 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (SIHEPI) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	39,1	17,4	17,4	26,1	38,5	30,8	23,1	7,7
Sumatera Utara	33	15,2	9,1	15,2	60,6	50,0	12,5	37,5	0,0
Sumatera Barat	19	21,1	15,8	21,1	42,1	14,3	42,9	28,6	14,3
Riau	12	50,0	25,0	8,3	16,7	44,4	44,4	11,1	0,0
Jambi	11	0,0	27,3	54,5	18,2	0,0	66,7	33,3	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	35,3	17,6	17,6	18,2	36,4	45,5	0,0
Bengkulu	9	33,3	11,1	33,3	22,2	75,0	25,0	0,0	0,0
Lampung	15	46,7	26,7	13,3	13,3	63,6	9,1	18,2	9,1
Bangka Belitung	7	14,3	0,0	42,9	42,9	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	0,0	0,0	42,9	57,1	n/a	n/a	n/a	n/a
DKI Jakarta	6	50,0	33,3	0,0	16,7	40,0	0,0	60,0	0,0
Jawa Barat	27	14,8	22,2	14,8	48,1	50,0	20,0	30,0	0,0
Jawa Tengah	35	45,7	11,4	14,3	28,6	40,0	30,0	25,0	5,0
DI Yogyakarta	5	40,0	0,0	40,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	42,1	21,1	13,2	23,7	66,7	12,5	12,5	8,3
Banten	8	12,5	0,0	0,0	87,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Bali	9	22,2	11,1	22,2	44,4	33,3	33,3	33,3	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	30,0	20,0	10,0	28,6	28,6	42,9	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	18,2	9,1	22,7	50,0	16,7	16,7	50,0	16,7
Kalimantan Barat	14	21,4	7,1	14,3	57,1	75,0	0,0	25,0	0,0
Kalimantan Tengah	14	28,6	14,3	28,6	28,6	66,7	16,7	16,7	0,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	23,1	0,0	15,4	36,4	18,2	45,5	0,0
Kalimantan Timur	10	40,0	20,0	0,0	40,0	16,7	0,0	83,3	0,0
Kalimantan Utara	5	0,0	0,0	40,0	60,0	n/a	n/a	n/a	n/a
Sulawesi Utara	15	26,7	13,3	33,3	26,7	33,3	33,3	16,7	16,7
Sulawesi Tengah	13	30,8	0,0	23,1	46,2	75,0	25,0	0,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	8,3	29,2	25,0	37,5	22,2	22,2	55,6	0,0
Sulawesi Tenggara	17	11,8	11,8	17,6	58,8	0,0	25,0	75,0	0,0
Gorontalo	6	33,3	0,0	33,3	33,3	0,0	0,0	50,0	50,0
Sulawesi Barat	6	33,3	16,7	16,7	33,3	0,0	0,0	100,0	0,0
Maluku	11	9,1	18,2	9,1	63,6	33,3	33,3	33,3	0,0
Maluku Utara	10	0,0	20,0	60,0	20,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Papua Barat	13	23,1	0,0	7,7	69,2	66,7	0,0	33,3	0,0
Papua	29	3,4	10,3	31,0	55,2	50,0	25,0	25,0	0,0
INDONESIA	513	25,7	15,6	20,3	38,4	42,0	21,7	31,6	4,7

Tabel 3.5.9 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	60,9	47,8	13,0	39,1	0,0	13,0	39,1	0,0
Sumatera Utara	33	27,3	22,2	0,0	72,2	5,6	0,0	72,2	5,6
Sumatera Barat	19	47,4	53,8	7,7	30,8	7,7	7,7	30,8	7,7
Riau	12	75,0	60,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Jambi	11	9,1	20,0	60,0	20,0	0,0	60,0	20,0	0,0
Sumatera Selatan	17	29,4	33,3	8,3	58,3	0,0	8,3	58,3	0,0
Bengkulu	9	33,3	60,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Lampung	15	53,3	58,3	8,3	33,3	0,0	8,3	33,3	0,0
Bangka Belitung	7	28,6	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	14,3	14,3	71,4	0,0	14,3	71,4	0,0
DKI Jakarta	6	33,3	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Jawa Barat	27	40,7	56,3	6,3	37,5	0,0	6,3	37,5	0,0
Jawa Tengah	35	57,1	25,0	18,8	56,3	0,0	18,8	56,3	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Timur	38	55,3	65,6	9,4	21,9	3,1	9,4	21,9	3,1
Banten	8	12,5	25,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0
Bali	9	33,3	37,5	12,5	50,0	0,0	12,5	50,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	30,0	11,1	33,3	55,6	0,0	33,3	55,6	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	40,9	23,5	5,9	64,7	5,9	5,9	64,7	5,9
Kalimantan Barat	14	35,7	50,0	16,7	33,3	0,0	16,7	33,3	0,0
Kalimantan Tengah	14	28,6	36,4	9,1	54,5	0,0	9,1	54,5	0,0
Kalimantan Selatan	13	53,8	23,1	0,0	76,9	0,0	0,0	76,9	0,0
Kalimantan Timur	10	30,0	20,0	20,0	60,0	0,0	20,0	60,0	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	66,7	33,3	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0
Sulawesi Utara	15	13,3	12,5	25,0	62,5	0,0	25,0	62,5	0,0
Sulawesi Tengah	13	23,1	40,0	20,0	40,0	0,0	20,0	40,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	45,8	33,3	5,6	61,1	0,0	5,6	61,1	0,0
Sulawesi Tenggara	17	17,6	12,5	25,0	62,5	0,0	25,0	62,5	0,0
Gorontalo	6	33,3	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	0,0	16,7	83,3	0,0	16,7	83,3	0,0
Maluku	11	18,2	40,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Maluku Utara	10	0,0	0,0	16,7	83,3	0,0	16,7	83,3	0,0
Papua Barat	13	15,4	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0	33,3	0,0
Papua	29	10,3	42,9	14,3	42,9	0,0	14,3	42,9	0,0
INDONESIA	513	37,0	38,9	11,6	48,3	1,1	11,6	48,3	1,1

Tabel 3.5.10 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Penyakit yang dapat Dicegah dengan Imunisasi (SIPD3I) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	26,1	30,4	21,7	21,7	38,5	38,5	23,1	0,0
Sumatera Utara	33	39,4	21,2	27,3	12,1	45,0	20,0	35,0	0,0
Sumatera Barat	19	42,1	26,3	10,5	21,1	38,5	23,1	30,8	7,7
Riau	12	25,0	0,0	41,7	33,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Jambi	11	45,5	9,1	27,3	18,2	16,7	66,7	16,7	0,0
Sumatera Selatan	17	47,1	41,2	11,8	0,0	40,0	26,7	33,3	0,0
Bengkulu	9	33,3	33,3	0,0	33,3	33,3	50,0	16,7	0,0
Lampung	15	53,3	20,0	20,0	6,7	63,6	9,1	18,2	9,1
Bangka Belitung	7	42,9	28,6	28,6	0,0	60,0	20,0	20,0	0,0
Kepulauan Riau	7	0,0	0,0	57,1	42,9	n/a	n/a	n/a	n/a
DKI Jakarta	6	66,7	0,0	33,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	25,9	22,2	14,8	37,0	61,5	7,7	30,8	0,0
Jawa Tengah	35	51,4	17,1	5,7	25,7	45,8	16,7	37,5	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	50,0	18,4	7,9	23,7	73,1	11,5	11,5	3,8
Banten	8	37,5	25,0	0,0	37,5	60,0	40,0	0,0	0,0
Bali	9	11,1	55,6	11,1	22,2	33,3	16,7	33,3	16,7
Nusa Tenggara Barat	10	20,0	50,0	20,0	10,0	0,0	28,6	71,4	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	31,8	9,1	22,7	36,4	44,4	33,3	22,2	0,0
Kalimantan Barat	14	28,6	21,4	14,3	35,7	71,4	0,0	28,6	0,0
Kalimantan Tengah	14	28,6	14,3	28,6	28,6	66,7	0,0	33,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	38,5	23,1	23,1	15,4	50,0	12,5	37,5	0,0
Kalimantan Timur	10	30,0	10,0	10,0	50,0	25,0	0,0	75,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	20,0	0,0	0,0	60,0	20,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	13,3	26,7	26,7	33,3	33,3	16,7	50,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	38,5	23,1	7,7	30,8	50,0	25,0	25,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	16,7	25,0	37,5	20,8	20,0	20,0	60,0	0,0
Sulawesi Tenggara	17	5,9	47,1	5,9	41,2	33,3	22,2	44,4	0,0
Gorontalo	6	50,0	33,3	16,7	0,0	40,0	20,0	40,0	0,0
Sulawesi Barat	6	33,3	16,7	50,0	0,0	0,0	33,3	66,7	0,0
Maluku	11	27,3	9,1	27,3	36,4	50,0	25,0	25,0	0,0
Maluku Utara	10	0,0	30,0	50,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Papua Barat	13	15,4	30,8	15,4	38,5	33,3	0,0	66,7	0,0
Papua	29	13,8	27,6	27,6	31,0	33,3	8,3	58,3	0,0
INDONESIA	513	32,7	23,2	19,7	24,4	46,3	18,8	33,4	1,4

Tabel 3.5.11 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Surveilans Malaria (e-SISMAL) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	60,9	21,7	8,7	8,7	63,2	10,5	26,3	0,0
Sumatera Utara	33	42,4	36,4	6,1	15,2	46,2	3,8	46,2	3,8
Sumatera Barat	19	42,1	31,6	15,8	10,5	21,4	7,1	71,4	0,0
Riau	12	91,7	8,3	0,0	0,0	75,0	8,3	16,7	0,0
Jambi	11	72,7	0,0	18,2	9,1	62,5	0,0	37,5	0,0
Sumatera Selatan	17	58,8	35,3	5,9	0,0	43,8	6,3	50,0	0,0
Bengkulu	9	88,9	11,1	0,0	0,0	66,7	11,1	22,2	0,0
Lampung	15	73,3	20,0	0,0	6,7	78,6	0,0	21,4	0,0
Bangka Belitung	7	57,1	42,9	0,0	0,0	71,4	0,0	28,6	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	57,1	0,0	14,3	16,7	16,7	66,7	0,0
DKI Jakarta	6	50,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	48,1	11,1	11,1	29,6	75,0	6,3	18,8	0,0
Jawa Tengah	35	65,7	20,0	5,7	8,6	36,7	13,3	50,0	0,0
DI Yogyakarta	5	20,0	20,0	0,0	60,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Jawa Timur	38	73,7	18,4	2,6	5,3	80,0	8,6	11,4	0,0
Banten	8	50,0	0,0	12,5	37,5	75,0	25,0	0,0	0,0
Bali	9	55,6	44,4	0,0	0,0	55,6	0,0	44,4	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	60,0	40,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	18,2	13,6	18,2	26,7	20,0	33,3	20,0
Kalimantan Barat	14	35,7	42,9	14,3	7,1	54,5	18,2	27,3	0,0
Kalimantan Tengah	14	64,3	21,4	14,3	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	30,8	7,7	0,0	50,0	8,3	41,7	0,0
Kalimantan Timur	10	70,0	30,0	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	0,0
Kalimantan Utara	5	80,0	20,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0
Sulawesi Utara	15	33,3	46,7	0,0	20,0	16,7	33,3	50,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	30,8	38,5	7,7	23,1	44,4	11,1	44,4	0,0
Sulawesi Selatan	24	50,0	41,7	4,2	4,2	45,5	9,1	45,5	0,0
Sulawesi Tenggara	17	35,3	41,2	11,8	11,8	38,5	0,0	61,5	0,0
Gorontalo	6	83,3	16,7	0,0	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Maluku	11	36,4	54,5	0,0	9,1	50,0	0,0	50,0	0,0
Maluku Utara	10	30,0	40,0	20,0	10,0	28,6	0,0	71,4	0,0
Papua Barat	13	38,5	23,1	15,4	23,1	50,0	0,0	50,0	0,0
Papua	29	31,0	37,9	10,3	20,7	35,0	10,0	55,0	0,0
INDONESIA	513	53,4	28,1	7,0	11,5	51,2	7,9	40,0	1,0

Tabel 3.5.12 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (s-STBM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	60,9	26,1	4,3	8,7	70,0	15,0	15,0	0,0
Sumatera Utara	33	54,5	39,4	6,1	0,0	48,4	3,2	48,4	0,0
Sumatera Barat	19	52,6	31,6	5,3	10,5	56,3	12,5	31,3	0,0
Riau	12	58,3	25,0	0,0	16,7	90,0	0,0	0,0	10,0
Jambi	11	63,6	18,2	0,0	18,2	88,9	0,0	11,1	0,0
Sumatera Selatan	17	58,8	29,4	5,9	5,9	53,3	0,0	46,7	0,0
Bengkulu	9	77,8	22,2	0,0	0,0	55,6	0,0	44,4	0,0
Lampung	15	73,3	13,3	0,0	13,3	92,3	0,0	7,7	0,0
Bangka Belitung	7	57,1	28,6	0,0	14,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Kepulauan Riau	7	28,6	71,4	0,0	0,0	28,6	28,6	42,9	0,0
DKI Jakarta	6	66,7	33,3	0,0	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Jawa Barat	27	40,7	29,6	0,0	29,6	52,6	15,8	31,6	0,0
Jawa Tengah	35	60,0	25,7	2,9	11,4	63,3	6,7	30,0	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	0,0	0,0	60,0	0,0	40,0	0,0
Jawa Timur	38	65,8	15,8	5,3	13,2	87,1	0,0	12,9	0,0
Banten	8	62,5	12,5	0,0	25,0	83,3	0,0	16,7	0,0
Bali	9	22,2	44,4	11,1	22,2	33,3	0,0	66,7	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	50,0	10,0	0,0	44,4	0,0	55,6	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	40,9	31,8	4,5	22,7	50,0	12,5	37,5	0,0
Kalimantan Barat	14	57,1	21,4	7,1	14,3	63,6	9,1	27,3	0,0
Kalimantan Tengah	14	57,1	7,1	21,4	14,3	55,6	0,0	44,4	0,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	30,8	0,0	7,7	66,7	8,3	25,0	0,0
Kalimantan Timur	10	80,0	10,0	0,0	10,0	66,7	0,0	33,3	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	20,0	0,0	20,0	50,0	25,0	25,0	0,0
Sulawesi Utara	15	20,0	66,7	0,0	13,3	38,5	15,4	38,5	7,7
Sulawesi Tengah	13	46,2	30,8	7,7	15,4	60,0	10,0	30,0	0,0
Sulawesi Selatan	24	62,5	29,2	0,0	8,3	54,5	4,5	40,9	0,0
Sulawesi Tenggara	17	52,9	41,2	0,0	5,9	56,3	0,0	43,8	0,0
Gorontalo	6	66,7	33,3	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Sulawesi Barat	6	50,0	33,3	0,0	16,7	40,0	0,0	60,0	0,0
Maluku	11	18,2	27,3	9,1	45,5	60,0	0,0	40,0	0,0
Maluku Utara	10	20,0	70,0	10,0	0,0	55,6	0,0	44,4	0,0
Papua Barat	13	30,8	7,7	7,7	53,8	80,0	0,0	20,0	0,0
Papua	29	24,1	17,2	13,8	44,8	50,0	8,3	41,7	0,0
INDONESIA	513	51,7	28,7	4,5	15,2	61,4	5,6	32,5	0,5

Tabel 3.5.13 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	56,5	39,1	0,0	4,3	45,5	18,2	36,4	0,0
Sumatera Utara	33	63,6	33,3	3,0	0,0	40,6	0,0	59,4	0,0
Sumatera Barat	19	47,4	31,6	10,5	10,5	26,7	6,7	60,0	6,7
Riau	12	75,0	8,3	0,0	16,7	40,0	0,0	50,0	10,0
Jambi	11	54,5	18,2	18,2	9,1	37,5	0,0	50,0	12,5
Sumatera Selatan	17	58,8	35,3	5,9	0,0	56,3	0,0	43,8	0,0
Bengkulu	9	55,6	44,4	0,0	0,0	55,6	0,0	44,4	0,0
Lampung	15	46,7	40,0	6,7	6,7	46,2	15,4	38,5	0,0
Bangka Belitung	7	85,7	14,3	0,0	0,0	85,7	0,0	14,3	0,0
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	14,3	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
DKI Jakarta	6	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Jawa Barat	27	40,7	25,9	0,0	33,3	61,1	5,6	33,3	0,0
Jawa Tengah	35	57,1	28,6	5,7	8,6	50,0	0,0	50,0	0,0
DI Yogyakarta	5	80,0	20,0	0,0	0,0	40,0	0,0	60,0	0,0
Jawa Timur	38	63,2	21,1	5,3	10,5	65,6	0,0	34,4	0,0
Banten	8	62,5	12,5	0,0	25,0	83,3	0,0	16,7	0,0
Bali	9	44,4	44,4	11,1	0,0	25,0	0,0	75,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	40,0	60,0	0,0	0,0	30,0	0,0	70,0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	27,3	9,1	13,6	23,5	5,9	70,6	0,0
Kalimantan Barat	14	50,0	35,7	14,3	0,0	58,3	8,3	33,3	0,0
Kalimantan Tengah	14	42,9	21,4	21,4	14,3	55,6	11,1	33,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	69,2	23,1	0,0	7,7	75,0	0,0	25,0	0,0
Kalimantan Timur	10	70,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	70,0	0,0
Kalimantan Utara	5	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Sulawesi Utara	15	26,7	40,0	6,7	26,7	20,0	20,0	60,0	0,0
Sulawesi Tengah	13	38,5	46,2	7,7	7,7	27,3	0,0	63,6	9,1
Sulawesi Selatan	24	66,7	20,8	4,2	8,3	42,9	4,8	52,4	0,0
Sulawesi Tenggara	17	23,5	23,5	23,5	29,4	25,0	25,0	50,0	0,0
Gorontalo	6	50,0	50,0	0,0	0,0	33,3	0,0	66,7	0,0
Sulawesi Barat	6	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Maluku	11	27,3	45,5	0,0	27,3	37,5	0,0	62,5	0,0
Maluku Utara	10	20,0	50,0	20,0	10,0	14,3	0,0	85,7	0,0
Papua Barat	13	30,8	15,4	23,1	30,8	66,7	0,0	33,3	0,0
Papua	29	27,6	20,7	10,3	41,4	35,7	28,6	35,7	0,0
INDONESIA	513	50,7	29,8	7,0	12,5	44,6	4,8	49,6	1,0

Tabel 3.5.14 Proporsi Ketersediaan Sistem dan Sifat Pencatatan Informasi Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Dinas Kesehatan Kab/Kota, Rifaskes 2019

Provinsi	N	Ketersediaan				Sifat pencatatan			
		Elektronik	Elektronik & manual	Manual	Tidak ada	Online	Offline	Online-Offline	Tidak digunakan
Aceh	23	52,2	21,7	0,0	26,1	58,8	11,8	23,5	5,9
Sumatera Utara	33	54,5	21,2	9,1	15,2	64,0	4,0	32,0	0,0
Sumatera Barat	19	52,6	21,1	5,3	21,1	71,4	7,1	21,4	0,0
Riau	12	66,7	16,7	8,3	8,3	80,0	0,0	20,0	0,0
Jambi	11	45,5	9,1	18,2	27,3	83,3	0,0	16,7	0,0
Sumatera Selatan	17	41,2	47,1	11,8	0,0	40,0	6,7	53,3	0,0
Bengkulu	9	77,8	11,1	0,0	11,1	75,0	12,5	12,5	0,0
Lampung	15	66,7	26,7	0,0	6,7	71,4	7,1	21,4	0,0
Bangka Belitung	7	57,1	14,3	0,0	28,6	80,0	0,0	20,0	0,0
Kepulauan Riau	7	57,1	28,6	0,0	14,3	66,7	0,0	33,3	0,0
DKI Jakarta	6	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Jawa Barat	27	51,9	18,5	0,0	29,6	73,7	10,5	15,8	0,0
Jawa Tengah	35	62,9	14,3	0,0	22,9	70,4	7,4	22,2	0,0
DI Yogyakarta	5	60,0	20,0	0,0	20,0	75,0	0,0	25,0	0,0
Jawa Timur	38	68,4	10,5	0,0	21,1	83,3	6,7	10,0	0,0
Banten	8	62,5	0,0	12,5	25,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Bali	9	44,4	44,4	11,1	0,0	75,0	0,0	25,0	0,0
Nusa Tenggara Barat	10	60,0	30,0	0,0	10,0	44,4	0,0	55,6	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	50,0	22,7	4,5	22,7	56,3	12,5	31,3	0,0
Kalimantan Barat	14	35,7	14,3	7,1	42,9	71,4	0,0	28,6	0,0
Kalimantan Tengah	14	64,3	21,4	7,1	7,1	58,3	8,3	33,3	0,0
Kalimantan Selatan	13	53,8	15,4	7,7	23,1	77,8	0,0	22,2	0,0
Kalimantan Timur	10	50,0	30,0	0,0	20,0	37,5	0,0	62,5	0,0
Kalimantan Utara	5	60,0	20,0	0,0	20,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Sulawesi Utara	15	46,7	33,3	6,7	13,3	41,7	16,7	41,7	0,0
Sulawesi Tengah	13	46,2	7,7	15,4	30,8	85,7	0,0	14,3	0,0
Sulawesi Selatan	24	62,5	12,5	8,3	16,7	77,8	11,1	11,1	0,0
Sulawesi Tenggara	17	41,2	23,5	5,9	29,4	81,8	18,2	0,0	0,0
Gorontalo	6	83,3	0,0	0,0	16,7	80,0	0,0	20,0	0,0
Sulawesi Barat	6	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Maluku	11	36,4	27,3	0,0	36,4	42,9	0,0	57,1	0,0
Maluku Utara	10	30,0	30,0	30,0	10,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Papua Barat	13	30,8	15,4	0,0	53,8	66,7	0,0	33,3	0,0
Papua	29	24,1	27,6	17,2	31,0	53,3	13,3	33,3	0,0
INDONESIA	513	53,0	20,5	5,7	20,9	67,1	6,4	26,3	0,3

Lampiran:

- 1. SK Menkes Nomor
HK.01.07/Menkes/275/2019**
- 2. SK Kepala Badan Litbangkes Nomor
HK.02.02/I/3450/2019**
- 3. Persetujuan Etik Rifaskes 2019**
- 4. Kuesioner**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/275/2019
TENTANG
TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk penguatan pencapaian *Universal Health Coverage* serta perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 yang efektif, efisien, terpadu dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/PER/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019.
- KESATU : Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 selanjutnya disebut Tim Rifaskes;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Risfakes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasehat, Penanggung Jawab, Pengarah, Pakar, Pelaksana Pusat, dan Pelaksana wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Tim Rifaskes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasehat bertugas:
 - a. memberikan nasehat, saran, dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
 - b. menetapkan kebijakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

2. Penanggung Jawab bertugas:

- a. menetapkan metodologi penelitian;
- b. menetapkan Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- c. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- d. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

3. Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat persiapan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait dengan metodologi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Riset Fasilitas Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

4. Pakar bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- b. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 tetap ditegakkan.

5. Pelaksana Pusat bertugas:

a. Bidang Teknis:

- 1) melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen kuesioner, pedoman teknis, konsultasi dan diskusi dengan pakar, serta pelaksanaan uji coba instrumen kuesioner;
- 2) menyusun rencana kerja penelitian;
- 3) menyusun metodologi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 4) menyusun protokol;
- 5) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data;

- 6) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 7) melaksanakan workshop untuk penanggung jawab teknis provinsi dan kabupaten/kota;
- 8) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- 9) melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 10) menyusun laporan kegiatan;
- 11) melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 kepada Penanggung jawab dan Pengarah; dan
- 12) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggung jawab dan Pengarah.

b. Bidang Pengelolaan Data bertugas:

- 1) membuat aplikasi *entry* untuk data Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 2) membuat aplikasi pemantauan proses pengumpulan data;
- 3) melatih pelaksana pusat bidang teknis dan/atau penanggung jawab teknis provinsi untuk penggunaan aplikasi pengolahan data;
- 4) menerima dan melakukan pemantauan *raw data*;
- 5) melakukan validasi *raw data* yang diterima dari enumerator Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 6) melakukan pembersihan *raw data* gabungan hasil validasi;
- 7) melakukan analisis data bersama dengan pelaksana pusat bidang teknis; dan
- 8) menyerahkan *raw data final* ke Laboratorium Manajemen Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

c. Bidang Manajemen bertugas:

- 1) melakukan perencanaan bidang manajemen Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 2) melakukan pengorganisasian Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 3) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 4) melakukan rekrutmen tenaga pengajar, penanggung jawab teknis provinsi;
- 5) memberikan dukungan administrasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 6) melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan tata usaha Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 7) melakukan perencanaan anggaran;
- 8) melakukan pengorganisasian keuangan, logistik, sumber daya manusia dan administrasi lainnya;
- 9) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- 10) melakukan penyiapan, pendistribusian dan penyimpanan logistik Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

d. Pelaksana wilayah bertugas:

- 1) menyusun rencana kerja dan pedoman kerja pelaksana wilayah;
- 2) merekrut enumerator;
- 3) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- 4) melakukan pelatihan bagi enumerator;
- 5) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 6) melakukan pengawasan pelaksanaan enumerator;
- 7) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Provinsi, Workshop pengumpulan data;
- 8) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan

9) menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Rifaskes bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan, Tim Rifaskes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pusat dan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Masa penugasan Tim Rifaskes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan sebagaimana dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



4th
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/Menkes/275/2019
TENTANG TIM RISET FASILITAS
KESEHATAN TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

- A. PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- C. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- D. PAKAR :
- Ketua : Dr. dr. Trihono, M. Sc.
- Anggota : 1. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH
2. Prof. dr. Hasbullah Thabarany, MPH, Dr.PH
3. Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc, Ph.D
4. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
5. Prof. dr. Lestari Handayani, M.Med
6. Prof. Budi Hidayat, SKM., MPPM, Ph.D
7. Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K)
8. Prof. Dr. Drs. Sudibyo Soepardi, M.Kes, Apt
9. Prof. Dr. drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes
10. Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, DrPH
11. dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD

12. Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P., MARS
13. dr. Tonang D Ardiyanto, SpPK, Ph.D
14. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes
15. Dr. Drs. Chazali Situmorang, Apt, M.Sc
16. Dr. Drs. Tris Eryando, MA
17. Prastuti Soewondo, SE, MPH., Ph.D
18. dr. Soewarto Kosen, MPH., Dr.PH
19. dr. Widodo JP, MS, MPH, Dr.PH
20. dr. Untung Suseno, M.Kes, AKAU
21. drg. Usman Sumantri, M.Sc
22. dr. Eka Viora, SpKJ

E. PELAKSANA PUSAT

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Sekretaris : 1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
2. Tinexcellly Marisiuli Simamora, SKM, MKM

a. Bidang Teknis

Ketua Bidang Teknis : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes

Wakil Ketua Bidang
teknis : Yuyun Yuniar, S.Si., Apt., MA

Sekretaris Bidang
teknis : 1. Mujiati, SKM., MKes
2. Rani Marsini, SKM

1. Koordinator Blok
Pelayanan
Kesehatan : dr. Fitriana, Sp.MK

2. Koordinator Blok
Sistem Informasi : Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes

3. Koordinator Blok
Kepesertaan : Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes

4. Koordinator Blok
Pembiayaan : drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS

5. Koordinator Blok
Farmasi dan Alat
Kesehatan : Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM

6. Koordinator Blok
Tata Kelola : dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD

b. Bidang Pengelolaan

Data

Ketua Bidang : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

Pengelolaan Data

c. Bidang Manajemen

1. Ketua Bidang : Kepala Bagian Program dan Informasi
Manajemen

2. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik
Keuangan dan Negara
Logistik

3. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan
Hukum, Kepegawaian
Organisasi dan
Kepegawaian

4. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Umum, Dokumentasi dan
Umum, Jejaring
Dokumentasi dan
Jejaring

5. Ketua Sub Bidang : Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, M.Ak
Kesekretariatan

F. PELAKSANA WILAYAH

Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan

a. Wilayah I

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Wakil Koordinator : 1. Dr. Dra. Raharni, Apt., M.Kes
Wilayah 2. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Wilayah II

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Wakil Koordinator Wilayah : Dr. dr. Felly Philipus Senewe, M.Kes.

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

c. Wilayah III

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil Koordinator Wilayah : dr. Trijuni Angkaswati, M.Sc.

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

d. Wilayah IV

Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu

Wakil Koordinator Wilayah : Junediyono, SKM, MKM

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

e. Wilayah V

Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Wakil Koordinator Wilayah : dr. Bagus Febrianto, M.Sc

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/I/3450/2019

TENTANG

PELAKSANA RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk penguatan pencapaian *Universal Health Coverage* serta perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/275/2019 tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, perlu dibentuk Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Pelaksana Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/PER/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/275/2019 tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PELAKSANA RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019.

- KESATU : Pelaksana Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Pelaksana Rifaskes terdiri atas Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Bidang Teknis, Bidang Data dan Bidang Manajemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEEMPAT : Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Teknis:
1. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen kuesioner, pedoman teknis, konsultasi dan diskusi dengan pakar, serta pelaksanaan uji coba instrumen kuesioner;
 2. menyusun rencana kerja penelitian;
 3. menyusun metodologi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 4. menyusun protokol;
 5. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data;
 6. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 7. melaksanakan *workshop* untuk penanggung jawab teknis provinsi dan kabupaten/kota;
 8. melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari persiapan sampai analisis data dan pelaporan;
 9. melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 10. menyusun laporan kegiatan;
 11. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan 2019 kepada Penanggung jawab dan Pengarah Riset Fasilitas Kesehatan 2019; dan
 12. mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggung jawab dan Pengarah Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.
- b. Bidang Pengelolaan Data
1. membuat aplikasi *entry* untuk data Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 2. membuat aplikasi pemantauan proses pengumpulan data;

3. melatih pelaksana pusat bidang teknis dan/atau penanggung jawab teknis provinsi untuk penggunaan aplikasi pengolahan data;
4. menerima dan melakukan pemantauan raw data;
5. melakukan validasi raw data yang diterima dari enumerator Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
6. melakukan pembersihan raw data gabungan hasil validasi;
7. melakukan analisis data bersama dengan pelaksana pusat bidang teknis; dan
8. menyerahkan *raw* data final ke Laboratorium Manajemen Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

c. Bidang Manajemen

1. melakukan perencanaan bidang manajemen Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
2. melakukan pengorganisasian Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
4. melakukan rekrutmen tenaga pengajar, penanggung jawab teknis provinsi;
5. memberikan dukungan administrasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
6. melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan tata usaha Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
7. melakukan perencanaan anggaran;
8. melakukan pengorganisasian keuangan, logistik, sumber daya manusia dan administrasi lainnya;
9. melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 ; dan
10. melakukan penyiapan, pendistribusian dan penyimpanan logistik Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

- KELIMA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, Pelaksana Rifaskes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya Pelaksana Rifaskes bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan akhir penelitian;
- KEEMPAT : Masa tugas Pelaksana Rifaskes selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

- KELIMA Pendanaan dari pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



SISWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/3450/2019
TENTANG PELAKSANA RISET FASILITAS
KESEHATAN 2019

SUSUNAN PELAKSANA PUSAT RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : 1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
2. Tinexcelly Marisiuli Simamora, SKM,
MKM
- A. Bidang Teknis
- Ketua Bidang Teknis : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
- Wakil ketua Bidang teknis : Yuyun Yuniar, S.Si., Apt., MA
- Sekretaris Bidang teknis : 1. Mujiati, SKM., MKes
2. Rani Marsini, SKM
- a. Blok Pelayanan
Kesehatan
- Koordinator : dr. Fitriana, Sp.MK
- Anggota : 1. Dr. dr. Telly Purnamasari Agus, M.Epid
2. Dr. dr. Laurentia Konadi, MS., Sp.GK
3. dr. Made Dewi Susilawati, M.Epid.
4. dr. Srilaning Driyah, Sp.PK, M.Si.Med
5. dr. Eva Sulistiowati, M.Biomed
6. dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK
7. dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
8. drg. Lelly Andayasari, M.Kes
9. drh. Risqa Novita, MKM
10. drg. Rafni Pamela Sari, MARS
11. dr. Rossa Avrina, M.Epid
12. dr. Hadjar Siswantoro, M.Sc
13. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc
14. drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM
15. Dra. Marice Sihombing, M.Si
16. Reni Oktavia, SKM., MKM

- b. Blok Sistem Informasi
Koordinator : Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes
Anggota : 1. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
2. Noor Edi Widya Sukoco, MPS., M.Sc.PH
3. Asep Hermawan, S.Kep., Ners, MPH
4. Syachroni, S.Si, M.Kes
- c. Blok Kepesertaan
Koordinator : Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes
Anggota : 1. Aris Yulianto, S.Si
2. Agus Dwi Harso, S.Si
3. Desi Fitriani, SKM, M.Si
4. Sundari Wirasmi, S.Si
5. dr. Sri Mardikani Nugraha, MKM
6. dr. Anton Suryatma, MKM
7. Heny Lestary, SKM, MKM
8. Miko Hananto, M.Kes
9. dr. Igan Aprianti
10. Timor Utama, S.Kom., MMSI
- d. Blok Pembiayaan
Koordinator : drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS
Anggota : 1. dr. Retna Mustika Indah, MKM
2. dr. Tita Rosita, MKM
3. Andi Leny Susyanty, S.Si., Apt, MKM
4. dr. Idawaty Muas, MKM
5. dr. Cicih Opitasari, MARS
6. Mimi Sumiarsih, SKM, MKM
7. Rozana Ika A. S.Psi, M.Psi T
8. drg. Doni Arianto, MKM.
- e. Blok Farmasi dan Alat Kesehatan :
Koordinator : Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM
Anggota : 1. Ida Diana Sari, S.Si., Apt., MPH
2. Drs. Max Josep Herman, M.Kes
3. Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
4. Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
5. Nita Prihartini, SKM
6. Bryan Mario Isakh, SKM, MKM
7. Harwati Nana Andini, S.Si., Apt., MPH
8. Sri Suratini, S.Si., Apt., M.Farm
- f. Blok Tata Kelola
Koordinator : dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD
Anggota : 1. Enung Nurchotimah, SKM, MKM
2. Meda Permana, S.Sos, M.Si
3. Dr. Feri Ahmadi, S.Si, MPH
4. Dr. Gurendro Putro, SKM, M.Kes

B. Bidang Pengelolaan Data

Ketua

Anggota

- : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
- : 1. Dr. Frans Dany
2. Dr. Nurhayati, SKM, MKM
3. Puti Sari Hidayangsih, SKM., M.Sc. PH
4. Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
5. Lely Indrawati, S.Sos., MKM
6. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
7. Astridya Paramitha, SKM, M.Kes
8. Lusi Kristina, S.Si, M.Kes, Apt
9. Antonius Yudi Kristanto, SKM., M.Kes
10. Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
11. Amir Suudi, SKM, MKM
12. Bhakti Samsu Adi, M.Si
13. Merry Budiarti S, M.Sc
14. Dwi Priyanto, S.Si, M.Si
15. Made Agus Nurjana SKM, M.Epid
16. Asmaul Husna, SKM, MPH
17. Zain Hadifah, SKM, M.Sc
18. Ina Kusriani, SKM, MKM
19. Eddy Purwanto, ST, MKM
20. Mara Ipa, SKM, M.Sc.
21. Rianto Purnama, S.Kom
22. Zainul Khaqiqi Nantabah, S.Si
23. Yuniarti Suryatinah, S. Farm, Apt
24. Nur Rahmawati Wijaya, S.Si
25. Mutiara Widawati, S.Si
26. Akhmad Wahyudin, SKM
27. Zumrotus Sholichah, SKM
28. Nur Sholihatin, S,Sos
29. Tri Wurisastuti, S.Stat
30. Rika Mayasari, S.Si
31. Ritawati, S.Si
32. Yusup, S.Kom
33. Revi Rosavika Kinansi, S.Si
34. Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si
35. Melda Suebu, S.Si
36. Windarti Fauziah, S.Si
37. Wening Widjajanti, SKM
38. Djunaedi, SKM
39. Narendro Arifia, S.Kom

C. Bidang Manajemen

1. Ketua Bidang
Manajemen

2. Ketua Sub Bidang
Keuangan dan Logistik
Anggota

- : Kepala Bagian Program dan Informasi
- : Kepala Bagian Keuangan dan Barang
Milik Negara
- : 1. Sri Rahayu, S.Sos.M.M

2. Mustafa Arif, SKM., MKM
 3. Yuni Nuraini, SKM, MKM
 4. Soegeng Basoeki, SKM, M.Si.
 5. Ardi Purnomo, SE
 6. Meli Damayanti, SKM
 7. Saepullah, SE
 8. Ciptadi
 9. Subini
 10. Latifah
 11. Subagio
3. Ketua Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Anggota : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Kepegawaian
- : 1. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
2. Indra Kurniawan, S.Kom., MKM
3. Dini Yulianti, S.Sos., MKM
4. Lintang Krina Ermaya, SH
5. Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan, MH
4. Ketua Sub Bidang Umum, Dokumentasi dan Jejaring Anggota : Kepala Bagian Umum, Dokumentasi dan Jejaring
- : 1. Leny wulandari, SKM, MKM
2. Isminah, SKM, MAP.
3. Ahdiyat Firmana, S.Sn
5. Ketua Sub Bidang Sekretariat Anggota : Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, M.Ak
- : 1. Nurul Puspasari, SKM, MKM
2. Joni Pahridi, SE, MIP
3. Bayu Ari Bowo, SE, M.Ak
4. Melyana, SKM
5. Titin Delia, SKM
6. Deasy Pristi Retnani, Amd.Keb
7. Eka Sri Setyaningsih

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



SISWANTO



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933
Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



PERSETUJUAN AMANDEMEN PROTOKOL
PROTOCOL AMENDMENT APPROVAL

No. : LB.02.01/2/KE.011/2019

Ref. : Persetujuan/Approval no : LB.02.01/2/KE.318/2018 tanggal 16 November 2018

Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (KEPK-BPPK) dengan berdasarkan Deklarasi Helsinki, telah melakukan telaah, pembahasan dan penilaian melalui proses **Expedited**.

memutuskan amandemen protokol uji klinik yang berjudul :

Health Research Ethics Committee, National Institute of Health Research and Development (HREC-NIHRD), in accordance with Helsinki Declaration, has conducted a thorough Expedited review of research protocol amendment entitled :

"Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 (Riset Evaluatif Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Semesta"

yang akan mengikutsertakan manusia sebagai partisipan/subyek penelitian; dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

in which will involve human participant(s), with Principal Investigator :

Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj(K)

sesuai surat pengantar no. LB.02.02/1/6518/2018 tanggal 16 Desember 2018, dapat diberikan persetujuan amandemen dengan masa berlaku :

has hereby declared the amendment is approved for implementation. This letter is valid from/to

21 Januari 2019 s/d 16 November 2019

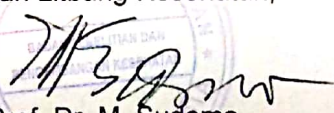
Jika ada perubahan protokol (amandemen) dan/atau perpanjangan penelitian, Ketua Pelaksana/Peneliti Utama harus mengajukan kembali protokol versi terbaru untuk kaji etik penelitian. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian juga harus diserahkan kepada KEPK-BPPK.

Should there be any modification (amendment) and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the latest version of protocol for approval. The final summary reports should also be submitted to HREC-NIHRD.

Chair of HREC-NIHRD :

Jakarta, 21 Januari 2019

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Badan Litbang Kesehatan,


Prof. Dr. M. Sudomo

RIFASKES-19. DINKES

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1.	Provinsi				
2.	Kabupaten/Kota				
3.	Nomor telepon institusi	-			
4.	Alamat e-mail institusi				
	Website institusi				
5.	Nama Kepala Dinas Kesehatan disertai gelar				
6.	Nomor HP Ka Dinkes	-			
7.	Koordinat GPS (My GPS Coordinates)	a) Garis Lintang	1. Utara (North/N)		2. Selatan (South/S)
		b) Koordinat garis lintang	° ' .		
		c) Koordinat garis bujur timur (east)	° ' .		
8.	Akurasi	m			

BLOK II. PENGUMPUL DATA

1.	Tanggal Pengumpulan data	- -	3.Tanda tangan Pengumpul data
2.	Nama Pengumpul data		

BLOK III. DATA UMUM

3.1 DATA WILAYAH DAN PUSKESMAS

1.	Tipe Dinas Kesehatan	1. Tipe A	2. Tipe B	3. Tipe C	☐
2.	Jumlah Desa di wilayah kerja				☐ ☐ ☐
3.	Jumlah kelurahan di wilayah kerja				☐ ☐ ☐
4.	Jumlah kecamatan di wilayah kerja				☐ ☐
5.	Jumlah puskesmas di wilayah kerja				☐ ☐ ☐
6.	Jumlah puskesmas rawat inap				☐ ☐
7.	Jumlah puskesmas non rawat inap				☐ ☐
8.	Apakah ada SK Penetapan Puskesmas sebagai:				
	a. Puskesmas Perkotaan	1. Ada	2. Tidak ada	☐	
	b. Puskesmas Perdesaan	1. Ada	2. Tidak ada	☐	
	c. Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	1. Ada	2. Tidak ada	☐	

9.	Jumlah Puskesmas			c. Puskesmas terpencil/sangat terpencil		
	a. Puskesmas Perkotaan					
	b. Puskesmas Perdesaan					
10.	Jumlah puskesmas terakreditasi					
11.	Jumlah kecamatan dengan puskesmas yang terakreditasi					
12.	Jumlah puskesmas PONED					
13.	Jumlah puskesmas BLUD					
14.	Jumlah puskesmas pembantu di wilayah kerja					
15.	Jumlah puskesmas pembantu yang berfungsi					
16.	Jarak dari dinas kesehatan ke puskesmas terjauh			Km		
17.	Waktu tempuh dari dinas kesehatan ke puskesmas terjauh			 Jam		
				 Menit		

3.2. UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM)

18.	Posyandu Balita	Jumlah	Jumlah posyandu Aktif
	a. Posyandu Pratama		
	b. Posyandu Madya		
	c. Posyandu Purnama		
	d. Posyandu Mandiri		
	e. Total		
19.	Jumlah pos kesehatan desa (poskesdes) di wilayah kerja		
20.	Jumlah Pos kesehatan pesantren (poskestren)		
21.	Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB)		
22.	Jumlah Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA)		
23.	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
24.	Jumlah pondok bersalin desa (polindes) di wilayah kerja		
25.	Jumlah Posyandu Lanjut Usia (lansia)		
26.	Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)		
27.	Jumlah pos malaria desa		
28.	Jumlah pos pembinaan terpadu (posbindu) PTM		
29.	Jumlah pos obat desa		

3.3. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

No	Fasilitas pelayanan kesehatan	Total	Jumlah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ISIKAN '88' JIKA TIDAK ADA DATA	No	Fasilitas pelayanan kesehatan	Total	Jumlah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ISIKAN '88' JIKA TIDAK ADA DATA
Rumah sakit							
30	RSU Pemerintah			32	RSU Swasta		
31	RS Khusus Pemerintah			33	RS Khusus Swasta		
Klinik							
34	Klinik Pratama			35	Klinik Utama		
Jumlah praktek perorangan (TULISKAN JUMLAH YANG TERDAFTAR DI DINAS KESEHATAN)							
36	Praktik mandiri dokter spesialis			39	Praktik mandiri Bidan		
37	Praktik mandiri dokter umum			40	Praktik mandiri Perawat		
38	Praktik mandiri dokter gigi						
Jumlah laboratorium klinik							
41	Laboratorium klinik mandiri			42	Lab. Klinik lain		
Jumlah apotek							
43	Apotek			44	Apotek Program Rujuk Balik (PRB)		

3.4 KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KERJA

45	Jumlah bidan desa	
46	Jumlah desa dengan bidan desa menetap di desa	
47	Jumlah desa tanpa bidan desa	

BLOK IV. INDIKATOR KESEHATAN

4.1. KESEHATAN MASYARAKAT

4.1.1. Kesehatan lingkungan

1.	Terdapat laboratorium kesehatan lingkungan	1. Ya 2. Tidak	
2.	Terdapat laboratorium pemeriksaan kualitas air minum	1. Ya 2. Tidak	
3.	Kabupaten/kota menerbitkan sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	1. Ya 2. Tidak	
4.	Melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan ke RS	1. Ya 2. Tidak	
5.	Melakukan pengawasan kualitas air minum di PDAM	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak ada PDAM	

6.	Menerima hasil pengawasan kualitas air minum dari PDAM	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak ada PDAM	☐	
7.	Melakukan pengawasan kualitas air minum di Depot Air Minum	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak ada depot	☐	
8.	Memiliki peralatan kesehatan lingkungan (Kesling Kit)			
	a. Water test kit	1. Ya 2. Tidak	☐	
	b. Food contamination kit	1. Ya 2. Tidak	☐	
	c. Alat ukur kualitas udara (PM 2,5, hygrometer, dll)	1. Ya 2. Tidak	☐	
9	Jumlah desa/kelurahan melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	☐ ☐ ☐		
10	Jumlah Desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	☐ ☐		
11	Pelatihan ISIKAN KODE "1" JIKA "YA", DAN KODE "2" JIKA "TIDAK"			
	a. Pengawasan kualitas air minum	☐	c. Pengelolaan limbah medis ☐	
	b. Pengawasan Tempat Fasilitas Umum dan Tempat rekreasi	☐	d. Penjamah makanan ☐	
12	Kesehatan Lingkungan.			
	Jenis Fasilitas	Jumlah di wilayah kerja	Jumlah Teraftar	Jumlah yang Diawasi
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Tempat Rekreasi	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	b. Tempat dan Fasilitas Umum	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	c. Tempat Pengelolaan Makanan	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	d. Sarana Air Minum	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
13	Jumlah TPM yang ada, terdaftar, dan diawasi di kabupaten/Kota pada tahun 2018			
	Jenis Fasilitas	Jumlah di wilayah kerja	Jumlah Teraftar	Jumlah yang Diawasi
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Jasa boga	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	b. Rumah Makan/Restoran	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	c. Depot air minum isi ulang	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	d. Kantin sekolah	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	e. Makanan jajanan	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
	f. Industri Pangan Rumah Tangga (IPRT)	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
4.1.2. Kesehatan Keluarga				
14	Melaksanakan Audit Maternal dan Perinatal tahun 2018	1. Ya 2. Tidak → Ke. P.16	☐	
15	Frekuensi pelaksanaan AMP tahun 2018	☐ ☐		

4.1.3. Kesehatan Kerja				
16	Terdapat SK/SE Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan kerja di tingkat kabupaten/kota	1. Ya 2. Tidak	☐	
17	Terdapat advokasi dan koordinasi pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di perusahaan (observasi laporan kegiatan advokasi dan koordinasi, data perusahaan yang dibina)	1. Ya 2. Tidak	☐	
18	Terdapat advokasi dan koordinasi pelaksanaan K3 di perkantoran (observasi laporan kegiatan advokasi dan koordinasi)	1. Ya 2. Tidak	☐	
19	Dilakukan pembinaan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan (observasi laporan kegiatan pembinaan)	1. Ya 2. Tidak	☐	
20	Jumlah tenaga jabatan fungsional Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di kabupaten/kota	☐ ☐		
4.1.4. Kesehatan Olahraga				
21	Terdapat SK/SE dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan olahraga di tingkat kab/kota	1 Ya 2. Tidak	☐	
22	Terdapat kegiatan pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota (observasi laporan kegiatan pembinaan kebugaran jasmani pekerja, haji, dan sebagainya)	1. Ya 2. Tidak	☐	
4.1.5. Promosi Kesehatan				
23	Terdapat kebijakan tingkat kabupaten/kota yang mendukung kearah gerakan Perilaku Hidup Sehat yang implementasinya melibatkan lintas sektor/mitra potensial/masyarakat (observasi dokumen)	1. Ya 2. Tidak	☐	
24	Terdapat penetapan tatanan sehat (rumah tangga/keluarga, pesantren, sekolah, rumah sakit, pabrik, tempat wisata) yang menyelenggarakan promosi kesehatan untuk meningkatkan PHBS masyarakat.	1. Ya 2. Tidak	☐	
25	Melakukan kampanye peningkatan perilaku hidup sehat tahun 2018 melalui media elektronik, non elektronik, dan media social (observasi dokumen)	1. Ya 2. Tidak	☐	
26	Terdapat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? observasi dokumen	1. Ya 2. Tidak	☐	
27	Jumlah kawasan tanpa rokok di kabupaten/kota	☐ ☐ ☐		
28	Jumlah desa dan kelurahan siaga aktif	☐ ☐ ☐		
29	Menyediakan anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan dari APBD kab/kota	1. Ya 2. Tidak	☐	
4.1.6. Gizi				
30	Menyelenggarakan surveillans gizi	1. Ya 2. Tidak	☐	
31	Melakukan kegiatan penanggulangan anemia remaja putri (observasi laporan kegiatan)	1. Ya 2. Tidak	☐	
4.2. PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT				
4.2.1. Pengendalian vector				
32.	Apakah kabupaten/kota menetapkan kebijakan lokal untuk pengendalian penyakit tular vektor? ISIKAN KODE JAWABAN DENGAN 1 = YA ATAU 2 = TIDAK			
	a. Perda	☐	c. Surat Edaran Bupati/walikota	☐
	b. SK Bupati/Walikota	☐	d. Lainnya	☐

33.	Apakah kabupaten/kota melaksanakan kegiatan surveilans penyakit tular vektor sebagai berikut? ISIKAN KODE JAWABAN DENGAN 1=YA ATAU 2 = TIDAK PADA KOLOM 2 SAMPAI 5				
	Kegiatan Surveilans	Tahun 2018			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Survei padat populasi jentik	☐	☐	☐	☐
	b. Survei padat populasi nyamuk	☐	☐	☐	☐
	c. Survei tempat perindukan	☐	☐	☐	☐
	d. Pemantauan resistensi nyamuk	☐	☐	☐	☐
	e. Pemantauan resistensi jentik	☐	☐	☐	☐
	f. Survei dinamika penularan	☐	☐	☐	☐
34.	Apakah upaya yang dilakukan dinas kesehatan dan jajarannya dalam pengendalian penyakit tular vektor tahun 2018? ISIKAN KODE JAWABAN DENGAN 1=YA ATAU 2 = TIDAK				
	Kegiatan Pengendalian	Tahun 2018			
		Malaria	Filariasis	DBD	Chikungunya
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Distribusi kelambu berinsektisida	☐	☐		
	b. Penyemprotan (<i>Indoor Residual Spray</i>)	☐	☐		
	c. Larvasidasi Kimia	☐	☐	☐	☐
	d. Pengendalian secara biologi	☐	☐	☐	☐
	e. Pengasapan (<i>fogging</i>)			☐	☐
	f. Pembasmian Sarang Nyamuk (PSN)			☐	☐
35.	Berapa jumlah kasus kejadian penyakit tular vector pada tahun 2018?				
	Penyakit Tular Vektor	1. Ada	2. Tidak ada → Baris berikutnya	Jumlah Kejadian (2018)	
	(1)	(2)		(3)	
	a. Malaria	☐		☐ ☐ ☐ ☐	
	b. Demam berdarah Dengue (DBD)	☐		☐ ☐ ☐ ☐	
	c. Chikungunya	☐		☐ ☐ ☐ ☐	
	d. Leptospirosis	☐		☐ ☐ ☐ ☐	
	e. Japanese Encephalitis	☐		☐ ☐ ☐ ☐	
4.2.2. Malaria					
36	Apakah terdapat data <i>Annual Parasit Index</i> (API) Dinas Kesehatan Kab/Kota tahun 2018	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.38			☐
37	API Kabupaten/Kota tahun 2018	 per mil			,
38	Apakah terdapat data <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) Dinas Kesehatan Kab/Kota tahun 2018	1. Ya, ada dokumen 2. Ya, tidak ada dokumen 3. Tidak → P.40			☐
39	AMI Kabupaten/Kota tahun 2018	 per mil			,
4.2.3. Imunisasi					
40	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi tahun 2018	%			,

4.2.4. Hepatitis				
41	Apakah di kabupaten/kota ada deteksi dini melalui pemeriksaan HBsAg?		1. Ya 2. Tidak → Ke P.43	☐
42	Kelompok sasaran yang dilakukan pemeriksaan HBsAg pada tahun 2018 (KODE "1" JIKA "YA", KODE "2" JIKA "TIDAK")			
	a. Anak yang lahir dari ibu penderita hepatitis B	☐	f. Kontak serumah dengan penderita	☐
	b. Pasangan penderita Hepatitis B	☐	g. Pasien yang mendapat hemodialisis	☐
	c. Orang yang sering berganti pasangan seks	☐	h. Pekerja kesehatan	☐
	d. MSM (man Sex Man)/homo seksual	☐	i. Petugas laboratorium	☐
	e. IDUs (Injection Drug User)/Pengguna Narkoba suntik	☐	j. Berkunjung ke wilayah dengan endemisitas tinggi	☐
4.2.5. Pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia pada balita melalui MTBS				
43	Apakah dinas kesehatan melaksanakan program MTBS tahun 2018?		1. Ya 2. Tidak → Ke P.45	☐
44	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan MTBS (CEK DOKUMEN)			
4.2.6. Karantina kesehatan				
45	Apakah pemerintah daerah/dinas kesehatan telah menerbitkan regulasi (kebijakan) tentang kekarantinaan kesehatan? (CEK DOKUMEN)		1. Ya 2. Tidak	☐
BLOK V. SUMBER DAYA MANUSIA				
Nama responden:			No. HP/telepon:	
No	Jenis SDM Kesehatan		Dinas Kesehatan Jumlah	UPT Dinas non puskesmas Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Tenaga medis:	a. Dokter umum		
		b. Dokter spesialis		
		c. Dokter gigi		
		d. Dokter gigi spesialis		
2	Bidan			
3	Perawat			
4	Farmasi:	a. Apoteker		
		b. Sarjana Farmasi		
		c. Ahli madya farmasi/Analisis farmasi		
		d. Asisten tenaga kefarmasian		
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat:	a. Epidemiolog		
		b. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku		
		c. Pembimbing kesehatan kerja		
		d. Administrasi dan kebijakan Kesehatan		
		e. Biostatistika dan kependudukan		
		f. Kesehatan reproduksi dan keluarga		
		g. Informatika Kesehatan		

No.	Jenis SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan Jumlah	UPT Dinas non puskesmas Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Kesehatan Lingkungan			
	a. Sanitasi lingkungan		
	b. Entomolog kesehatan		
	c. Mikrobiolog kesehatan		
7. Tenaga gizi			
	a. Nutrisionis		
	b. Dietisien		
8. Keterampilan fisik			
	a. Fisioterapis		
	b. Okupasi terapis		
	c. Terapis wicara		
	d. Akupunktur		
9. Keteknisian medis			
	a. Perekam medis dan informasi kesehatan		
	b. Teknik kardiovaskuler		
	c. Teknisi pelayanan darah		
	d. Refraksionis optisien/ optometris		
	e. Teknisi gigi		
	f. Penata anestesi		
	g. Terapis gigi dan mulut		
	h. Audiologis		
10. Teknik biomedika			
	a. Radiografer		
	b. Elektromedis		
	c. Ahli teknologi laboratorium medis		
	d. Fisikawan medis		
	e. Radioterapis		
	f. Ortotik prostetik		
11. Tenaga kesehatan tradisional			
	a. Tradisional ramuan		
	b. Tradisional keterampilan		

BLOK VI. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Nama:

Jabatan:

No. Hp:

6.1. ORGANISASI DAN SDM

1	Instalasi Farmasi atau gudang farmasi merupakan 1. Unit eselon IV berupa UPTD 2. Bagian dari eselon III dibawah kepala bidang 3. Bagian dari eselon IV di bawah kepala seksi 4. Lainnya	☐																					
2	Penanggung Jawab Instalasi Farmasi di Dinkes 1. Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian 3. Asisten tenaga kefarmasian 4. Tenaga kesehatan lain/ Non tenaga kesehatan	☐																					
3	Jumlah SDM di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Apoteker</td> <td style="width: 12.5%;">S1 Farmasi</td> <td style="width: 12.5%;">D3 Farmasi</td> <td style="width: 12.5%;">SAA/SMF</td> <td style="width: 12.5%;">Nakes Lain</td> <td style="width: 12.5%;">Non Nakes</td> <td style="width: 12.5%;">Jumlah Total Petugas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1)</td> <td style="text-align: center;">(2)</td> <td style="text-align: center;">(3)</td> <td style="text-align: center;">(4)</td> <td style="text-align: center;">(5)</td> <td style="text-align: center;">(6)</td> <td style="text-align: center;">(7)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Apoteker	S1 Farmasi	D3 Farmasi	SAA/SMF	Nakes Lain	Non Nakes	Jumlah Total Petugas	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								
Apoteker	S1 Farmasi	D3 Farmasi	SAA/SMF	Nakes Lain	Non Nakes	Jumlah Total Petugas																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																	

6.2. PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

1	Apakah membuat Rencana Kebutuhan Obat (RKO)	1. Ya 2. Tidak → P.10	☐						
2	Pada tahun 2018, bulan ke berapa RKO dikirim melalui e-monev?								
3	Apakah dinas melakukan evaluasi terhadap kesesuaian RKO dengan realisasi pengadaan? (tertulis atau tidak tertulis)	1. Ya 2. Tidak → P.6	☐						
4	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan dengan RKO: (dapat berupa perkiraan/estimasi)	1. ≤ 25% 2. 26-50% 3. 51-75% 4. lebih dari 75% 7. Tidak berlaku	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">a. Tahun 2016</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>b. Tahun 2017</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td>c. Tahun 2018</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> </tr> </table>	a. Tahun 2016	☐	b. Tahun 2017	☐	c. Tahun 2018	☐
a. Tahun 2016	☐								
b. Tahun 2017	☐								
c. Tahun 2018	☐								
5	Alasan ketidaksesuaian realisasi pengadaan obat dengan RKO? (ISI KODE JAWABAN DENGAN 1=YA atau 2=TIDAK)								
	a. Perubahan Anggaran	☐	e. Obat di e katalog tidak tersedia tepat waktu	☐					
	b. Pola Penyakit Berubah	☐	f. Obat di e katalog sudah habis	☐					
	c. Sisa stok obat tahun lalu yang masih banyak	☐	g. Pola persepsian berubah	☐					
	d. Ketersediaan obat di e katalog / permintaan obat tidak dilayani	☐	h. Perubahan regulasi	☐					
			i. lainnya, sebutkan	☐					
6	RKO dan Realisasi Pengadaan Obat melalui e-katalog ISI KODE JUMLAH SATUAN UNIT TERKECIL (7 kotak)								
	Nama Obat (1)	RKO 2017 untuk tahun 2018 (2)	Pemesanan tahun 2018 (3)	Pengiriman dari distributor tahun 2018 (4)					
	a. Amoksisilin tablet 500 mg								
	b. Dekametason tablet 0,5mg								
	c. Diazepam injeksi 5 mg/ml								
	d. Metformin tablet 500 mg								
	e. Magnesium sulfat injeksi 20%								
	f. Asam mefenamat tablet 500 mg								
	g. Garam oralit								
	h. Infus Ringer Laktat 500 ml								

16	Sumber dana untuk pembelian BMHP di Dinkes dan besarnya				
	Sumber Dana BMHP	ISIKAN KODE: 1. Ya 2. Tidak → Baris berikutnya	Tahun 2018		
	a. DAK	☐			
	b. APBD Provinsi	☐			
	c. APBD Kab/Kota	☐			
	d. Kapitasi	☐			
	e. Lain lain ,	☐			
17	Apakah ada pembelian alat kesehatan produksi dalam negeri tahun 2018?			1. Ya 2. Tidak → P.19	☐
18	Produk alat kesehatan dalam negeri tahun 2018 Isikan nama dan merk 5 jenis alkes lokal terbanyak (misalnya kursi roda AAA, tempat tidur BBB)		1. 2. 3. 4. 5.		
19	Apa saja sistem pengadaan obat dan berapa persentase pendanaannya (berdasarkan realisasi)				
	Mekanisme pengadaan obat	1. Ya 2. Tidak → ke baris berikutnya	Frekuensi Pengadaan tahun 2018	Rata-rata Waktu Tunggu Sejak Pemesanan	Persentase Tahun 2018 (Perkiraan)
	1	2	3	4	5
	a. e-Purchasing	☐	☐	☐	
	b. Tender/ Lelang	☐	☐	☐	
	c. Pembelian langsung	☐	☐	☐	
Kolom (3): Frekuensi Pengadaan 1. 1 kali per tahun 4. Setiap minggu 2. setiap 3-6 bulan 5. Lainnya, 3. setiap bulan			Kolom (4): Rata rata waktu tunggu 1. > 180 hari 4. 14-30 hari 2. 91-180 hari 5. <14 hari 3. 30-90 hari		
6.3. KETERSEDIAAN OBAT NON FORNAS dan OBAT FORNAS NON FKTP					
1	a. Apakah ada obat non fornas yang dibeli/disediakan oleh dinkes			1. Ya 2. Tidak → P.6.3.3	☐
	b. Berapa item obat non fornas yang dibeli/disediakan				
2	Obat non fornas yang tersedia di Dinkes (maksimal 5 obat yang paling sering dibeli)		1. 2. 3. 4. 5.		
3	a. Apakah ada obat fornas non FKTP (tidak diperuntukkan di FKTP)			1. Ya 2. Tidak → P.6.4	☐
	b. Berapa item obat fornas non FKTP (tidak diperuntukkan di FKTP)				

PROVINSI:			KABUPATEN/KOTA:		
-----------	--	--	-----------------	--	--

6.6 KETERSEDIAAN OBAT							
No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Adapelen gel 0.1%	☐	☐	22	Antasida tablet	☐	☐
2	Adrenalin (Epinefrin) injeksi	☐	☐	23	Apiksaban tablet	☐	☐
3	Akarbose tablet	☐	☐	24	Artemisinin Kombinasi Therapy (ACT) tablet	☐	☐
4	Albendazol tablet	☐	☐	25	Artemisinin injeksi	☐	☐
5	Alopurinol tablet	☐	☐	26	Artemisinin tablet	☐	☐
6	Alprazolam tablet	☐	☐	27	Artesunat injeksi	☐	☐
7	Alumunium hidroksida tablet	☐	☐	28	Asam alfa hidroksi (AHA): Asam glikolat	☐	☐
8	Ambroksol tablet	☐	☐	29	Asam asetat 2% tetes telinga	☐	☐
9	Aminofilin injeksi	☐	☐	30	Asam asetilsalisilat (Aspirin) tablet	☐	☐
10	Amiodaron tablet	☐	☐	31	Asam azelat krim	☐	☐
11	Amitriptilin tablet	☐	☐	32	Asam folat tablet	☐	☐
12	Amlodipin tablet	☐	☐	33	Asam fusidat krim	☐	☐
13	Amoksisilin sirup	☐	☐	34	Asam mefenamat tablet	☐	☐
14	Amoksisilin tablet	☐	☐	35	Asam nalidiksate tablet	☐	☐
15	Amoksisilin-asam klavulanat tablet	☐	☐	36	Asam nikotinat tablet	☐	☐
16	Ampisilin injeksi	☐	☐	37	Asam salisilat salep	☐	☐
17	Ampisilin sirup	☐	☐	38	Asam traneksamat injeksi	☐	☐
18	Ampisilin tablet	☐	☐	39	Asetazolamid tablet	☐	☐
19	Analog insulin long acting	☐	☐	40	Asiklovir salep	☐	☐
20	Analog insulin mix insulin	☐	☐	41	Asiklovir tablet	☐	☐
21	Analog insulin rapid acting	☐	☐	42	Atapulgit tablet	☐	☐
*Kolom (4) 1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF 2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran) 3. Tidak diperlukan/digunakan 4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis 5. Lainnya							

No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
43	Atazanavir tablet	☐	☐	67	<i>Diethylcarbamazine citrate</i> (DEC)	☐	☐
44	Atenolol tablet	☐	☐	68	Digoksin injeksi	☐	☐
45	Atorvastatin tablet	☐	☐	69	Digoksin tablet	☐	☐
46	Azitromisin tablet	☐	☐	70	Dihidroartemisinin tablet	☐	☐
47	Basitrasin salep	☐	☐	71	Dihidroergotamin injeksi	☐	☐
48	Beklometason inhalasi	☐	☐	72	Diltiazem injeksi	☐	☐
49	Benzil benzoate 25% emulsi	☐	☐	73	Diltiazem tablet, kapsul SR	☐	☐
50	Betahistin HCl/mesilat tablet	☐	☐	74	Dimenhidrinat suppositoria	☐	☐
51	Betametason krim, salep	☐	☐	75	Dimenhidrinat tablet	☐	☐
52	Bismut subsalisilat tablet	☐	☐	76	Dipiridamol tablet	☐	☐
53	Bisoprolol tablet	☐	☐	77	Doksazosin tablet	☐	☐
54	Budesonid inhalasi	☐	☐	78	Doksisiklin kapsul	☐	☐
55	<i>Celecoxib</i> tablet	☐	☐	79	Domperidon tablet	☐	☐
56	Dabigatran tablet	☐	☐	80	Dopamin injeksi	☐	☐
57	Dapson/DDS tablet	☐	☐	81	Efavirenz (EVF)	☐	☐
58	Deksametason tablet	☐	☐	82	Efedrin tablet	☐	☐
59	Dekstran cairan	☐	☐	83	Enalapril	☐	☐
60	Dekstrose 5%, 10% infus	☐	☐	84	Ergotamin tablet	☐	☐
61	Dekstrose bolus 40% iv	☐	☐	85	Eritromisin krim	☐	☐
62	Desonid krim	☐	☐	86	Eritromisin sirup	☐	☐
63	Diazepam injeksi	☐	☐	87	Eritromisin tablet	☐	☐
64	Diazepam suppositoria	☐	☐	88	Etambutol tablet	☐	☐
65	Diazepam tablet	☐	☐	89	Etil klorida semprot	☐	☐
66	Didanosin tablet	☐	☐	90	Ezetimibe tablet	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
91	Famotidin tablet	☐	☐	115	Furosemid tablet	☐	☐
92	Famsiklovir tablet	☐	☐	116	Gabapentin tablet	☐	☐
93	Fansidar tablet	☐	☐	117	Garam oralit serbuk	☐	☐
94	Fenil efedrin 2,5% tetes mata	☐	☐	118	Gemfibrozil tablet	☐	☐
95	Fenitoin injeksi	☐	☐	119	Gentamisin salep	☐	☐
96	Fenitoin kapsul	☐	☐	120	Gentian violet 1% cairan	☐	☐
97	Fenitoin tablet	☐	☐	121	Glibenklamid tablet	☐	☐
98	Fenobarbital injeksi	☐	☐	122	Gliklazid tablet SR	☐	☐
99	Fenobarbital tablet	☐	☐	123	Glikuidon tablet	☐	☐
100	Fenofibrat tablet	☐	☐	124	Glimepirid tablet	☐	☐
101	Fenoterol Cairan	☐	☐	125	Glipizid tablet	☐	☐
102	Fenoterol HBr aerosol	☐	☐	126	Gliseril guaiakolat tablet	☐	☐
103	Fero fumarat tablet	☐	☐	127	Gliseril trinitrat kapsul SR, tablet	☐	☐
104	Fero glukonat tablet	☐	☐	128	Griseofulvin tablet	☐	☐
105	Flufenazin dekanat tablet	☐	☐	129	Haloperidol injeksi	☐	☐
106	Flukanazol kap/tab	☐	☐	130	Haloperidol tablet	☐	☐
107	Flukloksasilin tablet	☐	☐	131	Hidrogen peroksida 3% cairan	☐	☐
108	Flumetolon tetes	☐	☐	132	Hidroklorotiazid (HCT) tablet	☐	☐
109	Flunarizin tablet	☐	☐	133	Hidrokortison injeksi	☐	☐
110	Fluoksetin tablet	☐	☐	134	Hidroksiklorokuin tablet	☐	☐
111	Fluosinolon asetonid krim	☐	☐	135	Hidroksizin tablet	☐	☐
112	Flutikason injeksi	☐	☐	136	HTIG injeksi	☐	☐
113	Fluvastatin tablet	☐	☐	137	Human insulin intermediate acting injeksi	☐	☐
114	Furosemid injeksi	☐	☐	138	Human insulin short acting injeksi	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
139	Ibuprofen suspense	☐	☐	162	Kanamisin injeksi	☐	☐
140	Ibuprofen tablet	☐	☐	163	Kandesartan tablet	☐	☐
141	Ikhtiol salep	☐	☐	164	Kaopectate sirup	☐	☐
142	Imidapril tablet	☐	☐	165	Kaptopril tablet	☐	☐
143	Imipramin tablet	☐	☐	166	Karbamazepin sirup	☐	☐
144	Indinavir tablet	☐	☐	167	Karbamazepin tablet	☐	☐
145	INH tablet	☐	☐	168	Karboksimetil selulosa (air mata buatan)	☐	☐
146	Ipratropium bromid nebulasi	☐	☐	169	Karvedilol tablet	☐	☐
147	Ipratropium bromid inhalasi	☐	☐	170	KCL 9,5gr serbuk, tablet	☐	☐
148	Irbesartan tablet	☐	☐	171	Ketokonazol tablet	☐	☐
149	Isoniazid + Etambutol tablet	☐	☐	172	Kina tablet	☐	☐
150	Isoniazid + Rifampisin tablet	☐	☐	173	Kinin tablet/injeksi	☐	☐
151	Isoniazid tablet	☐	☐	174	Klaritromisin tablet	☐	☐
152	Isoniazid+Rifampisin+Pirazinamid tablet	☐	☐	175	Klindamisin fosfat 1%, krim, gel	☐	☐
153	Isoniazid+Rifampisin+Pirazinamid+Etambutol tablet	☐	☐	176	Klindamisin tablet	☐	☐
154	Isoprinosine tablet	☐	☐	177	Klobazam tablet	☐	☐
155	Isosorbid dinitrat tablet	☐	☐	178	Kloksasilin tablet	☐	☐
156	Itrakonazol tablet	☐	☐	179	Klonazepam tablet	☐	☐
157	Ivermektin tablet	☐	☐	180	Klonidin tablet	☐	☐
158	Kalamin larutan (<i>lotion</i>)	☐	☐	181	Klopidogrel tablet salut selaput	☐	☐
159	Kalsitriol kaps lunak	☐	☐	182	Kloramfenikol kapsul	☐	☐
160	Kalsium glukonat tablet	☐	☐	183	Kloramfenikol salep mata	☐	☐
161	Kalsium karbonat tablet	☐	☐	184	Kloramfenikol tetes mata	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No.	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No.	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
185	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet	☐	☐	209	Lorazepam tablet	☐	☐
186	Klorheksidin larutan	☐	☐	210	Lovastatin tablet	☐	☐
187	Klorpromazin injeksi	☐	☐	211	Magnesium sulfat injeksi	☐	☐
188	Klorpromazin tablet salut selaput	☐	☐	212	Mebendazol tablet	☐	☐
189	Klotrimazol krim	☐	☐	213	Meloksikam tablet	☐	☐
190	Kodein tablet	☐	☐	214	Metampiron tablet	☐	☐
191	Kolestiramin serbuk	☐	☐	215	Metformin tablet	☐	☐
192	Kolkisin tablet	☐	☐	216	Metildopa tablet	☐	☐
193	Kotrimoksazol dewasa tablet	☐	☐	217	Metilergometrin maleat injeksi	☐	☐
194	Kotrimoksazol tablet anak/sirup	☐	☐	218	Metilprednisolon injeksi	☐	☐
195	Kuetiapin tablet SR	☐	☐	219	Metilprednisolon tablet	☐	☐
196	Lamivudin (3TC) tab	☐	☐	220	Metisoprinol sirup	☐	☐
197	Lamotrigin tablet	☐	☐	221	Metisoprinol tablet	☐	☐
198	Lampren (Klofazimin) tablet	☐	☐	222	Metoklopramid tablet	☐	☐
199	Lansoprazol tablet	☐	☐	223	Metoprolol tablet	☐	☐
200	Levetirasetam tablet	☐	☐	224	Metronidazol tablet	☐	☐
201	Levofloksasin tablet	☐	☐	225	Metronidazol vagina ovula	☐	☐
202	Lidokain Injeksi	☐	☐	226	Mikonazol krim	☐	☐
203	Lidokain semprot (<i>spray</i>)	☐	☐	227	Minosiklin kapsul	☐	☐
204	Lidokain tetes	☐	☐	228	Mirtazapin tablet	☐	☐
205	Lisinopril tablet	☐	☐	229	Moksifloksasin tablet	☐	☐
206	Loperamid tablet	☐	☐	230	Mupirosin salep	☐	☐
207	Lopinavir kapsul	☐	☐	231	NaCl infus	☐	☐
208	Loratadin tablet	☐	☐	232	N-asetil sistein granul, tablet	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No.	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No.	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
233	Natrium diklofenak tablet	☐	☐	255	Pantokain 2% tetes mata	☐	☐
234	Nelfinavir tablet	☐	☐	256	Parasetamol sirup	☐	☐
235	Nevirapin (NVP) tablet	☐	☐	257	Parasetamol tablet	☐	☐
236	Nifedipin tablet	☐	☐	258	Penisilin prokain injeksi	☐	☐
237	Nikardipin tablet	☐	☐	259	Perindopril arginin tablet	☐	☐
238	Nimodipin tablet	☐	☐	260	Permanganas kalikus serbuk	☐	☐
239	Nistatin tetes	☐	☐	261	Peroksida benzoil gel	☐	☐
240	Nitroglicerine	☐	☐	262	Pil kontrasepsi oral	☐	☐
241	Nitroprusid	☐	☐	263	Piperakuin tablet	☐	☐
242	Obat Anti Tuberculosis anak (FDC)	☐	☐	264	Piperasilin tazobaktam tablet	☐	☐
243	Obat Anti Tuberculosis dewasa (FDC)	☐	☐	265	Pirantel pamoat tablet	☐	☐
244	Obat Malaria kombinasi (FDC)	☐	☐	266	Pirazinamid tablet	☐	☐
245	Ofloksasin tablet	☐	☐	267	Piroksikam tablet	☐	☐
246	Ofloksasin tetes telinga	☐	☐	268	Pitavastatin tablet	☐	☐
247	Oksigen	☐	☐	269	Polimiksin B Salep	☐	☐
248	Oksitetrasiklin salep mata	☐	☐	270	Povidon iodine larutan	☐	☐
249	Oksitetrasiklin salep, krim	☐	☐	271	Pravastatin tablet	☐	☐
250	Oksitosin injeksi	☐	☐	272	Prazikuantel tablet	☐	☐
251	Okskarbazepin tablet	☐	☐	273	Prednisolon 0,5% tetes mata	☐	☐
252	Omeprazol tablet	☐	☐	274	Prednison tablet	☐	☐
253	Pankuronium tablet	☐	☐	275	Pregabalin tablet	☐	☐
254	Pantenol krim	☐	☐	276	Preparat ter (liquor carbonis detergent)	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
277	Primakuin tablet	☐	☐	301	Sefpodoksim tablet	☐	☐
278	Prometazin suppositoria	☐	☐	302	Seftadizim injeksi	☐	☐
279	Prometazin tablet	☐	☐	303	Seftriakson injeksi	☐	☐
280	Propil Tio Urasil (PTU) tablet	☐	☐	304	Seftriakson tablet	☐	☐
281	Propranolol tablet	☐	☐	305	Sefuroksim tablet	☐	☐
282	Pseudoefedrin tablet	☐	☐	306	Selenium sulfida shampoo	☐	☐
283	Ramipril tablet	☐	☐	307	Sertralin tablet	☐	☐
284	Ranitidin tablet	☐	☐	308	Setirizin sirup	☐	☐
285	Resorsinol krim	☐	☐	309	Setirizin tablet	☐	☐
286	Retinoid krim, salep	☐	☐	310	Silostazol tablet	☐	☐
287	Rifampisin kapsul	☐	☐	311	Simetidin tablet	☐	☐
288	Rifaroksaban tablet	☐	☐	312	Simvastatin tablet	☐	☐
289	Ringer asetat cairan infus	☐	☐	313	Sinarizin tablet	☐	☐
290	Ringer laktat cairan infus	☐	☐	314	Siprofloksasin tablet	☐	☐
291	Risperidon tablet	☐	☐	315	Smektit serbuk	☐	☐
292	Ritonavir tablet	☐	☐	316	Sodium hialuronat injeksi	☐	☐
293	Rosuvastatin tablet	☐	☐	317	Sodium hialuronat tetes mata	☐	☐
294	Salbutamol MDI/aerosol	☐	☐	318	Spiramisin tablet	☐	☐
295	Salbutamol serbuk inhalasi	☐	☐	319	Spironolakton tablet	☐	☐
296	Salbutamol sirup	☐	☐	320	Stavudin kapsul	☐	☐
297	Salbutamol tablet	☐	☐	321	Sukralfat sirup	☐	☐
298	Sefadroksil kapsul	☐	☐	322	Sulfas ferosus/TTD tablet	☐	☐
299	Sefalekssin kapsul	☐	☐	323	Sulfur salep	☐	☐
300	Sefiksim tablet	☐	☐	324	Telmisartan tablet	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

No.	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*	No	Nama Obat/Vaksin	Ketersediaan saat kunjungan 1. Ada → baris berikutnya 2. Tidak ada	Alasan tidak tersedia*
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
325	Tenofovir (TDF) tablet	☐	☐	347	Trifluoperazin tablet	☐	☐
326	Tenofovir+Disoproksil Fumarat tablet	☐	☐	348	Triheksifenidil tablet	☐	☐
327	Tenofovir+Emtrisitabin tablet	☐	☐	349	Triptan/Sumatriptan tablet	☐	☐
328	Tenofovir+Emtrisitabin+Efavirens tablet	☐	☐	350	Tropikamid 0,5% tetes mata	☐	☐
329	Tenofovir+Lamivudin tablet	☐	☐	351	Valasiklovir tablet	☐	☐
330	Tenofovir+Lamivudin+Efavirens tablet	☐	☐	352	Valproat sirup	☐	☐
331	Teofilin injeksi	☐	☐	353	Valproat tablet	☐	☐
332	Teofilin tablet	☐	☐	354	Valsartan tablet	☐	☐
333	Terbinafin krim	☐	☐	355	Verapamil tablet	☐	☐
334	Terbutalin inhalasi	☐	☐	356	Vitamin A tablet/cap	☐	☐
335	Terbutalin tablet	☐	☐	357	Vitamin B1 (Tiamin) tablet	☐	☐
336	Tetrakain tetes mata	☐	☐	358	Vitamin B12	☐	☐
337	Tetrasiklin kapsul	☐	☐	359	Vitamin B6 (Piridoksin) tablet	☐	☐
338	Tetrasiklin salep	☐	☐	360	Vitamin E	☐	☐
339	Tiamfenikol tablet	☐	☐	361	Vitamin K (Fitomenadion) injeksi	☐	☐
340	Tiazid tablet	☐	☐	362	Warfarin tablet	☐	☐
341	Timolol 0,5% tetes mata	☐	☐	363	Zefiran larutan	☐	☐
342	Tinktur opium	☐	☐	364	Zidovudin tablet	☐	☐
343	Tinktur yodii	☐	☐	365	Zidovudin+Lamivudin tablet	☐	☐
344	Tiotropium serbuk inhalasi	☐	☐	366	Zidovudin+Lamivudin tablet+Nevirapin	☐	☐
345	Topiramat tablet	☐	☐	367	Zink tablet	☐	☐
346	Triamsinolon asetonid 0,1%, krim, salep	☐	☐	368	Zonisamid tablet	☐	☐

***Kolom (4)**

1. Obat/vaksin tidak tersedia di PBF
2. Kendala manajemen (keuangan/pembayaran)
3. Tidak diperlukan/digunakan
4. Dapat diganti dengan obat lain yang sejenis
5. Lainnya

6.7. PERALATAN IMUNISASI						
ISIKAN KODE KONDISI ALAT:			1. Ya, semua berfungsi 2. Ya, sebagian berfungsi 3. Semua tidak berfungsi 4. Tidak ada			
NO	JENIS ALAT	KONDISI	NO	JENIS ALAT	KONDISI	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
1	Freezer	☐	5	KIPI Kit (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi)	☐	
2	Alat pembawa vaksin		6	Safety box	☐	
	a. Cold Box	☐		7	Refrigerator/ kulkas	
	b. Vaccine carier	☐			a. Buka atas	☐
	c. Termos	☐			b. Buka depan	☐
3	Cool pack (kotak dingin cair)	☐	8	Termometer	☐	
4	Alat suntik (Autodisposable syringe)	☐				

6.8. VAKSIN DAN SERUM				
1	Jenis vaksin dan serum	Ketersediaan vaksin/serum 1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Ketersediaan data vaksin/serum kadaluarsa 1. Ada 2. Tidak ada → baris berikutnya	Kadaluarsa 1. Ya, seluruhnya 2. Ya, sebagian 3. Tidak ada
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Vaksin BCG	☐	☐	☐
	b. Vaksin TT	☐	☐	☐
	c. Vaksin DT	☐	☐	☐
	d. Vaksin Td	☐	☐	☐
	e. Vaksin Campak	☐	☐	☐
	f. Vaksin Campak-Rubella (MR)	☐	☐	☐
	g. Vaksin Polio oral (OPV)	☐	☐	☐
	h. Vaksin Polio injeksi (IPV)	☐	☐	☐
	i. Vaksin Hepatitis B uniject	☐	☐	☐
	j. Vaksin Hepatitis B	☐	☐	☐
	k. Vaksin DPT-HB	☐	☐	☐
	l. Vaksin DPT-HB-HiB	☐	☐	☐
	m. Vaksin Anti rabies	☐	☐	☐
	n. Anti difteri serum (ADS)	☐	☐	☐
	o. Serum anti bisa ular (SABU)	☐	☐	☐
	p. Anti Rabies Serum	☐	☐	☐
	q. Anti Tetanus serum (ATS)	☐	☐	☐

PROVINSI:			KABUPATEN/KOTA:		
-----------	--	--	-----------------	--	--

BLOK VII. KAPITASI DAN PEMBIAYAAN

7.1 Kapitasi			
1	Apakah ada SK Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas tahun 2018?	1. Ya 2.Tidak → P10	☐
2	Tanggal ditetapkan SK tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas (tanggal, bulan, tahun)	- -	
3	Persentase alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kab/Kota ditetapkan sebesar (berdasarkan SK tersebut)		
4	Persentase alokasi dana kapitasi untuk obat, alkes, dan bahan medis habis pakai		
5	Persentase alokasi dana kapitasi untuk kegiatan operasional kesehatan lainnya		
6	Apakah ada SK Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas yang berlaku sebelum SK saat ini dikeluarkan	1. Ya 2.Tidak → ke P.10	☐
7	Persentase alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kab/Kota ditetapkan sebesar (berdasarkan SK tersebut)		
8	Persentase Alokasi dana kapitasi untuk obat, alkes, dan bahan medis habis pakai		
9	Persentase Alokasi dana kapitasi untuk kegiatan operasional kesehatan lainnya		
10	FKTP yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan di wilayah anda		
Isikan sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tahun 2018 bila tidak ada data isikan dengan kode 888			
	a. Puskesmas		
	b. Klinik pratama		
	c. Dokter Praktek Mandiri		
11	FKTP yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerapkan KBK di wilayah anda		
Isikan sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tahun 2018 bila tidak ada data isikan dengan kode 888			
	a. Puskesmas		
	b. Klinik pratama		
	c. Dokter Praktek Mandiri		
12	Jumlah FKTP yang memiliki rekening dana kapitasi sampai akhir tahun 2018		
Isikan sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tahun 2018 bila tidak ada data isikan dengan kode 888			
	a. Puskesmas		
	b. Klinik pratama		
	c. Dokter Praktek Mandiri		
13	Jumlah FKTP yang memiliki Bendahara Dana Kapitasi JKN yang ada dan masih aktif sampai akhir tahun 2018		
Isikan sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan tahun 2018 bila tidak ada data isikan dengan kode 888			
	a. Puskesmas		
	b. Klinik pratama		
	c. Dokter Praktek Mandiri		

7.2 Pembiayaan			
1.	Total realisasi dari anggaran tahun 2018	□.□□□.□□□.□□□.□□□	
	Sumber Anggaran	Anggaran yg Tersedia (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)
		(1)	(2)
2.	APBN		
	a. Dekonsentrasi (Dekon)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	b. Tugas Perbantuan (TP)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	c. B O K (DAK Non Fisik)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	d. Pinjaman Daerah	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	e. Hibah	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	f. Dana Kapitasi BPJS/JKN	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	g. Dana Non Kapitasi BPJS/JKN	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	h. Jamkesmas/Jampersal	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
3.	APBD Provinsi		
	3.1. Dana Bagi Hasil Provinsi (DBH)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	3.2. Dana Dekonsentrasi Provinsi	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	3.3. Jamkesda Provinsi	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□

	Sumber Anggaran	Anggaran yg Tersedia (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)
		(1)	(2)
4.	APBD Kabupaten/Kota		
	4.1. Dana Alokasi Umum (DAU)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.3. Dana Bagi Hasil (DBH)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.5. Alokasi Dana Desa (ADD)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.6. Dana Alokasi Cukai (DAC)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.7. Pendapatan Pajak Rokok (PJR)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	4.8. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
5.	Pendapatan Lain-lain		
	5.1. Bantuan dari Donor	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	5.2. Jamkesda Kab/Kota	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
	5.3. Lain-lain (sebutkan!)	□□□.□□□.□□□.□□□	□□□.□□□.□□□.□□□
6.	Total Realisasi Belanja Dinas Tahun 2018		□□□.□□□.□□□.□□□

7. Realisasi Belanja Menurut Program		
7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
7.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
7.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
7.4	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	
7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
7.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
7.7	Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset	
7.8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
7.9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
7.10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
7.11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
7.12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	
7.13	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
7.14	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
7.15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
7.16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
7.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
7.18	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
7.19	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
7.20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	
7.21	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
7.22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
7.23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
7.24	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	
7.25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak/Bayi	
7.26	Program District Health Account (DHA)	
7.27	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	
7.28	Program Pelayanan Neonatus	
7.29	Program Pelayanan Ibu Hamil	

7.30	Program pendampingan Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi (P4K)	
7.31	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	
7.32	Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
7.33	Program Pendataan	
7.34	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan	
7.35	Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
7.36	Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan	
7.37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	
7.38	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, dll)	
7.39	Program Pelayanan Kegawatdaruratan	
7.40	Program Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut	
7.41	Program PHN (Public Health Nurse)	
7.42	Program Kesehatan Jiwa	
7.43	Program Kesehatan Olah Raga	
7.44	Program Kesehatan dan Keselamatan kerja	
7.45	Program Kesehatan Mata	
7.46	Program lainnya.....	
8.	SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dinas kesehatan tahun 2018	
9.	Total APBD Kabupaten/Kota	

PROVINSI:			KABUPATEN/KOTA:		
-----------	--	--	-----------------	--	--

BLOK VIII. SISTEM INFORMASI KESEHATAN

NO.	Jenis Sistem Informasi digunakan baik di Dinas di wilayah kerja	Ketersediaan sistem informasi 1. Elektronik 2. Elektronik dan Manual 3. Manual → baris berikutnya 4. Tidak ada → baris berikutnya	Sistem pencatatan 1. Digunakan secara online 2. Digunakan secara off line 3. Digunakan secara online dan offline 4. Tidak digunakan	Pengembang 1. Kemenkes 2. Dinas Kesehatan 3. Swasta (Industri)	Server/ Penyimpanan data 1. Harddisk 2. Server Dinkes 3. Server Kemenkes 4. Server Non Pemerintah
1	2	3	4	5	6
1.	SIKDA (Sistim Informasi Kesehatan Daerah)	☐	☐	☐	☐
2	Komdat (Komunikasi Data)	☐	☐	☐	☐
3	SIM Dinkes (Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan)	☐	☐	☐	☐
4	SIMPUS	☐	☐	☐	☐
5	SP2TP/SP3	☐	☐	☐	☐
6	ePuskesmas	☐	☐	☐	☐
7	ASPAK	☐	☐	☐	☐
8	Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT)	☐	☐	☐	☐
9	Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA)	☐	☐	☐	☐
10	Sistem Informasi Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (SIHEPI)	☐	☐	☐	☐
11	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	☐	☐	☐	☐
12	Sistem Informasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (SIDPDI)	☐	☐	☐	☐
13	Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL)	☐	☐	☐	☐
14	Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (s-STBM)	☐	☐	☐	☐
15	Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)	☐	☐	☐	☐
16	Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	☐	☐	☐	☐

BILA NO 7 KOLOM 3 BERKODE 1 ATAU 2 (MENGUNAKAN ASPAK) LANJUT NO 17

17	Kesulitan penggunaan ASPAK	ISIKAN KODE "1.YA ATAU 2.TIDAK"			
	a. Penggunaan aplikasi	☐	c. Masalah sinyal (gangguan, tidak ada sinyal)	☐	
	b. Server down/ tidak dapat mengakses	☐	d. Ketersediaan dan kompetensi SDM	☐	

CATATAN PENGUMPUL DATA



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
 Jalan Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560
 Telp. (021) 4261088 Fax. (021) 4243933